

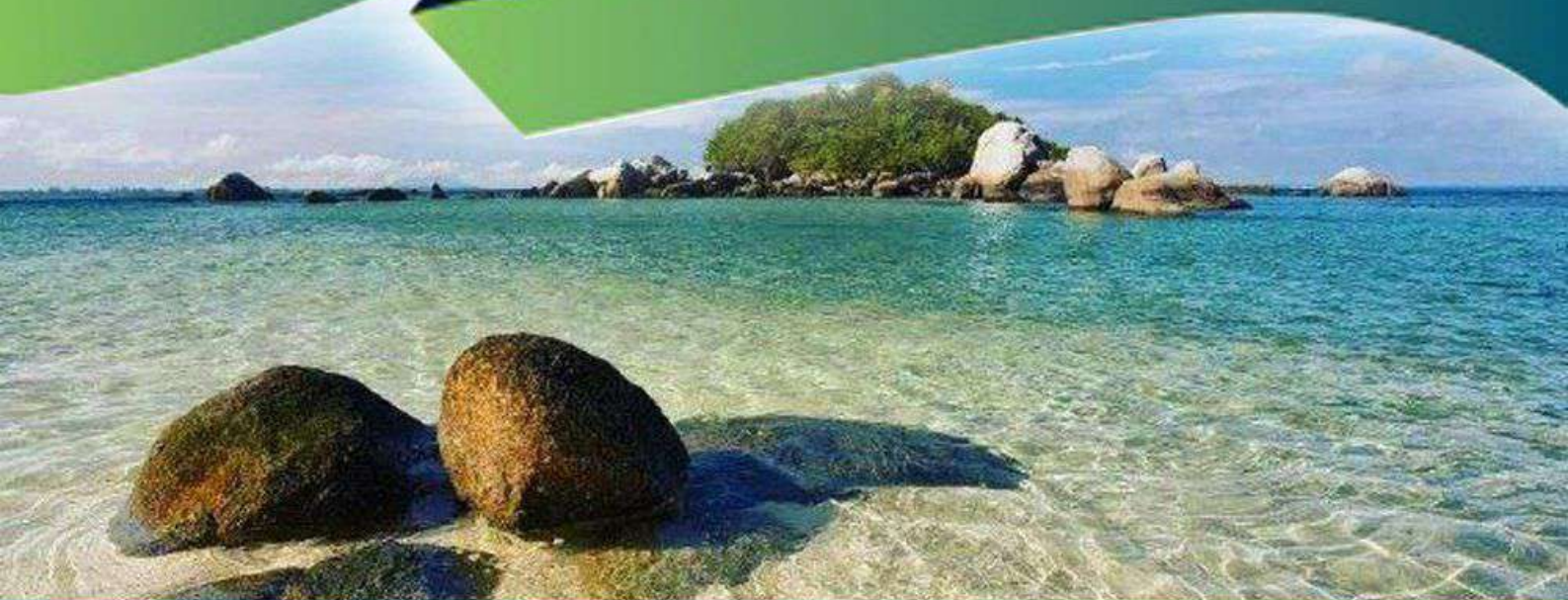


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2017-2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu point perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan kebijakan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tahun 2019 menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta RKPD dengan RPJMD;
 - d. bahwa telah terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara sehingga RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan penyesuaian terhadap RPJMN 2020-2024 dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan Perangkat Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10, Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM “Pasal 1”

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
10. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
14. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian arah kebijakan pembangunan pada setiap tahapan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
22. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap.
23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur untuk pencapaian kinerja suatu sasaran dalam bentuk dampak (*impact*).
24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
 27. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana struktur tata ruang provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Ketentuan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

“Pasal 5”

- 1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
 - 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah.
 - 3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah;
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. hasil RPJM Daerah.
 - 4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - 5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah;
 - 7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6”

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

- a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJM Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7”

Tahapan penyusunan RPJM Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJM Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 4 SERI E TAHUN 2020

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017-2022	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.5.1. Maksud.....	I-5
1.5.2. Tujuan.....	I-6
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	 II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-1
2.1.2. Luas dan Daerah Administratif.....	II-3
2.1.3. Penduduk.....	II-5
2.1.4. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi.....	II-8
2.1.5. Iklim.....	II-10
2.1.6. Kondisi Lahan.....	II-10
2.1.7. Potensi Ekonomi Wilayah.....	II-11
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana.....	II-18
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-21
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi.....	II-21
2.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II-35
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-61
2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib.....	II-61
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-98
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-108
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-108
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-111
2.4.3. Fokus Sumber Iklim Berinvestasi.....	II-113

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016.....	III-1
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-2
3.1.1.1.	Kinerja Pendapatan Daerah.....	III-2
3.1.1.2.	Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-12
3.1.1.3.	Kinerja Pembiayaan Daerah.....	III-20
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III-22
3.1.2.1.	Pertumbuhan Neraca Daerah.....	III-22
3.1.2.2.	Rasio Neraca.....	III-28
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012-2016.....	III-29
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-29
3.2.2.	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-29
3.2.3.	Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah.....	III-32
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Isu Strategis.....	IV-10
4.3.	Kajian Lingkungan Hidup	IV-12
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1.	Visi.....	V-4
5.2.	Misi	V-4
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	V-1
6.1.	Strategi dan Arah kebijakan.....	VI-2
6.1.1.	Strategi Pencapaian Sasaran.....	VI-2
6.1.2.	Arah Kebijakan untuk Mendukung Strategi.....	VI-10
6.2.	Program Pembangunan Daerah.....	VI-32
6.2.1.	Unggulan Pembangunan Daerah.....	VI-32
6.2.2.	Program Pembangunan Daerah.....	VI-35
6.2.3.	Tema Prioritas Pembangunan Daerah	VI-38
6.2.4.	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Progam Perangkat Daerah	VI-39
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
7.1.	Analisis Keuangan Daerah.....	VII-1
7.1.1.	Pendapatan Daerah.....	VII-1

7.1.2.	Belanja Daerah	VII-7
7.2.	Analisis Keuangan Daerah.....	VII-1
7.2.1	Analisis Pengeluaran Perodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.....	VII-9
7.2.2.	Belanja Proyeksi Data Masa Lalu.....	VII-15
7.2.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	VII-17
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja	VIII-1
8.2	Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.3	Indikator Kinerja Tujuan dan Target.....	VIII-1
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-3
Tabel II.2	Pembagian Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016	II-4
Tabel II.3	Pembagian Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-4
Tabel II.4	Pembagian Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-4
Tabel II.5	Proyeksi Penduduk per Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-6
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016....	II-7
Tabel II.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten Kota Tahun 2012-2016.....	II-7
Tabel II.8	Kondisi Iklim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-10
Tabel II.9	Jenis Luas Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016.....	II-11
Tabel II.10	Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.....	II-19
Tabel II.11	Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang Terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.....	II-20
Tabel II.12	Perkembangan PDRB Tahun 2012-2016 Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II-21
Tabel II.13	Perkembangan PDRB Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II-22
Tabel II.14	Perkembangan PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar)	II-23
Tabel II.15	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen).....	II-25
Tabel II.16	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen).....	II-26
Tabel II.17	Perkembangan PDRB kabupaten/Kota tahun 2012 s.d 2016 Atas harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II-27

Tabel II.18	Perkembangan Kontribusi PDRB kabupaten/Kota tahun 2011 s.d 2016 kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Milyar).....	II-27
Tabel II.19	Laju Inflasi Tahun 2012 s.d 2016 Kota Pangkalpinang menurut Kelompok Pengeluaran.....	II-32
Tabel II.20	Laju Inflasi Tanjung Pandan menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014 s.d 2016.....	II-32
Tabel II.21	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 s.d 2016....	II-36
Tabel II.22	Rata-rata Lama Sekolah tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tahun).....	II-37
Tabel II.23	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-38
Tabel II.24	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-40
Tabel II.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-42
Tabel II.26	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-43
Tabel II.27	Perkembangan APM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016.....	II-45
Tabel II.28	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.....	II-47
Tabel II.29	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2016.....	II-48
Tabel II.30	Usia Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	II-48
Tabel II.31	Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-49
Tabel II.32	Perkembangan Persentase Balita dengan Gizi Buruk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-50
Tabel II.33	Jumlah Kasus HIV/AIDS/IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.	II-51
Tabel II.34	Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-52
Tabel II.35	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-52
Tabel II.36	Data Kemiskinan Menurut kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-53

Tabel II.37	Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (Ribu Jiwa).....	II-53
Tabel II.38	Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2012-2016.....	II-53
Tabel II.39	Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-55
Tabel II.40	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 s.d 2016.....	II-55
Tabel II.41	Penduduk 15 Tahun ke Atas Tahun 2012 s.d 2016 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung....	II-56
Tabel II.42	Perbandingan antara Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Usaha Non Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.....	II-57
Tabel II.43	Jumlah Tenaga Kerja Usaha/Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.....	II-58
Tabel II.44	Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2016.....	II-59
Tabel II.45	Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-60
Tabel II.46	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-61
Tabel II.47	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-61
Tabel II.48	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berusia 5-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Tahun 2015	II-63
Tabel II.49	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2015	II-64
Tabel II.50	Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-65
Tabel II.51	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-66
Tabel II.52	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-66
Tabel II.53	Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus Penduduk Berisiko) Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-67
Tabel II.54	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-68
Tabel II.55	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-68

Tabel II.56	Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-69
Tabel II.57	Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-70
Tabel II.58	Gambaran Pencapaian kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-71
Tabel II.59	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km), 2016.....	II-72
Tabel II.60	Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km), 2016.....	II-72
Tabel II.61	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-73
Tabel II.62	Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa Tahun 2011- s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-73
Tabel II.63	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-74
Tabel II.64	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2011s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-75
Tabel II.65	Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-75
Tabel II.66	Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-76
Tabel II.67	Data TPAK Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-76
Tabel II.68	Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-78
Tabel II.69	Data Tingkat Pengangguran Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-79
Tabel II.70	Data Pengangguran Tahun 2011 s.d 2016 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-80
Tabel II.71	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-80
Tabel II.72	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-81
Tabel II.73	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-82
Tabel II.74	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-83

Tabel II.75	Data Ketersediaan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016	II-84
Tabel II.76	Pengelompokan Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan.....	II-85
Tabel II.77	Direktori Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016	II-85
Tabel II.78	Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016	II-86
Tabel II.79	Data Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012- 2016	II-87
Tabel II.80	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-88
Tabel II.81	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2010 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-88
Tabel II.82	Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-89
Tabel II.83	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-91
Tabel II.84	Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-91
Tabel II.85	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-92
Tabel II.86	Lalu Lintas Penerbangan Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-93
Tabel II.87	Lalu Lintas Penerbangan di Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin Tanjung Pandan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-93
Tabel II.88	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-94
Tabel II.89	Jumlah Terminal Bus, Teminal Udara dan Pelabuhan LautTahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-95
Tabel II.90	Jumlah ijin trayek Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-95
Tabel II.91	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-96
Tabel II.92	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-96
Tabel II.93	Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-97
Tabel II.94	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-97

Tabel II.95	Perkembangan Keolahragaan dari tahun 2012-2016.....	II-98
Tabel II.96	Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 - 2014.....	II-98
Tabel II.97	Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-101
Tabel II.98	Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-101
Tabel II.99	Produksi Komuditas Perkebunan (ton) tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-102
Tabel II.100	Produksi Komuditas Pangan (ton) tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-103
Tabel II.101	Produksi Daging Ternak Besar (Kg) tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-103
Tabel II.102	Luas Kawasan Hutan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-104
Tabel II.103	Produksi Biji Timah (Tin Ore) dan Logam Timah (Tin Mental) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-105
Tabel II.104	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$)	II-105
Tabel II.105	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-107
Tabel II.106	Angka Rata-Rata Pengeluaran per Kapita se Bulan, Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-108
Tabel II.107	Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-109
Tabel II.108	Persentase Konsumsi RTN Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-110
Tabel II.109	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-110
Tabel II.110	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-111
Tabel II.111	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-111
Tabel II.112	Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-112
Tabel II.113	Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-113
Tabel II.114	Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016	II-114

Tabel II.115	Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016	II-115
Tabel II.116	Jumlah Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016	II-115
Tabel II.117	Komponen Penghitungan IDI 2009-2016.....	II-116
Tabel II.118	Perkembangan IDI Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2014-2015	II-119
Tabel II.119	Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Juta)	II-120
Tabel II.120	Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi	II-121
Tabel II.121	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-122
Tabel II.122	Rasio Ketergantungan Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-123
Tabel III.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-2
Tabel III.2	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2012-2016.....	III-2
Tabel III.3	Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan Tahun 2012-2016.....	III-3
Tabel III.4	Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 2016 menurut jenis PAD.....	III-4
Tabel III.5	Realisasi Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-5
Tabel III.6	Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-5
Tabel III.7	Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-6
Tabel III.8	Realisasi Lain-Lain PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-7
Tabel III.9	realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung...	III-7
Tabel III.10	Realisasi Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-8
Tabel III.11	Dana Alokasi Umum/ Penyeimbang DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-8
Tabel III.12	Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-9
Tabel III.13	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	III-10
Tabel III.14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 s/d Tahun 2016.....	III-11

Tabel III.15	Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-13
Tabel III.16	Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-13
Tabel III.17	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-14
Tabel III.18	Realisasi Subsidi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016..	III-14
Tabel III.19	Realisasi Belanja Hibah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-15
Tabel III.20	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-16
Tabel III.21	Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2012-2016.....	III-16
Tabel III.22	Realisasi Belanja Bantuan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2012-2016.....	III-17
Tabel III.23	Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-17
Tabel III.24	Realisasi Belanja Langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-18
Tabel III.25	Realisasi Belanja Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-18
Tabel III.26	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-19
Tabel III.27	Realisasi Belanja Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-19
Tabel III.28	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-20
Tabel III.29	Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-20
Tabel III.30	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017.....	III-21
Tabel III.31	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-22
Tabel III.32	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	III-25
Tabel III.33	Rasio Likuiditas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-28
Tabel III.34	Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	III-28

Tabel III.35	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	III-29
Tabel III.36	Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-30
Tabel III.37	Komposisi Penutup Defisit Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-30
Tabel III.38	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-31
Tabel III.39	Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	III-33
Tabel V.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-12
Tabel V.2	Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-15
Tabel V.3	Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	V-16
Tabel VI.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis.....	VI-5
Tabel VI.2	Arah Kebijakan Pembangunan.....	VI-15
Tabel VI.3	Program Pembangunan Daerah Yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022.....	VI-40
Tabel VII.1	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..	VII-2
Tabel VII.2	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022.....	VII-4
Tabel VII.1	Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Seta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2016.....	VII-13
Tabel VII.2	Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-15
Tabel VII.3	Prediksi PAD dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022	VII-16
Tabel VII.4	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-16
Tabel VII.5	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-17
Tabel VII.6	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-19
Tabel VII.7	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-21

Tabel VII.8	Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.....	VII-22
Tabel VII.9	Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VII-28
Tabel VII.10	Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VII-30
Tabel VIII.1	Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VIII-3
Tabel VIII.2	Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	VIII-6
Tabel VIII.3	Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	VIII-10
Tabel VIII.4	Sasaran Pokok Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.....	VIII-24

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-8
Grafik II.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen).....	II-21
Grafik II.3	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2012-2016.....	II-29
Grafik II.4	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Wilayah Sumatera dan Indonesia Tahun 2016.....	II-29
Grafik II.5	PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-30
Grafik II.6	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahunan 2012-2016.....	II-31
Grafik II.7	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2012-2016 Kota Pangkalpinang, TanjungPandan, Palembang dan Nasional.....	II-32
Grafik II.8	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-33
Grafik II.9	Indeks Gini Wilayah Sumatera dan Nasional Tahun 2012-2016.....	II-34
Grafik II.10	Indeks Williamson Tahun 2011-2015 ProvinsiKepulauan Bangka Belitung.....	II-35
Grafik II.11	Rata-rata lama Sekolah tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-37
Grafik II.12	Rata-rata lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-38
Grafik II.13	Presentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2012-2016.....	II-39
Grafik II.14	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II-41
Grafik II.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) 2014/2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-44
Grafik II.16	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IndonesiaTahun 2012-2016.....	II-45
Grafik II.17	Perkembangan APM tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-46
Grafik II.18	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-47
Grafik II.19	Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2016.....	II-54

Grafik II.20	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-62
Grafik II.21	Presentase Lahan Kritis Tahun 2014Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-70
Grafik II.22	Penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-76
Grafik II.23	Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-91
Grafik II.24	Perkembangan IDI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2009-2015.....	II-117
Grafik II.25	Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2011 s.d 2016Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-123

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	II-2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-2
Gambar II.4	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II-17
Gambar II.5	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-18
Gambar II.6	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-20
Gambar II.7	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung.....	II-100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa RPJM Daerah selain merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (periode ketiga) dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, RPJMD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berdekatan, agar terdapat keselarasan pembangunan antar wilayah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain mempedomani RPJMN dan RPJP Daerah, juga dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJM Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dengan mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari Visi, Misi dan Program Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat/pemangku kepentingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun RPJM Daerah terdiri dari pendekatan politik, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 yaitu: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;
2. mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. meningkatkan kesehatan masyarakat;
5. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;
6. meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Didalam perkembangannya, setelah ditetapkan kurang lebih 2 (dua) tahun terjadi beberapa perubahan asumsi ekonomi dan pendapatan daerah akibat belum membaiknya perekonomian global dan nasional yang berimplikasi terhadap harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Turunnya harga komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakibatkan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah serta target sasaran lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah disusun. Mengingat terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara prediksi yang termuat dalam perencanaan dengan perkembangan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat maka diberikan ruang untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan Pasal 342 (1) Permendagri 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c) terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Ketentuan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan untuk melakukan perubahan RPJMD. Pada ayat (1) pasal 342 di atas pointnya berkenaan dengan hasil pengendalian dan evaluasi. Pasal 180 ditegaskan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

1. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
5. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain hal tersebut, dalam pasal 342 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Dalam hal ini berdasarkan masa sisa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2017-2022 dan sisa masa berlaku RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan berakhir di tahun 2022 nanti sangat memungkinkan untuk dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum yang melatarbelakangi perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 antara lain:

1. asumsi perencanaan terhadap kemampuan keuangan yang diproyeksikan optimis berimplikasi kepada asumsi pendanaan belanja program Perangkat Daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang akan sulit diimplementasikan jika memperhatikan kondisi real kemampuan keuangan saat ini. Asumsi perencanaan optimis ini didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga ada beberapa urusan dari kabupaten/kota yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi tetapi dalam penarikan pajak dan retribusi untuk peningkatan PAD Pemerintah Provinsi belum dapat dilakukan. Karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi yang menjadi dasar peningkatan pendapatan dari pelimpahan kewenangan belum dilakukan perubahan sampai saat ini;

2. masih belum optimalnya hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun nilai SAKIP tahun 2017 yang diterimakan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari 63 menjadi 67 (dengan kategori B), namun kenaikan ini belum cukup untuk memberikan nilai tambah bagi Dana Insentif Daerah (DID). Berdasarkan evaluasi dari Kementerian PAN dan RB bahwa masih belum terintegrasinya beberapa Renstra Perangkat Daerah yang berada pada level Program Perangkat daerah dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022. Sehingga ketika perlu dilakukan penajaman terhadap Program Perangkat Daerah yang berada pada Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian RPJMD, secara otomatis akan berimplikasi kepada perubahan RPJMD dimana Program Perangkat Daerah tersebut dalam RPJMD masuk kedalam Bab VII tentang Program Perangkat Daerah dan pendanaan;
3. terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Permendagri 86 Tahun 2017 tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 2017, sedangkan pengesahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 11 November 2017;
4. terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan turunannya Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mengakibatkan perubahan peraturan terkait keberadaan Perangkat daerah meliputi: Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja cabang dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan Gubernur tersebut ditetapkan setelah RPJMD ditetapkan tepatnya tanggal 29 Desember 2017. Sehingga secara substansi Program Perangkat Daerah untuk intervensi ke masyarakat dan mengukur kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang

Dinas belum terakomodir Dalam RPJMD 2017–2022 yang ditetapkan pada tanggal 11 November 2017;

5. selain daripada itu terjadi perubahan mendasar terkait dengan kebijakan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden tanggal 17 April 2019. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN. RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan Rancangan RPJMN 2020-2024;
6. terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga semua nomenklatur program Perangkat Daerah yang digunakan didalam RPJMD 2017 –2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus merujuk kepada permendagri tersebut;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Pandemi COVID-19 membuat perlambatan dalam pencapaian target pembangunan yang berdampak langsung pada perencanaan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sehingga dibutuhkan koreksi terhadap proyeksi target indikator makro pembangunan.

Berbagai poin-poin sebagaimana uraian di atas, mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti diantaranya, menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2017-2022. Perubahan Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD, setiap PD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD. Renja PD inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil dalam penyusunan Perubahan RPJM Daerah ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Deases* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (SK Nomor 010750 A);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

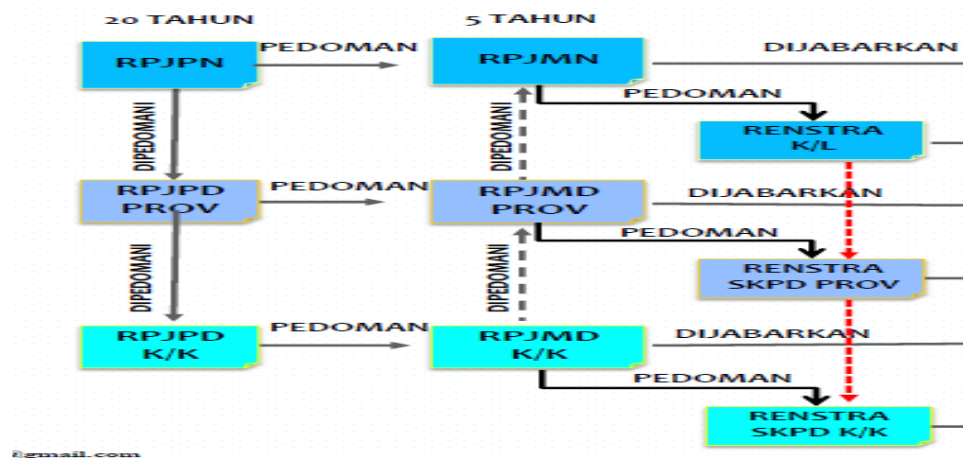
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJMD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun yang mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan RPJP Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 juga mengacu terhadap dokumen KLHS yang menunjukkan capaian *Sustainable Development Goals* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2017-2022. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar I.1

Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Secara substansi, berikut adalah keselarasan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, RPJMN 2020-2024 dan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Untuk menjamin keselarasan dengan pembangunan nasional dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Keselarasan Hubungan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022
	Visi	Visi
	Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
	Misi	Misi
1.	Pembangunan Kualitas Manusia Indonesia	1. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat
2.	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri Dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
3.	Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan	4. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
4.	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	5. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
5.	Kemajuan Budaya Yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
6.	Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, Dan Terpercaya	
7.	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	
8.	Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya	
9.	Sinergi Pemerintahan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	

1.3.2 Keselarasan RPJPD Tahun 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Keselarasan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2
Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No.	RPJPD Tahun 2005-2025	Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022
	Visi	Visi
	Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
	Misi	Misi
1.	Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2.	Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan IPTEK yang berbasis potensi lokal serta pemantapan Imtaq	2. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal 3. Meningkatkan kesehatan masyarakat
3.	Penguatan ketatapemerintahan yang baik (<i>good local governance</i>)	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
4.	Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah;	5. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
5.	Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.	6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

1.3.3 Keselarasan RTRW Tahun 2014-2034 dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Keselarasn RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2034. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) b yang menyatakan bahwa fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi, dengan keterkaitan sebagai berikut :

Tabel 1. 3
Keselarasan Dokumen RTRW Dengan RPJMD

No.	RTRW Tahun 2014-2034	Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022
	Tujuan	Visi
	Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan	Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi
	Strategi	Misi
1.	Penguatan karakter dan potensi unggulan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu sistem perkotaan yang terpadu	1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
2.	Pengembangan ekonomi wilayah melalui perwilayahan komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi berbasis agro-bahari	
3.	Pengembangan sektor industri pengolahan hasil agro-bahari yang didukung infrastruktur yang memadai	2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
		3. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong penguatan fungsi-fungsi pusat pertumbuhan dan produktivitas lahan

4.	Pengembangan kepariwisataan yang berbasis budaya lokal, heritage dan bahari serta ramah lingkungan	4. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
5.	Pengelolaan pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal	
6.	Penciptaan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar fungsi ruang dengan basis pembangunan berkelanjutan	5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi

Mengacu pada tabel di atas diketahui bahwa berbagai strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 telah menjadi pijakan dalam perumusan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

1.3.3 Keselarasan KLHS dan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Keselarasn antara RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan KLHS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 205 indikator sasaran yang terbagi dalam Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan;
2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan;
3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera;
4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas;
5. Tujuan 5 : Kesenjangan Gender;
6. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi;
7. Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi;
8. Tujuan 8 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak;
9. Tujuan 9 : Infrastruktur, Industri dan Inovasi;
10. Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan;
11. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman Berkelanjutan;
12. Tujuan 12 : Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan;
13. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim;
14. Tujuan 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Lautan;
15. Tujuan 15 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan;
16. Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh;
17. Tujuan 17 : Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Capaian indikator terbagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu kategori 1 (indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional), kategori 2 (indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional), kategori 3 (indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional), dan kategori 4 (indikator belum memiliki data). Capaian indikator TPB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional sebesar 24 % atau sejumlah 49 indikator. Indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebesar 48% atau sejumlah 99 indikator. Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebesar 10% atau sejumlah 21 indikator. Indikator yang belum memiliki data adalah sebesar 18 % atau sejumlah 36 indikator (Gambar 5.21.). Capaian indikator TPB setiap kategori secara rinci disajikan pada Tabel 5.1.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2 Tujuan

Perubahan RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan:

1. menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga diperoleh tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. menjadi pedoman penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun sebagai dasar penyusunan APBD;
4. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha, serta dengan masyarakat dan dengan Provinsi yang berbatasan/berdekatan;
5. memampukan Pemerintah Daerah mengukur dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan;
6. menjaga pemerataan pembangunan yang berkelanjutan antar sektor dan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara efisien dan efektif;
7. menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah dan perencanaan penganggaran kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. menyediakan instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah pada setiap tahun dan akhir periode pemerintahan 5 (lima) tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RPJMD terkait dengan pengaturan bab secara garis besar isi setiap bab didalamnya, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan dilakukannya penyusunan RPJM Daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

BAB IX PENUTUP

Berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

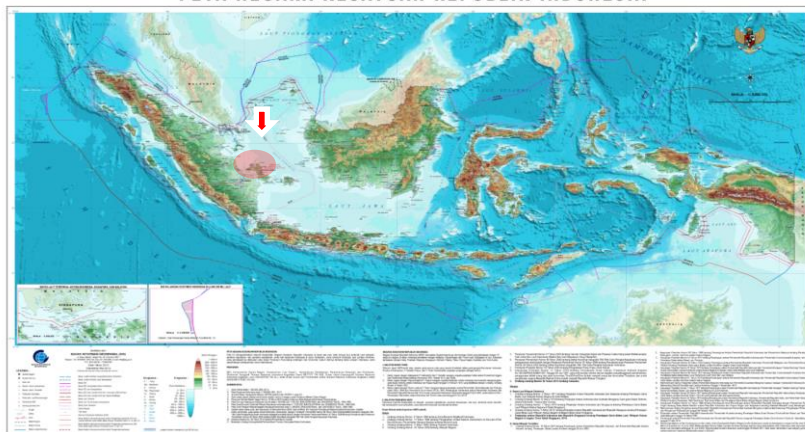
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

Gambar II.1

Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2018

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping itu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A), berada pada posisi silang antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan dengan Semanjung Malaysia dan Singapura. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dan dimasa yang akan datang.

Gambar II.2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Walaupun demikian, pada wilayah ALKI I terdapat beberapa potensi ancaman, terutama apabila terdapat konflik klaim wilayah di Laut Cina Selatan. Digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat konflik di Cina Selatan. Padatnya lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, juga mempunyai potensi kerawanan dalam keamanan kawasan.

Gambar II.3
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sebagaimana terlihat pada Gambar II.3 posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dan merupakan daerah kepulauan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka, sebelah Timur dengan Selat Karimata, sebelah Utara dengan Laut Natuna, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

2.1.1.1 Luas dan Daerah Administratif

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km². Terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang secara terperinci dapat dilihat pada data tabel II.1.

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Prov. Kep. Bangka Belitung		81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2019

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Kota Pangkalpinang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pemekaran, dengan membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), dengan 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel II.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
Prov. Kep. Bangka Belitung		47	47	47	47	47

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel II.2 dapat diketahui bahwa, total seluruh kecamatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 47 kecamatan. Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah wilayah Administrasi

Kecamatan yang paling banyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah masing-masing 8 kecamatan, sedangkan Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kecamatan yakni sebanyak 5 kecamatan.

Tabel II.3
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	62	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	42	42	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
Prov. Kep. Bangka Belitung		309	309	309	309	309

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Tabel II.3 di atas menunjukkan bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 Desa sedangkan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 39 desa. Adapun total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 309 Desa.

Tabel II.4
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	15	15	19	19	19
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	7	7	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
Prov. Kep. Bangka Belitung		78	78	82	82	82

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Tabel II.4 di atas diketahui bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 Kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah Kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

Tabel II.5
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
Prov. Kep. Bangka Belitung		81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23	81.725,23

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Tabel II.5 di atas dapat diketahui bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah administrasi yang paling besar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 km² dan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota Pangkalpinang sebesar 118,8 km². Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas lautan 65.301,23 km² dan Luas daratan 16.424,23 km².

2.1.1.2 Demografi

Kondisi Demografis Kepulauan Bangka Belitung secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan.

Tabel II.6
Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

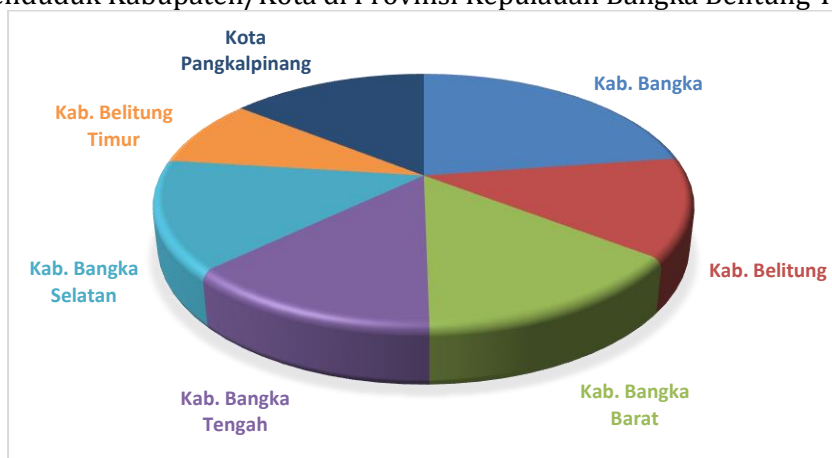
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah Penduduk	jiwa	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865	1.459.873
a. Laki-Laki	jiwa	697.897	713.223	728.580	743.931	759.255
b. Perempuan	jiwa	645.984	659.590	673.247	686.934	700.318
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	persen	2,19	2,15	2,11	2,07	n/a
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	82	84	86	87	89
4. Rasio Jenis Kelamin	persen	108,04	108,13	108,22	108,30	108,37
5. Rasio Ketergantungan	persen	46,40	46,06	45,74	46,05	n/a

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Data-data pada Tabel II.6 merupakan data yang diperoleh dari Kesepakatan Pemuktahiran Data Kesehatan Tahun 2018 yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 mencapai 1.459.873 jiwa yang terdiri dari 759.255 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 700.618 penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan rasio jenis kelamin 108,37. Rasio jenis kelamin di Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 sebesar 108,37, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan.

Grafik II.1

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan kabupaten/kota tergambar pada Tabel II.7. Tabel tersebut menunjukkan bahwa, penduduk terbanyak pada tahun 2018 berada di Kabupaten Bangka yaitu sebesar 331.793 jiwa dan yang paling sedikit di Kabupaten Belitung Timur, sebanyak 127.064 jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, angka tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yakni sebanyak 1.755 orang/km², dan terendah di Kabupaten Belitung Timur yakni sebanyak 51 orang/km².

Tabel II.7

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (org/km ²)
	Km ²	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	2.950,69	17,97	330.793	22,66	112
Kabupaten Belitung	2.293,69	13,97%	186.155	12,75	81
Kota Pangkalpinang	118,80	0,72%	208.520	14,28	1.755
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	17,17%	209.011	14,31	74
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	12,95%	192.429	13,18	90

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (org/km ²)
	Km ²	% luas Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah	% terhadap penduduk Kepulauan Bangka Belitung	
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	21,96%	205.901	14,10	57
Kabupaten Belitung Timur	2.507,0	15,26%	127.064	8,71	51
Luas Daratan	16.424,23	20,10%			
Luas Perairan	65.301,00	79,90%			
Prov. Kep. Bangka Belitung	81.725,23		1.403.865	100	89

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Kepadatan penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 87 jiwa per km² pada tahun 2017 menjadi 89 jiwa per km². Pada tahun 2018 penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 390.553, usia 15-64 tahun berjumlah 1.005.214 dan usia 65+ tahun berjumlah 64.106. Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak bekerja. Agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi daerah, maka dibutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian penduduk, hingga kebijakan ekonomi yang agar bonus demografi dapat menjadi keuntungan bagi pembangunan di daerah.

Tabel II.8

Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 (x1000)

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		Jumlah
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	68.109	65.470	133.579
2	5-9	66.606	63.846	130.452
3	10-14	64.844	61.678	126.522
4	15-19	62.529	59.180	121.709
5	20-24	63.439	58.738	122.177
6	25-29	67.225	61.031	128.256
7	30-34	66.458	60.437	126.895
8	35-39	64.138	57.021	121.159
9	40-44	58.996	50.557	109.553
10	45-49	51.171	43.679	94.850
11	50-54	40.049	35.258	75.307
12	55-59	30.983	28.583	59.566
13	60-64	23.646	22.096	45.742
14	65 +	31.062	33.044	64.106
JUMLAH		759.255	700.618	1.459.873

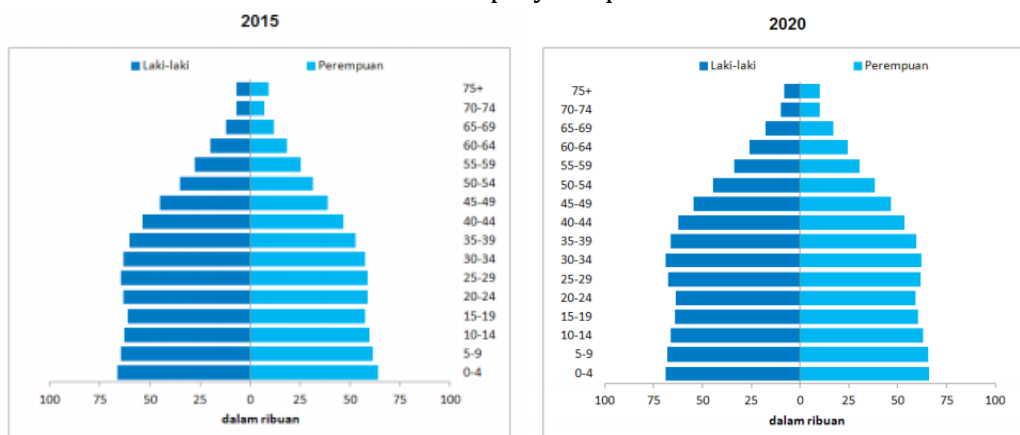
Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2019

Di samping jumlah penduduk, juga diperlukan untuk mengetahui proyeksi parameter kependudukan, seperti struktur umur, angka kelahiran total, serta angka harapan hidup. Berdasarkan proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, yang disusun

oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS dan UNFPA (*United Nations Population Fund*), proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 menggambarkan Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) (Gambar II.2), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Tipe ini memiliki kebiasaan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi dan terdapat pada daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup tinggi pula. Pertumbuhan ini disebabkan selisih antara tingkat kematian dan kelahiran yang cukup tinggi dimana penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Penduduk usia lanjut dan usia produktif termasuk usia angkatan kerja akan bertambah besar proporsinya. Sementara itu penduduk usia muda (bayi dan anak) jumlahnya meningkat.

Grafik II.2

Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 dan proyeksi pada Tahun 2020



Sumber: Bappenas, BPS & UNFPO 2013

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada (Soerjani et al. 1987). Menurut Khana dalam KLH (2010), daya dukung lingkungan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah dari sumber daya alam yang terbatas dengan mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya. Sesuai dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lingkungan tidak hanya diukur dari kemampuan lingkungan dan sumber daya alam dalam mendukung kehidupan manusia, tetapi juga dari kemampuan menerima beban pencemaran dan bangunan.

Khanna (1999) membagi daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi dua komponen yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas penyediaan (*supportive capacity*) adalah kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Adapun kapasitas tampung limbah

(*assimilative capacity*) adalah kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan di dalamnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, *supportive capacity* merupakan daya dukung lingkungan hidup dan *assimilative capacity* merupakan daya tampung lingkungan hidup.

Gambar 2.4

Komponen dalam Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Manusia mendapat manfaat dari berbagai sumber daya dan proses yang disediakan oleh ekosistem alam. Secara menyeluruh, manfaat ini dikenal dengan istilah jasa ekosistem dan meliputi produk seperti air minum dan proses seperti pemecahan (dekomposisi) sampah. Atau dengan kata lain, Jasa ekosistem adalah barang atau jasa yang disediakan oleh ekosistem untuk manusia dan menjadi dasar untuk penilaian (*valuation*) suatu ekosistem (Hein et.al., 2006). Ketersediaan jasa ekosistem sering bervariasi dengan berjalannya waktu dan ketersediaannya secara aktual dan potensial di masa depan harus menjadi bagian dari penilaian. Secara umum, jasa ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibagi menjadi 2 kategori. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9

Kategori dan Jenis Jasa Ekosistem

No	Kategori Jasa	Jenis
(1)	(2)	(3)
1	Penyediaan	1. Pangan 2. Air
2	Pengaturan	1. Pengaturan Iklim 2. Pengaturan Tata Aliran Air & Banjir 3. Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam 4. Pemurnian Air 5. Pengolahan dan Penguraian Limbah

2.1.1.3.1 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Pangan

Penyediaan pangan pada dasarnya dapat dipenuhi oleh sumber-sumber pangan yang berasal dari pertanian, perikanan (hasil laut), perkebunan, kehutanan hingga sumber daya peternakan. Prioritas pemenuhan dan penyediaan pangan merupakan salah satu aspek penting yang sudah sepatutnya diperhatikan lebih mendalam. Daya dukung lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan lebih seksama agar dapat digunakan sebagai langkah awal dalam menetapkan strategi penyediaan pangan masyarakat. Strategi penyediaan pangan yang jitu dapat menjamin keamanan dan ketahanan pangan yang sistematis pada suatu lingkungan.

Tabel II.10

Distribusi Kelas Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 1996 – 2016

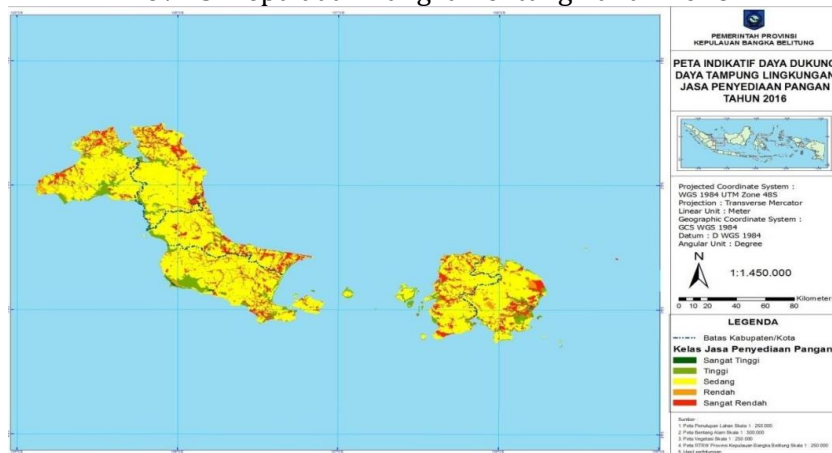
Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sangat Tinggi	2.581,00	0,15	2.581,00	0,15	2.657,90	0,16
Tinggi	176.278,43	10,57	154.636,53	9,27	148.101,41	8,88
Sedang	1.312.552,73	78,72	1.265.614,42	75,90	1.234.453,51	74,03
Rendah	27.196,23	1,63	33.450,40	2,01	41.709,47	2,50
Sangat Rendah	136.094,26	8,16	198.420,29	11,90	227.780,36	13,66
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total (Ha)	1.667.405,65	100	1667405,65	100	1.667.405,65	100

Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem (2018)

Data diatas merupakan data distribusi kelas daya dukung penyediaan pangan sepuluh tahun, dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2016. Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa ekoregion memberikan banyak manfaat bagi manusia terutama yang berkaitan dengan hajat hidup manusia yang paling utama yaitu pemenuhan kebutuhan pangan. Terpenuhinya pangan bagi manusia tidak terlepas dari peran tutupan lahan pada setiap ekoregion suatu wilayah.

Jasa ekosistem penyediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan data penutupan lahan tahun 1996, 2006, dan 2016, selain menggunakan data bentang alam dan vegetasi. Jasa ekosistem penyediaan pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1996-2016.

Gambar II.5
Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016



Secara umum terlihat adanya peningkatan luasan pada kategori sangat rendah pada tahun 1996-2016 yaitu seluas 136.094,26 ha atau 8,16 persen dari luas wilayah Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 1996, kemudian meningkat hingga seluas 198.420,29 ha atau 11,90 persen pada tahun 2006. Tahun 2016, luasan kategori jasa penyediaan pangan sangat rendah meningkat menjadi 227.780,36 ha atau 13,66 persen. Jasa ekosistem penyediaan pangan kategori rendah pada tahun 1996 seluas 27.196,23 ha atau 1,63 persen, luasan ini meningkat namun tidak terlihat signifikan, hingga sebesar 33.450,40 ha atau 2,01 persen pada tahun 2006. Tahun 2016, luasan lahan yang menyediakan jasa ekosistem penyediaan pangan kategori rendah sebesar 41.709,47 ha atau 2,50 persen. Bertambahnya luasan wilayah yang memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan kategori rendah dan sangat rendah mengindikasikan menurunnya kemampuan lahan dan ekosistem di Kepulauan Bangka Belitung dalam menyediakan sumber pangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan menurunnya luasan jasa penyediaan ekosistem pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kelas jasa ekosistem kategori sedang memiliki luasan sebesar 1.312.552,73 ha atau 78,72 persen pada tahun 1996 dan menurun menjadi 1.265.614,42 ha atau 75,90 persen pada tahun 2006 serta 1.234.453,51 ha atau 74,03 persen pada tahun 2016. Jasa ekosistem penyediaan pangan pada kategori tinggi pada tahun 1996 memiliki luasan 176.278,43 ha atau 10,57 persen dan menurun pada tahun 2006 menjadi 154.636,53 ha atau 9,27 persen. Tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 148.101,41 ha atau 8,88 persen. Jasa penyediaan pangan kategori sangat tinggi tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 1996 hingga 2016 yaitu secara konsisten berada pada persentase sekitar 0,15 persen.

Pada data tahun 2016, luasan lahan pertambangan meningkat pesat dari 105.074,05 ha pada tahun 2006 menjadi 143.411,58 ha pada tahun 2016. Meningkatnya luas lahan tambang mengakibatkan menurunnya potensi lahan sebagai penyedia pangan karena lahan pertambangan umumnya memiliki sedikit vegetasi

dan kondisi tanah yang terkategori kritis. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun jasa penyediaan pangan kategori sangat tinggi meningkat dari 2.504,45 ha menjadi 2.581,35 Ha. Kondisi ini disebabkan oleh bertambahnya luas hutan mangrove primer sebagai penyedia pangan terutama pangan laut dan pesisir pantai.

Tabel II.11
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan
Pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Blank	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandara/ Pelabuhan	146,08						146,08
Hutan lahan kering primer				617,62			617,62
Hutan lahan kering sekunder			115,878,50			1.342,54	117.221,03
Hutan mangrove primer				30.479,11	1.177,82	1.175,67	32.832,59
Hutan mangrove sekunder			283,35	30.896,02		1.665,25	32.844,62
Hutan rawa primer				596,05			596,05
Hutan rawa sekunder		222,57	33.713,92	10.665,63		162,00	44.764,12
Lahan terbuka	68.125,85	7.672,34				733,22	76.531,41
Perkebunan/Kebun		135,65	191.380,15			8,20	191.524,00
Permukiman/Lahan terbangun	28.968,77	3.585,46				383,28	32.937,51
Pertambangan	130.539,65	12.548,78				323,14	143.411,58
Pertanian lahan kering		185,02	53.536,74	3.792,42		251,52	57.765,70
Pertanian lahan kering campur semak/Kebun Campur		2.719,57	541.571,74	1.258,49		618,38	546.168,18
Rawa				9.838,64	1.002,59	64,06	10.905,29
Savanna/Padang rumput		9.907,41	89,79			19,41	10.016,61
Sawah				1.283,60	477,49		1.761,10
Semak belukar		2.315,86	296.281,73	259,51		1.131,17	299.988,28
Semak belukar rawa			1.443,42	53.822,67		309,81	55.575,90
Tambak				594,59		32,65	627,24
Transmigrasi		2.416,80					2.416,80
Tubuh air			274,18	3.997,08		737,68	5.008,94
Blank						3.745,02	3.745,02
Total	227.780,36	41.709,47	1.234.453,51	148.101,41	2.657,90	12.703,01	1.667.405,65

2.1.1.3.2 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Penyediaan Air Bersih

Selain penyediaan pangan, salah satu jasa ekosistem yang penting adalah jasa ekosistem penyediaan air. Air merupakan komponen utama dalam hidup manusia yang menyusun lebih dari 80 persen tubuh manusia.

Gambar II.6
Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Penyediaan Air
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016



Selain diperlukan dalam aktivitas manusia seperti konsumsi dan sanitasi, air digunakan dalam berbagai keperluan penting seperti irigasi dan kegiatan budidaya ikan. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Pentingnya fungsi air bagi kehidupan manusia tidak terhindarkan harus menjadi sasaran pengelolaan yang optimal dalam mendukung kebutuhan mendasar masyarakat. Distribusi dan persebaran wilayah jasa ekosistem penyediaan air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar II.6.

Perubahan luasan tutupan lahan diketahui memberikan pengaruh terhadap layanan jasa penyediaan air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 1996-2016 yang dapat dilihat pada tabel II.12. Luasan kelas jasa ekosistem penyediaan air dalam kategori tinggi sebesar 12.060,12 ha atau 0,72 persen pada tahun 1996, kemudian meningkat hingga seluas 12.630,69 ha atau 0,76 persen pada tahun 2006, dan kembali menurun tajam pada tahun 2016, yaitu seluas 49.649,09 ha atau 2,98 persen. Perubahan luasan kelas jasa ekosistem penyediaan air dalam kategori sedang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 1996-2016 menunjukkan adanya penurunan luasan wilayah yaitu sebesar 79.204,39 ha atau 4,75 persen pada tahun 1996, kemudian menurun hingga menjadi seluas 76.046,43 ha atau 4,56 persen pada tahun 2006, dan kembali menurun tajam hingga seluas 49.649,09 ha atau setara dengan 2,98 persen dari luasan Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016. Jasa ekosistem penyediaan air kategori rendah pada tahun 1996 seluas 1.331.570,01 ha atau setara dengan 79,86 persen. Luasan tersebut menurun pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.175.883,64 ha atau 70,52 persen dan secara konsisten menurun di tahun 2016 menjadi 1.112.163,73 ha atau 66,70 persen.

Tabel II.12
Distribusi Kelas Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 1996 – 2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sangat Tinggi	131,15	0,01	131,15	0,01	132,38	0,01
Tinggi	12.060,12	0,72	12.630,69	0,76	11.150,68	0,67
Sedang	79.204,39	4,75	76.046,43	4,56	49.649,09	2,98
Rendah	1.331.570,01	79,86	1.175.883,64	70,52	1.112.163,73	66,70
Sangat Rendah	231.736,97	13,90	390.010,74	23,39	481.606,76	28,88
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100

Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem, 2018

Menurunnya luasan jasa ekosistem penyediaan air kategori tinggi, sedang dan rendah tidak terlepas dari meningkatnya luasan wilayah pada kategori sangat rendah. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan jasa ekosistem penyediaan air dalam kategori sangat rendah pada tahun 1996 sebesar 231.736,97 ha atau setara dengan 13,90 persen dari total luas wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan ini meningkat pada tahun 2006 dan 2016 dengan luasan sebesar 390.010,74 ha atau 23,39 persen pada tahun 2006, dan 481.606,76 ha atau 28,88 persen pada tahun 2016. Kelas jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat tinggi cenderung konstan, yaitu sekitar 0,1 persen luas wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Degradasi dan alih fungsi lahan merupakan beberapa penyebab menurunnya jasa ekosistem penyediaan air pada suatu wilayah. Daerah hutan berperan sebagai wilayah atau area konservasi air yang memiliki cadangan air tanah yang tinggi. Hilangnya vegetasi yang terjadi akibat degradasi dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan campuran dan pertambangan menyebabkan terjadinya penurunan jasa ekosistem penyediaan air yang signifikan.

Tabel II.13
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air
pada Berbagai Jenis Tutupan lahan Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandara/Pelabuhan					146,08		146,08
Hutan lahan kering primer			617,62				617,62
Hutan lahan kering sekunder				115.878,50		1.342,54	117.221,03
Hutan mangrove primer				1.177,82	30.479,11	1.175,67	32.832,59
Hutan mangrove sekunder				332,91	30.846,46	1.665,25	32.844,62
Hutan rawa primer		176,68	419,37				596,05
Hutan rawa sekunder			44.602,12			162,00	44.764,12
Lahan terbuka				7.672,34	68.125,85	733,22	76.531,41

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkebunan/Kebun				9.027,43	182.488,37	8,20	191.524,00
Permukiman/Lahan terbangun				3.585,46	28.968,77	383,28	32.937,51
Pertambangan				12.548,78	130.539,65	323,14	143.411,58
Pertanian lahan kering				57.514,18		251,52	57.765,70
Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur				545.549,79		618,38	546.168,18
Rawa		6.835,12	4.006,11			64,06	10.905,29
Savanna/Padang rumput				579,32	9.417,88	19,41	10.016,61
Sawah				1.761,10			1.761,10
Semak belukar				298.857,10		1.131,17	299.988,28
Semak belukar rawa			3,88	55.262,20		309,81	55.575,90
Tambak					594,59	32,65	627,24
Transmigrasi				2.416,80			2.416,80
Tubuh air	132,38	4.138,88				737,68	5.008,94
Blank						3.745,02	3.745,02
Total	132,38	11.150,68	49.649,09	1.112.163,73	481.606,76	12.703,01	1.667.405,65

Degradasi dan alih fungsi lahan merupakan beberapa penyebab menurunnya jasa ekosistem penyediaan air pada suatu wilayah. Daerah hutan berperan sebagai wilayah atau area konservasi air yang memiliki cadangan air tanah yang tinggi. Hilangnya vegetasi yang terjadi akibat degradasi dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan campuran dan pertambangan menyebabkan terjadinya penurunan jasa ekosistem penyediaan air yang signifikan.

Jasa ekosistem penyediaan air bersih tahun 2016 mengalami penurunan yang terlihat pada semakin meluasnya tutupan lahan pertambangan yang memiliki kategori kelas jasa penyediaan air rendah (meningkat hingga seluas 12.548,78 ha) dan kategori kelas sangat rendah (meningkat hingga seluas 130.539,65 ha). Aktivitas penambangan timah menghasilkan tailing pasir dengan porositas tinggi yang tidak dapat dijadikan sebagai wilayah resapan dan konservasi air. Bekas galian penambangan pada dasarnya memiliki cadangan air permukaan yang cukup banyak namun kualitas air yang rendah seperti pH air rendah dan kandungan logam relatif tinggi menyebabkan air permukaan pada kolam/kolong bekas penambangan dikategorikan belum memenuhi standar baku mutu layak untuk air konsumsi.

Kawasan perkebunan sebagai salah satu tutupan lahan dengan jasa ekosistem penyediaan air sangat rendah diketahui memiliki luasan yang terus meningkat sejak tahun 1996 hingga 2016. Tahun 1996 kawasan perkebunan memiliki luasan sebesar 24.857,52 ha yang meningkat pesat pada tahun 2006 hingga sebesar 119.239,61 ha, kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 182.488,37 ha pada tahun 2016. Meluasnya tutupan lahan dalam bentuk perkebunan/kebun terutama perkebunan sawit menjadikan lahan tersebut memiliki penurunan jasa ekosistem penyediaan air. Hal ini dikarenakan adanya konversi area hutan yang awalnya sebagai wilayah

konservasi air menjadi perkebunan yang secara perlahan-lahan menurunkan kualitas lahan tersebut dalam menyimpan cadangan air tanah.

2.1.1.3.3 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca serta penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat serta bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rentang tahun 1996-2016 disajikan pada Tabel II.14. Data tersebut menunjukkan bahwa kelas dengan kategori sangat rendah mengalami peningkatan luas area secara signifikan. Luasan pada tahun 1996 sebesar 136.519,47 ha atau 8,19 persen, pada tahun 2006 sebesar 198.845,51 ha atau 11,93 persen dan pada tahun 2016 sebesar 232.758,86 ha atau 13,96 persen. Kategori rendah mengalami perubahan yang fluktuatif dan tidak terlalu signifikan, yaitu 202.249,75 ha atau 12,13 persen pada tahun 1996, kemudian bertambah menjadi 203.710,79 ha atau 12,22 persen pada tahun 2006, dan kembali mengalami penurunan menjadi 191.952,41 ha atau 11,51 persen pada tahun 2016. Sedangkan distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan iklim untuk kategori sedang mengalami penurunan luasan pada rentang tahun 1996 hingga 2016, dengan luasan 1.259.388,35 ha atau 75,53 persen pada tahun 1996, menurun menjadi 1.199.103,12 ha atau 71,91 persen pada tahun 2006 dan kembali mengalami penurunan luasan pada tahun 2016 menjadi 1.185.582,06 ha atau 71,10 persen. Kategori sedang selalu menjadi kelas yang mendominasi pada jasa ekosistem pengaturan iklim di Kepulauan Bangka Belitung, baik pada tahun 1996, 2006, maupun 2016.

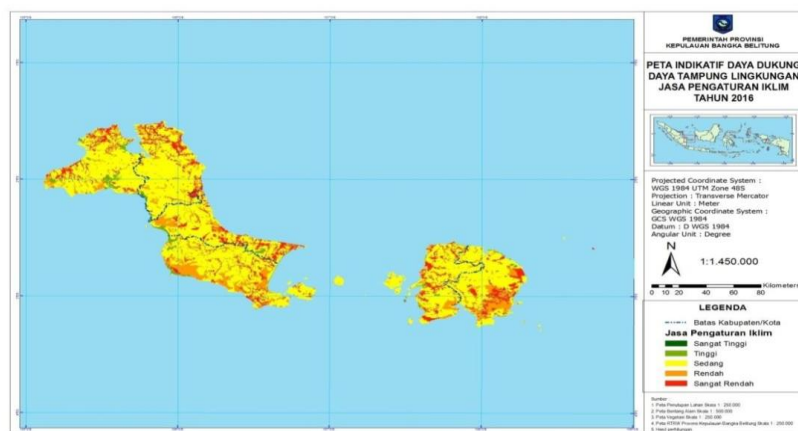
Tabel II.14
Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim
Pada Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996 – 2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sangat Tinggi	581,72	0,03	581,72	0,03	307,32	0,02
Tinggi	55.963,35	3,36	52.461,50	3,15	44.102,00	2,64
Sedang	1.259.388,35	75,53	1.199.103,12	71,91	1.185.582,06	71,10
Rendah	202.249,75	12,13	203.710,79	12,22	191.952,41	11,51
Sangat Rendah	136.519,47	8,19	198.845,51	11,93	232.758,86	13,96
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100

Penurunan luasan juga terjadi untuk kelas jasa ekosistem pengaturan iklim kategori tinggi dan sangat tinggi. Luas lahan kategori tinggi pada tahun 1996 sebesar 55.963,35 ha atau 3,36 persen, lalu menurun menjadi 52.461,50 ha atau 3,15 persen pada tahun 2006, dan selanjutnya pada tahun 2016 berkurang menjadi 44.102 ha atau 2,64 persen. Kelas sangat tinggi mengalami penurunan luasan, yang semula pada tahun 1996 dan 2006 sebesar 581,72 ha atau 0,03 persen, menurun menjadi 307,32 ha atau 0,02 persen pada tahun 2016. Luas lahan kategori sangat tinggi memiliki luasan terkecil di antara jenis kelas yang lain.

Tabel II.15 menunjukkan distribusi luasan daya dukung jasa ekosistem pengaturan iklim pada berbagai jenis tutupan lahan tahun 2016. Luasan lahan yang memiliki potensi jasa ekosistem pengaturan iklim kategori sangat rendah didominasi oleh pertambangan (130.539,65 ha) dan lahan terbuka (70.060,40 ha). Kategori rendah didominasi oleh semak belukar (45.674,03 ha) dan hutan rawa sekunder (44.602,12 ha). Luasan lahan untuk kategori sedang didominasi oleh tutupan pertanian lahan kering campur semak (517.607,18 ha) dan semak belukar (253.183,07 ha). Distribusi luasan untuk kategori tinggi didominasi oleh hutan mangrove primer (31.349,60 ha) dan hutan lahan kering sekunder (11.144,60 ha).

Gambar II.7
Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Tahun 2016



Kategori sangat tinggi memiliki luasan yang sangat kecil dan seluruhnya terdiri dari tutupan lahan berupa hutan mangrove primer seluas 307,32 ha. Secara umum, trend jasa ekosistem pengaturan iklim dalam periode 1996-2016 didominasi oleh kategori sedang dan tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur semak. Luasan untuk semua kategori pada tahun 2016 didominasi oleh tutupan lahan bervegetasi, yaitu semak belukar, lahan pertanian lahan kering campur semak dan hutan mangrove primer. Area yang bervegetasi memiliki manfaat penting dalam mengatur iklim melalui pengurangan emisi karbon dan gas-gas rumah kaca.

Tabel II.15
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim
Pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Pada Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandara/Pelabuhan					146,08		146,08
Hutan lahan kering primer		617,62					617,62
Hutan lahan kering sekunder		11.144,60	104.733,89			1.342,54	117.221,03
Hutan mangrove primer	307,32	31.349,60				1.175,67	32.832,59
Hutan mangrove sekunder		332,91	30.846,46			1.665,25	32.844,62
Hutan rawa primer			593,48	2,57			596,05
Hutan rawa sekunder				44.602,12		162,00	44.764,12
Lahan terbuka				5.737,79	70.060,40	733,22	76.531,41
Perkebunan/Kebun			177.730,58	13.785,23		8,20	191.524,00
Permukiman/Lahan terbangun				3.552,89	29.001,35	383,28	32.937,51
Pertambangan				12.548,78	130.539,65	323,14	143.411,58
Pertanian lahan kering			44.846,76	12.667,42		251,52	57.765,70
Pertanian lahan kering campur semak			517.607,18	27.942,61		618,38	546.168,18
Rawa		524,89	10.316,34			64,06	10.905,29
Savanna/Padang rumput			8.495,07	1.502,13		19,41	10.016,61
Sawah				1.761,10			1.761,10
Semak belukar			253.183,07	45.674,03		1.131,17	299.988,28
Semak belukar rawa			33.090,34	22.175,74		309,81	55.575,90
Tambak					594,59	32,65	627,24
Transmigrasi					2.416,80		2.416,80
Tubuh air		132,38	4.138,88			737,68	5.008,94
Blank						3.745,02	3.745,02
Total	307,32	44.102,00	1.185.582,06	191.952,41	232.758,86	12.703,01	1.667.405,65

2.1.1.3.4 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pencegahan Bencana Alam

Ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana, khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, banjir, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, banjir dan tsunami. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

Tabel II.16

Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir Pada Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996-2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sangat Tinggi	82.448,99	4,94	76.011,33	4,56	65.110,52	3,90
Tinggi	504.345,77	30,25	480.805,19	28,84	402.267,69	24,13
Sedang	912.591,82	54,73	876.182,63	52,55	921.944,35	55,29
Rendah	139.674,07	8,38	201.524,58	12,09	235.297,89	14,11
Sangat Rendah	15.642,00	0,94	20.178,90	1,21	30.082,19	1,80
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100

Tabel II.17

Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor Pada Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996-2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sangat Tinggi	88.747,29	5,32	84.200,71	5,05	66.191,63	3,97
Tinggi	602.424,87	36,13	573.866,16	34,42	506.442,92	30,37
Sedang	784.518,19	47,05	747.939,21	44,86	792.764,09	47,54
Rendah	79.508,10	4,77	103.365,91	6,20	122.744,05	7,36
Sangat Rendah	99.504,19	5,97	145.330,66	8,72	166.559,96	9,99
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100

Tabel II.18

Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Pada Berbagai Jenis Kelas Tahun 1996 - 2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sangat Tinggi	111.602,23	6,69	110.931,79	6,65	101.375,08	6,08
Tinggi	206.929,85	12,41	252.535,04	15,15	267.466,39	16,04
Sedang	120.214,68	7,21	102.002,35	6,12	100.515,76	6,03
Rendah	329.753,87	19,78	256.867,30	15,41	230.696,65	13,84
Sangat Rendah	886.202,01	53,15	932.366,17	55,92	954.648,78	57,25
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100	1.667.405,65	100

Distribusi luasan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rentang tahun 1996-2016 disajikan pada Tabel II.16 sampai dengan Tabel II.18. Data tersebut menunjukkan bahwa kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana alam banjir, longsor maupun kebakaran dengan kategori sangat rendah mengalami peningkatan luas area dalam rentang tahun 1996 hingga 2016. Kategori rendah untuk jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan longsor mengalami juga mengalami peningkatan luasan sepanjang tahun 1996 hingga 2016, sedangkan kategori rendah

untuk jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran kategori rendah mengalami penurunan luasan. Distribusi luasan jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir, longsor, maupun kebakaran untuk kategori sangat tinggi mengalami penurunan luasan pada rentang tahun 1996 hingga 2016. Hal serupa terjadi pada kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan longsor kategori tinggi yang terus mengalami penurunan luasan.

Tabel II.19

Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandara/Pelabuhan				146,08			146,08
Hutan lahan kering primer	617,62						617,62
Hutan lahan kering sekunder		1.229,10	114.694,39			1.342,54	117.221,03
Hutan mangrove primer	30.627,21	1.09,71				1.175,67	32.832,59
Hutan mangrove sekunder		338,06	30.841,31			1.665,25	32.844,62
Hutan rawa primer	593,48	2,57					596,05
Hutan rawa sekunder	4.901,05	39.701,07				162,00	44.764,12
Lahan terbuka				69.880,889	5.917,31	733,22	76.531,41
Perkebunan/Kebun		6.435,10	185.080,70			8,20	191.524,00
Permukiman/Lahan terbangun				30.324,01	2.230,22	383,28	32.937,51
Pertambangan				123.088,72	19.999,71	323,14	143.411,58
Pertanian lahan kering			48.493,516	9.020,67		251,52	57.765,70
Pertanian lahan kering campur semak		11.999,56	533.550,23			618,38	546.168,18
Rawa	1.706,61	9.134,61				64,06	10.905,29
Savanna/Padang rumput		668,01	9.329,19			19,41	10.016,61
Sawah				1.753,68	7,42		1.761,10
Semak belukar	13.549,73	285.307,37				1.131,17	299.988,28
Semak belukar rawa	9.073,27	46.192,82				309,81	55.575,90
Tambak				560,64	33,95	32,65	627,24
Transmigrasi				523,22	1.893,58		2.416,80
Tubuh air	4.041,55	229,72				737,68	5.008,94
Blank						3.745,02	3.745,02
Total	65.110,52	402.267,69	921.944,35	235.297,89	30.082,19	12.703,01	1.667.405,65

Hal sebaliknya terjadi pada kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran kategori tinggi yang justru mengalami peningkatan luasan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan longsor di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami penurunan, sedangkan jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran mengalami peningkatan. Meskipun demikian, kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari

bencana kebakaran di Kepulauan Bangka Belitung tetap didominasi kategori sangat rendah sehingga rentan terjadi bencana kebakaran.

Tabel II.20

Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandara/Pelabuhan					146,08		146,08
Hutan lahan kering primer	530,50	87,12					617,62
Hutan lahan kering sekunder		24.585,72	91.292,78			1.342,54	117.221,03
Hutan mangrove primer	26.886,84	4.770,09				1.175,67	32.832,59
Hutan mangrove sekunder		17.021,30	14.158,08			1.665,25	32.844,62
Hutan rawa primer	421,94	174,11					596,05
Hutan rawa sekunder	23.439,82	21.162,30				162,00	44.764,12
Lahan terbuka				29.641,22	46.156,97	733,22	76.531,41
Perkebunan/Kebun		24.405,12	167.110,68			8,20	191.524,00
Permukiman/Lahan terbangun				7.904,25	24.649,98	383,28	32.937,51
Pertambangan				48.132,44	94.956,00	323,14	143.411,58
Pertanian lahan kering			24.569,59	32.944,59		251,52	57.765,70
Pertanian lahan kering campur semak		49.916,83	495.632,96			618,38	546.168,18
Rawa	1.021,39	9.819,83				64,06	10.905,29
Savanna/Padang rumput	366,52	9.630,68				19,41	10.016,61
Sawah				1.711,23	49,87		1.761,10
Semak belukar	5.319,76	293.537,34				1.131,17	299.988,28
Semak belukar rawa	5.002,92	50.263,17				309,81	55.575,90
Tambak				516,74	77,84	32,65	627,24
Transmigrasi				1.893,58	523,22		2.416,80
Tubuh air	3.210,95	1.069,32				737,68	5.008,94
Blank						3.745,02	3.745,02
Total	66.191,63	506.442,92	792.764,09	122.744,05	166.559,96	12.703,01	1.667.405,65

Tabel II.21

Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bandara/Pelabuhan		146,08					146,08
Hutan lahan kering primer	530,50	87,12					617,62
Hutan lahan kering sekunder		6.235,97	28.997,35	80.645,17		1.342,54	117.221,03
Hutan mangrove primer	26.323,27	5.333,65				1.175,67	32.832,59
Hutan mangrove sekunder		15.367,45	1.901,69	13.880,23		1.665,25	32.844,62
Hutan rawa primer	419,37	176,68					596,05

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)						Total
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Hutan rawa sekunder	19.440,31	24.952,17	209,65			162,00	44.764,12
Lahan terbuka	14.169,81	60.516,72	1.111,66			733,22	76.531,41
Perkebunan/Kebun			10.271,25	21.839,37	159.405,19	8,20	191.524,00
Permukiman/Lahan terbangun				2.088,06	30.466,17	383,28	32.937,51
Pertambangan	11.579,83	131.205,45	303,16			323,14	143.411,58
Pertanian lahan kering			8.852,20	15.717,39	32.944,59	251,52	57.765,70
Pertanian lahan kering campur semak			28.461,63	65.191,00	451.897,16	618,38	546.168,18
Rawa	4.482,28	6.357,42	1,53			64,06	10.905,29
Savanna/Padang rumput				1.736,73	8.260,47	19,41	10.016,61
Sawah	1.226,31	534,78					1.761,10
Semak belukar				29.598,69	269.258,41	1.131,17	299.988,28
Semak belukar rawa	20.123,13	14.902,57	20.240,38			309,81	55.575,90
Tambak	482,79	111,79				32,65	627,24
Transmigrasi					2.416,80		2.416,80
Tubuh air	2.597,47	1.508,54	165,25			737,68	5.008,94
Blank						3.745,02	3.745,02
Total	101.375,08	267.466,39	100.515,76	230.696,65	954.648,78	12.703,01	1.667.405,65

2.1.1.3.5 Profil Daya Dukung Lingkungan Jasa Pengaturan Pengolahan Limbah

Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah dalam kapasitas yang terbatas. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Peta indikatif daya dukung jasa pengaturan pengolahan limbah provinsi kepulauan bangka belitung tahun 1996-2016 disajikan pada Gambar II.8.

Tabel II.22.

Distribusi Luas Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan Limbah
Pada Berbagai Kelas Pada Tahun 1996 - 2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tinggi	46.118,77	2,76	45.714,09	2,73	38.441,31	2,30
Sedang	822.051,13	49,11	720.288,53	43,03	604.856,62	36,14
Rendah	753.994,41	45,04	855.947,73	51,14	978.560,69	58,46
Sangat Rendah	979,93	0,06	1.193,90	0,07	1.391,34	0,08
Blank	50.729,87	3,03	50.729,87	3,03	50.624,16	3,02
Total	1.673.874,12	100	1.673.874,12	100	1.673.874,12	100

Distribusi luasan jasa ekosistem pengaturan pengolahan limbah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada rentang tahun 1996-2016 disajikan pada Tabel II.22. Data tersebut menunjukkan bahwa kelas dengan kategori sangat rendah mengalami perubahan luas area yang tidak terlalu signifikan. Luasan pada tahun 1996 sebesar 979,93 ha atau 0,06 persen, pada tahun 2006 sebesar 1.193,90 ha atau 0,07 persen dan pada tahun 2016 sebesar 1.391,34 ha atau 0,08 persen. Peningkatan luasan terjadi pada kategori rendah, yaitu sebesar 753.994,41 ha atau 45,04 persen pada tahun 1996, meningkat cukup signifikan menjadi 855.947,73 ha atau 51,14 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2016 luasannya kembali meningkat menjadi 978.560,69 ha atau 58,46 persen.

Berbeda dengan kategori sangat rendah dan kategori rendah, luasan kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan limbah untuk kategori sedang mengalami penurunan. Pada tahun 1996, luasannya 822.051,13 ha atau 49,11 persen, menurun menjadi 720.288,53 ha atau 43,03 persen pada tahun 2006 dan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 604.856,62 ha atau 36,14 persen. Perubahan luas yang tidak terlalu signifikan terjadi pada kelas tinggi. Pada tahun 1996, luasannya sebesar 46.118,77 ha atau 2,76 persen, menurun menjadi 45.714,09 ha atau 2,73 persen pada tahun 2006 dan berkurang luasannya menjadi 38.441,31 ha atau 2,30 persen pada tahun 2016.

Gambar II.8

Peta Indikatif Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan Limbah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016



Distribusi luasan daya dukung jasa ekosistem pengaturan pengolahan limbah pada berbagai jenis tutupan lahan pada tahun 2016 disajikan pada Tabel II.23 di bawah ini. Lahan dengan kategori sangat rendah didominasi oleh tutupan lahan terbuka, kategori rendah didominasi oleh pertanian lahan kering campur, kategori sedang didominasi oleh belukar, dan kategori tinggi didominasi oleh hutan mangrove primer.

Tabel II.23.
Distribusi Luasan Daya Dukung Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan Limbah
Pada Berbagai Jenis Tutupan Lahan Tahun 2016

Tutupan Lahan	Luas Kelas (Ha)					Total
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Blank	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Badan Air		3.249,48	67,90		2.273,06	5.590,44
Bandara/Pelabuhan			146,08			146,08
Belukar	259,51	291.806,45	2.220,61		6.630,20	300.916,76
Belukar Rawa	1.141,36	50.199,00	1.325,94		3.180,82	55.847,12
Hutan Lahan Kering Primer	530,50	87,12				617,62
Hutan Lahan Kering Sekunder		115.321,46	62,88		2.352,74	117.737,08
Hutan Mangrove Primer	20.913,30	5.186,43			7.923,58	34.023,31
Hutan Mangrove Sekunder		25.586,07	268,74		8.304,75	34.159,56
Hutan Rawa Primer		573,21			22,84	596,05
Hutan Rawa Sekunder	10.344,12	32.879,80	201,05		1.391,06	44.816,02
Pemukiman		32,57	32.044,94	16,84	1.074,44	33.168,79
Perkebunan		22.918,57	168.404,56		231,77	191.554,91
Pertambangan			140.214,47	302,78	3.446,46	143.963,71
Pertanian Lahan Kering		3.792,42	53.047,42	114,09	1.140,45	58.094,38
Pertanian Lahan Kering Campur		44.309,72	496.873,11		5.800,12	546.982,95
Rawa	5.252,52	4.745,39			938,12	10.936,04
Savanna/Padang Rumput		2.234,40	7.515,84		283,37	10.033,62
Sawah			1.747,44		15,34	1.762,78
Tambak			478,47		149,91	628,38
Tanah Terbuka		1.934,55	71.524,44	957,63	3.183,85	77.600,46
Transmigrasi			2.416,80			2.416,80
Blank					2.281,27	2.281,27
Total	38.441,31	604.856,62	978.560,69	1.391,34	50.624,16	1.673.874,12

2.1.1.4 Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut. Komposisi lahan datar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “*Tin Mayor South East Asian Tin Belt*” dengan tipe granit main range yang mempunyai ciri-ciri megakristal

(terutama K-Feldspar) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (Sumber: Arsip PT. Koba Tin: *Survey dan Geology Department*, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti Zircon (ZrSiO_4), Monazite ($(\text{Ce, La, Dy})\text{PO}_4$ (ThSiO_2), Hematite (Fe_2O_3), Pyrite (FeS_2), Ilmenite (FeTiO_3), dan Xenotime (YPO_4). Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (*granite belt*) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun. Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lainnya seperti pasir kuarsa (SiO_2), material Kaolin, dan bilitonite (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Hasil kajian hidrologi menyatakan bahwa daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkan Sunda (*Sunda Shelf*) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, dan Sungai Lenggang.

2.1.1.5 Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Selama tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 °C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan di Kepulauan Bangka Belitung, angin kencang, dan ombak laut cenderung meninggi.

2.1.1.6 Kondisi Lahan

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 529.810 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 489.080 ha dan perkebunan sebesar 391.064 ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 3.232 Ha.

Tabel II.24
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Lahan	Luas(Ha)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	13.262	15.719	15.719	22.771	25.058
Tegalan	109.820	113.105	113.105	117.376	99.038
Ladang	44.085	30.348	30.348	28.147	27.435
Perkebunan	334.698	441.152	441.152	367.848	391.064
Hutan Rakyat	71.323	47.753	47.753	42.637	43.315
Tambak	*	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*	*
Pengembalaan	4.235	1.815	1.815	2.263	3.232
Tanah kosong/(sementara tidak diusahakan)	126.272	76.588	76.588	67.415	55.987
Lain-Lain (pekarangan)	388.068	397.806	397.806	538.195	529.810
Permukiman	550.651	517.741	517.741	455.762	489.080
Hutan Negara	*	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*	*
JUMLAH	1.642.414	1.642.414	1.642.027	1.642.027	1.664.018

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(*: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)

2.1.1.7 Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis. Perencanaan dan pengembangan Rencana Struktur Ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

1. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ada perubahan status sistem perkotaan dimana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

2. Rencana Sistem Perkotaan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014, rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKNp), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parit Tiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

Namun berdasarkan revisi RTRW Nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, terdapat perubahan status sistem perkotaan dimana Kota Pangkalpinang yang tadinya merupakan Pusat Kegiatan Nasional Promosi (PKNp) naik kelas menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

3. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sesuai dengan Karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kepulauan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II.25
Sistem Pelabuhan Laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

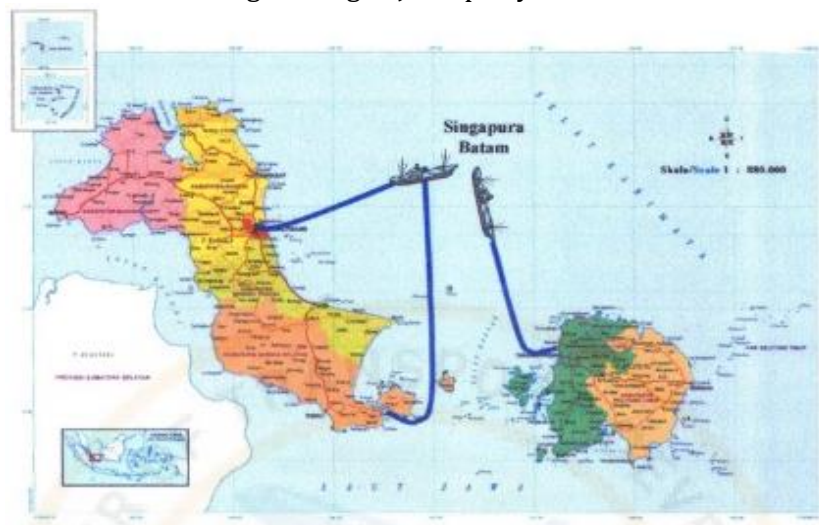
No. (1)	Klasifikasi & Nama Pelabuhan (2)	Kabupaten/Kota (3)
A	Pelabuhan Utama	
1	Pelabuhan Tanjung Batu	Belitung
B	Pelabuhan Pengumpul	
1	Pelabuhan Belinyu	Bangka
2	Pelabuhan Sadai	Bangka Selatan
3	Pelabuhan Muntok	Bangka Barat
4	Pelabuhan Pangkal Balam	Pangkalpinang
5	Pelabuhan Tanjung Pandan	Belitung
6	Pelabuhan Manggar	Belitung Timur
C	Pelabuhan Pengumpan	
1	Pelabuhan Sungailiat	Bangka
2	Pelabuhan Sungai Selan	Bangka Tengah
3	Pelabuhan Toboali	Bangka Selatan
4	Pelabuhan Tanjung Berikat	Bangka Tengah
5	Pelabuhan Tanjung Kelian	Bangka Barat
6	Pelabuhan Tanjung Tedung	Bangka Tengah
7	Pelabuhan Teluk Asam	Belitung Timur
8	Pelabuhan Dendang	Belitung Timur
D	Pelabuhan Khusus (Wisata)	
1	Pelabuhan Tanjungpandan	Belitung
2	Pelabuhan Tanjung Kelayang	Belitung

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Adapun angkutan penyeberangan meliputi simpul dan jalur sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian (Kabupaten Bangka Barat) - Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
2. Pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kab. Bangka Barat) - Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);

Gambar. II.10
Pengembangan Jalur pelayaran laut



Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada tabel II.26 di bawah ini.

Tabel II.26
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH	2010	2015	2020	2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PULAU BANGKA					
1 Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2 Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3 Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4 Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5 Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
JUMLAH	477.159	507.309	553.487	603.875	654.842
B. PULAU BELITUNG					
6 Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7 Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
JUMLAH	146.283	152.588	161.327	170.566	181.919
JUMLAH TOTAL	623.442	659.897	714.814	774.441	836.761

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

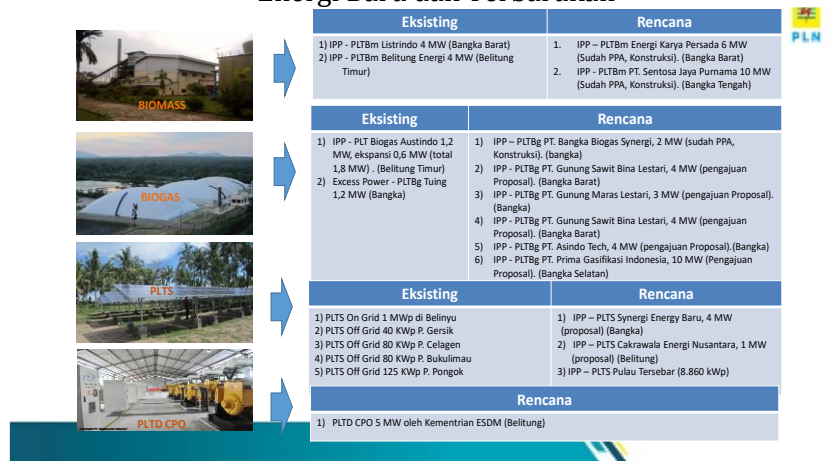
Gambar. II.12
Rencana Pembangunan Transmisi Bangka Belitung 2017-2026 (RUPTL)



Dengan keterbatasan alternatif pembangkit listrik maka arahan pengembangan energi listrik di Provinsi Bangka Belitung adalah pembangkit

listrik berbahan bakar non minyak salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menggunakan bahan bakar batubara. Sedangkan untuk daerah terpencil arahan penyediaan prasarana listrik adalah dengan membangun jaringan terisolasi. Arahan pengaturan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan.

Gambar. II.13
Energi Baru dan Terbarukan



Tabel II.27

Rasio Desa Berlistrik PLN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	KABUPATEN/KOTA	*JUMLAH DESA	DESA BERLISTRIK PLN	RATIO DESA BERLISTRIK PLN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(%)
1	Bangka	71	71	100
2	Bangka Barat	64	64	100
3	Bangka Tengah	63	63	100
4	Pangkalpinang	42	42	100
5	Bangka Selatan	53	53	100
6	Belitung Timur	39	39	100
7	Belitung	49	49	100
Prov. Kep. Bangka Belitung		381	381	100

Keterangan: *) Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut :

1. 4 (Empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (Dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Sedangkan standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan umum dan komersil: 15 persen dari domestik;
2. Wartel: 250 jiwa per wartel; dan
3. Telepon Umum: 800 jiwa per unit.

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel II.28 di bawah ini.

Tabel II.28
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. PULAU BANGKA						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
JUMLAH		112.683	124.942	136.315	148.724	158.861
B. PULAU BELITUNG						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
JUMLAH		33.451	34.830	36.825	38.934	40.986
JUMLAH TOTAL		146.134	159.772	173.140	187.658	199.847

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

Tersedianya fasilitas telepon sangat diperlukan bagi kelancaran komunikasi dan arus informasi. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kegiatan ekonomi, maka permintaan terhadap sambungan telepon akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Kebutuhan sambungan telepon se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 adalah sebanyak 146.134 sambungan telepon. Kalo diasumsikan peningkatan sambungan telepon terus meningkat setiap tahunnya maka kebutuhan sambungan telepon di provinsi kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2030 adalah sebanyak 199.847. Hal tersebut sangat juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tiap tahunnya

5 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan

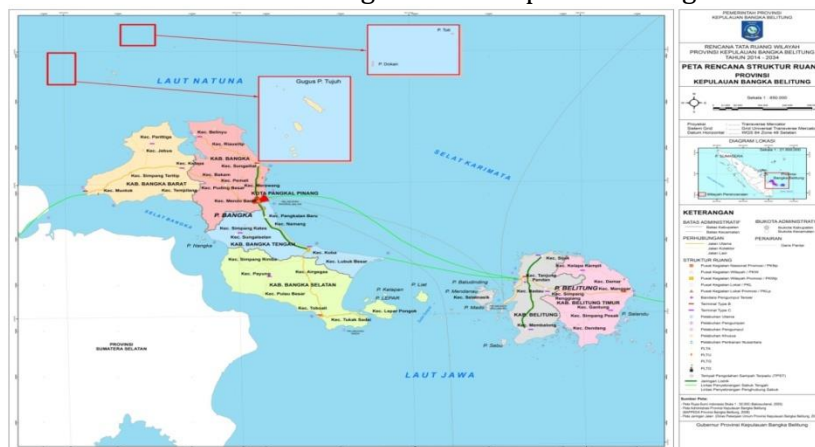
air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

- Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/kota yaitu WS Belitung;
- Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;
- Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempada sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
- Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai

6 Sistem Prasarana Lingkungan

Gambar II.14

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional), tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah domestik, sistem drainase, sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp, dan PKL).

7 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang

untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

8 Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

a. Hutan Lindung

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 ha, dimana 32 persen diantaranya (atau 156.730 ha) merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksud terdapat di Kabupaten Bangka Barat (28.589 ha), Kabupaten Bangka (15.736 ha), Kabupaten Bangka Tengah (32.226 ha), Kabupaten Bangka Selatan (28.234 ha), Kabupaten Belitung (37.583 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (45.874 ha).

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Merupakan kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

1. Sempadan Pantai; sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar Bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Pulau Penyau, Pulau Burung, Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Gelasa, Pulau Panjang, Pulau Tujuh, Pulau Lima, Pulau Lengkuas, Pulau Selindung, Pulau Pelanduk, Pulau Seliu, Pulau Nadu, Pulau Mendanau, Pulau Batu Dinding, Pulau Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Kriteria untuk sempadan pantai adalah wilayah pantai dengan jarak 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

2. Sempadan Sungai; Adapun sungai-sungai besar yang terdapat di Kepulauan Bangka Belitung diantaranya adalah Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau. Ketentuan terkait sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar 5 (lima) meter atau lebih dari kaki tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 50 (lima puluh) meter atau lebih dari titik pasang tertinggi.
3. Sempadan Kolong; berupa kolam-kolam bekas galian timah yang tergenang air hujan atau sungai yang dalam hal ini dapat diperlakukan sebagai danau/waduk. Kawasan sempadan kolong ditetapkan dengan kriteria: wilayah daratan dengan jarak antara 50 (lima puluh) meter sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; atau daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik kolong.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Situs Dan; Kawasan Cagar Budaya

1. Kawasan Cagar Alam; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang-Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.
2. Taman Wisata Alam Laut; di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.
3. Kawasan Suaka Alam Laut; dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Kepulauan Bangka Belitung memiliki kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kelian dan benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, mesjid Jami dan kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan Mayor Chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan

yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Cagar Budaya.

e. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data yang tersedia pada laporan RTRW kota Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung dapat diketahui kawasan rawan bencana, yaitu :

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Muntok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat), Lubuk Besar, Koba, Namang dan Sungai Selan (Kabupaten Bangka Tengah), Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan), Kota Pangkalpinang, Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung), Sungai Liat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
2. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parit Tiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
3. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

f. Kawasan Budidaya

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, yang dimaksud Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

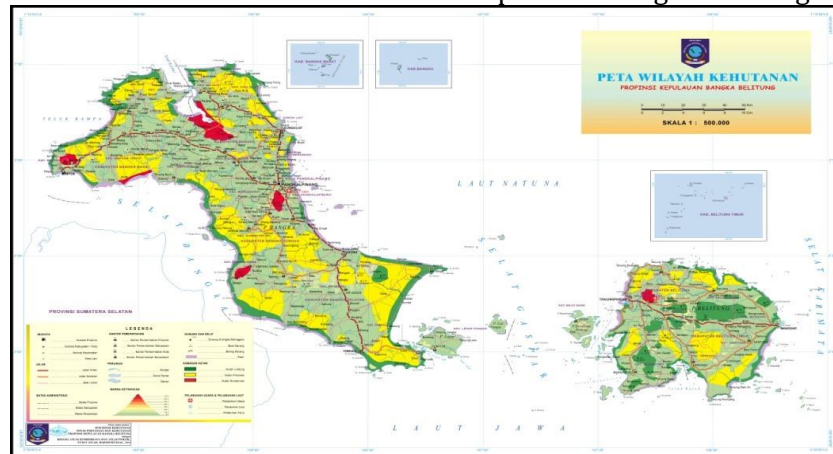
Definisi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan definisi Hutan produksi adalah kawasan hutan yang

mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan lampiran peta keputusan tersebut, Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 ha, Hutan Lindung 189.965,00 ha, Hutan Produksi 432.882,82 ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 ha.

Gambar II.15

Sebaran Hutan Produksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Rincian luas Hutan Produksi (HP dan HPK) di Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kabupaten Bangka (HP 67.083,52; HPK 11,32 ha), Kota Pangkalpinang (HP 0,00 ha; HPK 0,00 ha) Kabupaten Bangka Selatan (HP 106.451,10 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Tengah (HP 85.497,75 ha; HPK 0,00 ha), Kabupaten Bangka Barat (HP 78.368,92 ha; HPK 177,67 ha), Kabupaten Belitung (HP 43.595,77 ha; HPK 507,59 ha) dan Kabupaten Belitung Timur (HP 55.650,83 ha; HPK 0,00 ha). Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2014-2034, Kawasan Hutan Produksi diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut :

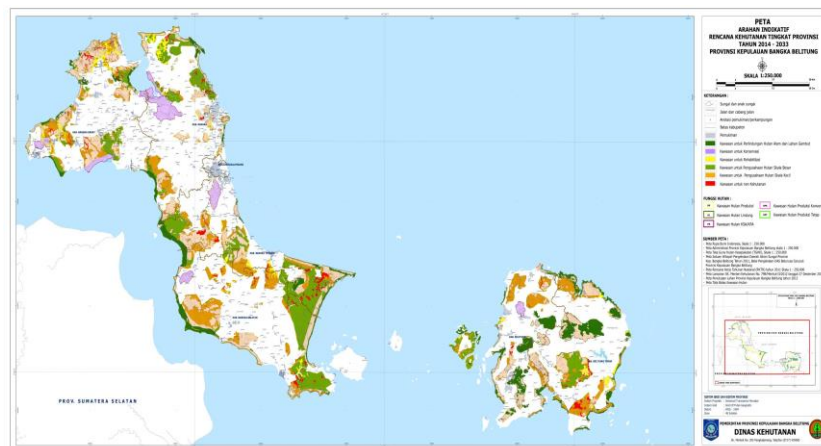
- a. Kawasan untuk Rehabilitasi, kriteria Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan.
- b. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta

Hutan Produksi, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar, kriteria Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin.
- d. Kawasan untuk non Kehutanan, kriteria Hutan Produksi dengan penutupan hutan selain Hutan Primer, tidak bergambut lebih dari 2 meter, dengan menggunakan mekanisme izin pinjam pakai.

Gambar II.16

Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi dalam RKTP Tahun 2014-2034



Sumber : RKTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2034.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Di wilayah kepulauan Bangka Belitung terdapat lebih kurang 903.450 ha kawasan pertanian dengan rincian kawasan pertanian tanaman pangan seluas (355.453 ha), pertanian hortikultura seluas (221.512 ha), perkebunan seluas (316.383 ha) dan kawasan peternakan seluas (10.102 ha).

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas :

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
- 2) PPN Sungailiat
- 3) PPN Tanjung Pandan*
- 4) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

- a. PPI Kurau;
- b. PPI Manggar;
- c. PPI Sungai Selan;
- d. PPI Sadai;
- e. PPI Selat Nasik; dan
- f. PPI Gantung

g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas +400.000 ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan eksplorasi peningkatan status WIUP ekspolasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian, memfasilitasi dan mengawasi kegiatan operasi produksi, identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat, dan memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan paska tambang, Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746 ha di wilayah WP yang menyebar di seluruhh kabupaten/kota dengan rincian a. Wilayah izin usaha eksplorasi dan operasi produksi L.

Gambar. II.17

Peta Kawasan Tambang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



h. Kawasan Peruntukan Industri

Arahan lokasi pengembangan kawasan industri di Provinsi ini adalah:

- 1) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
- 2) Kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Belinyu di Kabupaten Bangka;
- 3) Kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;

- 4) Kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkal Pinang;
- 5) Kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- 6) Kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
- 7) Kawasan industri terpadu Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:

1) Wisata Alam, meliputi:

- a) Seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
- b) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan Pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
- c) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
- d) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
- e) Taman wisata laut;
- f) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; dan
- g) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.

2) Wisata budaya, meliputi:

- a) Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
- b) Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
- c) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
- d) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di Kabupaten/Kota;

3) Wisata buatan, meliputi:

Kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan

resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas kurang lebih 59.188 ha. Dibedakan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan/pelayanan seperti kawasan perkotaan Muntok, Sungailiat, Pangkalpinang, Koba, Toboali, Tanjungpandan dan Manggar. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah belakang (*hinterland* dari pusat-pusat permukiman yang disebut di atas).

k. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa kawasan latihan militer di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Kelapa Kampit. Pada kawasan ini selain terdapat instalasi militer juga merupakan kawasan latihan tempur yang mempunyai radius tempur udara (*air weapon range/AWR*), Kawasan peluncuran Rudal dan Kawasan Militer Angkatan Laut (LANAL). Kawasan ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu basis militer TNI dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pada kawasan perbatasan, terutama perbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan China.

Gambar II.18
Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

l. Kawasan Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- Tata ruang di wilayah sekitarnya;

b) Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau

c) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

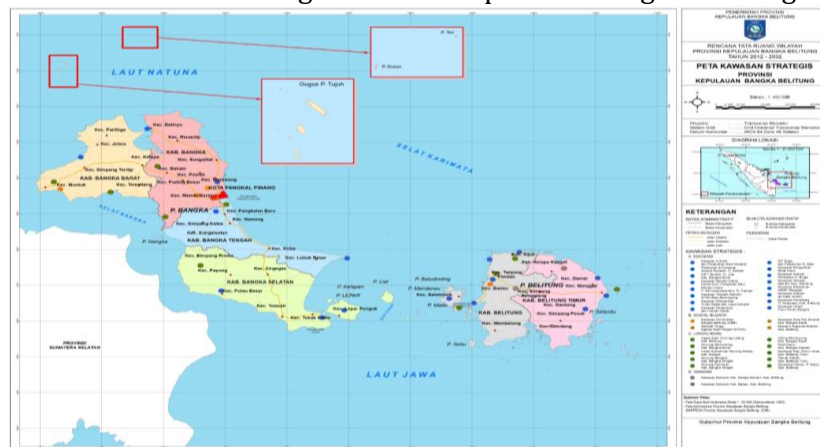
Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi terdiri atas:

a) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi, meliputi :

- 1) kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
- 2) kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- 3) kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
- 4) kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
- 5) kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
- 6) kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
- 7) kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
- 8) kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;

Gambar II.19

Peta Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034.

- 9) kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
 - 10) kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
 - 11) kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
 - 12) kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
 - 13) kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
 - 14) kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
 - 15) kawasan lintas timur Pulau Bangka.
- b) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya, meliputi: kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.
- c) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi: Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia.

Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir pergerakan tanah dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel II.29.

Tabel II.29

Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	Banjir dan Puting beliung	Sedang
2	Bangka Tengah	Banjir, pergerakan tanah	Rendah
3	Bangka Selatan	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang, tinggi
4	Bangka Barat	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
5	Belitung	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
6	Belitung Timur	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Rendah, sedang
7	Pangkalpinang	Banjir, puting beliung	Rendah, sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016

Bencana alam yang memberikan dampak pada 9.984 unit rumah mengalami kerusakan ringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2016 adalah bencana banjir bandang/rob/bah. Sedangkan korban meninggal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 paling banyak disebabkan oleh bencana tanah longsor/batu/pasir, untuk lebih lengkapnya data tersebut dapat dilihat pada Tabel II.30.

Tabel II.30

Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Kejadian	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Meninggal	Korban	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
Banjir Bandang/Rob/Bah	143 (67,77%)	3	19.019 KK/22 Jiwa	0	2	9.984
Angin Puting Beliung/Angin Kencang	11 (5,21%)	4	111 KK	7	8	95
Di Laut/Pantai	6 (2,84%)	7	18 jiwa	0	0	0
Di sungai	0	0	0	0	0	0
Longsoran Tanah/Batu/Pasir	8 (3,79%)	10	20 jiwa	0	0	0
Kebakaran Hutan/Lahan	1 (0,47%)	0	0	0	0	0
Kebakaran Rumah/Perumahan	11 (5,21%)	0	8 KK/13 jiwa	9	2	2
Kebakaran Gedung Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Pasar/Ruko, Gedung, Kantor/Sekolah swasta, warung/toko dan lainnya	7 (3,32%)	1	10 jiwa	4	0	2
Kabut Asap	0	0	0	0	0	0
Gempa Bumi (3 Kec)	15 (7,11%)	0	0	0	0	0
Bencana Sosial	2 (0,95%)	0	2 jiwa	0	0	0
Tersambar Petir	7 (3,32%)	2	24 jiwa	0	4	0

Sumber: Data dan Informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parit Tiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
2. Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan

Gambar II.20

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



3. Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan *Williamson* (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

A. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2014-2018 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel II.31.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 73.069 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2018 mencapai Rp. 52.212 miliar. Berdasarkan tabel II.10 menunjukkan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 secara nominal nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel II.31

PDRB Tahun 2014 –2018 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

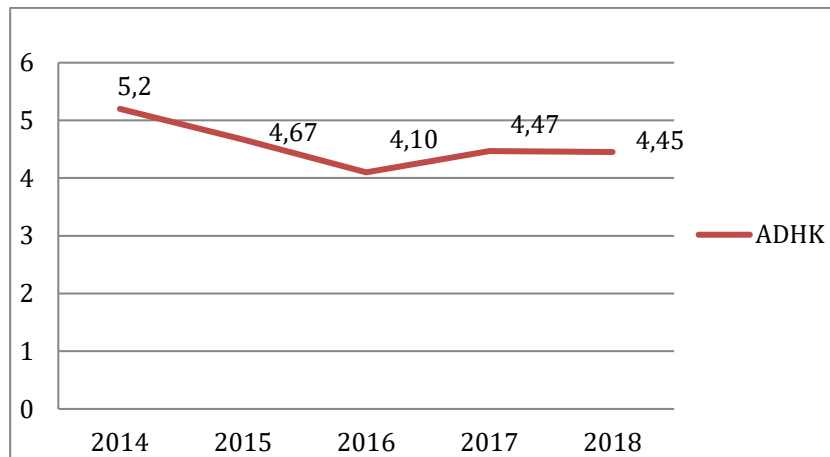
No.	PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	56.373,6	60.992,1	65.048,2	69.861,2	73.069
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	44.159,4	45.961,5	47.848,3	49.986,8	52.212

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Grafik II.3. ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh 4,45 persen melambat dibanding capaian tahun 2017 sebesar 4,47 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Selanjutnya PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Grafik II.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel II.32 menunjukkan bahwa perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 ada 4 sektor lapangan usaha yang menggerakkan perekonomian meliputi (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (ii) Pertambangan dan Penggalan; (iii) Industri Pengolahan; (iv) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel II.32

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014–2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.748,3	12.060,4	13.117,1	13.135,7	13.159,5
Pertambangan dan Penggalan	7.622,8	7.735,4	7.743,3	8.182,0	7.741,5
Industri Pengolahan	12.877,3	12.888,4	13.074,0	14.237,9	15.078,7
Pengadaan Listrik dan Gas	42,0	51,1	66,5	79,4	86,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,4	12,1	13,1	15,04	14,81
Konstruksi	4.712,4	5.264,2	5.753,08	6.371,9	7.110,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7702,4	8.634,1	9.621,63	10.840,52	11.471,23
Transportasi dan Pergudangan	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,0	3.104,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.321,4	1.459,8	1.609,0	1.734,0	1.896,8
Informasi dan Komunikasi	849,1	941,7	1.034,0	1.135,3	1.254,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,6	1.408,1
Real Estat	1.823,4	1.964,7	2.104,4	2.281,2	2.517,5
Jasa Perusahaan	154,0	169,6	176,3	196,7	217,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.025,6	3.471,6	3.781,6	4.116,3	4.372,0
Jasa Pendidikan	1.362,8	1.639,7	1.859,5	1.190,3	2.128,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	629,9	710,7	759,8	845,2	905,7
Jasa lainnya	371,7	426,6	493,1	548,5	600,43
Produk Domestik Regional Bruto	56.373,6	60.987,3	65.048,2	69.861,2	73.069,3

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Sementara dari keempat pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tersebut, perkembangan sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2018 sebesar Rp. 7.741,5 miliar mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp. 8.182,0 miliar, sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami peningkatan.

Tabel II.33
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014–2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.254,3	8.743,5	9.123,2	9.090	9.588,9
Pertambangan dan Penggalian	6.354,1	6.458,09	6.490,6	6.634,8	6.563
Industri Pengolahan	10.270,4	10.400,6	10.680,5	11.345,1	11.803,2
Pengadaan Listrik dan Gas	34,4	38,9	43,7	45,9	49,3
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,7	8,1	8,6	9,4	8,9
Konstruksi	3.552,4	3.760,1	4.021,6	4.248,4	4.493,1
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.140,7	6.402,1	6.727,7	7.253,3	7.445,1
Transportasi dan Pergudangan	1.570,8	1.662,3	1.752,3	1.892,2	2.021,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.000,6	1.034,8	1.086,5	1.136,5	1.207,2
Informasi dan Komunikasi	790,9	849,0	926,9	1.002,8	1.110,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	766,6	807,9	860	881,3	936,3
Real Estat	1.403,9	1.442	1.494,6	1.572,1	1.702,5
Jasa Perusahaan	115,7	120,3	120,4	127,5	136
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.149,8	2.337,1	2.478,7	2.604,2	2.843,2
Jasa Pendidikan	964,9	1.060,0	1.139,3	1.183,2	1.289,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	500,6	533,8	559,4	605,2	632,8
Jasa lainnya	281,7	304,6	334,4	354,9	381,2
Produk Domestik Regional Bruto	44.159,4	45.962,3	47.848,4	49.986,8	52.212,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dengan demikian, distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.34, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, persentase distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 66,45 persen.

Tabel II.34
Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2014–2018 Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,22	19,78	20,17	18,80	18,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	13,52	12,68	11,90	11,71	10,59
C.	Industri Pengolahan	22,84	21,13	20,10	20,38	20,64
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,10	0,11	0,12
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F.	Konstruksi	8,36	8,63	8,85	9,12	9,73
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,51	14,16	14,79	15,52	15,70
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,77	4,04	4,06	4,15	4,25
I.	Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	2,35	2,40	2,47	2,48	2,60
J.	Informasi dan Komunikasi	1,51	1,54	1,59	1,63	1,72
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,80	1,84	1,83	1,93
L.	Real Estate	3,23	3,22	3,24	3,27	3,44
M, N.	Jasa Perusahaan	0,27	0,28	0,27	0,28	0,30
O.	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,37	5,69	5,81	5,89	5,98
P.	Jasa Pendidikan	2,42	2,69	2,86	2,81	2,91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,17	1,17	1,121	1,24
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,66	0,70	0,76	0,79	0,82
PDRB		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 (tabel II.35), rata-rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 65,25 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 20,20 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder, sektor primer yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,29 persen dan pertambangan dan penggalan sebesar 11,02 persen, Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor tersier memiliki kontribusi sekitar 15,74 persen.

Tabel II.35
Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,91	18,69	19,03	19,06	18,29
B.	Pertambangan dan Penggalan	14,77	14,39	14,06	13,57	11,02
C.	Industri Pengolahan	24,04	23,26	22,63	22,29	20,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,09	8,04	8,18	8,40	9,74
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,86	13,90	13,93	14,07	15,74
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,56	3,61	3,66	4,19
I.	Penyediaan Akomodasi danMakan Minum	2,21	2,27	2,25	2,27	2,53
J.	Informasi dan Komunikasi	1,75	1,79	1,85	1,94	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,74	1,74	1,80	1,83
L.	Real Estate	3,11	3,18	3,14	3,12	3,38
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,29
O.	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	4,87	5,08	5,20	6,17
P.	Jasa Pendidikan	2,14	2,19	2,31	2,39	2,8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,13	1,16	1,17	1,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,62	0,64	0,66	0,71	0,82

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel II.36 dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tren menunjukkan terus mengalami peningkatan. Besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh karena itu, besaran perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

Tabel II.36

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	9.139.67	10.174.80	11.001.41	11.771.68	12.807.94
Kabupaten Bangka Barat	9.538.46	10.686.71	11.473.70	12.249.17	13.221.42
Kabupaten Bangka Tengah	6.198.20	6.690.27	7.056.17	7.468.64	7.971.97
Kabupaten Bangka Selatan	5.820.02	6.435.91	6.947.75	7.541.29	8.165.16
Kabupaten Belitung	6.000.33	6.731.14	7.328.17	8.001.86	8.738.19
Kabupaten Belitung Timur	5.082.82	5.666.81	6.125.94	6.604.09	7.151.86
Kota Pangkalpinang	8.414.61	9.359.68	10.234.63	11.116.23	12.113.98
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.388,4	5.6373,6	60.992,1	69.861,2	73.069,3
Nasional	9.546.134.0	10.569.705.3	11.531.716.9	12.406.809.8	13.588.797.3

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.37, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional. Dari besaran PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.37

Perkembangan PDRB Tahun Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Miliar Rupiah)

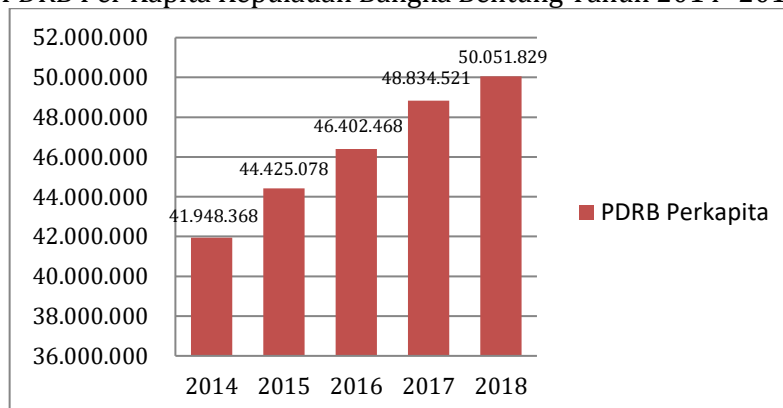
Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.769.12	8.143.12	8.512.42	8.906,23	9.355.33
Kabupaten Bangka Barat	7.972.79	8.349.26	8.769.64	9.189.73	9.673.06
Kabupaten Bangka Tengah	5.178.28	5.255.77	5.271.87	5.432.80	5.620.43
Kabupaten Bangka Selatan	4.852.97	5.068.27	5.284.64	5.511.77	5.763.78
Kabupaten Belitung	4.934.00	5.167.07	5.400.94	5.669.54	5.969.54
Kabupaten Belitung Timur	4.258.05	4.487.30	4.675.21	4.873.90	5.110.24
Kota Pangkalpinang	6.951.02	7.247.50	7.555.02	7.945.99	8.358.48

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40.104.9	42.190.9	44.159.4	49.986.8	52.212
Nasional	7.727.083.4	8.156.497.8	8.564.866.6	8.982.511.3	9.912.749.30

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

B. PDRB Per Kapita

Grafik II.4
PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018



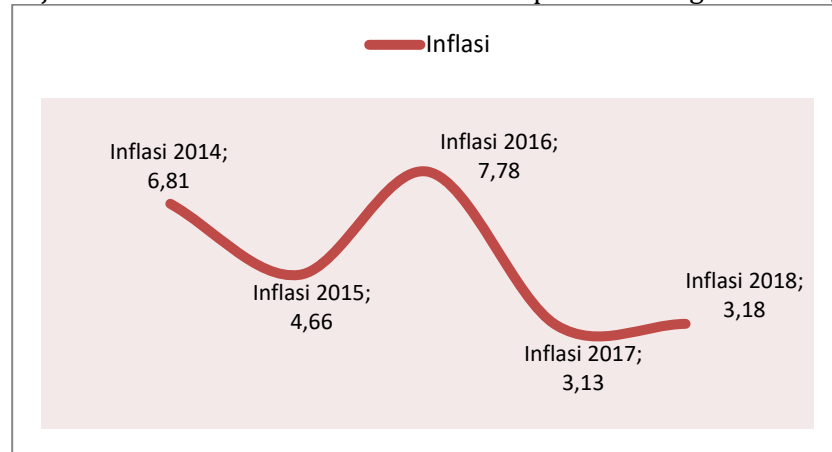
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2019

Nilai PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 41.948.368 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnya menjadi Rp. 50.051.829. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

C. Tingkat Inflasi

Grafik II.5 di bawah ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2014-2018 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mencapai 3,18 persen, ini sedikit mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 yakni sebesar 3,13 persen. Semenjak tahun 2017 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam level yang ideal yaitu 3-4 persen.

Grafik II.5
Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada semua kelompok pengeluaran. Dilihat dari besarnya andil/sumbangan inflasi selama tahun 2018 kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangsih terbesar adalah bahan makanan sebesar 0,87 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang paling kecil sumbangan/andilnya adalah kesehatan sebesar 0,11 persen.

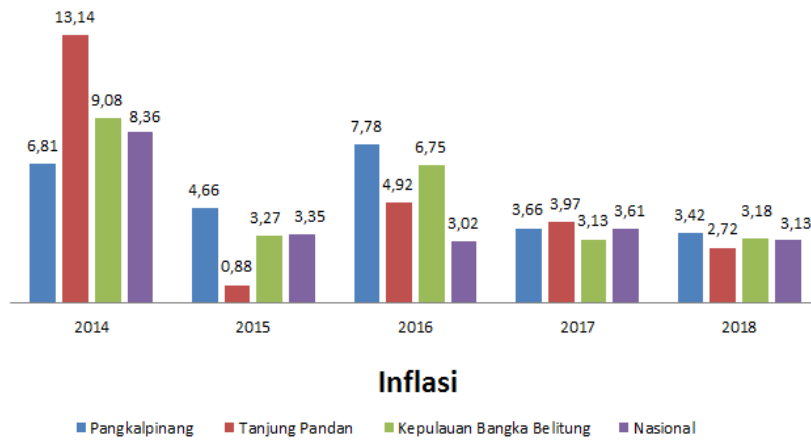
Tabel II.38
Laju Inflasi Tahun 2014-2018 Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	6,81	4,66	7,78	3,13	3,18
1.Bahan Makanan	3,39	6,63	13,49	1,66	0,87
2.Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,63	7,92	4,77	2,90	0,67
3.Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	8,85	3,74	3,59	5,63	0,62
4.Sandang	6,61	2,60	7,63	2,06	0,13
5.Kesehatan	8,13	5,50	4,31	3,61	0,11
6.Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	6,65	8,62	4,04	3,36	0,25
7.Transportasi,Komunikasi dan Jasa Keuangan	6,98	-2,04	11,42	2,09	0,53

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tingkat inflasi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional selama tahun 2014-2018 tren bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 inflasi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjung Pandan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nilai capaiannya di atas nasional dan tetap terjaga sesuai koridornya 3-4 persen. Kota Pangkalpinang tahun 2018 merupakan wilayah di Bangka Belitung yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi sebesar 3,42 persen. Selanjutnya inflasi di Bangka Belitung masih relatif terkendali yang didukung oleh koordinasi yang kuat antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan instansi terkait dalam mengendalikan harga-harga bergejolak (*volatile food*). Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada grafik II.6.

Grafik II.6
Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2018
Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional

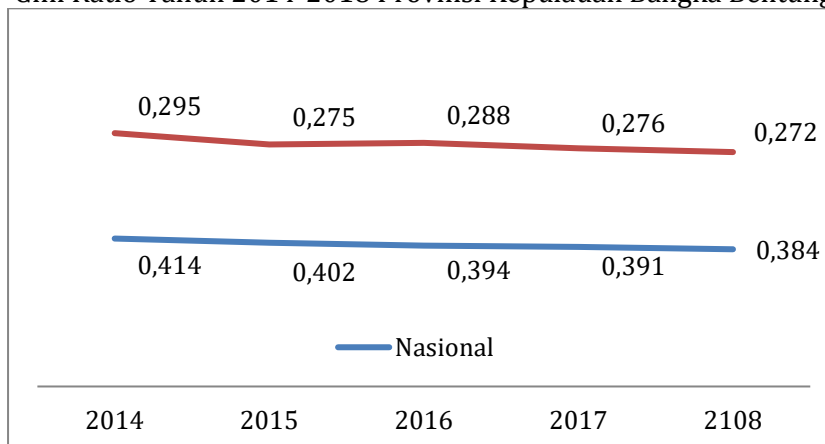


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

D. Indeks Gini

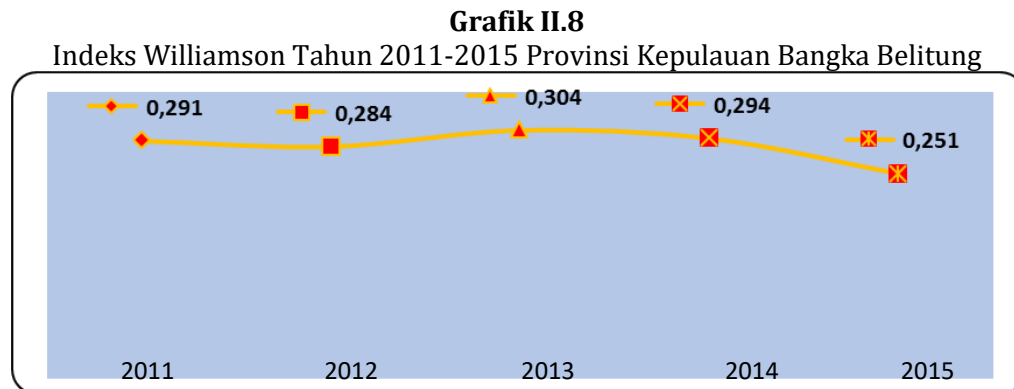
Berdasarkan grafik II.7 nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2014-2018 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki nilai Gini Ratio terendah se-Indonesia yaitu sebesar 0,272. Sementara itu, Provinsi DI Yogyakarta memiliki Gini Ratio tertinggi yaitu sebesar 0,422. Gini Ratio di daerah perkotaan di Bangka Belitung tahun 2018 sebesar 0,289, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan di Bangka Belitung tahun 2018 sebesar 0,222. Berdasarkan daerah tempat tinggal Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan yang terjadi di perdesaan.

Grafik II.7
Gini Ratio Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

E. Indeks Ketimpangan Williamson



Sumber: Bappeda tahun 2016, data diolah.

Pada periode 2011 sampai 2015 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun pada periode akhir. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284 dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,294 dan kembali turun menjadi 0,251 di akhir periode 2015. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah antar kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.8 berikut, yang menggambarkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1) Angka melek huruf

Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 berada pada 97,76 persen, artinya sekitar 98 persen penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka Melek Huruf ini merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk justru daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel II.39
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014 s.d 2018

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	98,24	97,87	97,77	97,87	98.49
2	Bangka Barat	95,15	96,36	96,51	96,36	96.94
3	Bangka Tengah	97,29	97,78	97,47	95,44	96.66
4	Bangka Selatan	95,71	95,44	96,84	97,78	97.41
5	Belitung	98,68	98,86	97,35	98,86	98.29
6	Belitung Timur	98,92	98,77	98,28	98,77	98.03
7	Kota Pangkalpinang	99,26	98,60	99,41	98,60	98.11
Prov. Kep. Bangka Belitung		97,60	97,63	97,66	97,63	97.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.40 berikut:

Tabel II.40
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	218.598	223.36	98.49
2	Kabupaten Bangka Barat	133.731	138.78	96.94
3	Kabupaten Bangka Selatan	129.505	135.69	96.66
4	Kabupaten Bangka Tengah	124.504	127.33	97.41
5	Kabupaten Belitung	126.995	128.46	98.29
6	Kabupaten Belitung Timur	869.828	88.07	98.03
7	Kota Pangkalpinang	142.962	144.99	98.11
Jumlah		963.278	986.68	97.76

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sementara Angka Harapan Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pendidikan. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dari usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a dan tahun. Angka Harapan Sekolah (HLS) bersama-sama dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan dua indikator penghitung IPM.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8,24. Meskipun grafiknya selama 2014-2018 mengalami peningkatan, namun masih di bawah rata-rata nasional yakni 8,42. Dari 7 Kabupaten/Kota yang ada, hanya Kota Pangkalpinang (9,78) yang angka di atas rata-rata nasional. Kabupaten Bangka Selatan memiliki RLS penduduk usia 15 tahun keatas terendah se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (6,36).

Tabel II.41
Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/kota	Rata - rata Lama Sekolah Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	7.89	7.96	8.38	8,19	8.20
2	Belitung	7.99	8.27	8.14	8,11	8.15
3	Bangka Barat	7.19	7.43	7.56	7,06	7.18
4	Bangka Tengah	7	6.97	7.17	6,79	6.80
5	Bangka Selatan	6.40	5.75	6.63	6,12	6.36
6	Belitung Timur	7.98	7.86	7.95	8,00	8.14
7	Pangkalpinang	9.67	9.99	9.76	9,77	9.78
Jumlah		7.76	7.79	7.62	7.78	8.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan (tidak termasuk tahun mengulang). Angka rata-rata lama sekolah diperoleh dari informasi tentang partisipasi Sekolah, Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, Ijazah tertinggi, dan Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tabel II.42
Angka Harapan Sekolah Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	12.33	12.36	12.37	12.58	12.68
2	Belitung	10.77	11.32	11.47	11.51	11.83
3	Bangka Barat	10.99	11.48	11.49	11.50	11.51
4.	Bangka Tengah	11.40	11.72	11.73	11.74	11.75
5.	Bangka Selatan	10.86	10.88	11.25	11.34	11.35
6.	Belitung Timur	10.94	11.28	11.46	11.48	11.49
7.	Pangkalpinang	12.74	12.76	12.77	12.78	12.83
Prov. Kep. Bangka Belitung		10.96	11.18	11.60	11.71	11.83

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Angka Harapan Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, walau menunjukkan peningkatan dari 10,96 (2014) menjadi 11,83 pada tahun 2018, tetapi masih dibawah Angka Harapan Sekolah (HLS) Indonesia dengan angka 12,85. Dan apabila dilihat dari peringkat secara nasional posisi HLS berada pada posisi 2 terbawah (urutan 33 dari 34 provinsi), hanya sedikit lebih tinggi 1,29. Saat ini Angka Harapan Sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertinggi di Kota Pangkalpinang (12,83), terendah di kabupaten Bangka Selatan (11,35). Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap angka IPM secara keseluruhan.

3) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APTS) adalah angka yang menunjukkan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Penyebab anak putus sekolah antara lain: karena masalah biaya, ingin membantu orang tua dengan bekerja, atau penyebab lainnya seperti menikah dini. Kasus anak putus sekolah berdampak seperti siklus. Selain berkorelasi dengan persoalan kemiskinan, putus sekolah juga mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu seterusnya karena tingkat pendapatan rendah, kemampuan untuk mengakses ke pendidikan formal pun sulit dicapai.

Tabel II.43
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2018

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (%)					
	2015			2018		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	0,54	8,75	21,63	0,60	8,07	3,65
Belitung	1,05	10,39	16,62	0,00	5,62	3,76
Bangka Barat	0,21	6,64	16,08	0,77	13,47	6,67
Bangka Tengah	1,34	6,25	11,72	0,46	6,32	6,41
Bangka Selatan	0,83	7,46	21,93	0,37	7,98	23,05
Belitung Timur	2,27	12,58	9,45	0,00	7,68	13,01
Pangkal Pinang	0,00	4,25	11,51	0,00	7,73	3,67
Prov. Kep. Bangka Belitung	0,77	7,87	15,92	0,37	8,11	7,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

APTS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi terutama untuk tingkat Sekolah Menengah yang dapat diamati pada tabel diatas. Tahun 2018 APT SMP meningkat dari 7,87 di tahun 2015 menjadi 8,11 persen di tahun 2018 berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 8 sampai 9 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 8 anak yang putus sekolah. Sementara itu APK SMA menunjukkan penurunan cukup besar dari 15,92 persen tahun 2015 menjadi 7,87 persen ditahun 2018, namun demikian angka ini juga terbilang tinggi mengingat secara rata-rata dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 7 sampai 8 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 7 anak yang putus sekolah. APTS SD sangat baik dari 0,77 persen tahun 2015 menjadi 0,37 persen di tahun 2018 yang berarti bahwa secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 0 sampai 1 anak yang putus sekolah.

Untuk tingkat Kabupaten/kota, APTS cukup tinggi terutama untuk tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2016, APTS tertinggi SMP ada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 13,47 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 13 sampai 14 anak putus sekolah untuk usia 13-15 tahun. Sementara kabupaten lainnya berkisar antara 5 sampai 8 anak yang putus sekolah. sementara untuk APTS SMA, persentase tertinggi ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 23,05 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah

terdapat ada 23 sampai 24 anak putus sekolah dan cenderung 23 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Disusul Kabupaten Belitung Timur sebesar 13,01 persen yang berarti berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 13 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Sementara di Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan APTS SMA cukup rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu masing-masing 3,76 persen dan 3,67 persen yang menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak merata untuk SMA yang berlokasi jauh dari pusat kota.

4) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS juga merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia tertentu di suatu daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Tabel II.44
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)) 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
1.3	APS 7-12 tahun	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
2.3	APS 13-15 tahun	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
3.3	APS 16-18 tahun	65,9	52,13	51,37	54,58	52,52
4.	DIPLOMA/PERGURUAN TINGGI					
4.1	Jumlah murid usia 19-24 tahun	10.072	3.516	19.446	19.633	20.524
4.2	Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun					160.473
4.3	APS SMA/MA 19-24 tahun	-	-	-	-	15.99

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Pada tabel II.44 di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah.

Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah, artinya hampir separuh (47,48 persen) penduduk usia 16-18 tahun tidak bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena faktor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya.

5) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Sementara itu, Angka Partisipasi Murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan.

Tabel II.45
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI/Paket A					
	APK SD/MI/Paket A	113.22	111.07	111.75	110.58	111.15
	APM SD/MI/Paket A	96.49	96.82	96.33	96.07	97.71
2.	SMP/MTs/Paket B					
	APK SMP/MTs/Paket B	85.52	87.60	84.38	84.53	85.93
	APM SMP/MTs/Paket B	71.83	69.28	68.57	70.30	73.96
3.	SMA/MA/SMK/Paket C					
	APK SMA/MA/SMK/Paket C	75.51	76.41	79.10	82.88	82.21

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	56.93	44.32	48.63	53.47	57.86

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai jenjang pendidikan walau menunjukkan peningkatan dari 2014-2018 (lihat tabel II.45). Dari besaran APK dan APM yang dicapai, baru APK & APM pada jenjang SD/MI yang dikatakan berhasil. Sementara pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK menunjukkan tidak saja belum semua anak bersekolah, namun juga banyak anak bersekolah kurang atau lebih dari usia ideal. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, atau berdomisili di luar zona daerah di mana sekolah berada.

a. Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan APK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 dapat diamati pada Tabel II.46-48 dibawah ini. APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, dan APK SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren menurun sejak 2014.

Tabel II.46

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Tahun 2014/2018
Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SD/MI/Paket A				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	120.75	111.44	111.42	114.19	109.13
2	Belitung	119.73	109.56	116.51	108.60	110.75
3	Bangka Barat	105.60	111.46	111.99	114.43	114.96
4.	Bangka Tengah	110.60	114.15	112.45	109.57	108.58
5.	Bangka Selatan	106.73	106.13	108.34	103.36	115.77
6.	Belitung Timur	116.17	115.99	114.40	115.79	108.67
7.	Pangkalpinang	111.73	110.16	109.63	108.47	109.79
Prov. Kep. Bangka Belitung		113.22	111.07	111.75	110.58	111.15
Indonesia		109.05	110.50	109.31	108.50	

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Secara keseluruhan pada tahun 2018, APK SD/MI di 7 Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikatakan berhasil. Artinya anak berusia SD/MI telah bersekolah seluruhnya. Dan apabila dilihat dari peringkat secara nasional posisi APK SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (111.15) masih di atas APK Nasional (108.50).

Tabel II.47

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2014/2018
Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

No	Kabupaten/Kota	SMP/MTs/Paket B				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	79.22	89.30	86.45	88.77	90.68
2	Belitung	80.45	84.68	92.63	100.60	92.20
3	Bangka Barat	85.15	95.40	71.21	69.45	72.01
4.	Bangka Tengah	82.55	90.10	94.71	92.20	88.75
5.	Bangka Selatan	81.36	85.28	82.76	81.93	85.91
6.	Belitung Timur	88.75	82.56	79.73	81.74	88.69
7.	Pangkalpinang	83.59	83.88	80.40	76.22	80.94
Prov. Kep. Bangka Belitung		85.52	87.60	84.38	84.53	85.93
Indonesia		76.35	91.17	90.12	90.23	

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Sementara untuk APK jenjang SMP/MTs, APK tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung (92,20) dan Kabupaten Bangka (90,68), APK terendah dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat (72,01). Dari 7 kabupaten/kota, hanya 2 (dua) kabupaten memiliki APK di atas rata-rata nasional, sementara lima kabupaten/kota APK nya masih di bawah rata-rata nasional. Sementara untuk tingkat provinsi, APK Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 masih di bawah rata-rata nasional.

Tabel II.48

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Paket C Tahun 2014/2018
Menurut kabupaten/kota/Provinsi Kepulauan Bangka Belitung/Nasional

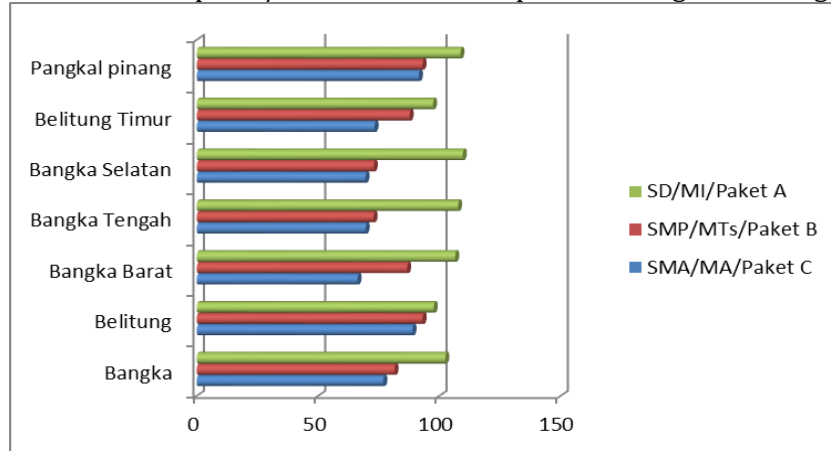
No	Kabupaten/Kota	SMA/MA/Paket C				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	79.86	80.33	95.24	96.91	120.95
2	Belitung	70.62	75.65	58.95	62.75	69.55
3	Bangka Barat	73.98	65.46	83.92	93.09	71.46
4.	Bangka Tengah	71.92	79.90	67.33	78.07	71.98
5.	Bangka Selatan	68.90	48.81	75.17	73.65	48.47
6.	Belitung Timur	64.50	78.59	74.46	75.97	72.75
7.	Pangkalpinang	91.57	102.39	92.46	92.29	95.75
Prov. Kep. Bangka Belitung		75.51	76.41	79.10	82.88	82.21
Indonesia		75.53	78.02	80.89	82.84	

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2018

Untuk Jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka (120.95), dan terendah Kabupaten Bangka Selatan (48,47). Dari 7 kabupaten/kota, hanya 2 (dua) kabupaten/kota yang berada di atas rata-rata provinsi (82,21) yaitu Kabupaten Bangka (120.95), Kota Pangkalpinang (95,75), dan hanya 2 (dua) kabupaten/kota yang APK SMA/MA/SMK/Paket C nya di atas rata-rata nasional. Sementara 5 kabupaten lainnya memiliki APK SMA/MA/SMK/Paket C di bawah rata-rata nasional.

Grafik II.9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2018
Menurut kabupaten/kotase-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



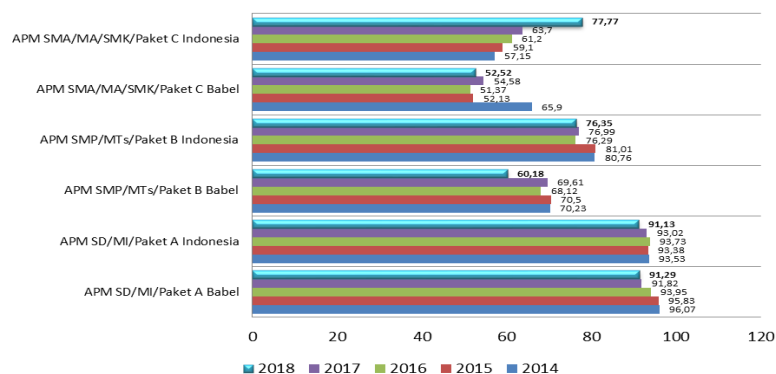
Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, 2019

Pada tahun 2018, khusus capaian kabupaten/kota, APK SMA/MA/SMK/Paket C tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka (120,95), terendah Kabupaten Bangka Selatan (48,47). APK SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung (92,20), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Barat (72,01). Sementara untuk jenjang APK SD/MI/Paket A capaian tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan (115,77), terendah oleh Kabupaten Bangka Tengah (108,58).

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan angka partisipasi murni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2018 dapat diamati pada Grafik II.10 dan Tabel II.49. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B, dan angka partisipasi murni SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren menurun sejak 2014, berbeda dengan perkembangan angka partisipasi murni Nasional, yang menunjukkan tren meningkat pada semua jenjang pendidikan dari 2014. Pada tahun 2018, hanya angka partisipasi murni SD/MI/Paket A yang berada di atas rata-rata Nasional, sementara angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B dan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C, capaiannya di bawah rata-rata nasional.

Grafik II.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APM)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2014-2018



Sumber : diolah dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Tabel II.49
Perkembangan APM Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A	138,240	143,072	141,586	143,980	143,136
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143,890	149,300	150,700	156,800	156,800
	APM SD/MI/Paket A	96.07	96.82	96.33	96.07	97.71
2.	SMP/MTs					
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B	48,886	50,827	49,590	51,369	44,415
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69,610	72,100	72,800	73,800	73,800
	APM SMP/MTs/Paket B	70.23	69.28	68.57	70.30	73.96
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C	36,337	37,172	36,731	39,245	37,763
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75,900	71,300	71,500	71,900	71,900
	APM SMA/MA/SMK/Paket C	65.9	44.32	48.63	53.47	57.86

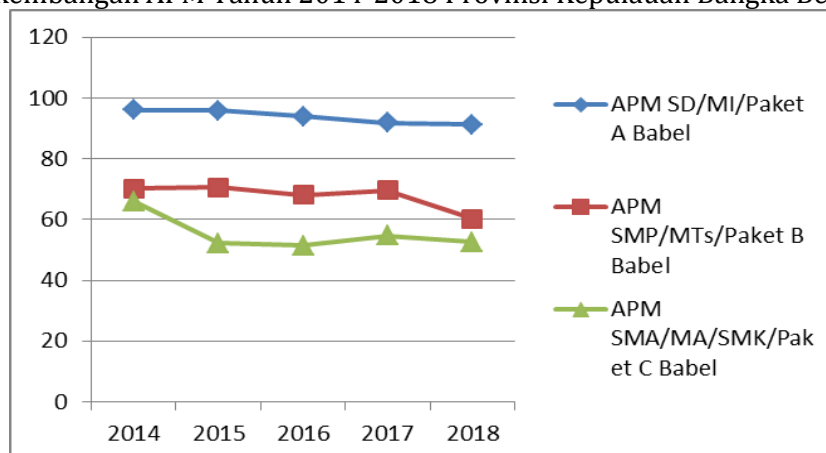
Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2019

Perkembangan angka partisipasi murni pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dapat dilihat tabel II.50. Angka partisipasi murni SD/MI yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Bangka Barat. Sementara angka partisipasi murni SMP/MTs paling tinggi diperoleh Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan angka partisipasi murni SMA/SMK/MA paling tinggi terdapat pada Kota Pangkalpinang. Sedangkan Grafik II.11 menunjukan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dalam kurun waktu tahun 2014-2018 pada jenjang tingkat pendidikan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C.

Gafik II.11

Perkembangan APM Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Tabel II.50

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

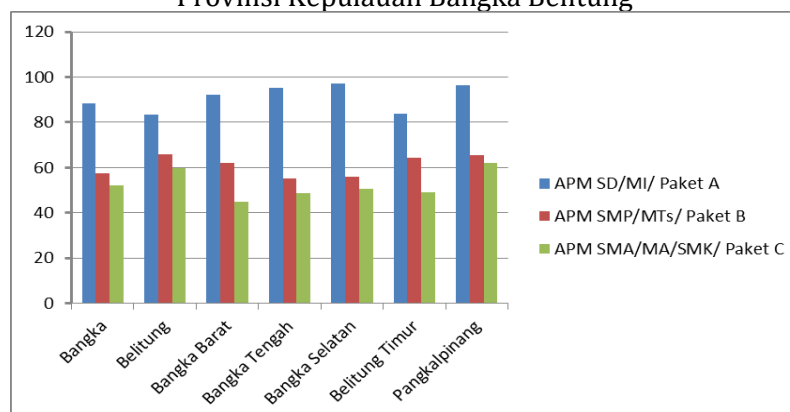
No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI/Paket A	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs/Paket B	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK/Paket C	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	31.354	35.464	94,58	9.649	16.826	74,12	8.089	15.530	65,38
2	Belitung	16.474	19.732	99,13	5.786	8.789	79,72	4.890	8.190	50,73
3	Bangka Barat	19.681	21.319	100	5.779	9.295	66,43	4.459	9.944	53,22
4	Bangka Tengah	22.050	23.154	97,88	5.775	10.435	69,05	4.923	10.120	53,92
5	Bangka Selatan	21.468	22.101	96,95	6.472	11.585	73,88	4.980	9.834	48,47
6	Belitung Timur	11.123	13.254	98,46	3.915	6.084	81,09	3.481	7.076	61,51
7	Pangkalpinang	20.986	21.776	99,18	7.059	10.786	75,13	6.941	11.206	68,68
Prov. Kep. Bangka Belitung		143.136	156.800	97,71	44.415	73.800	73,96	37.763	71.900	57,86
Indonesia		22.494.720	27.843.400	91,13	7.633.842	13.440.400	76,35	7.418/348	13.305.400	77,77

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni pada tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/Paket B di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berada di atas rata-rata nasional, dimana APM SD/MI/Paket A sebesar 97,71, APM nasional (91,13), dan APM SMP/MTs/Paket B sebesar 73,96,

APM nasional (76,35). Hanya APM SMA/MA/SMK (57,86) yang berada jauh di bawah APM nasional (77,77).

Grafik II.12
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Khusus capaian kabupaten/kota, APM SD/MI/Paket tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Barat (100), terendah Kabupaten Bangka (94,58), APM SMP/MTs/Paket B tertinggi dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur (81,09), terendah diraih oleh Kabupaten Bangka Barat 66,43. Sementara untuk jenjang APM SMA/MA/SMK APM tertinggi dicapai oleh Kota Pangkalpinang (68,68), terendah oleh Kabupaten Bangka Selatan (48,47).

B. Kesehatan

1) Angka kelangsungan bayi hidup

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita diperlihatkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel II.51
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	5,53	6,73	7,54	9,58	7,43	8,23	1,52	2,37	3,30	4,09
2	Belitung	12,91	13,81	11,29	12,26	12,17	14,02	10,04	12,12	12,14	13,45
3	Bangka Tengah	5,74	6,74	7,37	8,38	6,63	7,14	6,52	8,35	4,76	6,62
4	Bangka Barat	7,61	7,87	6,46	7,86	6,46	6,46	5,11	6,01	6,04	7,76
5	Bangka Selatan	7,37	8,42	6,28	7,38	5,85	7,52	1,81	2,41	1,24	1,55
6	Belitung Timur	10,22	11,15	8,25	8,25	6,71	8,62	3,98	1,99	13,28	14,71
7	Kota Pangkalpinang	2,92	3,16	3,38	3,38	6,33	6,33	3,11	3,59	3,25	3,72
Prov. Kep. Bangka Belitung		6,92	7,78	7,05	8,13	7,22	8,07	4,21	5,03	5,44	6,50

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014 - 2018

Berdasarkan Tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2014–2018 di Kabupaten/Kota menunjukkan mengalami penurunan diakumulasikan dibagi jumlah Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2018 angka kematian bayi yang paling tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Belitung Timur yakni sebesar 13,28 sedangkan untuk angka kematian balita yang paling tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah yakni sebesar 1,85. Sedangkan pada tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 angka kematian bayi sebesar 5,44 dan balita sebesar 1,06. Angka kematian bayi dan balita tersebut mengalami kenaikan disebabkan karena pneumonia, diare serta penyebab-penyebab lainnya.

2) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 70,67. UHH tertinggi masih berada di Kota Pangkalpinang yakni 72,86 tahun pada tahun 2018 diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur yakni 71,59 tahun, Kabupaten Bangka Tengah 70,78 tahun, Kabupaten Bangka 70,73 tahun, Kabupaten Belitung 70,64 tahun, dan Kabupaten Bangka Barat 69,73 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,47 tahun. Apabila dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 hingga tahun 2018 UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan.

Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

Tabel II.52
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,47	70,48	70,52	70,56	70,73
Belitung	70,22	70,32	70,38	70,44	70,64
Bangka Barat	69,46	69,47	69,52	69,56	69,73
Bangka Tengah	69,98	70,28	70,38	70,49	70,78
Bangka Selatan	66,56	66,86	66,99	67,13	67,47
Belitung Timur	71,03	71,23	71,30	71,37	71,59
Pangkalpinang	72,31	72,51	72,57	72,64	72,86
Prov. Kep. Bangka Belitung	69,72	69,88	69,92	69,95	70,67

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

3) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebanyak 44 orang, angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan angka kematian ibu pada tahun 2017 yakni sebanyak 21 orang. Adapun penyebab langsung besar kecilnya angka kematian ibu antara lain adalah perdarahan,

eklampsia, infeksi dan lain-lain. Data terkait dengan angka kematian ibu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel II.53 berikut:

Tabel II.53
Angka Kematian Ibu menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Kematian Ibu (AKI)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	7	12	6	4	9
Belitung	4	3	4	6	6
Bangka Barat	6	6	5	4	7
Bangka Tengah	4	2	2	0	6
Bangka Selatan	4	3	0	2	7
Belitung Timur	1	1	2	1	4
Pangkalpinang	2	4	5	4	5
Prov. Kep. Bangka Belitung	28	31	24	21	44

Sumber: Pemutahiran Data Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2014 s.d 2018

4) Bayi dengan Gizi buruk

Gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun, akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak, serta disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh. Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana mengalami kurang gizi yang diketahui berdasarkan pengukuran antropometri seperti pertambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain. Menurut WHO, sebanyak 54 persen penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal.

Tabel II.54
Perkembangan Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah dan Gizi Buruk
Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
		BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk	BBLR	Gizi Buruk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka		39	194	23	179	16	169	7	196	4
2	Belitung		1	143	4	1387	7	158	6	196	7
3	Bangka Tengah		9	171	6	128	6	183	8	168	9
4	Bangka Barat		9	107	11	182	14	142	10	117	12
5	Bangka Selatan		5	119	10	128	7	125	10	111	11
6	Belitung Timur		2	123	6	117	4	115	13	119	10
7	Kota Pangkalpinang		3	113	10	117	21	145	17	120	11
	Prov. Kep. Bangka Belitung		68	970	70	998	75	1.037	71	1.027	64

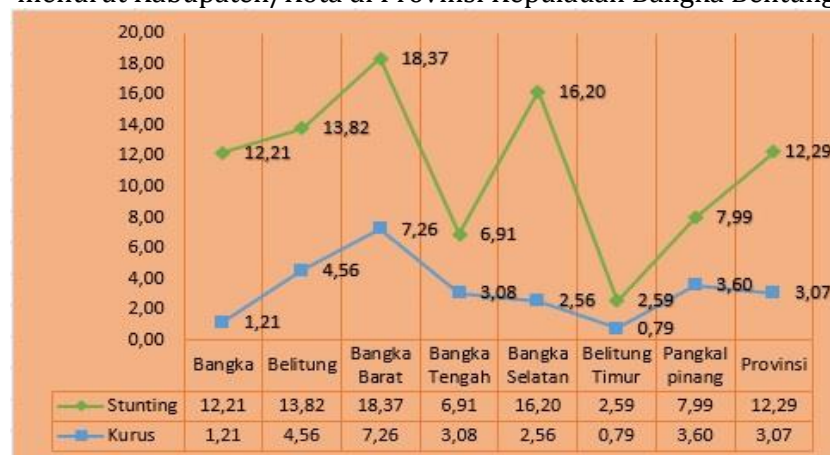
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel II.54 menjelaskan perkembangan perkembangan jumlah bayi berat lahir rendah dan gizi buruk dari tahun 2014 sampai dengan 2018, dimana untuk Tahun 2018 kasus Gizi Buruk paling tinggi di Bangka Barat dengan 12 kasus, sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka dengan 4 kasus. BBLR adalah neonatus dengan berat badan lahir pada saat kelahiran kurang dari 2500 gram (sampai 2499 gram) tanpa memandang masa kehamilan. Berat lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir. Untuk keperluan bidan di desa berat lahir diterima dalam 24 jam pertama setelah lahir. Terdapat 2 penyebab kelahiran bayi dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR), yaitu karena umur kehamilan kurang dari 37 minggu dan berat badan lebih rendah dari semestinya, sekalipun umur kehamilan cukup atau kombinasi keduanya.

5) Persentase *Stunting*

Grafik II.13

Persentase Bayi kurus dan Stunting Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Buku Saku Nasional PSG Tahun 2018

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih pendek (kerdil) dari standar usianya. Grafik II.13 menjelaskan kondisi persentase balita kurus dan stunting untuk tahun 2018, dengan balita kurus paling tinggi di Kabupaten Bangka Barat dengan persentase sebesar 7,26 persen dan yang paling rendah di Kabupaten Belitung Timur dengan 0,79 persen. Begitu pula dengan balita stunting paling tinggi di Bangka Barat sebesar 18,37 persen dan terendah di Belitung Timur sebesar 2,59 persen.

6) Penyakit Menular

Perkembangan jumlah kasus penyakit menular cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel II.55

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	HIV	DBD	Diare	TB	Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	58	87	5.791	442	20
2	Belitung	23	127	652	325	0
3	Bangka Barat	21	301	1.458	166	119
4	Bangka Tengah	12	181	2.731	207	29
5	Bangka Selatan	7	33	2.304	194	7
6	Belitung Timur	7	17	536	118	12
7	Kota Pangkalpinang	45	162	1.563	453	5
Prov. Kep. Bangka Belitung		173	908	15,035	1.903	192

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Kasus tertinggi adalah diare (26.938 kasus). Sementara kasus HIV terendah, tetapi jumlah secara absolute relative sudah besar.

7) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif, yaitu dari 5,25 persen pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan tahun 2014 menjadi sebesar 4,97 persen dan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 5,30 persen. Kenaikan ini cenderung dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas.

Tabel II.56

Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	70,90	67,23	66,62	71,07	76,20
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	427.081	469.814	488.701	564.391	607.927
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,62	0,60	0,90	0,75	0,56

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Memperhatikan Tabel II.57, sepanjang periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan kota dan tingkat kemiskinan desa sebesar 3 dan 7,92 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana tingkat kemiskinan kota 2,67 dan tingkat kemiskinan desa 7,57. Disamping itu, kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

Tabel II.57
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,47	3,04	2,77	2,67	3.00
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,97	6,84	6,83	7,57	7.92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.58, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

Tabel II.58
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5.57	5.40	5,20	5,63	5,52
Belitung	7.26	8.48	7,36	8,38	7.85
Bangka Barat	3.72	3.26	3,15	3,08	2,74
Bangka Tengah	5.77	5.46	3,27	5,67	5,64
Bangka Selatan	4.4	4.01	3,87	3,74	3,62
Belitung Timur	7.43	6.90	6,68	7,33	6,99
Kota Pangkalpinang	4.29	4.15	4,04	4,97	5,02
Prov. Kep. Bangka Belitung	5.37	5.25	4,97	5,40	5,22

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel II.59, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah diantara provinsi lain yaitu 5,3 persen pada tahun 2017. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera.

Tabel II.59
Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017
Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	855,71	837,42	859,41	841,31	829,80
Sumatera Utara	1.390,80	1.360,60	1.508,14	1.452,55	1.320,57
Sumatera Barat	380,63	354,74	349,53	376,51	359.99
Riau	522,53	498,28	562,92	501,59	496.39
Jambi	281,57	281,75	311,56	290,81	278.61
Sumatera Selatan	1108,21	1.085,80	1.112,53	1.096,50	1086.76

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bengkulu	320,41	316,50	322,83	325,60	302,62
Lampung	1134,28	1.143,93	1.100,68	1.139,78	1083,74
Kepulauan Bangka Belitung	70,90	67,23	66,62	71,07	76,20
Kepulauan Riau	125,02	124,17	114,83	119,14	128,43

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu berdasarkan data penduduk miskin di Pulau Sumatera tahun 2014-2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu memiliki persentase penduduk miskin paling rendah di Pulau Sumatera mengungguli sembilan provinsi lainnya.

Tabel II.60
Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2014-2018

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	18,05	17,08	16,73	16,89	16,01
Sumatera Utara	9,38	10,53	10,35	10,22	9,22
Sumatera Barat	7,41	7,31	7,09	6,87	6,65
Riau	8,12	8,42	7,98	7,78	7,39
Jambi	7,92	8,86	8,41	8,19	7,99
Sumatera Selatan	13,91	14,25	13,54	13,19	12,80
Bengkulu	17,48	17,88	17,32	16,45	15,43
Lampung	14,28	14,35	14,29	13,69	13,36
Kepulauan Bangka Belitung	5,36	5,40	5,22	5,20	5,25
Kepulauan Riau	6,70	6,24	5,98	6,06	6,40

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

8) Rasio penduduk yang bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama lima tahun (2014-2018) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif. Melonjak secara dramatis ditahun 2016 pada angka 0,97 kemudian menurun kembali pada tahun 2017 berada diangka 0,96 dan berlanjut hingga tahun 2018.

Tabel II.61
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	973.192	998.120	1.022.955	1.047.683	1.073.861
2.	Angkatan Kerja	636.959	665.842	705.173	699.017	727.918
3.	Penduduk yang Bekerja	604.223	623.949	686.830	672.618	701.366
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0,95	0,94	0,97	0,96	0,96

Sumber: Sakernas, (Agustus), 2018

Berdasarkan Tabel II.61 dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, Angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel II.62
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2014 s.d 2018 Prov. Kep. Bangka Belitung

Tahun	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja				Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TKPK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja /AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya	Jumlah BAK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2014	604,223	32,736	636,959	94.86	81,426	225,100	29,707	336,233	973,192	65.45
2015	623,949	41,893	665,842	93.71	75,602	220,803	35,873	332,278	998,120	66.71
2016	686,830	18,343	705,173	97.40	66,849	216,542	34,391	317,782	1,022,955	68.93
2017	672,618	26,399	699,017	96.22	80,170	235,882	32,614	348,666	1,047,683	66.72
2018	701,366	26,552	727,918	96.35				333,099	1,061,017	68.61

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tabel II.63
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,09	66.71	68,93	66,72	67.79
2.	Tingkat Pengangguran	5.14	6.29	2,60	3,78	3.65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus 2018)

Dari Tabel II.63, tren TPAK dari tahun 2014-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 sebesar 66,71 persen dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,93 persen. Namun turun kembali di tahun 2017 menjadi 66,72 persen sedangkan ditahun 2018 naik ke angka 67,79 persen.

Pada tahun 2018 struktur penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bekerja menurut lapangan pekerjaan sektor primer mengalami penurunan dari tahun 2017, hal ini dipengaruhi dengan adanya penurunan pada lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan pada lapangan pertambangan dan penggalian cenderung stagnan. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier mengalami peningkatan dari tahun 2017. Lapangan pekerjaan yang

masih dominan selain pertanian adalah perdagangan yang mengalami peningkatan dari angka 17,48 di tahun 2017 menjadi 18,81 pada tahun 2018.

Tabel II.64

Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2014 s.d 2018 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sektor Primer :					
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	31,41	36,63	32,13	32,56	30,99
2. Pertambangan dan Penggalian	17,5	10,47	10,81	13,59	13,65
Sektor Sekunder:					
3. Industri Pengolahan	5,88	5,75	8,17	6,56	7,05
4. Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,21	0,61	0,91	0,46	0,53
5. Bangunan	5,16	4,61	3,21	5,28	5,08
Sektor Tersier:					
6. Perdagangan	20,45	17,55	19,21	17,48	18,81
7. Transportasi dan Pergudangan	2,86	2,62	2,39	2,04	1,74
8. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,19	3,14	4,07	3,54	3,9
9. Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat	14,35	1,49	1,32	1,7	1,65
10. Jasa Perusahaan		0,98	1,04	0,75	0,97
11. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		5,48	5,28	6,37	6,33
12. Jasa Pendidikan		4,26	5,01	3,75	3,96
13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1,64	1,18	1,91	1,54
14. Jasa Lainnya		2,99	4,6	4,01	3,82
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1) Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata.

Tabel II.65
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	1,34	1,69	1,65	1,72	1,68
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0079	0,0078	0,007604	0,0074	0,0073

*Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000. Sumber: SKPD yang menangani urusan*

Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal yang tergambarkan pada Tabel II.65.

Berdasarkan data perkembangan Grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2011-2015 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup kesenian dimana tahun 2011 sebesar 1,34 meningkat tahun 2012 menjadi 1,69 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 1,65. Pada tahun 2014 kembali meningkat dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,72 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 1,68.

Tabel II.66
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Bangka	0,503	0
2.	Kab. Belitung	0,328	0
3.	Kab. Bangka Barat	0,167	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0,138	0,051
5.	Kab. Bangka Selatan	0,160	0
6.	Kab. Belitung Timur	0,306	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0,291	0
Jumlah		1,894	1

*Rumus : jumlah grup/klub : jumlah penduduk * 10.000*

Sumber: SKPD yang menangani urusan

B. Pemuda dan olahraga

1) Jumlah klub olahraga

Data yang diperoleh dari perangkat daerah yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepak bola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat adalah sebanyak 1.361 perkumpulan. Data tersebut terdiri dari 183 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 246 perkumpulan di Kabupaten Belitung, 246 perkumpulan Kabupaten Bangka Barat, 135 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 248 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 179 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 124 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Apabila dilihat dari jenis perkumpulannya, maka perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (613 perkumpulan), kemudian bola voli (451 perkumpulan), bulutangkis (118 perkumpulan), pencak silat (95 perkumpulan), bola basket (63 perkumpulan), dan atletik (21 perkumpulan).

Tabel II.67
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	2	2	2	2	3
2.	Kab. Belitung	2	2	2	2	3
3.	Kab. Bangka Barat	2	2	2	2	3
4.	Kab. Bangka Tengah	2	2	2	2	2
5.	Kab. Bangka Selatan	2	2	2	2	3
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	2
7.	Kota Pangkal Pinang	3	3	3	3	5
Prov. Kep. Bangka Belitung		15	15	15	15	21

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.67 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, Kota Pangkalpinang memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga atletik terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.68
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	34	40	40	64	64
2.	Kab. Belitung	66	80	110	120	123
3.	Kab. Bangka Barat	64	86	120	120	120
4.	Kab. Bangka Tengah	36	40	56	56	56
5.	Kab. Bangka Selatan	133	135	135	135	135

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	Kab. Belitung Timur	65	75	75	75	75
7.	Kota Pangkal Pinang	25	32	32	40	40
Prov. Kep. Bangka Belitung		423	488	568	610	613

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.68 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga sepakbola pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, Kabupaten Bangka Selatan memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga sepakbola terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun jumlahnya dari tahun ke tahun tidak mengalami pengurangan atau penambahan. Sedangkan Kabupaten Belitung mengalami penambahan jumlah perkumpulan paling banyak, yakni bertambah sebanyak 57 perkumpulan sejak tahun 2014.

Tabel II.69
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	9	39	25	38	47
2.	Kab. Belitung	10	56	70	76	83
3.	Kab. Bangka Barat	23	45	64	75	80
4.	Kab. Bangka Tengah	15	49	52	48	43
5.	Kab. Bangka Selatan	20	65	76	78	82
6.	Kab. Belitung Timur	10	46	65	78	81
7.	Kota Pangkal Pinang	39	45	47	40	35
Prov. Kep. Bangka Belitung		126	345	399	433	451

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.69 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola voli pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018, Kabupaten Belitung memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga bola voli terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 83 perkumpulan.

Tabel II.70 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bola basket pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangka menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami peningkatan

jumlah perkumpulan cabang olahraga bola basket. Sedangkan 4 kabupaten dan 1 kota lainnya mengalami penurunan.

Tabel II.70
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	25	25	27	28	30
2.	Kab. Belitung	10	4	4	7	7
3.	Kab. Bangka Barat	7	4	4	4	4
4.	Kab. Bangka Tengah	7	7	7	7	7
5.	Kab. Bangka Selatan	3	3	3	3	3
6.	Kab. Belitung Timur	10	5	5	5	5
7.	Kota Pangkal Pinang	10	10	10	9	7
Prov. Kep. Bangka Belitung		72	58	60	63	63

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.71 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga bulutangkis pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga bulutangkis terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 21 perkumpulan. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki perkumpulan cabang olahraga bulutangkis paling sedikit se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni hanya sebanyak 10 perkumpulan.

Tabel II.71
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	15	10	13	16	16
2.	Kab. Belitung	19	13	14	18	20
3.	Kab. Bangka Barat	10	19	20	20	21
4.	Kab. Bangka Tengah	20	4	8	16	18
5.	Kab. Bangka Selatan	59	6	10	12	15
6.	Kab. Belitung Timur	15	3	5	9	10
7.	Kota Pangkal Pinang	20	14	15	17	18
Prov. Kep. Bangka Belitung		158	69	85	108	118

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.72 menunjukkan jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2018, Kabupaten Bangka memiliki jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat terbanyak se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebanyak 23

perkumpulan. Kabupaten Bangka Tengah merupakan satu-satunya kabupaten yang mengalami pengurangan jumlah perkumpulan cabang olahraga pencak silat.

Tabel II.72
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	19	19	19	23	23
2.	Kab. Belitung	10	10	10	10	10
3.	Kab. Bangka Barat	16	16	18	18	18
4.	Kab. Bangka Tengah	10	10	7	7	9
5.	Kab. Bangka Selatan	9	9	10	10	10
6.	Kab. Belitung Timur	6	6	6	6	6
7.	Kota Pangkal Pinang	16	18	19	19	19
Prov. Kep. Bangka Belitung		86	88	89	93	95

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2) Jumlah Gedung olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia sebagai bagian dari pelaku pembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2018 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ±50 ha untuk pembangunan *Sport Center*, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Tabel II.73
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah gedung Olahraga	10	10	10	10	12
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	1730	1731	1731	1732	1732

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu banyak, dimana jumlah gedung olahraga sebanyak 12 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2018 sebanyak 1.732 buah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib

A. Urusan Pendidikan

1) Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi juga menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2014 s/d 2018 disajikan pada Tabel II.74.

Tabel II.74
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	138.240	143.072	141.586	143.980	143.136
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	143.890	149.300	150.700	156.800	156.800
1.3	APS 7-12 tahun	96,07	95,83	93,95	91,82	91,29
2.	SMP/MTs					
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	48.886	50.827	49.590	51.369	44.415
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69.610	72.100	72.800	73.800	73.800
2.3	APS 13-15 tahun	70,23	70,5	68,12	69,61	60,18
3.	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah murid usia 16-18 tahun	36.337	37.172	36.731	39.245	37.763
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	75.900	71.300	71.500	71.900	71.900
3.3	APS 16-18 tahun	65,9	52,13	51,37	54,58	52,52
4.	DIPLOMA/PERGURUAN TINGGI					
4.1	Jumlah murid usia 19-24 tahun	10.072	3.516	19.446	19.633	20.524
4.2	Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun					160.473
4.3	APS SMA/MA 19-24 tahun	-	-	-	-	15.99

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, 2018

Pada tabel II.74 di atas Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 91,29 persen. Hal ini berarti masih ada 8,71 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah.

Sedang untuk APS penduduk usia 13-15 tahun baru 60,18 persen yang bersekolah, dan masih terdapat 39,82 persen yang tidak bersekolah. Untuk penduduk 16-18 tahun baru 52,52 persen yang bersekolah. Mengingat tingginya penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah. Untuk itu perlu dilakukan analisis penyebab rendahnya APS, apakah karena faktor budaya, kemiskinan, geografi, atau yang lainnya, sehingga bisa diambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembangunan sarana prasarana sekolah, membangun infrastruktur dasar, atau yang lainnya

2) Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2014-2018 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

Tabel II.75
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah gedung sekolah	812	830			846
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	148.649	151.846			161.477
	Rasio	54,63	54,66			52,39
2.	SMP/MTs					
	Jumlah gedung sekolah	232	244			258
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	72.284	73.840			78.522
	Rasio	32,10	33,04			32,86
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah gedung sekolah	139	139			152
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	71.981	73.531			78.192
	Rasio	19,31	18,90			19,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2018 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.76.

Tabel II.76
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah s.d 2018
menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7- 12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13- 15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	189	36.559	51.70	60	17.866	33.58	36	17.548	20.52
2	Belitung	122	20.331	60.01	32	10.315	31.02	16	10.291	15.55
3	Bangka Barat	138	23.862	57.83	46	10.976	41.91	23	10.595	21.71
4.	Bangka Tengah	101	21.915	46.09	30	10.771	27.85	17	10.908	15.58
5.	Bangka Selatan	98	24.372	40.21	38	11.713	32.44	22	11.428	19.25
6.	Belitung Timur	106	13.690	77.43	25	6462	38.69	16	6275	25.50
7.	Pangkalpinang	92	20.749	44.34	27	10.419	25.91	22	11.150	19.73
Jumlah		846	161.477	52.39	258	78.522	32.86	152	78.192	19.44

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2018 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 40,21, tingkat SMP/MTS terendah di Kota Pangkalpinang yaitu 25,91 dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung yaitu 15,55, Sedangkan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2018 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur 77,43, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung Timur yaitu masing-masing 41,91 dan 25,5.

3) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid disuatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.77 berikut.

Tabel II.77
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SD/MI					
	Jumlah guru	9,303	9,701	9,283	8544	8665
	Jumlah murid	165,347	165,903	164,727	166610	168877
	Rasio	17.77	17.10	17.75	19.50	19.49
2.	SMP/MTs					
	Jumlah guru	3,839	4164	3920	3836	3883
	Jumlah murid	65,222	68,308	67,152	69,064	68,078

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rasio	16.99	16.40	17.13	18.00	17.53
3.	SMA/MA/SMK					
	Jumlah guru	3,463	3,615	3,544	3,451	3,600
	Jumlah murid	48,875	50,978	50,839	54,083	56,098
	Rasio	14.11	14.10	14.35	15.67	15.58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2014-2018, rasio guru dan murid tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu 19,50 pada Tahun 2017. Hal ini disebabkan jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang selalu meningkat sampai tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Tabel II.78
Jumlah Guru dan Murid Tahun s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	1,810	37,705	20.83	927	16,153	17.43	812	12,413	15.29
2	Belitung	1,118	19,356	17.31	448	8,388	18.72	429	7,361	17.16
3	Bangka Barat	1,407	25,535	18.15	607	9,244	15.23	468	7,413	15.84
4.	Bangka Tengah	1,123	23,388	20.83	469	9,103	19.41	404	6,673	16.52
5.	Bangka Selatan	1,204	24,895	20.68	555	8,939	16.11	458	6,744	14.72
6.	Belitung Timur	875	13,044	14.91	355	5,719	16.11	340	4,650	13.68
7.	Pangkalpinang	1,128	24,954	22.12	522	10,532	20.18	689	10,844	15.74
	Jumlah	8,665	168,877	19.49	3,883	68,078	17.53	3,600	56,098	15.58

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Berdasarkan Tabel II.78, rasio guru dan murid pada Tahun 2018 pada tingkat SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 22,12, tingkat SMP/MTs di Kota Pangkalpinang yaitu 20,18 dan tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Belitung yaitu 17,16.

B. Urusan Kesehatan

1) Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2014-2018, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di

setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.79.

Tabel II.79
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/kota	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	2	2	2	3	4
Belitung	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1
Prov. Kep. Bangka Belitung	8	8	8	9	10

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

2) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel II.80
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	7	9	10	10	10
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik Pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1	1
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	7	8	9	9	9
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	6	7	8	9	14
6.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	14	16	18	19	25
7.	Jumlah Penduduk	1.360.152	1.345.316	1.346.203	1.368.487	1.375.053
8.	Rasio	0.10	0.11	0.13	0.13	0.18

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 (*= RSUD)

Tabel II. 81 menunjukkan data Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang memiliki rasio paling tinggi yakni sebesar 0,044, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan memiliki rasio paling rendah yakni 0,010.

Tabel II.81
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/PO LRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bangka	4	0,012	1	0,003	-	-	3	0,009	2	0,006	10	0,030
2	Kab. Bangka Barat	1	0,005	-	-	-	-	1	0,005	2	0,010	4	0,020
3	Kab. Bangka Tengah	1	0,005	-	-	-	-	1	0,005	-	-	2	0,010
4.	Kab. Bangka Selatan	1	0,005	-	-	-	-	1	0,005	-	-	2	0,010
5.	Kab. Belitung	1	0,005	-	-	-	-	1	0,005	2	0,010	4	0,020
6.	Kab. Belitung Timur	1	0,008	-	-	-	-	1	0,008	-	-	2	0,016
7.	Kota Pangkalpinang	1	0,004	-	-	1	0,004	1	0,004	7	0,032	10	0,044
	Jumlah	10	0,04	35	0,00	-	-	9		7	0,03	34	0,150

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel II.82 di bawah ini. Pada tahun 2018 terdapat penambahan 1 (satu) puskesmas yaitu Puskesmas Perlang di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan 2 (dua) puskesmas pembantu di karenakan Kabupaten Bangka bertambah 2 (dua) pustu, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur berkurang 1 (satu) pustu, Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah bertambah 1 (satu) pustu.

Tabel II.82
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	12	12	12	12	12
2	Belitung	9	9	9	9	9
3	Bangka Tengah	8	8	8	8	9
4	Bangka Barat	8	8	8	8	8
5	Bangka Selatan	9	9	9	9	10
6	Belitung Timur	6	7	7	7	7
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	9
	Prov. Kep. Bangka Belitung	61	62	62	62	63

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.83 di bawah, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) pada tahun 2018 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun 2017, namun terdapat juga daerah yang mengalami penurunan seperti terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten

Belitung Timur. Dari 7 kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten yang realisasinya di bawah target indikator dan rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur yang tidak mencapai 75, sementara dua kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka yang berada di bawah rata-rata provinsi. Hanya Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Barat yang berada di atas rata-rata provinsi.

Tabel II.83

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	87,7	75,3	77,94	78,14	
2	Belitung	75,6	84,5	74,22	76,08	
3	Bangka Tengah	48,2	47,7	56,84	59,52	
4	Bangka Barat	87,4	83,7	89,46	88,82	
5	Bangka Selatan	76,4	59,6	74,75	73,62	
6	Belitung Timur	100	76,6	76,02	74,97	
7	Kota Pangkalpinang	92,0	87,7	88,70	94,38	
Prov. Kep. Bangka Belitung		80,2	73,7	77,64	78,66	

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Target eliminasi malaria di Bangka Belitung adalah sampai tahun 2020 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia serta dengan dukungan peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 tahun 2009 tentang eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mencapai Bangka Belitung bebas malaria diupayakan angka API < 1‰. Selama tiga tahun berturut-turut tidak ada kasus indigenous dengan sistem surveilans yang sudah baik. Pada tahun 2018 di seluruh provinsi ditemukan kasus malaria sebanyak 94 kasus atau mampu menekan kasus < dari 1/1000 penduduk, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2017 sebanyak 359 kasus. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menerima sertifikat eliminasi malaria sebanyak 5 sertifikat eliminasi malaria yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur.

Tabel II.84

Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2014 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0,48	0,21	0,13	0,05	0,07
2	Belitung	1,31	0,09	0,01	0,01	0,00
3	Bangka Tengah	2,28	0,19	0,36	0,24	0,12
4	Bangka Barat	0,98	0,74	0,09	0,00	0,053

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Bangka Selatan	1,63	0,30	0,17	0,16	0,04
6	Belitung Timur	0,98	0,05	0,07	0,00	0,10
7	Kota Pangkalpinang	0,31	5,18	0,92	0,01	0,03
Prov. Kep. Bangka Belitung		1,39	0,68	0,97	0,24	

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang dilaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan hasil surveilans kasus AIDS di rumah sakit, pada tahun 2018, laporan Kasus HIV direkapitulasi dari data SIHA online yang dikirim dari Kabupaten/Kota, laporan kegiatan konseling dan tes HIV yang dilakukan di layanan KTHIV di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di layanan Konseling dan Tes Sukarela jumlah yang positif HIV sebanyak 173 orang, jumlah kasus HIV meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV dimana peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang dilaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan. Jumlah kasus HIV/AIDS perKabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.85

Jumlah Kasus HIV Tahun 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	53	25	25	70	58
2	Belitung	234	27	27	31	23
3	Bangka Tengah	19	35	35	13	12
4	Bangka Barat	14	16	16	34	21
5	Bangka Selatan	15	0	0	8	7
6	Belitung Timur	3	4	4	3	7
7	Kota Pangkalpinang	67	65	65	111	45
Prov. Kep. Bangka Belitung		205	162	111	270	173

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014-2018

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2014-2018 mengalami kenaikan. Angka kasus paling tinggi di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 301 kasus. Pada tahun 2018, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka penurunan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur, dari 41 kasus pada 2017 menjadi 17 kasus pada 2018, sementara kabupaten yang terus mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2017 ke tahun 2018 adalah kabupaten Belitung, Bangka

Tengah dan Bangka Barat. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang berarti. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus* ini kerap menimbulkan kepanikan di masyarakat karena penyebarannya yang cepat dan potensinya menyebabkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit yang potensial untuk menimbulkan kejadian luar biasa. Penyakit Dengue (DBD) dapat menyerang semua umur, terutama anak-anak. Penyakit ini pun rawan menimbulkan kematian. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pencapaian keberhasilan pengendalian penyakit DBD mengacu pada indikator kinerja utama program pengendalian penyakit arbovirolosis adalah Kabupaten/Kota dengan *inciden rate* DBD ≤ 49 per 100.000 penduduk dan *cases fatality rate* (CFR) ≤ 1 persen.

Tabel II.86

Jumlah Kasus Penyakit DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	74	206	67	62	87
2	Belitung	36	114	158	2	127
3	Bangka Tengah	95	158	126	50	301
4	Bangka Barat	45	77	65	87	181
5	Bangka Selatan	55	89	24	45	33
6	Belitung Timur	9	26	12	41	17
7	Kota Pangkalpinang	18	77	38	52	162
Prov. Kep. Bangka Belitung		332	747	498	339	908

Sumber: *Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu; c. Hidup dalam lingkungan sehat dan; d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Tabel II.87

Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014		2015		2016		2017		2018	
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	12	36	12	33	12	35	12	33	12	35
2	Belitung	9	31	9	33	9	32	9	33	9	32
3	Bangka Tengah	7	18	8	19	8	20	8	19	9	20
4	Bangka Barat	8	19	8	18	8	19	8	18	8	19
5	Bangka Selatan	8	29	9	29	9	28	9	29	10	29
6	Belitung Timur	6	18	6	18	7	17	7	18	7	17
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	19	9	19	9	19	9	19
Prov. Kep. Bangka Belitung		61	169	61	169	62	170	62	169	63	171

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018

Tabel II.88

Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah	2014			2015				2016				2017				2018			
	U	G	Sp	U	G	Sp	Sp G	U	G	Sp	Sp G	U	G	Sp	Sp G	U	G	Sp	Sp G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	10	0	1	25	7	23	0	24	1	9	0	27	7	24	0	31	6	31	3
Bangka	61	9	16	82	17	47	3	68	25	40	0	107	21	27	0	25	6	35	0
Belitung	40	10	6	45	14	18	3	67	14	39	1	39	11	25	1	37	5	15	2
Bangka Tengah	44	7	5	47	11	6	0	39	9	7	1	46	10	20	0	44	1	8	0
Bangka Barat	36	7	3	42	5	7	0	48	9	7	0	65	10	8	0	19	3	22	2
Bangka Selatan	23	7	3	32	7	6	0	28	5	11	0	36	6	9	0	21	2	6	0
Belitung Timur	32	10	4	41	9	10	0	37	8	11	1	53	8	9	1	38	1	11	1
Pangkalpinang	56	19	42	69	25	44	5	75	24	46	5	80	22	28	3	40	7	30	3
Jumlah	292	69	83	383	95	161	8	386	95	179	8	453	95	150	5	255	31	158	11

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013-2018

Keterangan :

U : Dokter Umum G : Dokter gigi Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.88 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

3) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
2. Membudayakan NKKBS;
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Tabel II.89
Jumlah Posyandu Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Strata Posyandu				
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	15	44	71		228
2	Belitung	0	42	110		177
3	Bangka Barat	2	64	86		182
4	Bangka Tengah	13	96	29		138
5	Bangka Selatan	15	80			119
6	Belitung Timur	0	14			135
7	Pangkalpinang	0	27			116
Provinsi		45	367			1.095

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Penataan Ruang

Dari Tabel II.90 dapat diketahui bahwa total lahan yang dikategorikan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 20.688 ha atau 1,24 persen, total lahan yang dikategorikan kurang produktif seluas 1.187.155 ha atau 71,11 persen, dan total lahan tidak kritis seluas 461.576 ha atau 27,65 persen.

Tabel II.90
Total Luas Kelas Lahan Kritis Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Kelas Lahan Kritis(Ha)					
	Tidak kritis	Potensial kritis	Agak kritis	Kritis	Sangat kritis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	58.469	151.187	87.079	4.832		301.566
Bangka Barat	82.764	148.768	49.279	4.006	12	284.739
Bangka Selatan	63.503	221.296	79.855	4.630	191	369.475
Bangka Tengah	52.017	91.008	71.149	1.776	57	216.007
Belitung	93.307	86.806	44.995	977		226.084
Belitung Timur	106.771	89.947	59.569	4.189		260.476
Pangkalpinang	4.568	5.679	232			10.569
Jumlah	461.576	794.718	392.437	20.428	260	1.669.419

Sumber: Review Lahan Kritis Tahun 2018/BPDASHL Baturusa Cerucuk

Apabila dibandingkan dengan data kelas lahan kritis tahun 2014 yang dirilis oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat

disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan luas lahan kriteria kritis dan sangat kritis yang cukup signifikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2014, luas kelas lahan kriteria kritis adalah 140.887 ha dan luas kelas lahan kriteria sangat kritis adalah 112.879 ha sehingga masing-masing kriteria tersebut turun sebesar -85,50 persen dan -99,77 persen. Penurunan tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan luas lahan kriteria tidak kritis yang berlipat-lipat. Sementara itu, luas lahan kriteria potensial kritis menunjukkan peningkatan sebesar 27,25 persen dari 624.532 ha (Tahun 2014) menjadi 794.718 ha (Tahun 2018). Hal ini disebabkan oleh kondisi alami lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian besar berupa rawa-rawa.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel II.91 berikut.

Tabel II.91
Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang
Tahun 2013 s.d 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	-	20.98	20,17	20,17
Ketaatan terhadap RTRW	95.00	100.00	100.00	-	80.14	80,14	80,14
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	3.50	6.89	17.20	-	21	16,7	16,7
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	1	1	1	1

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Berdasarkan Tabel II.91 diatas, dapat terlihat persentase capaian luas kawasan lindung terhadap luas wilayah Bangka Belitung meningkat dari 11,57 persen menjadi 20,17 persen, begitu pula dengan persentase kawasan strategis yang dikembangkan meningkat sedikit dari 17,20 persen di tahun 2015 menjadi 20 persen ditahun 2019. Angka-angka tersebut berada diatas target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah menunjukkan penurunan sebesar 19,86 persen dan berada di bawah target RPJMD yaitu 100 persen.

Pada tahun 2016 dan tahun 2017 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

2) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2019 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel II.92 berikut:

Tabel II.92

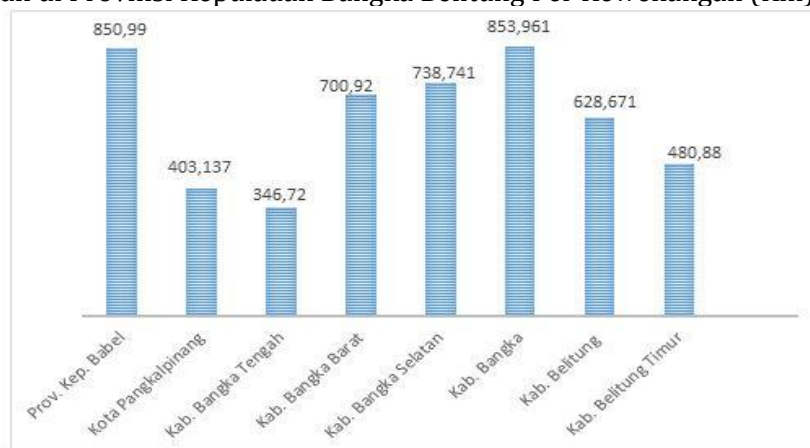
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Km) Tahun 2019

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis Permukaan		
	Diaspal	600,42	850,99
	Kerikil	0	0
	Tanah	0	0
2.	Kondisi Jalan		
	Baik	462,935	475,96
	Sedang	135,055	235,96
	Rusak	2,267	84,21
	Rusak Berat	0,163	54,86

Sumber: Dinas PUPR, 2019

Grafik II.14

Panjang Jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per Kewenangan (Km) Tahun 2019



Sumber: Dinas PUPR, 2019

Berdasarkan data diatas panjang jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sepanjang 850,99 Km dengan rincian terdapat 54,86 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak berat, 84,21 km kondisi jalan rusak, 235,96 km kondisi jalan dalam keadaan sedang dan 475,96 km kondisi jalan dalam keadaan

baik. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Tabel II.93

Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Meter), Tahun 2019

Jenis Kontruksi	Negara	Provinsi
(1)	(2)	(3)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu	64,9	0
2. Beton Bertulang	1646,60	2277,91
3. Rangka baja	1122,85	759,70
Jumlah/Total	2834,35	3037,61

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Tahun 2019

Berdasarkan data diatas, pembangunan jembatan yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sepanjang 3.037,61 Meter yang terdiri dari Kontruksi Jembatan Beton Bertulang sepanjang 2277,91 Meter sedangkan kontruksi jembatan dari Rangka Baja sepanjang 759,70 Meter.

D. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah bersanitasi, pengurangan kawasan kumuh, rumah tangga pengguna air bersih dan rumah layak huni. Gambaran mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.89.

Tabel II.94

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi, Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		Persentase Rumah Layak Huni		Persentase Kawasan Kumuh	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Bangka	91,67	94,99	98,11	98,50	98,01	98,01	0,02	0,03
Belitung	81,60	81,81	100,00	76,28	94,42	100,00	0,04	0,30
Bangka Barat	82,68	91,12	89,16	91,07	98,92	89,99	0,03	0,029
Bangka Tengah	90,05	92,10	80,32	82,63	97,13	97,98	0,02	0,30
Bangka Selatan	79,63	80,93	72,38	73,93	97,14	91,23	0,01	0,0094
Belitung Timur	69,39	74,01	76,22	84,47	54,53	58,89	0,04	0,0118
Kota Pangkalpinang	94,47	94,84	94,47	95,06	95,45	95,04	1,59	0,18
Prov. Kep. Bangka Belitung	84,21	87,11	87,24	85,14	89,91	90,16	0,25	0,12

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kep. Bangka Belitung, 2017-2018

Persentase rumah tangga bersanitasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 84,21 persen dan pada tahun 2018 sebesar 87,11 persen mengalami kenaikan sebesar 2,9 persen dengan Kabupaten/kota yang bersanitasi tertinggi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Bangka sebesar 94,99 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Belitung Timur dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 74,01 persen.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 87,24 persen dan pada Tahun 2018 sebesar 85,14 persen. Terjadi penurunan persentase penggunaa air bersih sebesar 3,1 persen dikarenakan banyaknya SPAM Pedesaan yang belum optimal penggunaannya. Pada tahun 2018, Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase rumah tangga pengguna air bersih tertinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 98,50 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 73,93 persen.

Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 89,91 persen dan pada tahun 2018 sebesar 90,16 persen mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen dengan persentase rumah layak huni kabupaten/kota tertinggi pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Belitung sebesar 100 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Belitung Timur dengan capaian sebesar 58,89 persen.

Persentase kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 sebesar 0,25 persen dan pada Tahun 2018 sebesar 0,12 persen. Terjadi penurunan luasan kumuh sebesar 0,12 persen. Pada tahun 2018, Kabupaten/kota yang memiliki nilai persentase kawasan kumuh tertinggi yaitu Kabupaten Belitung dan Bangka Tengah sebesar 0,30 persen dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan dengan capaian sebesar 0,0094 persen.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Salah satu pendukung ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja engan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel II.90 berikut ini.

Tabel II.95
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat(Linmas)	0,60/RT	0,65/RT	0,63/RT	0,70/RT	0,70/RT
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	-	91,87%	84,53%	86,13%	96,07
3	Cakupan pelayanan bencana	-	-	-	635	146

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	kebakaran kabupaten/kota					
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	31,65%	40,74%
5.	Persentase Penegakan PERDA	97,89%	94,38%	84,53%	88,98%	90,28

Sumber :Satuan Polisi Pamong PrajaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari tabel diatas, tergambar bahwa cakupan petugas perlindungan masyarakat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 0,70/RT, artinya jelas petugas linmas belum mencapai 1. saat ini jelas linmas sebanyak 3.554 sedangkan jumlah RT sebanyak 5.038. Indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun 2016-2018 belum mencapai 100 persen, artinya terdapat pelanggaran Tibumtranmas yang belum selesai ditindak. Untuk indikator waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2018 sebesar 31,65 dan sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun 2019 sebesar 40,74 persen, artinya belum semua kejadian wilayah kebakaran tertangani dalam waktu yang ditetapkan. Dari tabel diatas tergambar juga penegakan perda belum mencapai 100 persen, artinya masih ada pelanggaran perda yang belum berhasil ditindak.

Tabel II.96
Urusan Penunjang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	6 hr (60 JP)	6 hr (60 JP)	6 hr (60 JP)	6 hr (60 JP)	6 hr (60 JP)
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	-	380/5388 = 7,05	1014/5388 =18,82	680/5388 =12.62
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal	-	-	31,6	36,90	39,9
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	5,39	10,63	1,30	0,58	90
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	49	49	47	46	46
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	217	203	196	212	212
6	Jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah	495	613	2437	2502	2502
7	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	549	528	558	623	623

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah	2065	1941	2150	1946	1946

Dilihat dari tabel II.96 diatas diketahui rata-rata pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama 6 hari atau 60 JP. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun 2017 adalah 7,05 persen dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 18,82 persen. Sedangkan persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal (baik S1,S2, maupun S3) meningkat setiap tahunnya yakni 31,6 persen pada tahun 2017, dan 36,90 persen pada tahun 2018. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami fluktuatif yakni 5,39 persen pada tahun 2015, 10,63 persen pada tahun 2016, 1,30 persen pada tahun 2017, dan 0,58 persen pada tahun 2018.

Terkait jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah setiap tahunnya menurun sebagaimana terlihat pada tabel II.96 yakni sebanyak 49 pada tahun 2015 dan 2016, menjadi 47 pada tahun 2017 dan 46 pada tahun 2018. Sedangkan jumlah jabatan administrator pada instansi pemerintah pada tahun 2017, 2018, 2019 menurun dengan jumlah 217, 203, dan 196 namun pada tahun 2018 meningkat menjadi 212 jabatan. Untuk jumlah jabatan pengawas pada instansi pemerintah meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017-2018 dengan jumlah 495, 613, 2437, dan 2502 jabatan. Sementara untuk jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum pada instansi pemerintah sama-sama mengalami fluktuatif dengan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada tahun 2015 sebanyak 549, pada tahun 2016 sebanyak 528, pada tahun 2017 sebanyak 558, dan pada tahun 2018 sebanyak 623. Sedangkan jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada tahun 2015 sebanyak 2065, pada tahun 2016 sebanyak 1941, pada tahun 2017 sebanyak 2150, dan pada tahun 2018 sebanyak 1946 pemangku jabatan.

Tabel II.97
Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	-	-	80%	80%	83%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	60%	80%	87%
	Penerapan SIDA:					
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	55%	55%	70%
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	50%	70%	76%

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan baik di pusat maupun daerah. Kegiatan Kelitbangan yang diatur melalui Permendagri ini yaitu Kelitbangan Utama dan Kelitbangan Pendukung atau Penunjang. Pada tahun 2017 Kegiatan Kelitbangan yang dilakukan pada Bappeda Provinsi kepulauan Bangka Belitung melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Kelitbangan Utama terdiri kegiatan Penelitian/Kajian dan Inovasi dan Kelitbangan Pendukung/Penunjang yaitu Kegiatan Workshop Penguatan SDM Kelitbangan, Rapat Koordinasi Kelitbangan, Penyusunan Majalah Kelitbangan. Untuk Implementasi Rencana Kegiatan Kelitbangan yang dilakukan pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) Kegiatan kelitbangan atau 80 persen yaitu Penelitian/Kajian, Inovasi, Workshop Penguatan SDM dan Rapat Koordinasi Kelitbangan. Sedangkan pada tahun 2018 Implementasi Kegiatan Kelitbangan sebesar 80 persen sama dengan Kegiatan Kelitbangan pada tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan Implementasi Kegiatan Kelitbangan yaitu Lokakarya Penguatan Potensi Daerah sebagai bahan Inovasi Daerah (Kegiatan Kelitbangan Pendukung/Penunjang) sebesar 83 persen.

Untuk pemanfaatan hasil kelitbangan pada unsur kelitbangan utama yang terdiri dari 2 penelitian dan 1 inovasi dan sedangkan unsur kelitbangan pendukung/penunjang 2 publikasi penelitian tidak dilakukan pada tahun 2017 sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 60 persen. Untuk tahun 2018 terdapat peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 80 persen yaitu 2 (dua) penelitian, 1 (satu) inovasi dan 1 (satu) terpublikasi dari 2 (dua) penelitian. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 87 persen dengan pemanfaatan hasil kelitbangan yaitu 3 penelitian, 2 inovasidan 2 (dua) penelitian yang terpublikasi dari 3 (tiga) penelitian.

Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kinerja pemerintahan. Tugas dan fungsi Bappeda dalam hal ini bidang penelitian dan pengembangan menjadi fasilitasi dan koordinasi dalam mendorong dan mengawal perangkat daerah untuk melakukan inovasi yang nanti dapat diimplementasikan didalam pembangunan daerah. Untuk itu dari 36 perangkat daerah (Biro-Biro pada Sekretariat Daerah menjadi 1 Perangkat Daerah) pada tahun 2017 sebanyak 20 Perangkat Daerah atau 55 persen difasilitasi untuk mendorong terciptanya inovasi, sama halnya pada tahun 2018 sebanyak 55 persen atau 20 perangkat daerah didorong untuk menciptakan inovasi untuk diimplementasikan. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 70 persen atau 25 perangkat daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang termuat didalam dokumen RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pedoman didalam menciptakan inovasi yang akan dimuatkan didalam suatu arah kebijakan inovasi

yang dapat diterapkan untuk mendorong tercapainya program prioritas daerah. Pada tahun 2017 merupakan capaian awal dikarenakan tahun pertama perencanaan pembangunan daerah pada RPJMD 2017-2022 sehingga kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan melihat 13 program prioritas capaiannya sebesar 50 persen, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 70 persen dengan 9 dukungan inovasi yang mendukung program prioritas. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 76 persen dengan 10 dukungan inovasi yang mendukung program prioritas.

Capaian indikator kegiatan kelitbangan baik pada unsur kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung/penunjang perlu dilakukan peningkatan guna mendukung arah kebijakan daerah dalam hal perencanaan daerah dengan berpedoman dari kegiatan kelitbangan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2016 bahwa untuk penguatan kelitbangan pada Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan beberapa tenaga fungsional selain fungsional peneliti yaitu fungsional analisis kebijakan, fungsional prekayasa maupun fungsional lainnya sehingga dapat lebih maksimal didalam menjalankan tugas dan fungsi kelitbangan, selain itu juga belum adanya SDM yang memadai atau yang berkompeten baik dari kualitas maupun kuantitas untuk membentuk majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu untuk mengawal dan menjamin kualitas hasil penelitian guna merumuskan rekomendasi arah kebijakan daerah.

Tabel II.98
Urusan Penunjang Pengawasan

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK	95,7	89,22	86,02	68,62	81,63

Pada tahun 2018 untuk pertama kalinya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat itu merujuk pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017. Hal ini berhasil diraih setelah adanya implementasi dari rencana aksi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun meskipun sudah mendapat WTP, beberapa catatan masih diberikan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain terkait penyelesaian draf zonasi wilayah pesisir, jaminan pasca tambang, inventarisasi aset, dan kelebihan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Namun temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPD Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017. Pada tahun 2019, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dengan penekanan atas lain-lain pendapatan yang sah laporan operasional yang menjelaskan bahwa pendapatan hibah pengelolaan iuran penyelenggaraan pendidikan (IPP) pada sekolah menengah tingkat atas di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung belum dikelola dengan tertib. Ini merupakan kali kedua Pemerintah Provinsi memperoleh opini WTP atas pemeriksaan LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tindak lanjut temuan BPK, persentase rata-rata pertahunnya cukup baik, yaitu pada skala 68 persen hingga di atas 95 persen. Angka persentase ini dapat meningkat lagi jika temuan-temuan lama yang menyangkut masalah aset dapat segera diselesaikan.

Sekretariat DPRD provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Tipe sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang kecil.

DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
- b. Fungsi Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
- c. Fungsi Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD terdiri dari Penyampaian Raperda, Jumlah Pelaksanaan Sidang Paripurna Jumlah kajian tentang rancangan Perda yang disajikan pada tabel II.99. Data tersebut merupakan Renstra pada tahun periode 2012-2017 yang telah lalu. Data dalam 5 tahun terakhir adalah indikator utama yang telah diselesaikan

Tabel II.99
Urusan Penunjang Sekretariat Dewan

No	Indikator	2012		2013		2014		2015		2016*		2017		2018	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penyampaian Raperda	15	4	15	10	15		15	16 Perda (10 Perda Eksekutif dan 5 Perda Inisiatif serta 1 Perda Inisiatif tanpa Prolegda)	15		15		15	15
2	Jumlah Pelaksanaan Sidang Paripurna			41		27		30	37 Rapat (32 Rapat Biasa dan 5 Rapat Istimewa) atau 55,29%	30		30		15	15
3	Jumlah uji publik dengan rancangan Perda			2		2		2	0	2		2		n/a	n/a
4	Jumlah kajian tentang rancangan Perda	15	4	14		5		10	56,43%	10		10		n/a	n/a

Keterangan : T= Target; R= Realisasi

Untuk indikator penyampaian raperda, tahun 2012 ditargetkan sebesar 15 raperda namun hanya terealisasi 4 raperda. Hal ini disebabkan karena padatnya jadwal DPRD dan alotnya pembahasan raperda yang ada. Untuk indikator penyampaian raperda, tahun 2013 ditargetkan sebesar 15 raperda namun hanya terealisasi 10 raperda. Hal ini disebabkan karena padatnya jadwal DPRD dan alotnya pembahasan raperda yang ada. Untuk indikator penyampaian raperda, tahun 2015 ditargetkan sebesar 15 raperda dan terealisasi melebihi dari target yaitu 16 raperda. Untuk indikator penyampaian raperda, tahun 2018 ditargetkan sebesar 15 raperda dan terealisasi 15 raperda. Untuk Uji Publik Raperda pada tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan karena sudah termasuk didalam kegiatan Eksekutif.

Sedang Visi dan Misi Gubernur periode 2017- 2022 sudah berbeda, dengan kata lain, terjadinya perubahan terkait kebijakan serta indikator yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur melalui RPJMD. Untuk tahun 2020-2022 ada perubahan indikator, itu terjadi karena telah disesuaikan dengan perubahan RENSTRA dan RPJMD Perubahan yang telah dikoordinasi dan disetujui oleh beberapa stakeholder yang terkait.

Tabel II.100

No.	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022*	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan <i>Perubahan : Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD</i>	90 %	99.76%	90 %		90 %		90 %		90 %	
2	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD <i>Perubahan : Nilai LAKIP Sekretariat DPRD</i>	76 Predikat	74,01	76 Predikat		77 Nilai		77 Nilai		78 Nilai	
3	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya <i>Perubahan : Persentase meningkatnya Produk Hukum yang ditetapkan</i>	80 %	93,73%	80 %		80 %		80%		80%	

No.	Indikator	2018		2019		2020		2021		2022*	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>oleh Lembaga DPRD</i>										
4	Persentase Kesesuaian antar Informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler Dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95 %	158,33%	95 %		95 %		95%		95%	
5	Persentase ketersedianya sarana dan prasarana lembaga DPRD	75 %	99,30%	76 %		77 %		78%		80%	

Jika perubahan SOTK dan nomenkelatur telah dilaksanakan pada tahun 2020 ini, maka akan diikuti perubahan program dan indikator juga.

Tabel II.101

No.	Indikator	2020		2021		2022*	
		T	R	T	R	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase tingkat kepuasan dewan terhadap pelaksanaan kegiatan risalah, rapat dan publikasi			80 %		85 %	
2	Persentase peningkatan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	85%					
3	1. Persentase anggaran pendidikan terhadap APBD 2. Persentase anggaran kesehatan terhadap APBD			20 % 10 %		20 % 10 %	
4	Persentase peningkatan rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada eksekutif			30 %		60 %	

F. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan

kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.102 dimana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 38.506 orang, tahun 2015 sebesar 52.346 orang dan tahun 2016 turun menjadi 49.579.

Tabel II.102
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	29.177	38.506	43.968	52.346	49.579

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

G. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya angka pengangguran yang dilakukan melalui upaya penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan usaha yang ditandai dengan meningkatnya penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dan meningkatnya kualitas hidup serta peran perempuan.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatan penciptaan peluang lapangan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak. Dalam menggambarkan seberapa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.103, tren TPAK dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 sebesar 66,71 dan tahun 2016 naik menjadi 68,93 sedangkan tahun 2017 turun menjadi 66,72.

Tabel II.103

Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.45	66.71	68,93	66,72	67,79
2.	Tingkat Pengangguran	5.14	6.29	2,6	3,78	3,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Berdasarkan Tabel II.104, penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2017 terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar 219.002. Pada sektor sekunder di tahun 2017 mengalami penurunan di industri pengolahan, listrik, gas dan air dibandingkan tahun 2016 dan pada bangunan di tahun 2017 terjadi peningkatan. Sedangkan sektor tersier pada tahun 2017 terjadi peningkatan di industri perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan telekomunikasi, pada lapangan pekerjaan utama keuangan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel II.104

Data Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sektor Primer					
1.	Pertanian	178.107	189.774	228.578	220.658	219.002
2.	Pertambangan	121.104	105.754	76.399	78.856	91.438
	Sektor Sekunder					
1.	Industri Pengolahan	35.151	35.500	35.225	55.056	42.623
2.	Listrik, Gas dan Air	1.317	1.250	2.870	6.240	2.502
3.	Bangunan	34.101	31.168	28.787	22.041	35.520
	Sektor Tersier					
1.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	134.514	123.591	122.789	148.989	134.065
2.	Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	16.820	17.294	18.175	19.766	17.409
3.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	14.886	13.209	13.139	13.662	11.856
4.	Jasa Kemasyarakatan	87.848	86.683	97.987	121.562	118.203
	Prov. Kep. Bangka Belitung	623.758	604.223	623.949	686.830	672.618

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2017

Berdasarkan Tabel II.105 secara kewilayahan untuk melihat gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dapat diketahui melalui Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua Kabupaten Kota. Untuk tahun 2018 TPAK hampir diseluruh Kabupaten/Kota meningkat kecuali di Kabupaten Bangka yang menurun sebesar 1,65 point dari tahun 2017 yang berada di angka 65,75 persen. Angka TPAK tahun 2018 tertinggi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 71,93 persen dan terendah di Kota Pangkalpinang sebesar 63,64persen sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sebesar 67,79 persen.

Tabel II.105

Data TPAK Tahun 2014 s.d 2018 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	65,45	63,88	n/a	65,75	64,10
2.	Kab. Belitung	63.48	67,64	n/a	69,29	70,36
3.	Kab. Bangka Barat	67.12	65,47	n/a	68,17	70,47
4.	Kab. Bangka Tengah	62.48	66,48	n/a	69,26	70,99
5.	Kab. Bangka Selatan	67.08	70,32	n/a	64,7	67,40
6.	Kab. Belitung Timur	68.79	68,11	n/a	68	71,93
7.	Kota Pangkal Pinang	64.90	67,41	n/a	63,42	63,64
Prov. Kep. Bangka Belitung		65.45	66,71	68,93	66,72	67,79

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka dimana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang turun pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat dan untuk tahun 2016 penduduk yang bekerja sebanyak 686.830 orang.

Tabel II.106

Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2013 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	132.508	132.128	131.559	n/a	98.373
2.	Kab. Belitung	81.599	82.200	83.903	n/a	59.060
3.	Kab. Bangka Barat	88.601	84.219	86.480	n/a	62.668
4.	Kab. Bangka Tengah	73.376	74.102	79.971	n/a	61.775
5.	Kab. Bangka Selatan	82.739	88.740	94.575	n/a	63.483
6.	Kab. Belitung Timur	53.758	58.259	59.159	n/a	41.744
7.	Kota Pangkal Pinang	84.205	84.575	88.302	n/a	56.173
Prov. Kep. Bangka Belitung		596.786	604.223	623.949	686.830	443.276

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari Kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari Pemerintah Daerah. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Dari Tabel II.107, Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun terakhir menunjukkan trend fluktuatif sedangkan di tahun 2018 rata rata menunjukkan penurunan, hanya ada dua Kabupaten yang mengalami peningkatan yaitu Kabupaten Belitung meningkat sebesar 0,36 point menjadi 2,93 persen dan Kabupaten Bangka Selatan meningkat sebesar 1,61 point menjadi 4,35 persen. Untuk TPT tahun 2018 yang tertinggi di Kota Pangkalpinang sebesar 4,70 persen dan yang terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,50 sedangkan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,65 persen lebih rendah dari rata-rata Nasional dimana rata-rata nasional sebesar 5,34 persen.

Tabel II.107

Data Tingkat Pengangguran Tahun 2014 s.d 2017 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	8,36	8,87	n/a	4,29	4,12
2.	Kab. Belitung	3,03	4,57	n/a	2,57	2,93
3.	Kab. Bangka Barat	1,21	5,92	n/a	4,23	3,11
4.	Kab. Bangka Tengah	5,64	6,58	n/a	3,38	3,93
5.	Kab. Bangka Selatan	3,26	2,01	n/a	2,74	4,35
6.	Kab. Belitung Timur	2,61	2,55	n/a	2,62	1,50
7.	Kota Pangkal Pinang	8,84	10,64	n/a	5,8	4,70
Prov. Kep. Bangka Belitung		5,14	6,29	2,60	3,78	3,65

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan
- Dari 9 indikator Utama yang diukur
- Indikator Utama yang masuk kategori baik adalah Indikator Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- Indikator Utama

Tabel II.108

Komponen Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Indikator Utama	Indeks		
		2017	2018	2019
A.	Perencanaan Tenaga Kerja	8,70	6,65	7,22
1	Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	8,70	6,65	7,22
B.	Penduduk dan Tenaga Kerja	6,84	7,17	7,12
1	Persentase NEET (15-24 tahun)	0,83	1,00	0,98
2	Persentase Anak Yang Bekerja (10-17 tahun)	1,44	1,55	1,61
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00	2,81	2,84
4	Persentase Setengah Pengangguran	1,57	1,82	1,70
C.	Kesempatan Kerja	9,27	14,40	12,87
1	Persentase Tenaga Kerja Formal	2,66	5,42	5,16
2	Proporsi LPINP	2,15	3,00	2,56
3	Proporsi LPINP Laki-laki	1,90	2,25	2,08
4	Proporsi LPINP Perempuan	1,16	2,23	1,64
5	Proporsi LPIP	1,40	1,50	1,43
D.	Pelatihan dan Kompetensi Kerja	9,61	5,84	7,89
1	Tingkat Kapasitas Pelatihan Kerja	2,18	1,44	1,87
2	Tingkat Lulusan Pelatihan Kerja	6,00	3,51	4,56
3	Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	1,43	0,89	1,46
E.	Tingkat Produktifitas Kerja	3,57	6,62	3,97

No.	Indikator Utama	Indeks		
		2017	2018	2019
1	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	3,57	3,95	3,96
2	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	0,00	2,67	0,01
F.	Hubungan Industrial	3,73	2,81	3,13
1	Tingkat PP Yang disahkan	0,72	1,81	1,47
2	Tingkat PKB Yang Didaftarkan	0,20	0,41	0,43
3	Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	1,77	0,59	1,23
4	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	1,05	0,00	0,00
G.	Kondisi Lingkungan Kerja	2,19	2,97	3,83
1	Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	0,00	1,22	1,09
2	Tingkat Kecelakaan Kerja	1,46	1,51	2,63
3	Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	0,73	0,24	0,12
I.	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	6,93	8,06	7,79
1.	Proporsi Upah rata-rata per jam terhadap UMP per jam	6,93	8,06	7,79
J.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	7,98	8,72	10,00
1.	Tingkat Perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	4,00	4,00	4,00
2.	Tingkat Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif	3,98	4,72	6,00
Jumlah Indeks per tahun		58,83	63,23	63,82

Berdasarkan Tabel II.109, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 41.893 orang meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 32.736 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

Tabel II.109
Data Pengangguran Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	3.341	5.900	12.053	12.805	n/a
2.	Kab. Belitung	2.327	2.169	2.635	4.015	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	3.177	3.605	1.083	5.443	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	2.604	2.639	4.430	5.631	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	3.432	1.377	2.769	1.936	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	1.348	1.211	1.562	1.550	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	4.835	6.013	8.204	10.513	n/a
Prov. Kep. Bangka Belitung		22.064	22.657	32.736	41.893	18.343

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi

berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumber daya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia.

Tabel II.110 menunjukkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai IDG terbesar se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 68,21. Sedangkan Kabupaten Bangka Selatan memiliki nilai IDG terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 48,46.

Tabel II.110
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N0	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	59,40	62,01	61,32	47,84	62,20
2.	Belitung	48,56	40,16	52,00	52,72	48,48
3.	Bangka Barat	54,81	55,57	59,37	59,98	49,88
4.	Bangka Tengah	54,93	54,29	50,71	43,30	56,39
5.	Bangka Selatan	37,80	37,13	37,93	48,94	48,46
6.	Belitung Timur	50,11	63,33	63,04	55,54	68,21
7.	Kota Pangkal Pinang	56,10	55,44	55,22	43,35	57,17
Prov. Kep. Bangka Belitung		57,29	56,12	56,29	54,17	52,57

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel II.111 menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, Kota Pangkalpinang memiliki nilai IPG terbesar se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 93,94. Sedangkan Kabupaten Belitung Timur memiliki nilai IPG terendah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 67,36.

Tabel II.111
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	86,77	86,92	87,17	88,14	88,24
2.	Belitung	86,61	87,19	87,98	87,99	88,62
3.	Bangka Barat	88,11	88,56	88,71	89,41	88,92
4.	Bangka Tengah	90,28	90,60	90,61	90,83	91,04
5.	Bangka Selatan	82,17	82,52	82,83	83,48	83,54
6.	Belitung Timur	84,29	85,37	86,10	86,04	67,36
7.	Kota Pangkal Pinang	92,30	92,47	93,09	92,08	93,94
Prov. Kep. Bangka Belitung		87,73	87,74	88,37	88,93	89,15

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional, IDG masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 27 dari 34 Provinsi. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka angkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.112
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

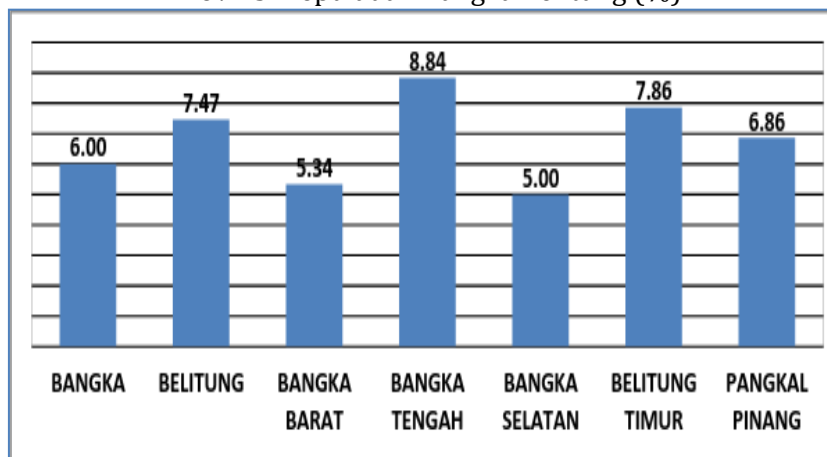
No (1)	Uraian (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4	4	5	4
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52	49	50	52
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199	191	188	207
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407	1.403	2.452	2.477
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467	246.913	271.604	298.764
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,66	0,63	0,42	0,90	0,82

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014 menjadi 0,63 di tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah menurut

Kabupaten/Kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel II.113 dan Grafik II.15 berikut:

Grafik II.15
Grafik Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan grafik II.115 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2014 berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,00.

Tabel II.113
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	2.761	46.031	6,00
2	Kabupaten Bangka Barat	1.609	30.123	5,34
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.415	28.303	5,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	1.807	20.447	8,84
5	Kabupaten Belitung	1.986	26.591	7,47
6	Kabupaten Belitung Timur	1.609	20.479	7,86
7	Kota Pangkalpinang	2.224	32.442	6,86
Jumlah		13.411	204.416	6,56

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.114
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah KDRT	115	88	79	46	50
2.	Jumlah Rumah Tangga	368.504	345.928	400.276	410.871	432.906
3.	Rasio KDRT	0,031	0,025	0,020	0,011	0,012

Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Berdasarkan Tabel II.114 jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dari 135 ditahun 2012 menjadi 88 di tahun 2015.

I. Urusan Pangan

Ketersediaan Pangan dapat bersumber dari produksi pangan lokal maupun mendatangkan dari luar daerah/negara. Ketersediaan pangan (terutama beras) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berasal dari luar daerah, hanya sebagian kecil yang merupakan produksi dari dalam daerah. Salah satu penyebab utama rendahnya kemampuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyediakan pangan dari produksi lokal adalah iklim dan jenis tanah yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Berdasarkan Tabel II.115 menjelaskan bahwa perbandingan antara kebutuhan beras/tahun (ton) dengan kemampuan produksi bersih beras lokal (ton). Angka Kebutuhan Beras di tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 122.191 ton dari 121.876 ton di tahun 2017, hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk. Untuk produksi beras lokal terdapat peningkatan menjadi 32.727 ton di tahun 2018 dari 21.772 ton di tahun 2017 menyebabkan kondisi ketersediaan beras sebagai pangan utama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung naik dari 17,82 persen di tahun 2017 menjadi 20,38 persen di tahun 2018 dan menurunkan angka ketergantungan beras dari luar daerah dari 82,18 persen di tahun 2017 menjadi 79,62 persen di tahun 2018.

Tabel II. 115
Data Ketergantungan Beras 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.428.275	1.459.873
2	Kebutuhan Beras/Tahun (ton)	124.621	117.535	119.663	121.876	122.191

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Produksi Bersih Beras (ton)	16.873	15.838	20.706	21.772	32.727
4	Kondisi ketersediaan (%)	13,54	13,48	17,30	17,82	20,38
5	Ketergantungan (%)	86,46	86,52	82,70	82,18	79,62

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Angka kebutuhan beras penduduk bergantung pada jumlah penduduk dan angka kebutuhan per kapita. Dengan adanya program diversifikasi pangan untuk kebutuhan karbohidrat terlihat bahwa terjadi penurunan angka kebutuhan beras per kapita berganti ke asupan karbohidrat dari bahan non beras sejak tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel II.115 tersebut dapat terlihat bahwa produksi beras Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terkait dengan beberapa upaya peningkatan luas tanam padi di beberapa kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun perlu diantisipasi dengan upaya peningkatan produksi padi lokal dengan intensifikasi lahan tanam padi yang telah ada dan memastikan ketersediaan beras dari luar daerah (import) tetap stabil.

Berdasarkan Tabel II.116 menunjukkan bahwa produksi padi (ton) kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Produksi padi (ton) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat tahun 2018 sebesar 55.212 ton meningkat dari tahun 2017 lalu yaitu sebesar 37.213 ton. Sejak tahun 2016 Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah yang mempunyai produksi padi (ton) paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbeda dengan Kota Pangkalpinang merupakan wilayah bukan penghasil padi sawah maupun padi ladang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tidak ada produksi padi (ton). Beberapa faktor yang mempengaruhi produksi padi (ton) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya.

Tabel II.116

Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2014-2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Bangka	4.681	9.303	6.862	9.666	10.016
2	Kabupaten Bangka Tengah	470	365	884	905	1.125
3	Kabupaten Bangka Barat	6.296	3.753	6.171	5.556	7.014
4	Kabupaten Bangka Selatan	7.803	8.002	16.728	15.471	31.149
5	Kabupaten Belitung	1.614	1.477	1.557	1.650	1.922
6	Kabupaten Belitung Timur	2.617	4.170	2.186	3.876	3.987
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Prov. Kep. Bangka Belitung	28.459	23.481	27.068	35.388	55.212

Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Tabel II.117 menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014-2018 dengan Angka Tetap (ATAP) tahun berjalan terlihat ketersediaan beras sebagai pangan utama terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk ketersediaan beras lokal mengalami kenaikan karena upaya swasembada beras yang terus dilakukan cukup memberikan hasil terhadap peningkatan produksi beras dari 21.722 ton pada tahun 2017 menjadi 32.727 ton pada tahun 2018. Begitu juga untuk ketersediaan beras impor mengalami kenaikan dari 124.994 ton pada tahun 2017 menjadi 127.830 ton pada tahun 2018. Angka ini mempengaruhi total ketersediaan beras pada tahun 2018 sebesar 160.557 ton, meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana ketersediaannya sebesar 146.716 ton. Ketersediaan beras di tahun 2018 sebesar 160.557 ton telah memenuhi kebutuhan beras di tahun tersebut dengan kebutuhan sebanyak 122.191 ton.

Tabel II.117

Data Ketersediaan Pangan 2014-2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Keterangan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ketersediaan Beras (Lokal)	Ton/Thn	16.873	15.838	20.706	21,722	32.727
2	Ketersediaan Beras (Import)	Ton/Thn	95.390	125.011	122.457	124.994	127.830
3	Ketersediaan Beras (Lokal + Import)	Ton/Thn	112.263	140.849	143,163	146.716	160.557
4	Kebutuhan Beras	Ton/Thn	124.621	117.535	119.663	121.876	122.191
5	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	2.437,20	2.490	2.455	2.643,27	2.791
6	Ketersediaan Protein	Gr/Kap/Hari	79,38	71,56	71,08	82,73	100,9
7	Ketersediaan Lemak	Gr/Kap/Hari	144,63	76,55	91,81	94,08	83,41
8	PPH Ketersediaan	Skor	78,50	78,78	87,10	87,84	88,45

Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 ditetapkan pun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/Kap/Hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 Gram/Kap/Hari. Selanjutnya berdasarkan Tabel II.117 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melebihi kondisi ideal yang dipersyaratkan.

J. Urusan Pertanahan

1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel II.118

Luas Lahan (m²) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HP L	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	92.935	-	3.012.794	-	-	662.093	128.635	1.543.303	-	-	-	1.325.862	13.370.466	1.510.640	-	550.000	-
2	Bangka Tengah	119.468	-	3.821.638	-	194.723	332.686	-	2.226.024	-	-	-	226.308	-	1.740.960	-	-	-
3	Bangka Barat	444.940	-	7.390.740	-	-	31.915	-	197.805	-	-	-	29.868	-	1.398.692	-	-	-
4	Bangka Selatan	104.354	139.457.500	54.831.907	977.115	-	132.438	139.457.500	59.978.053	1.496.977	-	10.842	556.199	139.457.500	64.299.906	1.768.093	-	10.842
5	Pangkalpinang	1.196.283	-	1.439.515	-	-	800.392	-	1.224.213	-	-	-	266.080	-	1.081.783	-	-	-
6	Belitung	185.019	-	10.549.495	-	-	1.352.501	-	2.766.871	-	-	-	743.381	-	2.944.824	-	-	-
7	Belitung Timur	3.278	-	866.903	-	-	598.850	657.256	1.699.841	-	-	-	377.462	572.400	2.782.879	-	-	-
Jumlah		2.146.277	139.457.500	81.912.992	977.115	194.723	3.910.875	140.243.391	69.636.110	1.496.977	-	10.842	3.525.160	153.400.366	75.759.684	1.768.093	550.000	10.842

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

Tabel II.119

Luas Lahan (m²) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No.	Kabupaten/Kota	2017						2018						Jumlah	Luas(*) WILAYAH(m2)
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW		
1	Bangka	0,0104	3,456	0,0621	0,0078	0,0018	0	0,0368	1,4013	0,0318	0,0131	0	0,0004	424.668.655	2.950.880.000
2	Bangka Tengah	0,0388	0,1145	0,5153	0,0112	0	0	0,0532	0,3859	0,4683	0,0359	0,0004	0	45.004.540	2.155.770.000
3	Bangka Barat	0,0014	0	0,24	0,006	0	0	0,0016	0,4705	1,13	0,0066	0	0	61.705.493	2.820.610.000
4	Bangka Selatan	0,0012	0,93	0,1	0,01	0	0	0,0021	0,34	0,3	0,0084	0	0	77.542.657	3.607.080.000
5	Pangkalpinang	1,031	0	2,7811	1,0481	0	0	2,5841	0	2,9289	0,3599	0	0	14.057.302	89.400.000
6	Belitung	0,0314	0,5868	0,55	0,0156	0	0	0,0571	0,598	1,62	0,0132	0,0013	0	91.690.199	2.293.690.000
7	Belitung Timur	0,0072	0,18	0,1294	0,0155	0	0,0001	0,0098	0,6854	0,55	0,0367	0	0,0001	60.201.739	2.506.910.000

No.	Kabupaten/Kota	2017					HW	2018					HW	Jumlah	Luas(*)
		HGB	HGU	HM	HP	HPL		HGB	HGU	HM	HP	HPL			WILAYAH(m2)
Jumlah		0,0186	0,95	0,25	0,0163	0,0003	0	0,0378	0,65	0,65	0,0194	0,0002	0,0001	774.870.585	16.424.340.000
Total Luas Wilayah															

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

Tabel II.120

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2014					2015					2016						
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	30,52	-	989,47	-	-	212,39	41,26	495,07	-	-	-	417,29	4.208,06	475,44	-	-	-
2	Bangka Tengah	67,41	-	2.156,46	-	109,88	183,90	-	1.230,51	-	-	-	122,51	-	942,49	-	-	-
3	Bangka Barat	231,26	-	3.841,44	-	-	16,23	-	100,61	-	-	-	14,87	-	696,56	-	-	-
4	Bangka Selatan	55,07	73.595,46	28.936,26	515,65	-	68,41	72.040,16	30.983,12	773,30	-	5,60	281,38	70.551,74	32.529,41	494,48	-	5,48
5	Pangkalpinang	623,08	-	718,59	-	-	407,94	-	623,96	-	-	-	132,82	-	540,01	-	-	-
6	Belitung	122,00	-	6.929,00	-	-	885,00	-	1.810,00	-	-	-	478,00	-	1.895,00	-	-	-
7	Belitung Timur	2,86	-	740,78	-	-	510,57	550,41	1.423,72	-	-	-	309,47	469,29	2.281,59	-	-	-
Jumlah		1.132,21	73.595,46	44.312,00	515,65	109,88	2.284,45	72.631,83	36.666,99	773,30	-	5,60	1.756,35	75.229,09	39.360,49	494,48	-	5,48

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

Tabel II.121

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2017-2018 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	2017					HW	2018					HW
		HGB	HGU	HM	HP	HPL		HGB	HGU	HM	HP	HPL	
1	Bangka	0,0104	3,456	0,0621	0,0078	0,0018	0	0,0368	1,4013	0,0318	0,0131	0	0,0004
2	Bangka Tengah	0,0388	0,1145	0,5153	0,0112	0	0	0,0532	0,3859	0,4683	0,0359	0,0004	0
3	Bangka Barat	0,0014	0	0,24	0,006	0	0	0,0016	0,4705	1,13	0,0066	0	0
4	Bangka Selatan	0,0012	0,93	0,10	0,01	0	0	0,0021	0,34	0,30	0,0084	0	0
5	Pangkalpinang	1,031	0	2,7811	1,0481	0	0	2,5841	0	2,9289	0,3599	0	0
6	Belitung	0,0314	0,5868	0,55	0,0156	0	0	0,0571	0,598	1,62	0,0132	0,0013	0
7	Belitung Timur	0,0072	0,18	0,1294	0,0155	0	0,0001	0,0098	0,6854	0,55	0,0367	0	0,0001

No.	Kabupaten/Kota	2017					HW	2018					HW
		HGB	HGU	HM	HP	HPL		HGB	HGU	HM	HP	HPL	
Jumlah		0,0186	0,95	0,25	0,0163	0,0003	0	0,0378	0,65	0,65	0,0194	0,0002	0,0001
Total Luas Wilayah													

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW=

2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel II.122

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	4	-	-	5	1	20	4	2	50
2	Bangka Tengah	1	-	-	2	-	-	9	7	77,7
3	Bangka Barat	3	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	6	3	50	2	-	-	12	6	50
6	Belitung	5	2	40	5	-	-	11	-	-
7	Belitung Timur	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Jumlah Kasus Terdaftar		20			18			39		
Jumlah Kasus Diselesaikan			5			1			15	
Penyelesaian Kasus (%)				25			5,5			38,4

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.123

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/kota	2017			2018		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	2	2	100	1	1	100
2	Bangka Tengah	0	0	0	3	2	66,67
3	Bangka Barat	0	0	0	0	0	0

No	Kabupaten/kota	2017			2018		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
4	Bangka Selatan	0	0	0	1	1	100
5	Pangkalpinang	2	2	100	3	2	66,67
6	Belitung	0	0	0	0	0	0
7	Belitung Timur	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4	4	100	8	6	75

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

3) Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel II.124

Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	5	5	100	5	5	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	4	4	100	14	14	100	-	-	-
3	Bangka Barat	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	9	9	100	2	2	100	-	-	-
6	Belitung	5	5	100	9	9	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	-	-	-	-	-	-
Permohonan Izin Lokasi		30	30		30	30		0	0	
Pemberian Izin Lokasi		30	30		30	30		0	0	
Penyelesaian Izin Lokasi (%)		100	100		100	100		0	0	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel II.125

Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/Kota	2017			2018		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	1	1	100	11	11	100
2	Bangka Tengah	4	4	100	9	9	100
3	Bangka Barat	3	3	100	5	5	100
4	Bangka Selatan	1	1	100	2	2	80
5	Pangkalpinang	7	7	100	8	8	100
6	Belitung	23	23	100	15	15	100
7	Belitung Timur	4	4	100	2	2	100
TOTAL		43	43	100	52	43	82,69

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

K. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.126.

Tabel II.126
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Kualitas Air	84.36	61.3	62.05	82.08	72.50
Indeks Kualitas Udara	64.25	90,39	90.61	80.4	94.97
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	37,07	36.77	36.41	0	0
Indek Kualitas Tutupan Hutan (IKTH)	0	0	0	35.35	44.01
Nilai IKLH	59.41	60,22	62,74	56.88	67.85

Sumber: RPPLH (2018)

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif, Pada tahun 2017 nilai IKA Provinsi menurun dibandingkan tahun 2016 sedangkan untuk nilai IKU meningkat. Peningkatan signifikan terdapat pada Nilai IKTH yaitu dari 35.35 menjadi 44.01, hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan tahun 2016 dengan menyempurnakan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial. Masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk indeks kualitas air dihitung untuk 11 sungai dan menggunakan avg NSF memasukkan unsur pencemar untuk 10 parameter+debit, sedangkan udara hanya di hitung 3 titik lokasi: industri, perumahan dan transportasi.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.127, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi diKabupaten Belitung Timur

menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

Tabel II.127

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No (1)	Kabupaten/Kota (2)	2012 (3)	2013 (4)	2014 (5)	2015 (6)	2016 (7)
1	Bangka	81,39	87,7	73.82	75,3	77,9
2	Belitung	78,44	75,6	73.73	84,5	74,2
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	38.68	47,7	56,8
4	Bangka Barat	54,66	87,4	77.58	83,7	89,5
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	75.18	59,6	74,8
6	Belitung Timur	72,39	100	73.82	76,6	76,0
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	86.72	87,7	88,7
Prov. Kep. Bangka Belitung		76,38	80,2	71.24	73,7	77,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel II.128 terlihat rasio penduduk ber KTP meningkat, karena kepemilikan KTP meningkat. Di samping itu kepemilikan akta kelahiran juga meningkat.

Tabel II.128

Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (1)	Realisasi				
	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 (6)
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	60	59	63	93,6	99,68
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	84,4	95.5	95.1	97,92	97,99
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah	22,8	25,7	30	33,24	38,38
Kepemilikan KTP	765.507	761.597	837.252	945.036	962.342
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	407	292	491	401	457
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	1.281.099	1.292.863	1.321.117	1.349.121	1.379.767
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	765.507	761.597	837.252	945.036	962.342

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan, pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, KB, 2019

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintahandesa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa,

belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desaan stabilitas Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2013 jumlah binaan LPM sebanyak 1.575 meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 3.176. Kabupaten Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada tahun 2018 yaitu sebanyak 571 LPM dan kabupaten Bangka Selatan yang paling rendah yaitu sebanyak 476 LPM.

Tabel II.129
Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2013 s.d 2017 Menurut kabupaten/kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten / Kota	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
		LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	LPM	PKK	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bangka	158	385	482	1.231	501	527	1.642	1.499	527	1.642	527	1.642
2	Belitung	262	310	330	709	492	487	818	767	487	818	487	818
3	Bangka Barat	374	887	462	1.370	503	626	1.584	1.480	626	1.584	626	1.584
4.	Bangka Tengah	266	721	281	776	502	489	1.397	1.202	489	1.397	489	1.397
5.	Bangka Selatan	291	757	439	1.078	483	476	1.424	1.481	476	1.424	476	1.424
6.	Belitung Timur	224	534	552	960	581	571	1.056	1.058	571	1.056	571	1.056
Jumlah		1.575	3.594	2.546	6.124	3.062	3.176	7.921	7.487	3.176	7.921	3.176	7.921

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dari data di atas kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2013 jumlah kelompok PKK sebanyak 3.594 meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 6.124 pada tahun 2015 sebesar 7.487 dan pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 7.921. Sedangkan kabupaten Bangka memiliki kelompok PKK terbanyak pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebanyak 1.642 kelompok PKK dan Kabupaten Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 818 kelompok PKK.

Terdapat beberapa data sektoral yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya terkait dengan jumlah bumdes yang aktif, jumlah posyandu aktif, jumlah siswa sekolah dasar yang terfasilitasi dalam program PMT-AS di daerah tertinggal dan terpencil, jumlah aparatur desa terlatih dan jumlah kawasan perdesaan yang dibangun.

Tabel II. 130
Jumlah Bumdes yang Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	STATUS BUMDes 2017			STATUS BUMDes 2018				
		Persiapan	Terben- tuk	Aktif	Pemula	Berkem- bang	Maju	Mandiri	Unggulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	16	32	32	38	12	-	-	1
2	Bangka Tengah	-	44	44	28	17	6	1	5
3	Bangka Barat	-	21	21	2	25	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	17	17	40	-	-	-	-
5	Belitung	2	9	9	26	-	-	-	-
6	Belitung Timur	-	24	24	18	5	3	2	3
Prov. Kep. Bangka Belitung		18	147	147	152	59	3	3	9

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarkan data diatas ada perbedaan status BumDes tahun 2017 dengan tahun 2018 dikarenakan adanya pembaharuan status yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 Tanggal 29 September 2017 tentang Petunjuk teknis operasional dan tata cara pemberian bantuan keuangan khusus kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program peningkatan dan pendampingan kelembagaan BumDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keterkaitan antara status BumDes di tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk lebih mengetahui BumDes mana yang benar-benar aktif dan perlu didorong lebih aktif untuk dapat membantu Bumdes tersebut dalam segi keuangan, Harapan yang akan didapatkan dengan keaktifan Bumdes adanya bantuan keuangan baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun dana CSR.

Tabel II. 131
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan		Kelurahan		Desa		Puskesmas		Posyandu		Posyandu Aktif	Posyandu Aktif
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bangka	8	8	15	19	62	62	12	12	221	227	164	168
2	Belitung	5	5	7	7	42	42	9	9	174	177	119	127
3	Bangka Barat	6	6	4	4	60	60	8	8	171	182	86	112
4	Bangka Tengah	6	6	7	7	56	56	8	9	136	138	27	25

No	Kabupaten	Kecamatan		Kelurahan		Desa		Puskesmas		Posyandu		Posyandu Aktif	Posyandu Aktif
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	Bangka Selatan	8	8	3	3	50	50	9	10	121	121	33	45
6	Belitung Timur	7	7	0	0	39	39	7	7	133	134	131	121
7	Pangkalpinang	7	7	42	42	0	0	9	9	116	116	87	88
Prov. Kep. Bangka Belitung		47	47	78	82	309	309	62	64	1072	1095	647	687

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Melihat data posyandu aktif yang terdapat di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya peningkatan keaktifan posyandu hal ini terlihat dari jumlah peningkatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017 dengan total 647 menjadi 687 di tahun 2018 ini menunjukkan ada peningkatan keaktifan sebanyak 40 posyandu aktif.

Tabel II. 132

Jumlah Sekolah Dasar (SD) Penerima Bantuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah(PMT-AS) Tahun 2017 sd Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan		Jumlah SD Penerima		Jumlah Siswa Penerima PMT-AS	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	Riau Silip Puding Besar Mendo Barat	Bakam	1 1 1	1	409	90
2	Bangka Barat	Muntok Simpang Tritip Jebus Parit Tiga Kelapa	Tempilang	2 1 1 1 1	1	409	90
3	Bangka Tengah	Lubuk Besar Sungai Selan	Lubuk Besar	1 3	1	408	90
4	Bangka Selatan	Air Gegas Pulau Besar Simpang Rimba	Air Gegas	1 1 1	1	408	90
5	Belitung	Membalong Badau Sijuk Tanjungpandan	Badau	2 2 1 1	1	408	90
6	Belitung Timur	Manggar Dendang Simpang Pesak	Simpang Pesak	1 1 1	1	408	90
Prov. Kep. Bangka Belitung				25	6	2450	540

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Berdasarkan tabel II. 133 pada tahun 2017 masih belum ada pelatihan bagi kepala desa dalam pelatihan Revolusi Mental sebaliknya pada tahun 2018 telah dilakukan pelatihan bagi kepala desa sebanya 38 orang dari 6 (enam) kabupaten, dan harapannya pelatihan tersebut dapat mengikut sertakan kepala desa yang lainnya. Pelatihan tidak hanya revolusi mental namun masih banyak pelatihan yang harus ditingkatkan lagi terutama bagi bendahara desa dan pengurus desa

lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, mengingat pada saat ini banyak sekali anggaran yang diperuntukkan bagi desa namun banyak juga pengurus yang masih belum semuanya dapat menyelesaikan laporan keuangannya dengan baik. Dengan melihat data diatas dapat untuk dipertimbangkan kembali pelatihan terkait dengan pengurus desa.

Tabel II. 133

Jumlah Aparatur Desa Yang Terlatih Tahun 2017 s.d Tahun 2018 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Jenis Pelatihan 2014			Jenis Pelatihan 2015			Jenis Pelatihan 2016			Jenis Pelatihan 2017			Jenis Pelatihan 2018		
		Benda hara Desa	Perat uran Desa	Bin tek BP D	Benda hara Desa	Perat uran Desa	Revo lusi Men tal (Bag i Kad es)	Benda hara Desa	Perat uran Desa	Revo lusi Men tal (Bag i Kad es)	Benda hara Desa	Perat uran Desa	Revo lusi Men tal (Bag i Kad es)	Benda hara Desa	Perat uran Desa	Revo lusi Men tal (Bag i Kad es)
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Bangk a	0	0	9			15			7	9	11	-	-	-	-
2	Bangk a Tenga h			8			5			6	8	11	-	-	-	7
3	Bangk a Barat			8			15			6	9	13	-	-	-	5
4	Bangk a Selata n			9			15			6	8	11	-	-	-	6
5	Belitu ng			8			5			5	8	12	-	-	-	8
6	Belitu ng Timur			8			5			5	8	12	-	-	-	12
	Prov. Kep. Bangka Belitung	-	-	50	-	-	60	-	-	35	50	70	-	-	-	38

Sumber : Data Survey Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Tabel II. 134

Jumlah Kawasan Perdesaan Tahun 2016 sd Tahun 2018 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	Bakam Pemali Belinyu Riau Silip	- Petanian dan Pariwisata - Pertumbuhan Ekonomi Baru - Pertanian dan Pariwisata - Perikanan dan Pariwisata	-Bakam - Pemali -Belinyu -Riau Silip	-Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perdesaan Pertumbuha n Ekonomi Baru - Kawasan Perdesaan	-Bakam - Pemali -Belinyu -Riau Silip	-Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perdesaan Pertumbuhan Ekonomi Baru - Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata

No	Kabupaten	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan	Kecamatan	Tema Kawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pertanian dan Pariwisata -Kawasan Perikanan dan Pariwisata		-Kawasan Perikanan dan Pariwisata
2	Bangka Tengah	-	-	-	-	Koba	Kawasan Ekowisata, Sungai dan Pulau
3	Bangka Barat	-	-	-	-	Parit Tiga	Kawasan Mina Politan dan Pariwisata
		-	-	-	-	Simpang Teritip	Kawasan Mina-Industri Kecil Wisata
		-	-	-	-	Simpang Teritip dan Mentok	Kawasan Mina-Agrowisata
4	Bangka Selatan	-	-	Air Gegas	Kawasan Perdesaan Pengembangan Budidaya Lada Putih	Air Gegas	Kawasan Perdesaan Pengembangan Budidaya Lada Putih
5	Belitung	Selat Nasik	Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata	Selat Nasik	Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata	Selat Nasik	Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata
6	Belitung Timur	Manggar	Kawasan Perdesaan Minapolitan	Manggar	Kawasan Perdesaan Minapolitan	Manggar	Kawasan Perdesaan Minapolitan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2018

Upaya Pemerintah baik pusat maupun Provinsi maupun kabupaten telah melakukan banyak intervensi berkaitan dengan pengembangan kawasan perdesaan. Melihat data diatas pada tahun 2016, Pemeritah Pusat, Provinsi dan Kabupaten telah melakukan upaya pengembangan kawasan perdesaan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Berbeda halnya dengan kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah yang belum menyelesaikan andministrasi dalam dokumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) di tahun 2016. Namun Pada tahun 2018 Pemerintah provinsi membantu untuk menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan harapannya dengan tersedianya dokumen RPKP tersebut dapat membantu kabupaten untuk mengembangkan kawasan dan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.

Berdasarkan sumber data yang disampaikan dan berdasarkan Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun pada lampiran nomor urut 2 (dua) menyatakan

klasifikasi status desa.

Tabel II. 135
Jumlah Desa Tertinggal dan Berkembang Tahun 2016 sd Tahun 2017 Kabupaten
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Status Perkembangan Desa Tertinggal		Status Perkembangan Desa Berkembang	
				2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bangka	3	4	2	2	2	2
2	Belitung	4	8	4	4	4	4
3	Bangka Barat	6	18	9	9	9	9
4	Bangka Tengah	3	3	3	3	-	-
5	Bangka Selatan	8	41	12	12	29	29
6	Belitung Timur	3	6	2	2	4	4
TOTAL		27	80	32	32	48	48

Sumber: Kepmendes, PDT dan Transmigrasi No 126, 2017

Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($=$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($=$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($=$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($=$) dari 0,4907.

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.136. Memperhatikan data tersebut terlihat bahwa sejak tahun 2013 terjadi tren penurunan pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung.

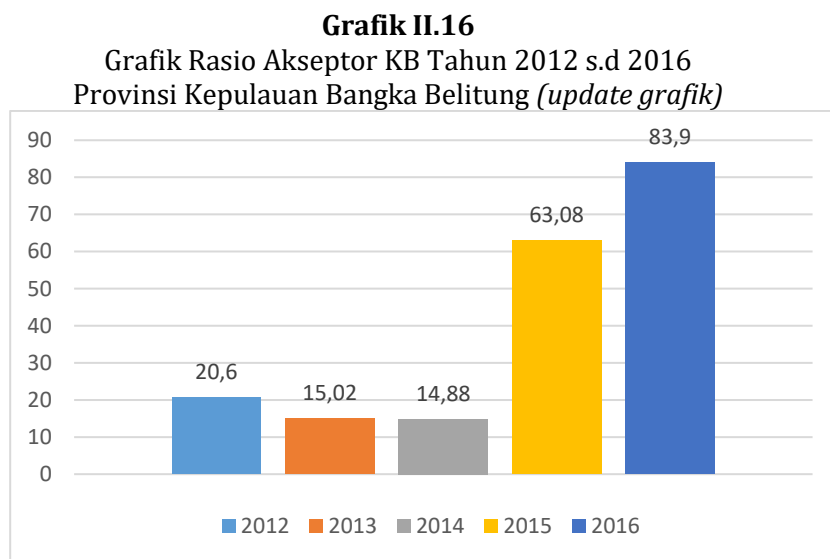
Tabel II.136
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan (%)	2,22	2,19	2,15	2,11	2,07

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel II.137
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah akseptor KB	52.762	40.976	37.576	38.967	229.251
2.	Jumlah pasangan usia subur	256.116	272.808	252.481	279.880	273.191
3.	Rasio akseptor KB	20,60	15,02	14,88	13,92	83,92

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

Berdasarkan tabel II.137 pada kurun waktu 2012 -2016 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami tren penurunan, namun di tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 13,92 ditahun 2015 menjadi 83,92 pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada grafik II.16.

3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahapan diantaranya, Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal diantaranya :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah;
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel II.138 sebagai berikut:

Tabel II.138
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248	20.648
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421	190.421
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259	107.369
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928	318.438

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan di atas, data Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun 2014 ke tahun 2016 terjadi peningkatan yang drastis, terutama meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I. Artinya terjadi peningkatan jumlah keluarga Sejahtera 1+ secara drastis, namun bersamaan dengan itu terjadi juga peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera hampir dua kali.

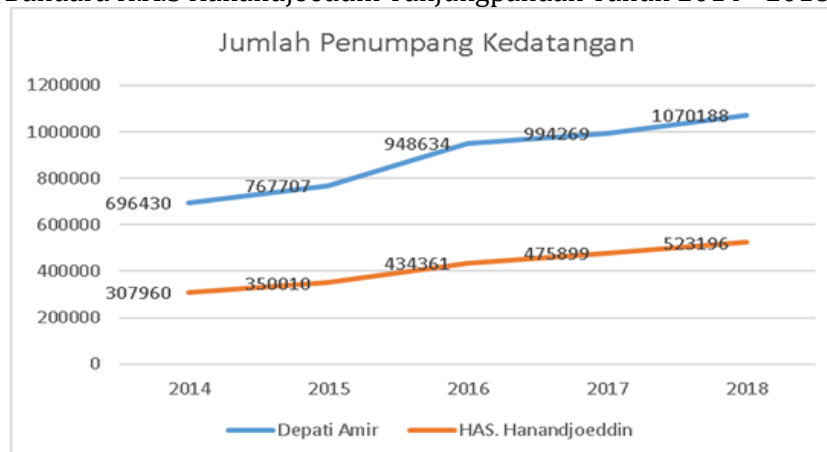
O. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung

peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional. Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik II.17.

Grafik II.17

Jumlah Penumpang Datang dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2014 - 2018

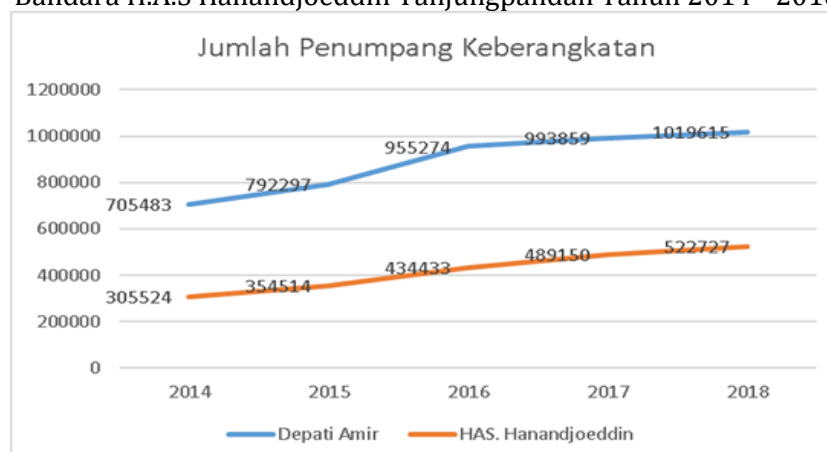


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Grafik II.18

Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2014 - 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada grafik II.19 berikut:

Grafik II.19
Jumlah Kapal di Pelabuhan Laut Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018



Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 2.472 unit dengan berat total 3.122.720 *Grosston*.

Di sisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2012-2016 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada tabel II.139.

Tabel II.139
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan
Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2018	52427	696	4490	17398	8456	330452
2017	50024	747	4720	18727	9099	338475
2016	43681	704	4169	16872	8174	07609
2015	41418	674	4273	17765	8502	325404
2014	36967	659	4329	16670	8235	22178

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013-2016. Indeks ketersediaan infrastruktur perhubungan dan *load factor* tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.140
Load Factor Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Load facktor angkutan	48	36	36	32	24

Tabel II.141

Indeks di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan perhubungan
Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Indeks ketersediaan infrastruktur perhubungan	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	30,25

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan *e-Gov* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan *e-Gov* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional. Kebutuhan akan aksesibilitas telekomunikasi (internet/data) pada titik titik kawasan pariwisata baru dan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk sektor Komunikasi dan Informatika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan terbangunnya kampung internet di wilayah pesisir sejumlah 1.338 site BTS. Ketersediaan perencanaan umum/*grand design* kematangan Teknologi Informasi/Maturity IT dapat dijadikan tolok ukur untuk pengembangan Teknologi Informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari: 1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; 2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan 3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai. Adapun Indikator tersebut yaitu Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator indeks Indikator Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi dengan strategi Meningkatkan transparansi melalui pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi serta Persentase layanan akses teknologi informasi dan komunikasi birokrasi.

Tabel II.142

Indek e-government Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran	Indikator	Target/Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indikator Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi	na	na	na	na	3.48

Gambar II.21
Indeks e-government secara nasional



Tabel II.143
Prediksi Target 2018 Sampai Dengan Tahun 2022
Indek e-government Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran	Indikator	Target/Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indikator Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi	3.48	3.50	3.53	3.64	3.75

Sumber: Bidang E Government Diskominfo Bangka Belitung

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 memiliki nilai indeks SPBE sebesar 3,48 atau berkategori BAIK. Dari beberapa indikator penilaian, seperti domain kebijakan SPBE, domain tata kelola, dan domain layanan SPBE sudah cukup baik. Yang masing-masing domain tersebut masih terdapat kendala dan permasalahan.

Pelaksanaan SPBE ini diharapkan bisa mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan nilai indeks SPBE agar terus meningkat menjadi 3,50 pada tahun 2019, serta diharapkan menjadi 3,75 pada tahun 2022. hal ini akan dapat tercapai bila kelemahan yang ditemukan pada beberapa domain tadi bisa di atasi.

Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap

pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

Tabel II.144

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	798	812	821	714	681
2.	Jumlah Koperasi	1.076	1.103	1.149	980	981
3.	Persentase Koperasi Aktif	74.16	73.61	71,45	72,86	69,42

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami perubahan, dari data di atas tahun 2016 sebesar 71,45 persen meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 72,86 persen dan menurun menjadi 69,42 persen pada tahun 2018.

Tabel II.145

Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	291.322	292.456	293.985	150.870	150.948

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun selama lima tahun terakhir, pada tahun 2016 UKM sebanyak 293.985 menurun pada tahun 2017 menjadi 150.870 dan pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 150.948 UKM.

R. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: “Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, terkoneksiya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan

investor/pengusaha besar, tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi.

Adapun tujuan jangka menengah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatkan realisasi investasi dan terwujudnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai pelayanan prima. Sedangkan sasarannya antara lain: perbaikan kemudahan berinvestasi, meningkatnya nilai realisasi, meningkatnya jumlah investor dan meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu.

Tabel II.146
Jumlah proyek dan nilai investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Proyek	55	58	100	155	235	411
2	Nilai Investasi (Triliun Rp)	1.706,77	1.738,75	2.056,98	1.156,00	3.061,08	3.733,03

Sumber: DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Pada tabel diatas yaitu tabel II.146 menunjukkan bahwa jumlah proyek di tahun 2013 sebanyak 55 yang mengalami peningkatan sebanyak 411 di tahun 2018. Hal ini diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dan sekaligus meningkatkan jumlah investor yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olahraga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera Tahun 2018 yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 7 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itu merupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradasi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda

menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel II.147
Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	15	12	12	8	10

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data Tabel II.147, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2014 s.d 2018) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah klub/organisasi olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir banyak mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebanyak 1.361 klub/organisasi.

Tabel II.148
Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Organisasi Olahraga	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Klub/Organisasi Olahraga	880	1063	1216	1322	1361

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Hasil Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kemajuan dalam dalam beberapa tahun dengan kenaikan 7,5 poin dari indeks 45,5 di tahun 2015 menjadi 53,00 di tahun 2018. Ini merupakan hal yang positif dimana harapan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengembangan potensi intelektual dan keterampilan pemuda dalam mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat berjalan dengan baik. Untuk itu peningkatan kualitas pemuda harus tetap dilakukan dengan memberikan pengembangan potensi diri untuk memperkaya *hard skill* dan *soft skill* guna menyiapkan mereka menjadi generasi hebat penerus bangsa.

Tabel II.149
Data Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2015 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Domain	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendidikan	56,67	60,00	60,00	60,00

No	Domain	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Kesehatan dan Kesejahteraan	62,50	57,50	60,00	65,00
3.	Ketenagakerjaan dan Kesempatan	35,00	60,00	45,00	60,00
4.	Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	40,00	40,00	40,00
5.	Gender dan Diskriminasi	33,33	30,00	33,33	40,00
IPP		45,50	49,50	47,67	53,00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI

Hasil Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 menunjukkan bahwa (1) Indeks partisipasi 0,26, (2) Indeks ruang terbuka 0,23, (3) Indeks kebugaran 0,19 (4) Indeks SDM Keolahragaan 0,36 dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 0,26. Kesimpulannya adalah Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada pada kategori kurang karena Indeks total IPO yang meliputi Partisipasi, Ruang Terbuka, Kebugaran dan SDM Keolahragaan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26 berada direntang 0,24-0,49. Artinya bahwa pembangunan olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih perlu diperhatikan dan dibenahi oleh pemerintahan dan semua lapisan masyarakat agar pembangunan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa lebih baik.

Tabel II.150
Data Indeks Pembangunan Olahraga Tahun 2015 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Dimensi	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Partisipasi				0,26	0,26
2.	Ruang Terbuka				0,23	0,23
3.	Kebugaran				0,19	0,19
4.	SDM Keolahragaan				0,36	0,36
IPO					0,26	0,26

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Bangka Belitung dan Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI

T. Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

Tabel II.151

Jumlah Data Statistik Per Aspek Yang Digunakan Dalam Penyusunan Perencanaan

No.	Elemen Data	2016	2017	2018	satuan	Urusan	Data Dasar/Data Komposit	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Layanan Telepon Seluler	0	0		Desa	Kominfo	Data Tunggal	Diskominfo
	Jumlah Desa Terlayani	0	0	35	Desa			Diskominfo
	Jumlah Desa yang belum Terlayani	0	0	1				Diskominfo
	Jumlah BTS	0	0	99	Desa	Desa		Diskominfo
	Jumlah Provider				28 tersebar di Kabupaten/Kota	Desa		Diskominfo
2	Layanan Telepon Kabel							Diskominfo
	Jumlah Jaringan Telepon Tersedia	0	0	11	Desa			Diskominfo
	Jumlah Jaringan Terpasang	0	0	0	SS			Diskominfo
3	Layanan Internet							Diskominfo
	Jumlah Data Terlayani	0	0	25	Desa			Diskominfo
	Jumlah Data Belum Terlayani	0	0					Diskominfo
4	Jumlah Kantor Pos	0	0	5	Desa			Diskominfo
	Jumlah Kantor Pos Pembantu	0	0	3	Desa			Diskominfo
	Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling	0	0	19	Desa			Diskominfo
5	Radio	0	0	0				Diskominfo
	Jumlah Stasiun Radio	0	0	0				Diskominfo
	Cakupan Layanan	0	0	0				Diskominfo
6	Televisi	0	0	0				Diskominfo
	Jumlah Stasiun Televisi	0	0	0				Diskominfo
	Cakupan Layanan	0	0	0				Diskominfo
7	Surat Kabar Nasional	0	0	0				Diskominfo
	Surat Kabar Lokal	0	0	0				Diskominfo

Sumber: Buku Cetak Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2018

Berdasarkan Tabel di atas dapat disajikan bahwa data yang tersedia meliputi data tahun 2018, dan adapun elemen data yang tersedia terdiri atas: Layanan Telepon Seluler (meliputi: Jumlah Desa Terlayani, Jumlah Desa yang belum terlayani, dan Jumlah BTS); Layanan Telepon Kabel (meliputi: Jumlah Jaringan Telepon Tersedia); Layanan Internet (meliputi: Jumlah Desa Terlayani); Jumlah Kantor Pos (meliputi: Jumlah Kantor Pos Pembantu, Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling). Untuk elemen Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling tidak bisa digunakan lagi sebagai elemen data untuk tahun berikutnya, karena dari pihak Kantor Pos sudah menyatakan tidak digunakan lagi.

Tabel II.152Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2011 s.d 2015
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka	8	8	8	8	8
2.	Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota	8	8	8	8	8

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa cetak Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka dan Buku PDRB Provinsi/Kabupaten/Kota tersedia pada tahun 2011 sampai dengan 2015, dimana Bappeda yang berperan dalam mencetak Buku tersebut. Sedangkan untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak dilakukan cetak Buku tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran. Dan pada tahun 2019 telah dilakukan Cetak Buku tersebut masing-masing sebanyak 85 buah, dan disebar ke Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPS Provinsi, Kantor Perwakilan BI Bangka Belitung, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (dan Statistik) Kabupaten/Kota

U. Urusan Persandian

Persandian selama lima tahun terakhir belum memiliki struktural eselon empat yang khusus menangani urusan Persandian ini, sejak adanya perubahan terhadap SOTK di masing-masing perangkat daerah, mulai tahun 2017 Struktural Persandian muncul. Fokus urusan persandian ini dalam lima tahun kedepan adalah:

- (a) Jumlah layanan persandian yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (b) jumlah Penanganan terhadap insiden atau penyimpangan sistem informasi, semakin kecil insiden yang terjadi pada setiap tahunnya merupakan bagian dari indikator kinerja dari urusan persandian. Sehingga diharapkan pada setiap tahunnya jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lebih besar dari Nol.
- (c) adanya kebijakan teknis dan dukungan SDM dibidang keamanan informasi, akan tetapi permasalahan keamanan informasi pada implementasinya berada pada struktural yang berbeda di dalam SOTK yang diterapkan di Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika.

Sinergitas antara keamanan informasi dan persandian sangatlah erat hal ini dapat dilihat dari dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kemanan informasi dan persandian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Semakin tingginya tingkat ancaman terhadap informasi strategis yang berasal dari dalam dan luar negeri, maka persandian Republik Indonesia dituntut terus mengembangkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sandi, baik pusat maupun daerah.

Berdasarkan data SDM persandian di dinas komunikasi dan Informatika masih perlu ditingkatkan baik jumlah personil serta kualitas SDM persandian. Hal ini untuk mengantisipasi operasional data *center* yang akan datang. SDM persandian dibekali oleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai.

Tabel II.153
Jumlah Ketersediaan sumber daya manusia bidang persandian

DATA SDM PERSANDIAN									
PADA UNIT TEKNIK PERSANDIAN (UTP)									
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG									
NO	NAMA PERSONIL	NIP	TEMPAT/ TGL LAHIR	GOL	JABATAN	PENDIDIKAN			KETERANGAN
						UMUM	PIM	FUNGSIONAL/ SANDI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MUSTARI	19640611190522 1 001	PANGKA PINANG, 11 APRIL 1964	Pemata Tk. I/II d	KEPALA SEKSI PERSANDIAN	SLTA	IV	-	DB127822 3487
2	MUHAMMAD AKBAR, A.Md	19790225200212 1 004	PANGKA PINANG, 25 MARET 1978	Pemata/II c	OPERATOR SANDI & TELEKOMUNIKASI	DI KOMUNIKASI	-	SANDIMAN LANJUTAN 2009	DB218570 7906
3	ZULFIKAR, S. Si	19801223200502 1 007	PANGKA PINANG, 23 DES 1980	Pemata/II c	PRANATA ALAT PERSANDIAN	SIMIPA MATEMATIKA	-	SANDIMAN LANJUTAN 2013	DB137364 1082
4	RINI HAPSARI, A.Md	19790606200703 2 007	PALEMBANG, 06 JUNI 1978	Pemata Muda/III a	OPERATOR SANDI & TELEKOMUNIKASI	DISTEKNIK TELEKOMUNIKASI	-	PEMBENTUKAN SANDIMAN 2013	DB117113658
Sumber: Data Elektronik Personil Sandi pada Seksi Persandian									

V. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

W. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan masih dihadapkan

pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

Tabel II.154
Urusan Perpustakaan

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	3.355	718	6.373	6.253	4.700
2	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun	N/A	N/A	6.565	5.893	4.335
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	N/A	N/A	21.137	23.055	22.379
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/hari	279	60	531	521	391
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	9796	10.791	11.028	11.553	11.738
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dari tahun 2014-2019 terjadi penurunan dan peningkatan, pada tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan per tahun relatif menurun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 718 sedangkan 2014 jumlah pengunjung perpustakaan per tahun berjumlah 3.355, dan pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan per tahun meningkat sangat besar yang berjumlah 6.373 dan tahun selanjutnya di tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan menurun menjadi 6.253. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung menurun kembali menjadi 4.700. Dari tabel di atas menjelaskan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Keliling per tahun pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada data, di tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan keliling berjumlah 6.565 pengunjung sedangkan di tahun 2017 berjumlah 5.893 pengunjung, jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun pada tahun 2018 relatif menurun dengan jumlah 4.335 pengunjung.

Uraian dari tabel II.154 tentang koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2014 dan 2015 tidak ada data, pada tahun 2016 berjumlah 21.137, di tahun 2017 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meningkat menjadi 23.055 dan pada tahun 2018 terjadi penyusutan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah berjumlah 22.379. Uraian dari tabel di atas tentang Rasio perpustakaan per satuan penduduk pada tahun 2014-2017 tidak ada data namun di tahun 2018 terdapat $1.341/1.459.873 \times 1000$. Dari tabel II.155 di jelaskan pula tentang Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per hari pada tahun 2015 menurun menjadi 60 orang dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 279 orang, dari tahun 2015 jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan

per hari di tahun 2016 meningkat sangat besar yang berjumlah 531 pengunjung, kemudian menurun di tahun 2017 yang berjumlah 521 dan menurun kembali pada tahun 2018 yang berjumlah 391 orang. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dari tahun 2014-2019 terus meningkat sangat besar, pada tahun 2014 jumlah koleksi judul buku perpustakaan berjumlah 9.796 judul, pada tahun 2015 jumlah koleksi judul buku perpustakaan meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 10.791 di tahun 2016 jumlah koleksi judul buku perpustakaan berjumlah 11.553, jumlah koleksi judul buku terus meningkat pada tahun 2017 berjumlah 11.553 sampai dengan tahun 2018 jumlah koleksi judul buku meningkat sangat besar yang berjumlah 11.738 judul. Selain itu dari tabel II.154 di atas menjelaskan jumlah pustakawan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat dari tahun 2014 s. d 2018 berjumlah 1 orang pustakawan.

Tabel II.155

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2014 s.d 2018 Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Pengunjung	3.355	718	6.373	6.253	4.700

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun pada tahun 2015 yang berjumlah 718 sedangkan di tahun sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 3.355 pengunjung, kemudian meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 berjumlah 6.373. Jumlah pengunjung perpustakaan seperti yang tergambar pada tabel di atas pada tahun 2017 menurun menjadi 6.253 dan tahun 2018 jumlah pengunjung relatif menurun dari tahun sebelumnya menjadi 4.700 pengunjung.

Tabel II.156

Jumlah Perpustakaan Tahun 2014 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perpustakaan Milik Pemda	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
-	Perpustakaan Pemda (Perpustakaan Prov, Kab/Kota)	8	8	8	8	8
-	Perpustakaan Desa/Kelurahan	309	309	309	309	309
-	Perpustakaan Kelurahan	85	85	85	85	85
a	PERPUSTAKAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA					
-	Perpustakaan SD Negeri	750	750	750	750	750
-	Perpustakaan SMP Negeri	161	161	161	161	161
-	Perpustakaan SMA Negeri	85	85	85	85	85
-	Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri	5	5	5	5	5
-	Perpustakaan Umum	8	8	8	8	8
-	Perpustakaan Khusus	4	4	4	4	4
2.	Perpustakaan Non Pemda	525	525	525	525	525
a	PERPUSTAKAAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA					
-	Perpustakaan SD Swasta	42	42	42	42	42
-	Perpustakaan SMP Swasta	43	43	43	43	43

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	Perpustakaan SMA Swasta	46	46	46	46	46
-	Perguruan Tinggi Swasta	14	14	14	14	14

Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan menjadi 2, yaitu Perpustakaan milik Pemda dan Perpustakaan Non Pemda. Dari tabel di atas Jumlah Perpustakaan Milik Pemda ada beberapa bagian yaitu, Perpustakaan Pemda Prov, Kabupaten/Kota, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kelurahan, Perpustakaan Sekolah Negeri dan Swasta dan di dalam Perpustakaan Sekolah Negeri dan Swasta terdapat Perpustakaan yang termasuk Pemda seperti, Perpustakaan SD Negeri, Perpustakaan SMP Negeri, Perpustakaan SMA Negeri. menjadi beberapa perpustakaan yang termasuk pemda, Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri juga termasuk dalam Perpustakaan milik Pemda, dari keseluruhan pada tabel II.156 menunjukkan bahwa Perpustakaan Milik Pemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 1.415 buah. Sedangkan Perpustakaan Non Pemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 525 buah. Dari tabel di atas yang termasuk dalam Perpustakaan Non Pemda yaitu, Perpustakaan SD Swasta, Perpustakaan SMP Swasta, Perpustakaan SMA swasta dan Perpustakaan Perguruan Tinggi Swasta.

X. Urusan Kearsipan

Tata kelola kearsipan daerah belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase sistem kearsipan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 70 persen. Selain itu, kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dan terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan. Hal ini terlihat dari jumlah arsiparis yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebanyak 22 arsiparis, sedangkan di Dinas Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya ada 4 orang arsiparis. Dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah sebanyak 42, angka ini masih belum mencukupi.

Tabel II.157
Urusan Kearsipan

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10%	15%	25%	30%	36%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	10	10	35	35
3	LAKE (Laporan Audit Kearsipan)	N/A	N/A	35	39	45,82

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Eksternal)					

Berdasarkan pada tabel di atas menjelaskan berapa Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Dinas Kearsipan dan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 berjumlah 10 persen dan pada tahun 2015 berjumlah 15 persen, kemudian pada tahun 2016 berjumlah 25 persen meningkat di tahun 2017 menjadi 30 persen dan di tahun 2018 Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku meningkat menjadi 36 persen. Dari tabel di atas Peningkatan SDM pengelola Kearsipan pada tahun 2014 berjumlah 5 pengelola dan di tahun 2015-2016 peningkatan SDM pengelola kearsipan berjumlah 10 dan di tahun 2017-2018 berjumlah 35 pengelola. Tabel di atas dapat menjelaskan nilai LAKE (Laporan Audit Kearsipan Eksternal) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2015 belum ada penilaian LAKE, di tahun 2016 LAKE (Laporan Kearsipan Eksternal) bernilai 35, pada tahun 2017 berjumlah 39 dan pada tahun 2018 berjumlah 45,82, nilai tersebut berpredikat buruk. Untuk meningkatkan nilai LAKE banyak aspek / sub aspek yang menjadi penilaian diantaranya:

1. Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari :
 - a. Tata Naskah Dinas
 - b. Klasifikasi Arsip
 - c. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
 - d. Jadwal Retensi Arsip
 - e. Pedoman Pengolahan Arsip Inaktif
 - f. Pedoman Penyusutan Arsip
 - g. Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
2. Program Kearsipan
3. Pengolahan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-kurangnya 10 tahun
4. Penyusutan Arsip
5. Pengelolaan Arsip Statis
6. SDM Kearsipan
7. Kelembagaan
8. Prasarana dan Sarana Kearsipan

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nomenklatur kepulauan pertama di Indonesia yang diapit oleh 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kurang lebih 65,301.00 km² atau 79,80 persen yang memiliki potensi produksi (ton) dan produksi (ton), baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potensi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.158.

Tabel II.158
Potensi Kelautan dan Perikanan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2018

No (1)	Uraian (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2017 (6)	2018 (7)
1.	Perikanan Tangkap (persentase)	19,20	13,18	18,57	19,64	29,84
a	Potensi Produksi (ton)	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	767.126
b	Produksi (ton)	203.284,40	139.632,96	196.704,00	208.019,7	228.980
2.	Perikanan Budidaya (persentase)	0,32	0,33	0,35	0,29	0,71
a	Potensi Produksi (ton)	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
b	Produksi (ton)	4.198,62	4.305,29	4.618,87	3.305,00	9.340,93

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Berdasarkan Tabel II.158 perkembangan produksi perikanan baik penangkapan maupun budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 9.340,93 ton, mengalami peningkatan dari produksi tahun 2017 yang lalu sebesar 3.305,00 ton. Demikian pula dengan produksi perikanan tangkap yang mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 228.980 Ton setelah pada tahun 2017 mencapai 208.019,7. Namun dari tabel diatas menunjukkan bahwa potensi besar untuk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih banyak Nelayan yang menggunakan Kapal Trawl yang penggunaannya sudah dilarang karena merusak lingkungan laut (terumbu karang) dan meresahkan nelayan lainnya.
2. Masih kurangnya pengawasan di laut karena luasnya perairan Bangka Belitung
3. Kebutuhan benih untuk kegiatan budidaya sebagian besar masih didapatkan dari luar Bangka Belitung
4. Pemanfaatan teknologi baru dalam kegiatan budidaya masih terbatas hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang terlatih dan kurangnya permodalan untuk melakukan kegiatan usaha

a) Perikanan Budidaya

Potensi perikanan budidaya wilayah Bangka Belitung dengan panjang pantai 1,295.83 Km dan 950 Pulau menyimpan potensi yang cukup besar untuk usaha budidaya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk perikanan budidaya yaitu sejumlah 104,863 ha untuk budidaya laut; 64,050 ha untuk budidaya air payau dan 1,602 ha untuk budidaya air tawar.

Tabel II.159
Produksi Perikanan Budidaya Unggulan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Ikan	2014	2015	2016	2017	2018
		(satuan : Ton)				
Kabupaten Bangka	Vanamei	95,00	302,50	292,58	596,07	1.050,78
	Lele	286,86	152,05	65,02	139,95	152,44
	ikan Hias (Satuan: ribu ekor)	68,00	80,00	61,19	-	12,00
	Rumput Laut	-	12,50	-	-	-
Kabupaten Belitung	Kerapu	52,98	84,06	75,99	61,43	96,50
	Lele	37,73	63,04	73,32	77,24	109,99
Kota Pangkalpinang	Vanamei	633,00	750,00	1.387,00	853,17	5.658,59
	Lele	215,21	88,10	50,88	52,17	73,75
	ikan Hias (Satuan: ribu ekor)	180,00	74,75	1,28	-	-
Kab. Bangka Barat	Vanamei	-	-	-	-	-
	Kerapu	-	-	0,40	0,85	-
	Lele	249,47	101,97	15,43	24,67	44,72
	Bandeng	-	1,70	-	-	0,12
Kab. Bangka Tengah	Vanamei	-	0,30	-	-	8,32
	Kerapu	2,20	2,10	6,17	12,90	34,62
	Lele	572,04	260,67	1.203,38	1.108,33	1.206,67
	ikan Hias (Satuan: ribu ekor)	11,00	35,70	10,19	-	12,85
	Rumput Laut	520,00	1.061,15	34,30	-	-
Kab. Bangka Selatan	Vanamei	18,70	3,50	-	-	-
	Kerapu	53,57	63,80	25,65	7,40	6,77
	Lele	192,20	147,10	26,86	50,95	71,57
	Bandeng	47,80	10,95	-	-	-
	Rumput Laut	-	-	4,56	-	-
Kab. Belitung Timur	Kerapu	9,57	3,96	4,22	0,98	1,64
	Lele	66,16	26,15	85,90	49,38	39,65
	Bandeng	-	-	0,03	0,19	-
	ikan Hias (Satuan: ribu ekor)	4,25	34,80	18,42	-	-
	Rumput Laut	5,00	1,50	-	-	-

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan komoditas unggulan perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018. Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 9.340,93 ton, mengalami peningkatan dari produksi tahun 2017 yang lalu sebesar 3.305,00 ton.. Produksi tertinggi diperoleh dari jenis budidaya tambak yaitu sebesar 6717,54 ton dan udang vanamei sebagai komoditas dengan produksi tertinggi.

Kota Pangkalpinang tercatat sebagai daerah penyumbang produksi budidaya terbesar yaitu sebesar 5.767,49 ton disusul oleh Kabupaten Bangka Tengah dengan produksi sebesar 1.467,31 ton . Tahun 2018 juga terjadi pergeseran jenis budidaya dimana kegiatan budidaya air payau khususnya tambak udang vanamei

banyak bermunculan di beberapa kabupaten. Kegiatan budidaya air tawar mulai menggunakan Sistem Bioflok yang membutuhkan modal sedikit lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional tetapi bisa diterapkan di lahan yang tidak terlalu luas dengan hasil panen yang lebih banyak dibandingkan dengan cara konvensional. Untuk budidaya laut mulai kembali menunjukkan geliatnya terutama untuk komoditas kerapu dan kekerangan. Mulai membaiknya harga dan permintaan untuk komoditas kerapu menyemangati pembudidaya dalam memulai usahanya kembali. Namun ketersediaan benih dan faktor alam masih menjadi kendala yang harus dicari solusinya.

b) Perikanan Tangkap

Sumber daya perikanan tangkap di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk dalam di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber: KEP MEN KP Nomor: KEPULAUAN 45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumber daya ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia). Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km² atau 80 persen dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km.

Tabel II.160
Sentra produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Belitung
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 - 2018

Kabupaten/ Kota	Jenis Ikan	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten Bangka	Tongkol	834,70	60,70	103,80	19,76	1.249,66
	Tenggiri	1.147,90	609,40	626,10	1.504,88	2.050,28
	Kerapu	1.134,10	112,50	169,00	554,29	598,23
Kabupaten Belitung	Tongkol	106,80	27,20	86,30	88,65	220,90
	Tenggiri	1.675,30	601,70	839,40	1.625,61	906,49
	Kerapu	2.608,70	2.670,40	2.788,80	3.448,44	3.552,34
Kota Pangkalpinang	Tongkol	1.144,20	-	-	-	371,28
	Tenggiri	302,00	235,70	10,70	19,48	1.104,70
	Kerapu	695,10	158,10	55,80	97,55	236,61
Kab. Bangka Barat	Tongkol	171,00	41,50	125,90	-	830,39
	Tenggiri	793,80	356,90	616,70	607,21	539,91
	Kerapu	183,00	309,80	96,50	127,57	76,28
Kab. Bangka Tengah	Tongkol	1.280,10	30,40	33,60	241,28	520,94
	Tenggiri	2.627,20	377,30	1.163,00	1.179,87	1.880,92
	Kerapu	166,70	774,30	700,00	241,28	916,72
Kab. Bangka Selatan	Tongkol	-	143,10	152,50	281,54	1.646,64
	Tenggiri	2.575,50	966,00	1.476,70	747,64	3.771,48
	Kerapu	929,00	92,80	190,80	540,55	249,39
Kab. Belitung Timur	Tongkol	3.602,20	8.721,60	1.123,70	-	4.932,08
	Tenggiri	5.013,80	4.746,30	3.515,30	3.094,98	3.209,53
	Kerapu	545,20	2.002,50	5.951,50	2.439,74	3.502,40

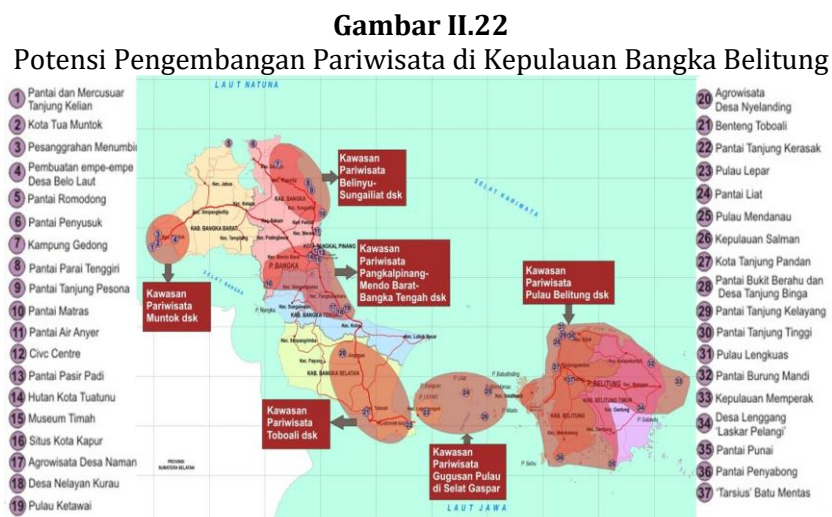
Berdasarkan Tabel II.160 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 228.980

ton lebih besar dibandingkan tahun 2017 lalu yaitu 208.019.7 ton. Produksi perikanan tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 3 (tiga) terakhir terus mengalami peningkatan. Artinya hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap memberikan kontribusi yang bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Bangka Belitung 2018, jumlah nelayan di tahun 2018 adalah sebanyak 39.122 orang. Jumlah ini sedikit turun dari tahun sebelumnya yaitu 42.662 orang nelayan. Walaupun jumlah nelayan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, tetapi produksi ikan laut pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Hal ini menunjukan bahwa produktivitas nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan. Adapun sebaran nelayan terbanyak ada di Kabupaten Belitung sebanyak 9.679 orang disusul oleh Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 7.798 orang nelayan. Selanjutnya jumlah perahu/kapal perikanan di tahun 2018 adalah sejumlah 16.199 unit, dengan unit terbanyak yaitu kapal motor tempel berukuran kurang dari 5GT.

B. Urusan Pariwisata

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang kaya dan bernilai tinggi dan saat ini mulai mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai sektor yang ramah lingkungan, pariwisata juga diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat yang saat ini masih mengandalkan pada sektor pertambangan.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.22 berikut :



Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Tabel II.161

Kunjungan Wisatawan Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Wisatawan Domestik	236.370	369.743	465.554	460.236	362.279	417.818
2.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.035	3.020	4.690	6.613	7.143	8.124
3.	Jumlah	238.405	372.763	470.244	466.876	369.422	425.942

Sumber : BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan dibagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan hal ini akan berdampak pada meningkatnya perekonomian di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2013 jumlah wisatawan sebanyak 238.405 orang dan meningkat secara bertahap setiap tahunnya menuju 369.422 orang pada tahun 2017.

Tabel II.162Rata-rata Lama Menginap Wisatawan (Hari) Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.	Wisatawan Mancanegara	2,22	2,94	3,28	2,11	3,10
2.	Wisatawan Domestik	1,93	2,02	1,90	1,76	1,79

Sumber : BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara tahun 2013 selama 2,22 hari dan meningkat menjadi 3,10 hari pada tahun 2017, sedangkan rata-rata lama menginap wisatawan domestik selama 1,93 hari pada tahun 2013 dan menurun menjadi 1,79 hari pada tahun 2017. Rata-rata lama menginap wisatawan domestik cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan wisatawan mancanegara dikarenakan tujuan wisatawan domestik mengunjungi suatu daerah adalah dalam rangka mengunjungi teman atau keluarga maupun tugas kedinasan.

Tabel II.163Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2016

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata					
		2015			2016		
		Tersertifikasi	Jumlah	%	Tersertifikasi	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)
1	Bangka	25	396	6,31	10	395	2,53
2	Belitung	46	732	6,28	50	889	5,62

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja Sektor Pariwisata					
		2015			2016		
		Tersertifikasi	Jumlah	%	Tersertifikasi	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(1)
3	Bangka Barat	9	93	9,68	4	92	4,35
4	Bangka Tengah	24	316	7,59	10	303	3,30
5	Bangka Selatan	5	28	17,86	4	30	13,33
6	Belitung Timur	36	98	36,73	25	103	24,27
7	Pangkalpinang	56	604	9,27	13	583	2,23
Total		201	2.267	8,87	116	2.395	4,84

Persentase tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 8,87 persen di tahun 2015 dan menurun di tahun 2016 menjadi 4,84 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang tersertifikasi masih jauh dari ideal untuk mendukung pelayanan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan realisasi PAD sektor pariwisata Kabupaten Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disebabkan oleh berkembangnya pariwisata di Kabupaten Belitung setelah ditetapkannya Pulau Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Geopark Pulau Belitung sebagai Geopark Nasional.

Tabel II.164
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013– 2017

NO	KAB/KOTA	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PANGKALPINANG	7.336.894.862	8.801.420.374	9.631.350.478	9.954.137.659	11.583.060.799,00
2	BANGKA	3.599.872.745	4.136.429.771	4.236.244.364	4.850.669.654	4.496.786.900,33
3	BANGKA TENGAH	6.472.305.848	7.431.657.014	7.419.934.320	10.835.828.660	10.130.943.652,90
4	BANGKA BARAT	982.272.425	1.088.258.520	1.268.342.766	1.279.951.251	1.929.421.180,70
5	BANGKA SELATAN	880.910.600	1.292.168.800	1.254.853.300	1.228.007.952	1.453.701.050,00
6	BELITUNG	5.415.332.790	7.223.515.080	10.606.105.256	14.168.692.380	16.498.482.650,60
7	BELITUNG TIMUR	1.117.619.224	1.830.114.107	1.421.310.603	1.319.978.955	1.504.338.120,00
PAD 7 Kab/Kota		25.805.208.493	31.803.563.666	35.838.141.086	43.637.266.511	47.596.734.354,00
Kenaikan		37,82	23,24	12,69	21,76	9,07

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2011 sebesar 3,53 persen sedangkan pada Tahun 2017 sebesar 4,06 persen terjadi kenaikan yang tidak signifikan dikarenakan selama kurun waktu 6 tahun terjadi kenaikan sebesar 0,53 persen sehingga hal ini perlu didukung dengan berbagai program/kegiatan pemerintah yang bersinergi dan berkesinambungan dimana sektor pariwisata bukan merupakan sektor penyumbang utama PDRB.

C. Urusan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034, Pasal 31 menyatakan bahwa Kawasan peruntukan pertanian adalah seluas 903.450 Ha yang terdiri atas lahan peruntukan tanaman pangan 355.453 Ha, hortikultura 221.512 Ha, perkebunan 316.383 Ha, dan peternakan 10.102 Ha.

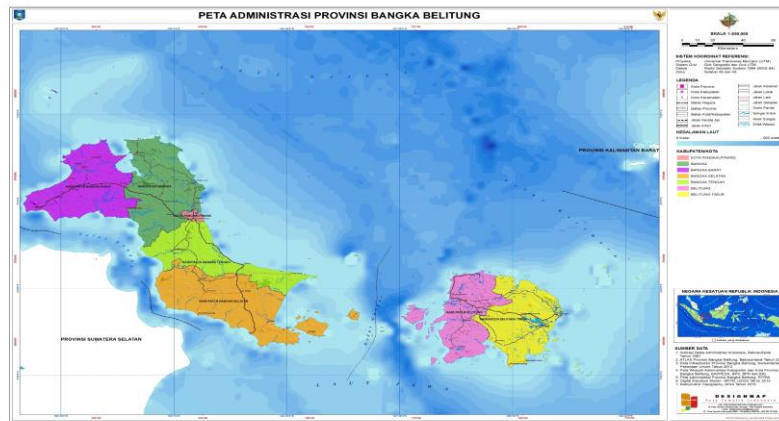
Tabel II.165
Luas Lahan (Ha) Menurut Penggunaan Lahan per-Kabupaten
di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2018

Penggunaan Lahan		Kabupaten							Luas Total (Ha)
		Bangka	Bangka Barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II	LAHAN PERTANIAN	236.227	195.684	168.131	231.830	195.777	143.655	2.108	1.173.412
	1.1 Lahan Sawah	3.645	2.542	306	14.789	1.159	2.832	-	25.053
	a. Irigasi	1.078	200	53	1.600	1.061	974	-	4.966
	b. Tadah hujan	943	2.342	253	11.687	98	1.858	-	17.181
	c. Pasang surut	390	-	-	-	-	-	-	390
	d. Lebak	1.054	-	-	1.502	-	-	-	2.556
		232.672	193.142	167.825	217.041	194.618	140.824	2.108	1.148.319
	a. Tegal	37.690	2.365	12.655	17.976	10.950	15.383	901	97.930
	b. Ladang	12.818	4.087	1.798	1.985	9.175	593	-	30.416
	c. Perkebunan	108.041	60.982	24.444	72.764	61.608	66.092	478	394.408
	d. Hutan rakyat	13.702	3.468	-	1.448	12.976	12.059	8	43.661
	e. Pengembalaan	-	1.049	-	557	417	1.208	1	3.232
	f. Sementara tidak diusahakan	27.544	15.820	-	5.590	2.502	7.309	410	59.174
	g. Lain-lain	32.697	105.371	128.918	116.689	96.990	38.180	311	519.497
II	LAHAN NON PERTANIAN	58.841	92.747	597.80	128.878	33.592	107.036	9.732	490.607
II.1	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	58.841	92.747	59.780	128.878	33.592	107.036	9.732	490.607
	Jumlah	295.068	228.431	227.911	360.708	229.369	250.691	11.840	1.664.018

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2018

Sedangkan berdasarkan penggunaan lahan/*land use* atau existing area menurut data statistik BPS tahun 2016 adalah luas lahan pertanian yang diusahakan 683.717 ha dari total luas lahan pertanian 1.186.652 Ha. Berdasarkan data luasan areal baik RTRW maupun penggunaan lahan dapat ditelaah bahwa potensi pembangunan pertanian masi sangat memungkinkan untuk dikembangkan baik sebagai kawasan pertanian sub-sektor tertentu maupun pertanian terpadu. Secara terperinci penggunaan lahan/*land use* di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut:

Gambar II.23
Peta Administrasi Prov.Kep.Bangka Belitung



Beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dalam pembangunan pertanian selama periode 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 yang menjadi sebagian isu-isu strategis, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;
2. Sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran;
3. Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah.
4. Lahan Pertanian :
 - (a) Belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian;
 - (b) Konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian;
 - (c) Kecenderungan penurunan kualitas lahan, sebagai akibat pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus menerus;
 - (d) Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit;
 - (e) Lahan untuk usaha ternak yang belum cukup tersedia;
 - (f) Ketidakpastian status kepemilikan lahan.
5. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;

6. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
7. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian
 - (a) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi;
 - (b) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk;
 - (c) Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di sektor pertanian;
 - (d) Belum Optimalnya peran penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani;
8. Terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.

Kondisi terkini dan isu-isu strategis pembangunan pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituangkan sebagai kebijakan pada sektor pertanian adalah :

1. Kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas strategis dan unggulan daerah (padi, jagung, cabai, bawang merah, sapi, lada dan karet);
2. Kebijakan pengembangan produk pertanian yang berkualitas dan berdaya saing baik dalam skala nasional maupun internasional serta penyediaan bahan baku agroindustri;
3. Kebijakan pengembangan dan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/perbibitan;
4. Kebijakan pengembangan Infrastruktur, Sarana Prasarana Pertanian sebagai dukungan pengembangan pertanian berkelanjutan;
5. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang unggul dan handal melalui peningkatan sistem penyuluhan, pendidikan dan latihan pertanian;
6. Pengembangan kawasan berbasis pertanian mendukung program tematik: Pengembangan lapangan pekerjaan (ketenagakerjaan); Pengembangan kawasan strategis KTM Batu Betumpang, KTM Gantung; Kebijakan dan

implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; Penurunan angka kemiskinan dan penurunan inflasi di bidang pertanian;

7. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

D. Urusan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas +19.131 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas +10.878 Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas +3.210 Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 659.014,58 Hektar, berdasarkan fungsinya terdiri dari Hutan Konservasi 35.473,00 Ha, Hutan Lindung 189.965,00 Ha, Hutan Produksi 432.882,82 Ha, dan Hutan Produksi Konversi 692,58 Ha.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sampai dengan Tahun 2016, Kawasan Hutan seluas 657.378,26 Ha, terdiri dari 35.750,84 ha Hutan Konservasi, 184.276,95 ha Hutan Lindung, 436.647,89 ha Hutan Produksi dan 692,58 ha Hutan Produksi Konversi. Perkembangan luas kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel II.167.

Potensi Hasil Hutan Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Kayu (HHK) terdiri dari jenis: meranti, ramin, membalong, mendaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, manggeris, gelam, bakau, sengon, dan beberapa jenis dari kelompok rimba campuran lainnya. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) terdiri dari: gaharu, madu alam, jamur, rotan, getah karet, tanaman bahan obat (pasak bumi), tanaman penghasil buah, tanaman penghasil minyak atsiri. Selain hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wisata alam dan jasa lingkungan untuk mendukung pariwisata. Bahkan telah ditetapkan 2 (dua) kawasan hutan yang dikelola melalui skema izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Juru Seberang dan HKm Bukit Peramun di Kabupaten Belitung sebagai Geopark Nasional.

Tabel II.166

Perkembangan Luas Kawasan Hutan Tahun 2014 - 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Fungsi Hutan	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Konservasi (HK)	35.473,00	35.473,00	35.473,00	35.750,84	35.750,84
Hutan Lindung (HL)	189.965,00	189.965,00	189.965,00	184.276,95	184.276,95
Hutan Produksi (HP)	432.882,82	432.882,82	432.882,82	436.647,89	436.647,89
Hutan Produksi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58

Fungsi Hutan	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konversi (HPK)					
Jumlah	659.014,58	659.014,58	659.014,58	657.378,26	657.378,26

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Keterangan :

1. Tahun 2014 s/d 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.798/Menhut-II/2012;
2. Tahun 2017 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017

Kontribusi Kehutanan dan Penebangan Kayu (Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam miliar rupiah), sebagai berikut: 2014 Rp.190,0; 2015 Rp.221,3; 2016 Rp.239,0; 2017 Rp.244,0; 2018 Rp.266,2, terdapat kenaikan selama periode tahun 2014-2018. Kontribusi Kehutanan dan Penebangan Kayu (Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) dalam PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam miliar rupiah), sebagai berikut: 2014 Rp.143,6; 2015 Rp.155,2; 2016 Rp.158,5; 2017 Rp.158,5; 2018 Rp.167,2, terdapat kenaikan selama periode tahun 2014-2018. (Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018).

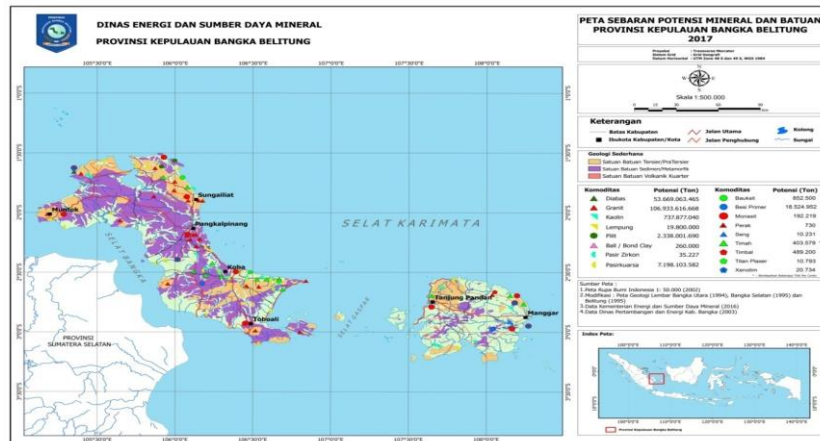
E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggungjawab berbagai sektor terkait.

Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tersaji pada

tabel II.167 berikut. Data potensi bahan galian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah ini masih menggunakan data tahun 2016, hal ini karena pembaharuan data tersebut dilakukan setiap empat tahun sekali.

Gambar. II.24
Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017

Tabel II.167
Potensi Bahan Galian Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(2)
1	Kaolin	737,878.040
2	Pasir kwarsa	7.198.103.582
3	Diabas	53.669.063.465
4	Granit	106.933.616,668

Sumber: ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

F. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.168.

Tabel II.168
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekspor (us Dollar)	1.653,1	1.191,1	1.290,7	1.784,1	1.774,9
	Timah	1.376,8	973,2	963,8	1.390,9	1.361,1
	Non Timah	276,3	217,9	326,8	393,2	413,8
2.	Impor (us Dollar)	58,9	49,9	132,0	74,4	70,5
	Migas	20,3	31,4	41,4	53,3	128,1
	Non Migas	37,7	18,5	90,61	21,1	16,7

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2014, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.376,8 juta USD, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 973,2 juta USD dan pada tahun 2016 tetap mengalami penurunan sampai dengan 963,8 juta USD, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.390,9 juta USD, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 1.361,1 juta USD.

Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2014, impor mencapai 37,7 juta USD dan menurun pada tahun 2015 menjadi 18,5 juta USD dan namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 90,61 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2017 menjadi 21,1 juta USD, namun pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 16, 7 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2012- 2017 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

G. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain adalah:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;

13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung;
dan
15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

Tabel II.169
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Industri Kecil	10.954	12.094	12.732	15.108	17.024
	Laju pertumbuhan	0,22	0,10	0,05	0,15	0,11
2.	Industri Menengah	103	112	106	111	99
	Laju pertumbuhan	-0,06	0,09	0,04	-0,05	-0,12

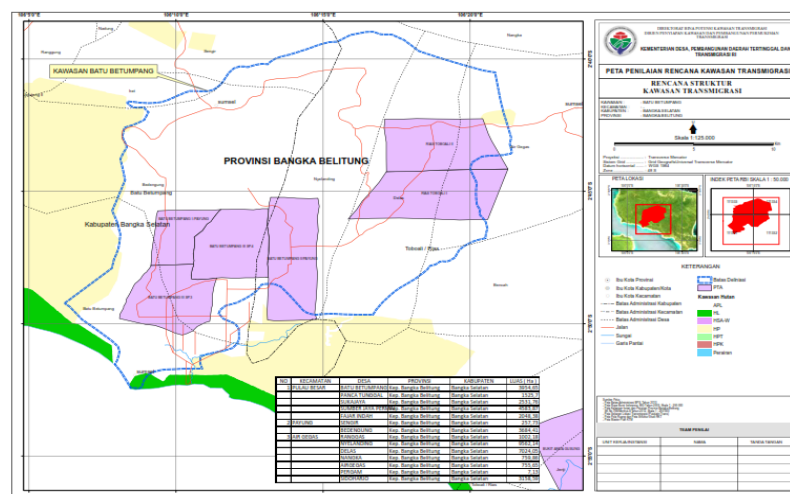
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel II.169 laju pertumbuhan baik industri kecil maupun menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun. Laju pertumbuhan Industri kecil tahun 2014 sebesar 0,22 persen dan secara konsisten turun menjadi 0,10 persen ditahun 2015 dan pada tahun 2016 menjadi 0,05 persen. Pada tahun 2017 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,15 persen dan secara konsisten turun menjadi 0,11 persen Sementara itu pada kegiatan industri menengah, laju pertumbuhan pada tahun 2014 mencapai -0,06 persen dan menunjukkan peningkatan jumlah di tahun 2015 dengan persentase pertumbuhan 0,09 persen, turun sedikit ditahun 2016 sebesar 0,04 persen dan tumbuh negatif sebesar -0,05 persen di tahun 2017. namun mengalami kenaikan tumbuh negatif sebesar -0,12 persen di tahun 2018.

H. Urusan Transmigrasi

Pada urusan transmigrasi terdapat kawasan terpadu mandiri Batu Betumpang yang juga merupakan salah satu Kawasan Strategi Provinsi dengan luas 41.100,3 ha. Kawasan Kota Terpadu Mandiri harus memperhatikan ketentuan/kriteria yakni kawasan tersebut tidak berada di kawasan hutan. Berdasarkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Kabupaten Bangka Selatan (SK Menhut No. 357/Menhut-II Tahun 2004) dapat dilihat bahwa di dalam kawasan tidak memiliki status kawasan hutan. Berdasarkan SK tersebut pada kawasan ini berada dalam area penggunaan lain (APL).

Gambar. II.25
Peta Penilaian Rencana Kawasan Transmigrasi



Tabel II.170
Penggunaan Lahan di Kawasan Batu Betumpang

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
(1)	(2)	(3)
Hutan	2.512,20	6,11%
Hutan Rawa	3.731,56	9,08%
Vegetasi Pantai	6,04	0,01%
Kebun	6.787,10	16,51%
Pemukiman	842,28	2,05%
Semak Belukar	4.046,02	9,84%
Tambak	3,57	0,01%
Pertambangan/Bekas Tambang	572,35	1,39%
Tanah Kosong	5,96	0,01%
Tegalan/Ladang	22.593,22	54,97%
Total	41.100,3	100,00%

Sumber: Diolah dari Peta SPOT 5 dan Kecamatan Dalam Angka 2007

Transmigrasi di Pulau Bangka dimulai sejak tahun 1981, dimana daerah tujuan transmigrasi adalah Kabupaten Bangka dengan lokasi di Kawasan Mudel (UPT Batu Rusa Tengah) dan saat ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah, kemudian telah berkembang menjadi kawasan permukiman perkotaan sehingga batasan dahulu merupakan kawasan transmigrasi sudah tidak terlihat lagi.

Perkembangan transmigrasi di Kabupaten Bangka Tengah awalnya ditempatkan sejumlah 100 kepala keluarga (421 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Transmigrasi daerah setempat yang ditempatkan di UPT Kurau, dengan bidang usaha adalah nelayan, dan pada tahun 1982, 1983 Kabupaten Bangka Tengah dijadikan lagi daerah tujuan Transmigrasi dengan sejumlah 150 kepala keluarga (817 jiwa) yang berasal dari wilayah setempat, dengan bidang usaha yang sama yaitu nelayan.

Ada beberapa titik yang menjadi tujuan transmigrasi di Pulau Bangka yang salah satunya yaitu UPT Rias dan UPT Bukit Anda di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan pada Tahun 2014 ada penempatan transmigrasi di UPT Jebus sebanyak 43 kepala keluarga terdiri dari 10 KK transmigrasi daerah asal Provinsi DIY, 10 KK dari Provinsi Jawa Timur dan 23 KK dari transmigrasi daerah setempat dari Desa Jebus Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, lebih lengkapnya data transmigrasi di Pulau bangka dapat dilihat pada tabel berikut.

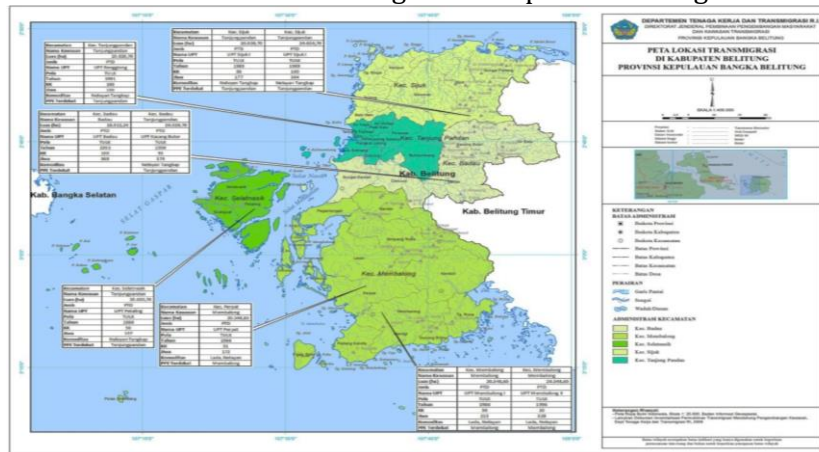
Tabel II.171
Kondisi Transmigrasi Di Wilayah Pulau Bangka

No.	Nama UPT	Lokasi	Jml KK	Jml Jiwa	Asal Trans	Bidang Usaha	Thn Penempatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kurau I	Kab. Bangka Tengah	100	421	Jateng, Lokal	Nelayan	1981-1983	Belum terbit sertifikat lahan karena tumpang tindih dengan kebun sawit perusahaan
2	Kurau II	Kab. Bangka Tengah	150	817	Kurau, Lokal	Nelayan	1982-1983	
3	Rias Toboali I	Kab. Bangka Selatan	298	1376	Jateng, Jabar, Lokal	Pertanian	1982-1983	
4	Rias Toboali II	Kab. Bangka Selatan	350	1284	Jateng, Jabar, Lokal	Pertanian	1991. 1986	
5	Batu Betumpang I/Payung	Kab. Bangka Selatan	500	1917	Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Lokal	Pertanian	1990-1991	
6	Batu Betumpang II/Payung	Kab. Bangka Selatan	499	1958	Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Bali, Lokal	Pertanian	1991-1993-1996	
7	Batu Betumpang III/Payung	Kab. Bangka Selatan	400	1280	Jateng, Jabar, Jatim, Bali Lokal	Pertanian	1994-1995	
8	Batu Betumpang IV/Payung	Kab. Bangka Selatan	380	1382	DKI, Bali, Jabar, Jatim, Jateng, Lokal	Pertanian	1996-1997	
9	Bangka Kota I	Kab. Bangka Selatan	100	372	Jateng, Jabar, Jatim, Lokal	Pertanian	1992	
10	Bangka Kota I	Kab. Bangka Selatan	100	361	Jabar, Jateng	Pertanian	1994	
11	PERMIS	Kab. Bangka Selatan	100	356	Jateng, Jabar, Jatim, Lokal	Pertanian	1995	
12	Bukit Anda	Kab. Bangka Selatan	100	391	Jateng	Pertanian	2004	
13	Bukit Anda	Kab. Bangka Selatan	50	166	Wonosobo	Pertanian	2006	
14	Jebus	Kab. Bangka Barat	43	158	DIY, Jatim, Lokal	Pertanian	2014	

Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Pulau Belitung yang meliputi 2 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, dijadikan tempat transmigrasi mulai pada tahun 1986-1993 dengan asal transmigran dari Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali dan Lokal dengan menempati 9 UPT, dengan bidang usaha sektor pertanian, Untuk lebih jelasnya keberadaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Belitung, dapat dilihat pada tabel II.172.

Gambar II.28
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Tabel II.172
Kondisi Transmigrasi di Wilayah Pulau Belitung

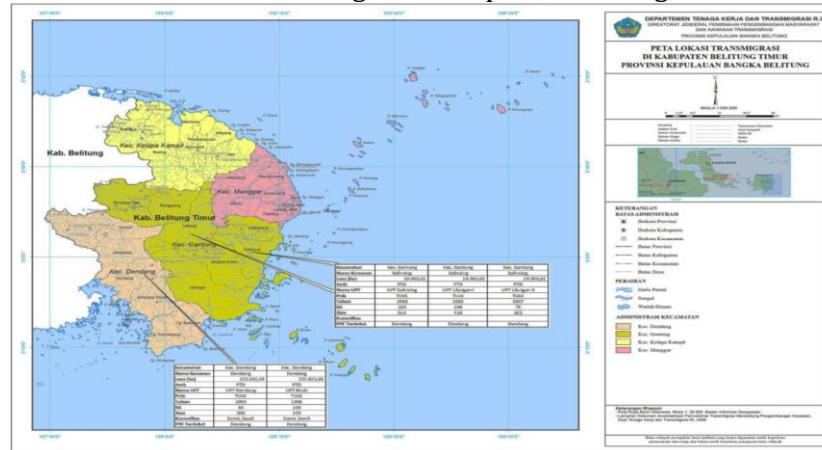
No.	Nama UPT	Lokasi	Jml KK	Jml Jiwa	Asal Trans	Bidang Usaha	Thn Penempatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perpat	Kab. Belitung	51	172	Jateng	Pertanian	1986	Belum terbitnya sertifikat lahan karena tumpang tindih dengan lahan timah
2	Membalong I	Kab. Belitung	50	215	Jateng	Pertanian	1986	
3	Membalong II	Kab. Belitung	100	328	Jatim, Jateng	Pertanian	1996	
4	Petaling, Selat Nasik	Kab. Belitung	50	197	Jateng, Jatim	Pertanian	1988	
5	Sijuk I	Kab. Belitung	50	177	Jabar, Bali	Pertanian	1989	
6	Sijuk II	Kab. Belitung	100	304	Bali	Pertanian	1989	
7	Kacang Butor	Kab. Belitung	93	374	Jateng	Pertanian	1990	
8	Renggiang	Kab. Belitung	100	310	Jatim, Jateng, DIY, Lokal	Pertanian	1991	
9	Badau	Kab. Belitung	100	368	Jabar, DKI, Jateng	Pertanian	1993	
10	Dendang	Kab. Belitung Timur	50	206	Jateng, Lokal	Pertanian	1995	
11	Lilangan I	Kab. Belitung Timur	100	513	Jabar, DKI	Pertanian	1996	
12	Lilangan II	Kab. Belitung Timur	150	513	DIY, Jabar, Jateng	Pertanian	2005	
13	Birah	Kab. Belitung Timur	100	339	DKI, Jatim	Pertanian	1998	
14	Selinsing	Kab. Belitung Timur	100	416	Jabar, Lokal	Pertanian	2005	
15	Selinsing	Kab. Belitung Timur	75	262	Jabar	Pertanian	2007	
	Jumlah		1269	4694				

Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Kabupaten Belitung Timur program transmigrasi di mulai tahun 1995, yang jadi tempat tujuan transmigrasi adalah UPT Dendang, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 50 kepala keluarga (206 jiwa), berasal dari Provinsi Jawa Tengah, dan berasal dari transmigrasi wilayah setempat. Pada tahun 1996 yang dijadikan tempat transmigrasi adalah UPT Lilangan I, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 100 kepala keluarga (513 Jiwa), yang berasal dari Provinsi jabar dan DKI. Pada tahun1998 yang dijadikan daerah tujuan transmigrasi adalah Lilangan II, dengan jumlah transmigrasi sebanyak 150 kepala keluarga (513 jiwa) berasal dari Provinsi Jawa Barat, DKI, dan Jawa Tengah. Pada tahun1998 UPT Birah, menjadi daerah

tujuan transmigrasi dari asal Provinsi Jatim, dan DKI dengan jumlah transmigrasi adalah 100 kepala keluarga (339 jiwa).

Gambar II.29
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

Pada tahun 2005 dan 2007 di Kabupaten Belitung Timur yang dijadikan daerah transmigrasi adalah UPT Selinsing, dengan jumlah transmigrasi 100 kepala keluarga (410 jiwa) berasal dari Provinsi Jawa Barat, dan Transmigrasi berasal dari wilayah setempat. Untuk tahun 2007 jumlah transmigrasi yang ditempatkan di UPT Selingsing sebanyak 75 kepala keluarga (262 jiwa) yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan transmigrasi dari wilayah setempat, bergerak di bidang pertanian.

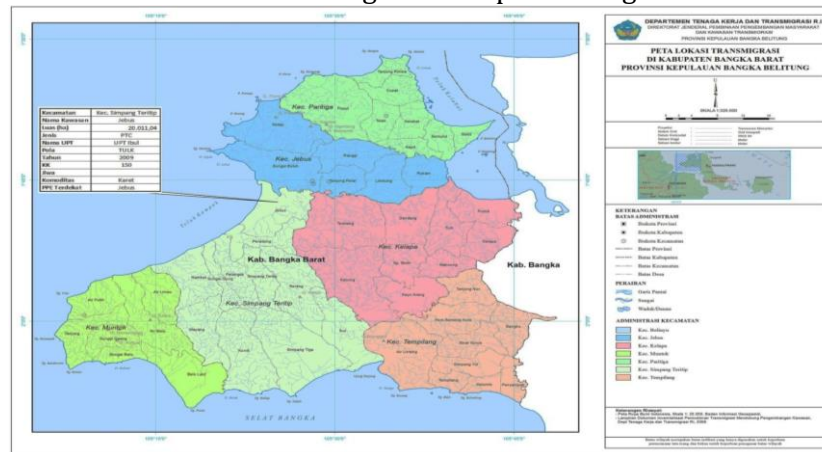
Potensi Wilayah transmigrasi di Kabupaten Belitung Timur adalah :

1. Perkebunan : lada, sawit, karet, coklat, durian, dan kopi
2. Pertanian : Sayur mayur, padi, jagung, dan kedelai
3. Perikanan : Tambak, keramba, dan rumput laut
4. Peternakan : Sapi, Kambing, dan unggas.

Lokasi Transmigrasi Bina, ada di

1. Kecamatan : Gantung
2. Desa : Selinsing
3. Dusun : Danau Merantih
4. Luas Areal : 1.500 ha
5. Daya Tampung : 175 Kepala Keluarga (KK)

Gambar II.30
Peta Lokasi Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat



Sumber: Profil Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, 2016

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi per kapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.173.

Tabel II.173
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2013 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata rata pengeluaran per kapita	936.726	1.047.711	1.118.101	1.211.879	1.360.994

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2018

Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari Rp. 936.726 pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.360.994 pada tahun 2017.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionilasi tukar petani ditampilkan pada

Tabel II.174.

Tabel II.174
 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2013 s.d 2018
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	128,47	112,62	121,95	120,77	116,43	106,13
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	128,14	110,89	116,47	119,09	122,09	125,73
3	Rasio	1,003	1,016	1,05	1,01	0,96	0,84

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Berdasarkan tabel II.174 menunjukkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2018 bersifat fluktuatif. Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2013-2015 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2016-2018 mengalami penurunan. Selanjutnya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2018 disebabkan oleh subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 4,21 persen, subsektor peternakan sebesar 0,72 persen dan subsektor perikanan sebesar 0,23 persen. Artinya dengan adanya penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3 (tiga) tahun terakhir, akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani.

C. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.176 dapat dijelaskan bahwa konsumsi rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013 s.d. 2015 yaitu sebesar Rp. 8.746.368 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 9.286.512 pada tahun 2015. Namun menurun signifikan di tahun 2016 menjadi Rp. 615.498.

Tabel II.175
 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2013 s.d 2017
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	8.746.368	9.082.432	9.286.512	615.498	N/A
2	Total pengeluaran	16.063.118	16.671.131	17.264.385	1.211.879	N/A
3	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	N/A

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.176 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau

kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju. Secara keseluruhan total pengeluaran tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.211.879. Total pengeluaran paling tinggi adalah Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.499.317, sedangkan total pengeluaran paling kecil adalah Kabupaten Bangka Tengah sebesar Rp. 1.034.887.

Tabel II.176
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2016
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	627.426	1.205.228	
2	Kabupaten Bangka Barat	537.508	1.118.834	
3	Kabupaten Bangka Selatan	N/A	1.046.885	
4	Kabupaten Bangka Tengah	513.860	1.034.887	
5	Kabupaten Belitung	596.381	1.211.879	
6	Kabupaten Belitung Timur	610.456	1.206.380	
7	Kota Pangkalpinang	816.751	1.499.317	
Prov. Kep. Bangka Belitung		615.498	1.211.879	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

D. Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.177.

Tabel II.177
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	19.664	12.532	12.532	8.255	16.264	N/A
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	39	40	40	104	156	164
3	Rasio daya serap tenaga kerja	504,20	313,30	313,30	79,37	104.26	N/A

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

E. Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi

pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.178.

Tabel II.178
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	19.664	12.532	12.532	8.255	16.264
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	39	40	40	104	156
3	Rasio daya serap tenaga kerja	504,20	313,30	313,30	79,37	104.26

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.179
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panjang Jalan Provinsi	899,33	899,33	899,33	899,33	850,99
2	Jumlah Kendaraan	395.951	398.065	381.193	421.792	413.919
3	Rasio	0,0022	0,0022	0,0023	0,0021	0,0020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perhubungan

Tabel II.180
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	N.A	81.821	-
2	Kabupaten Bangka Barat	700,920	43.430	0,016
3	Kabupaten Bangka Selatan	633,970	42.442	0,013
4	Kabupaten Bangka Tengah	346,720	44.006	0,007
5	Kabupaten Belitung	666,024	71.557	0,009
6	Kabupaten Belitung Timur	880,880	45.617	0,019
7	Kota Pangkalpinang	850,990	85.346	0,009
	Prov. Kep. Bangka Belitung	4.079,504	413.919	0,0098

Sumber: Dinas PUPR, 2018 (* Untuk Kabupaten Bangka Belum Terisi Masih dianalisis)

Tabel II.181 menunjukkan jumlah penumpang angkutan laut baik kedatangan dan keberangkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dari tabel

tersebut dapat diketahui bahwa baik kedatangan maupun keberangkatan penumpang yang menggunakan angkutan laut mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel II.181
Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Jiwa/Orang)

Jenis Pelayaran	Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017
1. Luar Negeri					
a. Embarkasi	-	-	-	-	-
b. Debarkasi	-	-	-	-	-
2. Dalam Negeri					
a. Embarkasi	118266	77783	54183	32729	33167
b. Debarkasi	108150	64383	48030	32293	29183
Jumlah/ Total	545840	142166	102213	65022	62350

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

B. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.182.

Tabel II.182
Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	233.977 Ha	295.068 Ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 Ha	282.061 Ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 Ha	360.707 Ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 Ha	212.677 Ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 Ha	229.369 Ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 Ha	250.691 Ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 Ha	11.840 Ha	0,19
	Jumlah	1.186.652 Ha	1.542.414 Ha	0,73

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

C. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.183

Infrastruktur Tahun 2013 s.d 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,25	5,83	3,21			
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	26	26	26			
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	100			80,14
4.	Persentase Penduduk berakses airbersih	29,29	64,98	46,22			87,24
5.	Rasio daya tersambung padarumah tangga	69,13	67,95	80,96			
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	92,81	80,96	88,96			
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,65	0,66	0,68			
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,93	0,95	0,90			

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017***2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi****A. Angka Kriminalitas**

Hakikat manusia sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan pikiran di dunia ini menjadikan manusia selalu mempunyai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Era modernisasi dan globalisasi telah menghapus batasan-batasan yang ada antar negara di dunia. Berbagai informasi dan pengaruh dari suatu negara dapat masuk dengan mudah ke negara lainnya. Sehingga jarak dan waktu pun saat ini tidak memiliki batasan. Akibatnya negara-negara yang tidak memiliki pertahanan atau filter yang kuat, tidak dapat memilah mana pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik. Selain memberi kemudahan di kehidupan manusia modernisasi juga menimbulkan masalah sosial. Kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan dan perjudian merupakan gejala penyakit sosial yang harus di berbatas dari muka bumi. Indonesia pun sudah mulai banyak terkena proses dari akulturasi negara-negara barat.

Modernisasi sangat cepat merubah budaya Indonesia yang ketimuran dan di kenal dengan sopan santunnya menjadi lebih kebaratan dengan kebebasannya. Modernisasi banyak memberi perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang juga sangat besar dari proses modernisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas. *Crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu: pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis,

psikologis dan emosional. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiel yang tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiel yang melimpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, sungguh pun demikian trend tindakan pidana menurun akan tetapi masih ada tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hal itu dapat di lihat dari jumlah kejahatan pidana 207 kasus atau 25,37 persen dari 816 kasus di 2016 menurun menjadi 609 kasus pada 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 45,65 persen atau 331 kasus. Sedangkan data registrasi Polisi Daerah Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan bahwa kejadian kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2014-2018 cenderung berfluktuasi.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

Tabel II.184

Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2014		2015		2016		2017		2018*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Narkoba	188	197	227	192	107	54	257	132	121	75
2	Pembunuhan	9	8	9	10	2	2	10	8	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Seksual	40	28	58	55	22	13	75	70	7	5
5	Penganiayaan	73	46	88	53	25	8	75	62	10	8
6	Pencurian	148	71	188	77	71	21	70	35	47	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	3	2	8	6	6	2	0	0	0	0
9	Penipuan	182	82	124	63	81	20	31	24	8	5
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	1	0	33	0	33	30
11	Pembakaran	9	9	15	8	3	0	1	1	1	1
12	Penyelundupan	5	5	5	4	3	0	0	0	0	0
13	Lain-lain	1501	834	1756	1021	495	185	57	42	102	63
Total		2158	1282	2478	1489	816	302	609	374	331	210

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

B. Jumlah Demo

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan). Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapa saja, baik wanita maupun pria. Dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut umur. Kejahatan dan tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat sekarang ini maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dimana pelakunya adalah seorang remaja. Pelaku tindakan kriminal saat ini tidak hanya didominasi orang dewasa namun anak pada usia remaja juga sudah banyak yang melakukan tindakan kriminal. Peran remaja yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan dan kemajuan bangsa ini pada kenyataannya melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum banyak remaja yang melakukan perbuatan yang sangat tidak diharapkan sebagai penerus generasi bangsa. Kenyataan yang terjadi pada saat ini tindakan penyimpangan yang dilakukan remaja tidak hanya sebatas kasus kenakalan remaja namun sudah menjurus pada tindakan kriminal. Bentuk tindakan kenakalan remaja yang terjadi biasanya seperti tauran/perkelahian dan seks bebas. Namun saat ini muncul tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan remaja seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, penipuan bahkan tindakan pembunuhan.

1) Demonstrasi

Aksi demonstrasi dilakukan oleh banyak orang dan biasanya dilakukan oleh

mahasiswa, buruh, atau anggota suatu organisasi. Demonstrasi ini merupakan salah satu cara kelompok tertentu menyuarakan idenya dan tidak heran aksi ini kerap menimbulkan kerugian meskipun tujuannya bisa dibilang cukup baik, “agar suara didengar”. Faktor Penyebab Demonstrasi Kegiatan aksi unjuk rasa tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang melatar belakangnya. Mengacu pada pengertian demonstrasi, adapun beberapa faktor penyebab terjadinya demonstrasi adalah sebagai berikut:

a) Ketidakadilan Sosial

Isu ketidakadilan sosial seringkali menjadi penyebab timbulnya gesekan di masyarakat yang berujung pada aksi unjuk rasa. Masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan sosial berkumpul untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya. Dengan melakukan aksi ini para demonstran menuntun dan berharap akan mendapatkan keadilan yang lebih merata.

b) Ketidaksesuaian Pendapat

Perbedaan pendapat yang sangat bertolak belakang antar masing-masing pihak dapat menyebabkan timbulnya aksi unjuk rasa. Demonstrasi dianggap dapat menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi sehingga dengan aksi demonstrasi diharapkan dapat menampung pendapat hingga tercapai tujuan bersama.

c) Aspirasi Masyarakat yang Belum Terpenuhi

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk aksi masyarakat dalam memantau kinerja para pengelola negara. Dengan adanya demonstrasi akan membuat para pengelola negara lebih sigap dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relative lebih aman. Jumlah demo Tahun 2014–2018 masih bersifat fluktuatif yang disebabkan terjadinya gejolak di masyarakat akibat inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang tiap tahunnya. Diharapkan tahun–tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.185.

Tabel II.185

Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 -2018

NO	JENIS	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bidang Politik	5	4	12	5	2
2	Bidang Ekonomi	10	24	15	3	2
3	Pemogokan Kerja	2	3	-	-	1
4	Jumlah unjuk rasa	17	30	27	8	5

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

C. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.187, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 10 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah serta pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.

Tabel II. 186
Jumlah Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nomor	Peraturan Daerah
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
10	5 Tahun 2017	Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan

menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei.

PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

E. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.188 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2014-2018 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau restribusi harus diatur dengan Undang-Undang Dasar hukum pengenaan pajak

daerah dan restribusi daerah antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah.

Tabel II. 187
Realisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Tahun 2014 s.d 2018
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp juta)

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	PAJAK DAERAH					
1	Pajak Kendaraan Bermotor	162.036,29	172.239,98	171.879,40	197.962,271	208.756,99
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	139.175,29	110.239,08	111.656,78	169.320,289	230.410,24
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	163.479,97	165.429,32	151.587,72	182.118,099	265.482,40
4	Pajak Air Permukaan	4.036,07	4.860,32	5.707,53	7.541,444	10.091,51
5	Pajak Rokok	39.534,99	54.176,24	67.152,03	72.194,352	72.494,28
	JUMLAH PAJAK DAERAH	508.262,61	506.944,94	507.983,46	629.136,46	787.235,42
B	RESTRIBUSI DAERAH	9.357,40	11.520,36	8.651,87	5.434,54	7.613,35
1	Restribusi Jasa Umum	5.743,20	7.643,79	4.337,02	1.708,72	2.826,05
	1 Restribusi Pelayanan Kesehatan	3.279,50	5.022,76	1.231,27	489,738	518,771
	2 Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	316,29	272,42	156,67	-	-
	3 Restribusi Pelayanan Pendidikan	2.147,42	2.348,61	2.949,08	934,985	1.518,280
	4 Restribusi Tempat Penggantian Cetak Peta	-	-	-	284,000	789,000
2	Restribusi Jasa Usaha	1.363,58	1.847,89	2.634,87	2.688,81	4.010,41
	1 Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.226,11	1.558,83	2.380,81	2.333,64	3.570,97
	2 Restribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	-	57,94	46,94	99,36	78,86
	3 Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	65,570	122,25	101,24	93,23	150,33
	4 Restribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	71,90	108,87	105,88	162,58	210,26
3	Restribusi Perizinan Tertentu	2.251	2.029	1.680	1.037	777
	1 Restribusi Izin Trayek	55,82	37,45	60,50	86,36	40,50
	2 Restribusi Izin Usaha Perikanan	99,71	41,71	129,69	149,74	133,30
	3 Restribusi Perpanjangan IMTA	2.095,10	1.949,53	1.489,79	800,91	603,08

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Dari data realisasi pajak daerah dan restribusi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2017 jumlah Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp. 629.136,46, (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 787.235,42 (dalam juta) atau mengalami kenaikan sebesar 25,12 persen, sedangkan untuk Restribusi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di tahun 2017 jumlah yang diperoleh sebesar Rp. 5.434,54 (dalam juta) meningkat signifikan di tahun 2018 sebesar 40,09 persen menjadi Rp. 7.613,35 (dalam juta).

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II.188

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel II.188 dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per 10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per 10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per 10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan

latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.190 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana padatahun 2013 sebesar 46,83 persen dan konstan sepanjang tahun 2014 s.d. 2015, tetapi kemudian meningkat menjadi 46,92 persen. Namun pada tahun 2017 menunjukkan penurunan menjadi 46,16 persen.

Tabel II.189
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	369.912	377.995	386.133	392.371	392.057
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	49.520	50.602	51.688	55.372	59.810
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	419.432	428.597	437.821	447.743	451.867
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	895.691	915.284	934.992	954.224	978.998
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,83	46,83	46,83	46,92	46,16

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Data di bawah ini merupakan data yang terkait dengan data urusan pemerintah bidang pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian 5 tahun terakhir dan merupakan data RENSTRA pada periode Tahun 2012-2017 dan LAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2018 yang tertuang pada tabel II.190

Tabel II.190
Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rasio kecukupan sarana dan prasarana dengan kebutuhan pegawai sesuai kualitas pelayanan yang baik	-		0,16	0,20	0,20	0,25	0,25	0,33	0,30		

SASARAN	INDIKATOR	SATU AN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Persentase barang milik daerah/kantor yang terinventarisir sesuai kaidah pencatatan BMD	Perse n		50	60	60	65	65	70	70		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penilaian akuntabilitas kinerja	Nilai / (Skor)		55,06/ (C)	61/(B)	60,69/(B)	61/(B)	60,96/ (B)	70 (B)	63,65 (B)	76	67.17 / (B)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai		2,4	2,4	2,4	2,5	2,44	2,5	2,44		
	Persentase Kecamatan berkinerja baik	Perse n		20	20	20	20	0	20	0		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase unit layanan yang telah menerapkan standar pelayanan publik	Perse n			100	100	100	100	100	100		
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Perse n		85	90	90	90	90	100	100		
Meningkatnya implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang di implementasikan	Perse n			26	26	32	91	42	21		
Meningkatnya peranan penggunaan layanan administrasi pembangunan	persentase SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	Perse n	-	-	100	72,22	80	66,67	90	89		
Berkembangnya ekonomi UMKM	persentase UMKM yang berkembang	Perse n			20	20	75	75	100	80		

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Tersaluranya bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat yang membutuhkan	persentase bantuan sosial dan hibah yang tepat guna dan sasaran ke masyarakat	Persen			100	100	100	100	100	92,3		

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Sedang Visi dan Misi Gubernur periode 2017- 2022 sudah berbeda, dengan kata lain, terjadinya perubahan terkait kebijakan serta indikator yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur melalui RPJMD. Sasaran dan Indikator sesuai dengan Sekeretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sesuai table II.191

Tabel II.191
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya kualitas dan jumlah kebijakan dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	Persentase uraian dalam LPPD Provinsi Kep. Bangka Belitung yang memiliki capaian kinerja dengan predikat tinggi	Persen	80	89,63	85		90		95	-	100	
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kwilayahan dan kerjasama	Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang efisien dibidang otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerjasama	terlaksananya pelayanan administrasi dan penyediaan dokumen bagi pemerintah daerah	Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya partisipasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik serta kebebasan menyampaikan pendapat/aspirasi		Persen	80		85		90		95		100	
Meningkatnya pelayanan publik dibidang	Persentase fasilitasi bidang keagamaan	Persen	75	96,43	85	-	80	-	85	-	85	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
keagamaan												
Meningkatnya pelayanan publik kepada penerima hibah dan bansos	Persentase masyarakat penerima hibah bansos yang terbaru	Persen	80	100	85	-	90	-	95	-	90	
Meningkatnya pelayanan dibidang pendidikan KB, pemuda dan pariwisata	Persentase perumusan kebijakan dan koordinasi bidang pendidikan KB, pemudan dan pariwisata	Persen	70	100	70	-	75	-	80	-	100	
Meningkatnya penyusunan kebijakan dibidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum	Persentase kualitas dan kuantitas produk hukum	Persen	80	89	85	-	90	-	95	-	100	
	Persentase pelayanan hukum pemerintah daerah	Persen	80	95,8	85	-	90	-	95	-	100	
	Persentase publikasi produk hukum	Persen	80	96	85	-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dibidang sumber daya alam	persentase rekomendasi kebijakan terkait sumber daya alam	Persen	80	100	85	-	90	-	95	-	95	
Meningkatnya rekmendasi kebijakan dibidang BUMD, penanaman modal, pariwisata dan budaya	persentase rekomendasi kebijakan terkait BUMD, penanaman modal, pariwisata dan budaya yang diimplementasikan	Persen	80	100		-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya rekomendasi kebijakan dibidang administrasi perekonomian	persentase rekomendasi kebijakan terkait administrasi perekonomian yang diimplementasikan	Persen	80	100		-	90	-	95	-	100	
Meningkatnya fasilitasi pengendalian kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan dan koordinasi bidang pembangunan yang memanfaatkan	Persen	80	94	85	-	90	-	95	-	100	
Terciptanya pengadaan barang atau jasa yang transparan, akuntabel, terbuka dan kompetitif	Persentase belanja pengadaan melalui e-procurement	Persen	90	100	92	-	94	-	96	-	98	
Meningkatnya nilai manajemen perubahan	Persentase peningkatan komitmen pimpinan PD dan pegawai dalam melakukan RB	Persen	50	100	53	-	60	-	65	-	68	
	Persentase pola pikir dan budaya kerja	Persen	40	100	44	-	47	-	52	-	56	
	Pesentase menurunnya resiko kegagalan	Persen	50	100	53	-	56	-	58	-	62	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR									
			2018		2019		2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi	Persentase perangkat daerah yang efektif dan efisien	Persen	50	100	54	-	56	-	59	-	62	
Meningkatnya penataan ketatalaksanaan pemda	Persentase peningkatan ketatalaksanaan pemda	Persen	55	88,89	60	-	62	-	64	-	68	
Meningkatnya nilai akuntabilitas	Persentase peningkatan nilai laporan kinerja	Persen	56	100	60	-	64	-	67	-	70	
Meningkatnya kualitas pembinaan pelayanan publik	Index pelayanan publik	Persen	50	100	54	-	58	-	62	-	68	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang kerumahtanggaan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang perlengkapan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Tingkat kepuasan atas pelayanan bidang keuangan	Persen	62,51	100	64,46	-	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persentase informasi kehumasan yang diterima oleh publik	Persen	80	100	100	-	100	-	100	-	100	
Meningkatnya agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persentase agenda pimpinan daerah yang terlayani	Persen	80	100	100	-	100	-	100	-	100	

Keterangan: T= Target; R= Realisasi

Untuk tahun 2020-2022 Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi perubahan sasaran dan indikator, hal tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dengan perubahan RPJMD 2017-2022 sesuai dengan table II.192.

Tabel II.192
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Terimplementasikan	Persen	90		95	-	100	
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pembinaan Agama, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan dibidang Agama, Sosial dan Budaya yang Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	90	
Meningkatnya Keselarasan Kebijakan dibidang Hukum	Persentase kebijakan di bidang produk hukum yang Selaras dan Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	100	

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan dibidang Perekonomian dan administrasi Pembangunan yang Terimplementasikan	Persen	90	-	95	-	95	
Meningkatnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kematangan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Kematangan	3	-	4	-	5	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tingkat Kepuasan Pelayanan Umum dan Kesekretariatan Setda	Persen	65,42	-	66,4	-	67,4	
Meningkatnya Penataan dan Penguatan Organisasi	Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi	Persen	56	-	59	-	62	

2.1.4.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pusat maupun daerah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan pemetaan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut pemetaan pencapaian indikator TPB 2014-2018 dengan RPJMD.

Tabel II.193
Pemetaan Capaian Indikator Pembangunan erhadap Target/Indikator TPB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TAR-GET	INDIKATOR	INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	—	5,4	5,22	5,30	5,25
1.3.	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persentase kepesertaaan JKN	Persen	—	—	73,25	74,9	76,54
	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaaan JKN Ketenagakerjaan	Jiwa	—	—	73,25	74,9	77
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan		Orang	—	—	—	42.942	86
1.4.	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		Persen	—	73,33	74,99	87,78	—

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap		Persen	56,15	56,88	57,6	58,33	—
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin		Persen	65,83	63,94	63,65	71,1	68,5
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak	Persen	—	68,03	63,95	68,14	66,83
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		Persen	—	80,13	82,49	83,56	85,64
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase Rumah layak huni	Persen	—	13,5	10,92	3,41	—
	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat		Persen	96,49	96,82	96,33	96,07	97,71
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		Persen	71,83	72	69,21	70,3	73,96
	1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/P aket C	Persen	56,9	35,89	24,7	53,47	57,86
	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		Persen	—	93,43	93,71	82,18	86,66
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN		Persen	—	98,35	98,34	98,87	—
1.5.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Orang	474	202	109	22230	5891
	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah		Lokasi	—	—	—	5	1
2.1.	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).			—	—	—	13	—
	2.1.1.(a) Prevalensi	Prevalensi	Persen	—	—	—	16,70	2,25

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Kurang Gizi anak balita						
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan			—	—	—	6,60	—
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/kapita/hari		Persen	—	7,99	9,99	6,60	—
2.2.	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen	—	14	15,70	18	12,3
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi Stunting pada anak Balita	Persen	—	12,9 ; 4,00	12,51 ; 6,59	13,50 ; 8,40	—
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	Persen	—	2,7	3,3	7,98	—
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persen	—	—	—	—	12,5
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persen	—	25,03	41,89	42,2	—
2.3.	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rupiah per Tenaga Kerja	44.872.857,82	40.486.675,68	48.810.699,68	47.135.941,93	43.438.838,80
3.1.	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Persen	—	97,56	98,09	98,76	—
	3.1.2.(a)* Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	—	81,86	84,65	90,26	—
3.2.	3.2.1* Angka Kematian	Angka Kematian	Persen	—	8,07	—	5,03	5,4

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup						
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Persen	—	5,50	—	4,63	4,8
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Persen	—	7,22	—	4,2	6,31
	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persen	—	—	—	100	100
3.3.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang	Kejadian Malaria per 1.000 orang		0,86	1.080	0,113	0,07	0,1
	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria		—	—	5	7	5
	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persen	—	—	—	28,57	57,14
	3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Persen	—	—	—	119	119
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	kabupaten /kota	—	7	7	7	7
	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	kabupaten /kota	—	—	—	7	2
3.4.	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persen	—	30,7	29,32	—	24,6
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi tekanan darah tinggi	Persen	—	37,2	30,9	29,9	—
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Persen	—	—	—	3,5	3,5
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Persen	0	—	—	—	—
	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan	Kab./Kota	—	—	—	6	7

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	upaya kesehatan jiwa	n upaya kesehatan jiwa						
3.5.	3.5.1(a) Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis		Orang	—	579	401	435	311
	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		Orang	—	—	71	72	43
	3.5.1(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		Orang	—	—	30	10	75
	3.5.1(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu		Lembaga	—	—	4	3	8
	3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba		Persen	1,85	1,68	—	1,49	—
3.7.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Persen	—	—	—	—	—
	3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Persen	65,83	63,94	63,65	71,1	68,5
	3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Persen	—	—	—	126,72	128,16
	3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		—	—	—	50	34
	3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).	Total Fertility Rate (TFR).		—	—	—	2,3	2,25
3.8.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	Unmet need pelayanan kesehatan	Persen	—	3,26	3,76	3,57	—

TAR-GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jiwa/1000	370,26	523,69	581,41	636,25	780
	3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	—	—	—	68,7	78
3.a.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persen	—	30,70	29,32	29,67	—
3.b.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas		Persen	—	—	—	85%	90%
3.c.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan		—	—	—	0,24	—
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persen	18,87	36,89	59,07	66,54	93,01
	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	8,41	28,97	54,67	73,83	91,12
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persen	11,43	20	57,14	74,29	91,43
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Persen	—	111,07	111,75	110,58	—
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Persen	—	87,6	84,38	84,53	—
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Persen	—	76,41	79,1	82,88	—
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Tahun	—	7,83	8,04	8,13	—
4.2.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Persen	—	28,51	29,13	30,55	—
4.3.	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Persen	—	76,41	79,1	82,88	—
	4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Persen	—	11,13	14,48	15,01	—
4.4.	4.4.1. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Persen	—	49,14/24,86	55,88/28,70	64,4	—
4.5.	4.5.1* Rasio angka partisipasi Murni (APM)		Persen	—	100,53/104,28/104,02/173,03	100,53/104,28/104,02/173,03	100,92 ; 99,56 ; 105,74 ;	—

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederaj at; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.						134,40	
4.6.	4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	97,6	97,63	97,66	97,79	98,79
	4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Persen	—	99,88/97,98	99,79/98, 75	99,8 ; 98,77	—
4.c.	4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik	Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik	Persen	—	—	39,35	42,22	43,24
5.1.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.			—	—	1	2	2
5.2.	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		—	—	0,043	0,046	0,064
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100
5.3.	5.3.1* Proporsi Perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Persen	—	1,33/25,45	0,97/28,7 9	2,22 ; 32,15	—
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Tahun	—	—	—	21,8	21
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15- 19 tahun (Age Specific Fertility)Rate/ASFR	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility) Rate/ASFR		—	—	—	50	34
	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederaj at	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat	Persen	—	76,41	79,10	82,88	—
5.5.	5.5.2* Proporsi	Proporsi	Persen	—	—	—	1,78	2,07

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	perempuan yang berada di posisi managerial	perempuan yang berada di posisi managerial						
	5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Persen	—	—	—	5,6	8,8
	5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	81,75	81,7	83,92	80,44	80,59
5.b.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen	—	61,81	62,12	63,43	—
6.1.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persen	63,2	68,03	63,95	68,14	66,83
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/detik	0,188	0,266	0,316	0,406	0,506
6.2.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persen	—	—	70,06	79,01	—
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persen	75,7	80,8	83,16	83,56	85,64
	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa/kelurahan	—	284	312	366	385
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa/kelurahan	32	—	—	36	159
6.4.	6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.			17	52	39	49
6.5.	6.5.1.(a) Jumlah	Jumlah Rencana	RPDAST	1	1	1	1	1

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).						
	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Ha	8744	8743	8744	1574	4164
7.1.	7.1.1* Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi.	Persen	92	93	100	100	—
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi listrik per kapita.		—	652,04	609,9	631,79	671,19
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga		—	73,55	76,48	79,57	—
8.1.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita		2,43	1,89	1,96	2,39	—
	8.1.1.(a) PDB per kapita	PDB per kapita		41.948	44.429	46.457	48.903	—
8.3.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin		—	39,92	45,61	36,13	—
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal	Persen	—	45,87	44,43	51,62	—
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persen	—	78,70	76,62	73,76	—
8.5.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja		—	12.541,44	13.963,52	14777	—
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Persen	—	6,29	2,60	3,78	—
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	Persen	—	8,55	7,14	5,9	—
8.6.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Persen	—	27,51	24,73	21,15	—
8.9.	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara		Orang	2.297	3.078	5.037	7.183	8.124
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		Orang	256.393	254.530	295.688	362.992	417.818
8.10.	8.10.1* a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa			—	—	—	—	49,19
	8.10.1* b. Jumlah			—	—	—	—	12,34

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	kantor bank per 100.000 penduduk dewasa							
9.1.	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	4	4	3	3	3
9.2.	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Persen	—	22,63	22,29	22,72	—
	9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.		Persen	21,14	21,86	22,18	23,32	24,10
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		%	—	61,81	62,12	63,43	—
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.		%	—	20,21	23,30	28,86	—
10.1.	10.1.1* Koefisien Gini.			0,295	0,275	0,288	0,281	0,278
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		%	—	5,40	5,22	5,25	—
10.3.	10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia		Point	89,80	81,25	87,65	83,07	80,95
10.4.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Jiwa	—		33,56	—	2.049
11.1.	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Persen	—	97,80	97,31	98,47	99,1
11.2.	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Load factor	Persen	48	36	36	28	24
11.4.	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		kota	—	—	—	2	2
	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		Indeks Risiko	—	—	—	—	147
	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		EWS (titik)	—	—	—	29	—
11.6.	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persen	—	—	—	21,15	34,62
12.4	12.4.1.(a) Jumlah		Perusaha	27	31	33	37	41

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU		n					
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Ton	—	---	—	---	24.928
12.5.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang		Ton	-	-	-	4.899,83	7.705,15
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		Orang	—	0,15	0,22	0,07	0
14.2.	14.2.1 (a) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional		Perda	—	—	—	—	1
	14.2.1 (b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan		WPP	1	1	1	1	1
14.5.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan		Ha	800.571,20	800.571,20	800.571,20	800.571,20	810.380,76
14.6.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.		UMKM	—	—	—	—	37
15.1.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	15,45	14,2	13,99	13,5	13,28
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	13	13	13	13	13
15.3.	15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan		Persen	8744	8743	8744	1574	4164
16.1.	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Persen	11	—	—	—	—
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Persen	—	1,03	0,6	0,58	—
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya			—	—	—	47,8	—
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga		Persen	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

TAR- GET	INDIKATOR	INDIK ATOR	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RPJMD)					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)							
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).		Skor	55,08	60,69	61	63,65	67,17
	16.6.1.(a) Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	PL baru tahun 2018	Persen	—	—	—	—	—
	16.6.1.(b) Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	PL baru tahun 2018	Persen	—	—	—	—	—
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang.	PL baru tahun 2018	Persen	—	—	—	75	90
16.7.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Persen	8,89	6,67	6,67	4,44	6,67
17.1.	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB		Persen	0,90	0,83	0,78	0,90	1,08
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik		Persen	120,23	88,09	114,26	76,38	97,32
17.8.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.		persen	—	20,21	23,30	28,86	—
	17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.		Persen	—	—	—	28,86	—
17.18.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		Persen	—	—	—	92,2	—

Setelah dilakukan pemetaan indikator, maka disusunlah target TPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut hasil penyusunan target TPB yang tersaji dalam bentuk matrix.

Target 185. Target Capaian Indikator Pembangunan terhadap target/indikator TPB Propinsi Kep.Bangka Belitung

TPB	RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)

TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.	1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase Angka Kemiskinan (Maks 7-8%)	Persen	-	5,40	5,51	5,61	5,72
1.3.	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persentase kepesertaan JKN (Min 95%)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan JKN Ketenagakerjaan (62,4 jt formal, 3,5 jt nonformal)	Persen	-	-	73,25	74,80	76,36
	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	2,8 juta	Orang	-	-	-	40	252
1.4.	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	Persen	-	60	60,67	61,33	62
	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	63%	Persen	55,62	56,08	56,54	57,01	57,47
	1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	Persen	56,11	56,67	57,22	57,78	58,33
	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak (100%)	Persen	-	60	62,67	68,15	68,52
	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	100%	Persen	-	-	-	83,56	83,59
	1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase Rumah layak huni (0%)	Persen	-	5	4,67	4,33	4

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	94,78%	Persen	96,49	96,82	96,33	96,07	97,71
	1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	82,20%	Persen	71,83	69,28	68,57	70,3	73,96
	1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C (91,63)	Persen	56,9	44,32	48,63	53,47	57,86
	1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (77,4%)	Persen	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	100%	Persen	100	100	100	100	100
1.5.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tidak Ada Target	Orang					
	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	39 Daerah	Lokasi					
2.1.	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Tidak Ada Target						
	2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Prevalensi Kurang Gizi anak balita (17%)	Persen	17	17	17	17	17
	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Tidak Ada Target	Persen					
	2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/kapita/hari	8,50%	Persen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
2.2.	2.2.1* Prevalensi	Prevalensi stunting	Persen					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	(pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (Tidak Ada Target)						
	2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi Stunting pada anak Balita (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil (28%)	Persen	28	28	28	28	28
	2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (50%)	Persen	-	20	22	24	26
2.3.	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) (Tidak Ada Target)	Persen (Rupiah per Tenaga Kerja)	106,84	93,72	109,93	103,37	92,82
3.1.	3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (95%)	Persen	95	95	95	95	95
	3.1.2.(a)* Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (85%)	Persen	85	85	85	85	85
3.2.	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran	Persen	24	24	24	24	24

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	kelahiran hidup	hidup (24 bayi)						
	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (95%)	Persen	95	95	95	95	95
3.3.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang	Kejadian Malaria per 1.000 orang (Tidak Ada Target)						
	3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (300)						
	3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.3.5. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Jumlah Kab/kota dengan eliminasi Kusta (7)	kabupaten /kota	7	7	7	7	7
	3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) (35)	Kab/Kota					
3.4.	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun (5,40%)		-	20	19,03	18,05	17,08
	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi tekanan darah tinggi (24,30%)	Persen	-	35	34,27	33,54	32,81
	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun (15,40%)	Persen	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri (Tidak Ada Target)	Persen					
	3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (280)	Kab./Kota					
3.5.	3.5.1(a) Jumlah	Tidak Ada Target	Orang					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis							
	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Tidak Ada Target	Orang					
	3.5.1(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	210	Orang	-	-	30	42,86	55,71
	3.5.1(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/di bantu	85	Lembaga	-	-	10	15,36	20,71
	3.5.1(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Tidak Ada Target	Persen					
3.7.	3.7.1. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Min 4 jenis 85%)	Persen	85	85	85	85	85
	3.7.1(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (66%)	Persen	66	66	66	66	66
	3.7.1(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern (23,50%)	Persen	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
	3.7.2. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) (38)		38	38	38	38	38
	3.7.2(a) Total Fertility Rate	Total Fertility Rate (TFR) (2,28)		2,28	2,28	2,28	2,28	2,28

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	(TFR).							
3.8.	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	Unmet need pelayanan kesehatan (9,91%)	Persen	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	3.8.2. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Tidak Ada Target)	Persen (Jiwa/1000)					
	3.8.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Min 95%)	Persen	-	-	-	60	62,69
3.a.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
3.b.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Tidak Ada Target	Persen					
3.c.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Tidak Ada Target)						
	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B (84,20%)	Persen					69
	4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B (81%)	Persen					48
	4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (84,60%)	Persen					47,7
	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat (114,09%)	Persen	113,22	111,07	111,75	110,58	111,15
	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat (106,94)	Persen	85,52	87,6	84,38	84,53	85,93
	4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	(8,8 tahun)	Tahun	7,76	7,79	7,62	7,78	8,24
4.2.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	-	28,51	29,13	30,25	39,44

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	(PAUD).	(77,20%)						
4.3.	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
	4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) (36,73%)	Persen	-	20	21,12	22,23	23,35
4.4.	4.4.1. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Tidak Ada Target	Persen		49,14	55,88	64,4	
4.5.	4.5.1* Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.							
	Rasio APM Dan Rasio APK SD/MI		Persen		100,53	100,9	100,92	
	Rasio APM Dan Rasio APK SMP/MTS		Persen		104,28	107,59	99,56	
	Rasio APM Dan Rasio APK SMA/MA		Persen		104,02	108,12	105,74	
	Rasio APM Dan Rasio APK PT		Persen		173,03	245,05	134,4	
4.6.	4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun (96,10%)	Persen	96,1	97,63	97,66	97,79	
	4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun							
	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Persen		99,88	99,79	99,8	
	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-59 Tahun	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun	Persen		97,98	98,75	98,77	

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
4.c.	4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik	Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik (Tidak Ada Target)	Persen		93	93,4	95,1	96,9
5.1.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	16		-	-	1	2	3
5.2.	5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan (menurun tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan))		20,48	20,48	20,48	20,48	20,48
	5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (70%)	Persen	70	70	70	70	70
5.3.	5.3.1* Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun (21)	Tahun	21	21	21	21	21
	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)Rate/ASFR	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility) Rate/ASFR (38)		38	38	38	38	38
	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sede rajat (91,63%)	Persen	75,51	76,41	79,1	82,88	82,21
5.5.	5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Tidak Ada Target)	Persen					
	5.6.1(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (9,90%)	Persen	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	5.6.1(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang	Persen	85	85	85	85	85

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	metode kontrasepsi modern (85)						
5.b.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Tidak Ada Target)	Persen					
6.1.	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (100%)	Persen	64,44	66,67	68,89	87,24	86,88
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (118,6 m3/dtk; 60 pulau	m3/detik	118,6	118,6	118,6	118,6	118,6
6.2.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Tidak Ada Target)	Persen					
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (100%)	persen	76,47	77,94	79,41	84,21	87,11
	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (45.000)	Desa/Kelu- rahan					
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (Tidak Ada Target)	Desa/Kelu- rahan					
6.4.	6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah (Tidak Ada Target)						
6.5.	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	RPDAST	1	1	1	1	1

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	
	Wilayah (RTRW).							
	6.5.1.(e) Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Ha	8.744	8.743	8.744	1.574	4.164
7.1.	7.1.1* Rasio elektrifikasi.	Rasio elektrifikasi (96,60%)	Persen	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.	Konsumsi listrik per kapita (1.200 KWh)		-	650	686,67	723,33	760
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga (Tidak Ada Target)						
8.1.	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	Laju pertumbuhan PDB per kapita (> 50 juta)		8,22	10,83	13,44	16,06	18,67
	8.1.1.(a) PDB per kapita	PDB per kapita (Tidak Ada Target)						
8.3.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin (Tidak Ada Target)						
	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal (51%)	Persen	15	15	15	15	15
	8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian (Tidak Ada Target)	Persen					
8.5.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja (Tidak Ada Target)	persen					
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Tidak Ada Target)	Persen					
	8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran	Persentase setengah pengangguran	Persen					
8.6.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (Tidak Ada Target)	Persen					
8.9.	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara	20 juta	Orang	2.297	3.078	5.037	7.183	8.124
	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Tidak Ada Target	Orang	256.393	254.530	295.688	362.992	417.818
8.10.	8.10.1* a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	8.10.1* b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Tidak Ada Target						
9.1.	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Unit	4	4	3	3	3
9.2.	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita (Tidak Ada Target)	Persen					
	9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Mendekati 26%	Persen	21,14	21,86	22,18	23,32	24,10
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(Tidak Ada Target)	Persen					
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.	(Tidak Ada Target)	Persen					
10.1.	10.1.1* Koefisien Gini.	0,36		0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	7-8%	Persen	8	8	8	8	8
10.3.	10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	87	Point	-	81	81,4	81,8	82,2
10.4.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	(62,4 jt pekerja formal, 3,5 jt perkerja informal)	Jiwa					
11.1.	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	(18,6 juta)	Persen	-	-	-	89,81	90,16
11.2.	11.2.1.(a). Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Load Factor	Persen	48	36	36	32	24
11.4.	11.4.1.(a). Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang	(Tidak Ada Target)	kota					

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	dan kota kecil.							
	11.5.1.(a). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	-30%	Indeks Risiko	-30	-30	-30	-30	-30
	11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	(Tidak Ada Target)	EWS (titik)					
11.6.	11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (80%)	Persen	—	—	—	21,15	34,62
12.4	12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	(Tidak Ada Target)	Perusahaan	27	31	33	37	41
	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	(150 juta ton)	Ton	-	---	-	---	24.928
12.5.	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	(Tidak Ada Target)	Ton	-	-	-	4.899,83	7.705,15
	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	(Tidak Ada Target)	Orang					
14.2.	14.2.1 (a) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	(Tidak Ada Target)	Perda					
	14.2.1 (b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan	(Tidak Ada Target)	WPP	1	1	1	1	1
14.5.	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	(20 juta ha)	Ha	800.000,00	2.000.000,00	3.200.000,00	4.400.000,00	5.600.000,00
14.6.	14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.	87%	UMKM	87	87	87	87	87
15.1.	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	15,45	14,2	13,99	13,5	13,28
	15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	13	13	13	13	13
15.3.	15.3.1.(a).	(5,5 jt Ha)	Persen	8744	8743	8744	1574	4164

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan							
16.1.	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(Tidak Ada Target)	Persen					
	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	(Tidak Ada Target)	persen					
	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	(Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%)	Persen	85	85	85	85	85
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		Skor	55,08	60,69	61	63,65	67,17
	16.6.1.(a) Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(b) Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen	—	—	—	90	90
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja	PL baru tahun 2018 (90%)	Persen				90	90

TPB		RKPD (TAHUNAN DARI RPJMD)						
TARGET	INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN INDIKATOR (EVALUASI RKPD)*					
			satuan	2014	2015	2016	2017	2018
	pengadaan barang.							
	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Persen	8,89	6,67	6,67	4,44	6,67
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	(di atas 12%)	Persen	4,89	5,33	5,78	6,22	6,67
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.8.	17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet.	(Tidak Ada Target)	persen					
	17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	(Tidak Ada Target)	Persen					
17.18.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(Tidak Ada Target)	Persen					

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan keuangan di suatu daerah adalah kunci utama dalam merealisasikan perencanaan dan pembangunan, dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk, besaran dana perimbangan yang diterima, serta keikutsertaan investor dan dunia usaha sebagai sumber dana perimbangan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk didalamnya kinerja keuangan pada periode sebelumnya dan kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Hasil analisis juga digunakan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi lima tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah itu sendiri.

3.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018

Kemampuan keuangan di suatu daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait dengan peraturan yang ada, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi antara belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) serta pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2018, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan perubahan kebijakan pengelolaan keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam periode 2014–2018, pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat dari Rp. 1.719.774.423.456,42 pada tahun 2014 menjadi Rp. 2.556.977.711.924,35 pada tahun 2018. Berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah, maka selama kurun waktu 5 tahun, rata-rata realisasi pendapatan daerah 98,41%, sebagaimana disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1
Target dan realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	1.722.417.070.217,83	1.719.774.423.456,42	99,85%
2015	1.918.085.118.953,54	1.886.998.635.504,14	98,38 %
2016	2.017.171.126.824,26	1.949.866.524.266,77	96,66%
2017	2.386.297.015.485,16	2.251.024.652.420,48	94,33%
2018	2.487.065.640.565,87	2.556.977.711.924,35	102,81%
Rata-rata	2.106.207.194.409,00	2.072.928.389.514,00	98,42 %

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Persentase pencapaian pendapatan daerah menurun dari tahun 2014-2017. Sedangkan pada tahun 2018 persentase pencapaian pendapatan daerah meningkat daripada tahun 2017. Walaupun secara keseluruhan realisasi pendapatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018.

Kontribusi Pendapatan Daerah ada 3 (tiga) komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Gambaran perkembangan angka-angka capaiannya dari ketiga komponen sumber pendapatan daerah tersebut dari tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2014-2018

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Pencapaian	Kontribusi Terhadap Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah				
2014	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	101,14%	32,74%
2015	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	102,30%	30,30%
2016	581.397.810.824,26	574.258.443.819,77	98,77%	29,45%
2017	737.192.092.935,16	709.832.181.818,48	96,29%	31,53%
2018	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70%	33,26%
Rata-rata	644.786.761.915	653.888.826.277	101,41 %	31,54 %
Dana Perimbangan				
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11%	59,61%
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84%	59,90%
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72%	57,76%
2017	1.619.104.922.550,00	1.539.960.002.502,00	95,11%	68,41%
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54%	66,26%
Rata-rata	1.389.771.820.924,00	1.303.201.393.627,00	93,77 %	62,80%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17%	7,65%
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88%	9,79%
2016	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	4986,46%	12,79%
2017	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%	0,05%
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00%	0,48%
Rata-rata	71.648.611.570,00	115.838.169.610,00	161,67 %	5,58%

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Jika dilihat dari sumber dananya dalam 5 tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 31,54 %, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kategori sedang. Kemudian dana perimbangan memberikan sumbangan rata-rata sebesar 62,80 %, hal ini berarti ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat masih relatif besar, sehingga daerah masih tetap besar ketergantungannya atas peningkatan fiskal nasional.

Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan, dapat dilihat dari rasio PAD terhadap realisasi belanja. PAD mampu membiayai rata-rata 31,47% dari kebutuhan belanja. Sedangkan dana perimbangan berkontribusi rata-rata sebesar 59,43%. Namun demikian, selama periode 2014-2018, trend kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2014 ke tahun 2018 berfluktuatif. Peran terbesar adalah di tahun 2018, sebesar 33,26%. Artinya peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan harus ditingkatkan.

Tabel III.3
Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pembiayaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2014-2018

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kemampuan (%)
	Pendapatan	Belanja	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Asli Daerah			
2014	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	101,14%
2015	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	102,30%
2016	581.397.810.824,26	574.258.443.819,77	98,77%
2017	737.192.092.935,16	709.832.181.818,48	96,29%
2018	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70%
Rata-Rata			31,47
Dana Perimbangan			
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11%
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84%
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72%
2017	1.619.104.922.550,00	1.539.960.002.502,00	95,11%
2018	1.685.118.643.150,00	1.694.218.759.243,00	100,54%
Rata-Rata			59,43
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17%
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88%
2016	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	4986,46%
2017	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11%
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00%
Rata-Rata			9,46

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari data diatas terlihat bahwa kemampuan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja untuk pegawai, program pembangunan dan kegiatan masih kecil, yaitu rata-rata 31,47% selama 2014-2018.

(1.) Pendapatan Asli Daerah

Selama Periode 2014-2018 angka tersebut realisasi PAD mengalami peningkatan. Hal ini diperoleh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Realisasi PAD sampai dengan tahun 2018 menurut jenis PAD dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4
Realisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sampai dengan 2018 menurut jenis PAD

No.	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4:3)	(6=4-3)
1	Pajak daerah	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117,5	117.239.020.276,83
2	Retribusi Daerah	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00	46,32	(8.824.843.557,87)
3	Hasil PMD & Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	6,17	(3.385.907.708,12)
4	Lain-lain PAD yang Sah	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64	53,31	(44.216.313.745,36)
	Jumlah	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35	107,70%	60.811.955.265,48

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

a. Pajak Daerah

Secara umum realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2018 tergambar pada Tabel III.5. Perkembangan hasil pajak daerah dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	499.202.994.535,74	508.262.616.895,88	101,81
2015	500.844.014.371,82	506.944.936.060,22	101,22
2016	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72	99,77
2017	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39	108,80
2018	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117,50
Jumlah	2.757.410.847.168,80	2.939.562.890.739,04	106,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan data pada tabel III.5 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 persentase pajak daerah memenuhi target dan realisasi pada tahun tersebut meningkat daripada target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4. Pada tahun 2016, realisasi pajak daerah lebih kecil daripada target yang telah ditetapkan tetapi persentase sudah 99,77 %.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada kepentingan pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi daerah mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada masyarakat. Perkembangan realisasi Retribusi Daerah 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel III.6.

Tabel III.6
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	5.901.678.950,00	9.357.405.765,00	158,55
2015	8.445.970.286,00	11.520.365.059,00	136,40
2016	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72	97,36
2017	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00	28,00
2018	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00	46,32
JUMLAH	59.082.096.249,30	42.577.530.580,72	72,07

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Pada komponen retribusi daerah, selama periode 2014 – 2017 persentase retribusi daerah mengalami penurunan dari 158,55 % menjadi 28 %. Penurunan realisasi ini terjadi karena pada tahun 2017, RS Jiwa dan Propinsi menjadi BLUD dan tidak menjadi objek pajak seperti pada realisasi tahun 2016. Pada tahun 2018, persentase realisasi retribusi daerah mengalami peningkatan daripada pada tahun 2017 yaitu dari 28 % menjadi 46,32 %. Selain itu, realisasi pada tahun 2018 mengalami kenaikan daripada tahun 2017 walaupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Kenaikan ini disebabkan oleh perubahan perda retribusi dengan mencantumkan objek pajak baru.

c. Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada perusahaan swasta. Realisasi penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama periode 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel III.7.

Tabel III.7

Realisasi Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	7.500.000.000,00	1.205.926.846,39	16,08
2015	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	69,91
2016	5.613.342.583,77	5.613.342.582,77	100,00
2017	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	62,43
2018	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	60,17
JUMLAH	37.613.342.583,77	22.483.195.384,87	59,77

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Selama kurun waktu 2014-2018 Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah rata-rata 59,77%. Ditahun 2016 pernah mencapai 100%. Artinya upaya peningkatan harus senantiasa dilakukan agar realisasi hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat mencapai target. Penurunan realisasi hasil PMD dan pengelolaan kekayaan pada tahun 2018 disebabkan oleh adanya pemutihan pajak kendaraan baik motor maupun mobil.

d. Lain-lain PAD yang sah

Penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan lain-lain PAD utamanya bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Rekening Deposito pada bank dan Rupa-rupa Pendapatan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD 2014-2018, secara rata-rata melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,61%, penurunan realisasi terjadi mulai tahun 2016 dari sebelumnya di tahun 2015 sebesar 114,02% menjadi 90,03% dan pada tahun 2018 realiasi lain-lain PAD mencapai 53,31%, realisasi sebagaimana tersebut masih berada dibawah target sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan lebih lanjut. Adapun realiasasi lain-lain PAD adalah sebagaimana tertera pada Tabel III.8.

Tabel III.8

Realisasi Lain-lain PAD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2016

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2014	44.138.193.812,09	44.282.891.354,15	100,33
2015	42.181.234.295,72	48.094.172.699,14	114,02

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)
2016	57.767.577.457,26	52.009.773.813,56	90,03
2017	131.045.293.810,72	69.954.766.361,04	53,38
2018	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64	53,31
Jumlah	369.827.523.574,79	264.820.514.681,53	71,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

(2.) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana Perimbangan ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2014-2017 masih dibawah target, sedangkan Tahun 2018 sudah mencapai target sebesar 100,54 % dengan rincian sebagaimana yang dapat dilihat pada Table III.9. Peningkatan ini disebabkan oleh pemerintah pusat melakukan pembayaran kurang bayar DBA sumber daya alam tahun anggaran 2017.

Tabel III.9
Realisasi Dana Perimbangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4=3:2)	(5=3-2)
2014	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	99,11	(9.231.925.325,00)
2015	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	95,84	(49.087.004.551,00)
2016	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	78,72	(304.488.402.655,00)
2017	1.619.104.922.550,00	1.537.241.446.289,00	94,94	(81.863.476.261,00)
2018	1.684.392.043.000,00	1.694.218.759.243,00	100,58	9.826.716.243,00
JUMLAH	6.948.859.104.620,00	6.516.006.968.134,00	93,77	(434.844.092.549,00)

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dana perimbangan ini terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi, sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen pendapatan daerah yang meliputi Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan dan Bagi Hasil dari Pertambangan. Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Tabel III.10.

Tabel III.10
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	184.182.116.920,00	174.950.191.595,00	94,99
2015	226.155.287.000,00	188.157.236.449,00	83,20
2016	130.875.389.000,00	142.860.016.345,00	109,16
2017	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	68,72
2018	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00	114,36
JUMLAH	905.527.205.070,00	842.359.542.670,00	93,02

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan tabel 3.10 di atas dapat terlihat bahwa secara rata-rata realisasi pada komponen Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 93,02 persen, dengan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 114,36 persen dari target. Peningkatan ini disebabkan oleh pembayaran kurang bayar oleh pemerintah pusat terhadap DBH sumber daya alam tahun anggaran 2017.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun realisasi DAU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014-2018 adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.11.

Tabel III.11
Dana Alokasi Umum / Penyeimbang DAU
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	806.820.146.000,00	806.820.146.000,00	100,00
2015	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	100,00
2016	905.526.208.000,00	905.526.208.000,00	100,00
2017	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	99,26
2018	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00	99,98
Jumlah	4.616.463.934.550,00	4.608.966.285.809,00	99,83

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan tabel 3.11, dapat dijelaskan bahwa DAU selama tahun 2014-2018 secara rata-rata sebesar 99.83 persen. Upaya peningkatan DAU secara terus menerus dilakukan, antara lain secara bersama-sama dengan provinsi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memasukkan luas wilayah laut sebagai dasar perhitungan alokasi DAU ke daerah, disamping pemberian dana khusus kemahalan membangun di daerah kepulauan.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Realisasi DAK dari Tahun 2014-2018 sebesar 74,61 persen, menurun pada Tahun 2015 sebesar 80 persen dan Tahun 2016 realisasi hanya mencapai 19,75 persen. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya alokasi yang diberikan Pemerintah Pusat, namun karena adanya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan mendapat alokasi DAK tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, kenaikan realisasi DAK mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 dan 2018, sehingga rata-rata realisasi DAK dari tahun 2014 s.d 2018 sebesar 74,61 persen. Secara periodik, realisasi DAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014-2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.12.

Tabel III.12

Realisasi Pos Dana Alokasi Khusus
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00	100,00
2015	55.444.770.000,00	44.355.816.000,00	80,00
2016	394.371.719.000,00	77.898.689.000,00	19,75
2017	455.719.877.000,00	438.826.469.824,00	96,29
2018	477.959.139.000,00	460.227.704.831,00	96,29
Jumlah	1.426.867.965.000,00	1.064.681.139.655,00	74,61

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

(3.) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), Bidang Infrastruktur Jalan, Dana Penyesuaian Percepatan Infrastruktur Daerah (PPID), dan Sumbangan Pihak Ketiga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 mengalami

peningkatan. Kenaikan yang sangat signifikan pada Tahun 2016 sebesar 4.974,33 persen yang bersumber dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Adapun Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2014-2018 adalah sebagaimana tergambar pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah (Berkurang)
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 3 - 2
2014	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	100,17	223.305.000,00
2015	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	102,88	5.168.850.000,00
2016	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	4986,46	244.323.167.102,00
2017	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	4,11	(28.767.531.900,00)
2018	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00	0
Jumlah	358.243.057.850,00	579.190.848.052,00	161,67	220.947.790.202,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel III.14.

Tabel III.14
Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2		3		4		5		6		7
1	PENDAPATAN	1.722.417.070.217,83	1.719.774.423.456,42	1.918.085.118.953,54	1.886.998.635.504,14	2.017.171.126.824,26	1.949.866.524.266,77	2.386.297.015.485,16	2.251.024.652.420,48	2.487.065.640.565,87	2.556.977.711.924,35
1.1	Pendapatan Asli Daerah	556.742.867.297,83	563.108.840.861,42	558.971.218.953,54	571.802.890.055,14	581.397.810.824,26	574.258.443.819,77	737.192.092.935,16	709.832.181.818,48	789.629.819.565,87	850.441.774.831,35
1.1.1	Pajak Daerah	499.202.994.535,74	508.262.616.895,88	500.844.014.371,82	506.944.936.060,22	509.130.376.289,67	507.983.460.531,72	578.237.062.209,57	629.136.457.212,39	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83
1.1.2	Retribusi Daerah	5.901.678.950,00	9.357.405.765,00	8.445.970.286,00	11.520.365.059,00	8.886.514.493,56	8.651.866.891,72	19.409.736.914,87	5.434.540.818,00	16.438.195.604,87	7.613.352.047,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	1.205.926.846,39	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	5.613.342.583,77	5.613.342.582,77	8.500.000.000,00	5.306.417.427,05	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	44.138.193.812,09	44.282.891.354,15	42.181.234.295,72	48.094.172.699,14	57.767.577.457,26	52.009.773.813,56	131.045.293.810,72	69.954.766.361,04	94.695.224.199,00	50.478.910.453,64
1.2	Dana Perimbangan	1.034.374.722.920,00	1.025.142.797.595,00	1.179.487.500.000,00	1.130.400.495.449,00	1.430.773.316.000,00	1.126.284.913.345,00	1.619.104.922.550,00	1.537.241.446.289,00	1.684.392.043.000,00	1.694.218.759.243,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	184.182.116.920,00	174.950.191.595,00	226.155.287.000,00	188.157.236.449,00	130.875.389.000,00	142.860.016.345,00	175.828.126.000,00	120.836.218.678,00	188.486.286.150,00	215.555.879.603,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	806.820.146.000,00	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	897.887.443.000,00	905.526.208.000,00	905.526.208.000,00	987.556.919.550,00	980.297.314.000,00	1.018.673.218.000,00	1.018.435.174.809,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	43.372.460.000,00	43.372.460.000,00	55.444.770.000,00	44.355.816.000,00	394.371.719.000,00	77.898.689.000,00	455.719.877.000,00	438.826.469.824,00	477.959.139.000,00	460.227.704.831,00
01.03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.299.480.000,00	131.522.785.000,00	179.626.400.000,00	184.795.250.000,00	5.000.000.000,00	249.323.167.102,00	30.000.000.000,00	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari data tabel III.14 menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan realisasi meningkat dalam kurun waktu dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daripada target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Selain itu, realisasi retribusi daerah tidak mencapai target yang ditetapkan karena ada perubahan pada objek pajak dan perubahan perda tentang objek retribusi pajak baru.

3.1.1.2. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah pada periode 2014–2018 dipergunakan untuk upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang dijabarkan dalam periode perencanaan pembangunan setiap tahun (RKPD) atas dasar RPJMD 2012-2017 yang telah disusun sebelumnya. Pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dituangkan dalam visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***. Mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya dan kondisi daerah, maka misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Serta Pembangunan Demokrasi; dan
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah tersebut telah dilakukan upaya-upaya antara lain dengan mengintensifkan segala sektor pendapatan yang dapat dijadikan sumberdaya untuk membiayai pembangunan tersebut.

Kinerja Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2014-2018 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel III.15.

Tabel III.15
Target dan realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2014	1.924.383.150.881,78	1.596.086.858.479,20	82,94	328.296.292.402,58
2015	2.226.354.387.053,48	1.869.958.486.295,70	83,99	356.395.900.757,78
2016	2.354.864.921.673,87	2.069.868.292.386,32	87,90	284.996.629.287,55
2017	2.598.989.042.215,22	2.359.078.163.818,47	90,77	239.910.878.396,75
2018	2.596.704.155.898,11	2.364.345.563.586,80	91,05	232.358.592.311,31
Jumlah	11.701.295.657.722,50	10.259.337.364.566,50	87,67	1.441.958.293.155,97

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan tabel 3.15, dapat dijelaskan bahwa pada periode 2014-2018 jumlah anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan berjumlah Rp.11.701.295.657.722,50 dengan realisasi sebesar Rp.10.259.337.364.566,50 atau 87,67 persen. Kemampuan membelanjakan anggaran yang tersedia rata-rata baru 87,67%. Artinya masih besar jumlah anggaran yang tersisa setiap tahunnya.

(1.) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp.6.437.458.376.321,03 dengan realisasi sebesar Rp.5.836.262.998.556,47 atau 90,66 persen, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.16.

Tabel III.16
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Sisa
1	2	3	4 = 3 : 2	5 = 2 - 3
2014	1.016.409.393.479,78	855.780.981.423,84	84,20	160.628.412.055,94
2015	1.228.793.606.173,98	1.080.851.837.395,72	87,96	147.941.768.778,26
2016	1.311.959.122.367,45	1.209.394.930.768,63	92,18	102.564.191.598,82
2017	1.419.103.316.979,96	1.330.059.029.641,26	93,73	89.044.287.338,70
2018	1.461.192.937.319,86	1.360.176.219.327,02	93,09	101.016.717.992,84
Jumlah	6.437.458.376.321,03	5.836.262.998.556,47	90,66	601.195.377.764,56

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

a. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp2.453.614.832.741,73 dengan realisasi sebesar Rp 2.263.500.122.984,53 atau 92,25 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.17.

Tabel III.17

Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	303.779.760.640,61	274.339.635.936,42	90,31
2015	347.016.633.146,16	312.375.890.443,08	90,02
2016	429.926.074.527,94	396.188.131.149,20	92,15
2017	667.619.827.029,36	620.836.142.868,21	92,99
2018	705.272.537.397,66	659.760.322.587,62	93,55
Jumlah	2.453.614.832.741,73	2.263.500.122.984,53	92,25

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

b. **Belanja Bunga**

Belanja Bunga dalam APBD selama tahun 2014-2018 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasinya.

c. **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 hanya dianggarkan pada Tahun 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,00, dan tahun 2018 sebesar Rp.812.500.000,00 namun tidak terealisasi sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.18.

Tabel III.18

Realisasi Belanja Subsidi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	-	-	-
2015	-	-	-
2016	1.000.000.000,00	-	

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2017	-	-	-
2018	812.500.000,00	-	
Jumlah	1.812.500.000,00	-	0,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp.1.443.657.679.636,20 dengan realisasi sebesar Rp. 1.350.778.103.674,00 atau 93,56 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.19.

Tabel III.19
Realisasi Belanja Hibah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	203.224.437.112,00	167.022.782.500,00	82,19
2015	289.428.845.000,00	257.790.335.224,00	89,07
2016	407.111.744.574,00	403.743.237.430,00	99,17
2017	262.214.900.000,00	254.263.301.000,00	96,97
2018	281.677.752.950,20	267.958.447.520,00	95,13
Jumlah	1.443.657.679.636,20	1.350.778.103.674,00	93,56

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp. 4.920.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.308.335.000,00 atau 67,23 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.20.

Tabel III.20

Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	1.030.000.000,00	745.500.000,00	72,38
2015	1.228.500.000,00	666.700.000,00	54,27
2016	1.000.000.000,00	717.060.000,00	71,71
2017	943.000.000,00	700.000.000,00	74,23
2018	718.910.000,00	479.075.000,00	66,64
Jumlah	4.920.410.000,00	3.308.335.000,00	67,23

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp.1.363.432.322.141,92 dengan realisasi sebesar Rp.1.284.426.197.709,73 atau 94,20 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.21.

Tabel III.21

Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	233.243.093.633,99	212.859.716.663,42	91,26
2015	332.323.833.855,82	303.413.474.847,19	91,30
2016	157.738.163.425,51	156.076.110.183,43	98,95
2017	362.199.953.426,60	351.012.561.851,05	96,91
2018	277.927.277.800,00	261.064.334.164,64	93,93
Jumlah	1.363.432.322.141,92	1.284.426.197.709,73	94,20

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

g. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp. 1.142.903.775.642,00 dengan realisasi sebesar Rp. 932.605.492.319,76 atau

81,59 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.22.

Tabel III.22
Realisasi Belanja Bantuan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	265.398.559.934,00	200.796.461.884,00	75,66
2015	256.078.694.172,00	206.510.260.515,00	80,64
2016	312.183.139.840,00	251.916.010.142,00	80,69
2017	116.755.422.524,00	102.528.477.024,00	87,81
2018	192.487.959.172,00	170.854.282.754,76	88,76
Jumlah	1.142.903.775.642,00	932.605.492.319,76	81,59

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

h. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp. 27.116.856.159,18 dengan realisasi sebesar Rp. 1.644.746.868,45 atau 6,06 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.23.

Tabel III.23
Realisasi Belanja Tidak Terduga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	9.733.542.159,18	16.884.440,00	0,17
2015	2.717.100.000,00	95.176.366,45	3,50
2016	3.000.000.000,00	754.381.864,00	25,15
2017	9.370.214.000,00	718.546.898,00	7,67
2018	2.296.000.000,00	59.757.300,00	2,60
Jumlah	27.116.856.159,18	1.644.746.868,45	6,06

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

(2.) Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 yang digunakan sebagai belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 5.263.837.281.401,43 dengan realisasi sebesar Rp. 4.423.074.366.010,02 atau 84,02 persen, sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.24.

Tabel III.24
Realisasi Belanja Langsung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	907.973.757.402,00	740.305.877.055,36	81,53
2015	997.560.780.879,50	789.106.648.899,98	79,10
2016	1.042.905.799.306,42	860.473.361.617,69	82,51
2017	1.179.885.725.235,26	1.029.019.134.177,21	87,21
2018	1.135.511.218.578,25	1.004.169.344.259,78	88,43
Jumlah	5.263.837.281.401,43	4.423.074.366.010,02	84,02

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

a. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp.471.215.989.010,00 dengan realisasi sebesar Rp. 432.048.966.710,94 atau 91,68 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.25.

Tabel III.25

Realisasi Belanja Pegawai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	78.574.583.300,00	70.712.733.013,01	89,99
2015	92.273.195.330,00	81.446.272.543,00	88,27
2016	105.050.534.080,00	99.601.380.686,93	94,81
2017	152.558.482.700,00	143.373.444.944,00	93,98
2018	42.759.193.600,00	36.915.135.524,00	86,33
Jumlah	471.215.989.010,00	432.048.966.710,94	91,68

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

b. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun 2014-2018 sebesar Rp.3.013.318.701.641,37 dengan realisasi sebesar Rp.2.538.369.310.562,24 atau 84,23 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.26.

Tabel III.26

Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	447.315.828.222,00	364.039.655.088,00	81,38
2015	599.476.960.259,50	473.942.522.699,00	79,06
2016	605.139.780.708,62	531.095.000.241,86	87,76
2017	613.769.474.270,00	517.435.756.892,24	84,30
2018	747.616.658.181,25	651.856.375.641,14	87,19
Jumlah	3.013.318.701.641,37	2.538.369.310.562,24	84,23

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

c. Belanja Modal

Belanja Modal dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2014-2018 sebesar Rp.1.779.302.590.750,06 dengan realisasi sebesar Rp. 1.452.656.088.736,84 atau 81,64 persen sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel III.27.

Tabel III.27

Realisasi Belanja Modal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	382.083.345.880,00	305.553.488.954,35	79,97
2015	305.810.625.290,00	233.717.853.657,98	76,43
2016	332.715.484.517,80	229.776.980.688,90	69,06
2017	413.557.768.265,26	368.209.932.340,97	89,03
2018	345.135.366.797,00	315.397.833.094,64	91,38
Jumlah	1.779.302.590.750,06	1.452.656.088.736,84	81,64

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Adapun proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dirinci seperti pada Tabel III.28.

Tabel III.28

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	URAIAN	2016	2017	2018
		(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5
A	Belanja Tidak Langsung	92,23	93,73	93,09
1	Belanja Pegawai	92,15	92,99	93,55
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	2016	2017	2018
		(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5
4	Belanja Hibah	99,17	96,97	95,13
5	Belanja Bantuan Sosial	71,71	74,23	66,64
6	Belanja Bagi Hasil	98,95	96,91	93,93
7	Belanja Bantuan Keuangan	80,69	87,81	88,76
8	Belanja Tidak Terduga	46,81	7,67	2,60
B	Belanja Langsung	82,51	87,21	88,43
1	Belanja Pegawai	94,82	93,98	86,33
2	Belanja Barang dan Jasa	87,76	84,30	87,19
3	Belanja Modal	69,06	89,03	91,38

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari tabel 3.28 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terhadap anggaran belanja dari tahun semakin meningkat akan tetapi masih terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan realisasi belanja pada beberapa komponen belanja, hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah cukup baik dengan tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi.

3.1.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Pembiayaan Daerah dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.182.644.063.217,03 dengan realisasi sebesar Rp. 1.187.644.063.216,86 atau 100,42 persen dengan uraian sebagai yang dapat dilihat pada Tabel III.29.

Tabel III.29
Realisasi Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	201.966.080.663,95	201.966.080.663,95	100
2015	320.653.645.641,17	320.653.645.641,17	100
2016	337.693.794.849,61	337.693.794.849,61	100
2017	212.692.026.730,06	217.692.026.730,06	102,35
2018	109.638.515.332,24	109.638.515.332,07	100
Jumlah	1.182.644.063.217,03	1.187.644.063.216,86	100,42

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

(1.) Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan penerimaan mencakup komponen: 1) SILPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pembiayaan Penerimaan dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp. 1.192.644.063.217,03 dengan realisasi sebesar Rp. 1.192.644.063.216,86 atau 100,00 persen sebagaimana yang terlihat pada Tabel III.30.

Tabel III.30
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	201.966.080.663,95	201.966.080.663,95	100,00
2015	325.653.645.641,17	325.653.645.641,17	100,00
2016	337.693.794.849,61	337.693.794.849,61	100,00
2017	217.692.026.730,06	217.692.026.730,06	100,00
2018	109.638.515.332,24	109.638.515.332,07	100,00
Jumlah	1.192.644.063.217,03	1.192.644.063.216,86	100

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

(2.) Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan pengeluaran mencakup komponen: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman. Adapun pembiayaan pengeluaran dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp.17.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.17.500.000.000 atau terealisasi sebesar 100 persen sebagaimana yang tergambar dalam Tabel III.31.

Tabel III.31
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4 = 3 : 2
2014	-	-	
2015	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
2016	-	-	0,00
2017	5.000.000.000,00	-	0,00
2018	-	-	0,00
Jumlah	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	100,00

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

3.1.2 Neraca Daerah

3.1.2.1 Pertumbuhan Neraca Daerah

Neraca merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, sebagai informasi neraca menyediakan gambaran mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai tingkat rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Neraca merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi unsur *value for money*. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2014-2018 seperti terlihat pada Tabel 3.32 dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

- a. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 0,35% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 0,35% dalam lima tahun terakhir. Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi dan aset tetap. Aset lancar berupa kas, piutang, persediaan. Investasi berupa investasi jangka panjang. Sementara Asset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan.
- b. Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 17%, hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas, piutang dan persediaan, mengalami pertumbuhan sebesar 23,61 %, 19,18% dan 94,78%. Melihat komposisi selama periode 2014-2018, pertumbuhan aset lancar menunjukkan bahwa kondisi aset lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kondisi cukup sehat karena aset lancar. Selain itu aset lancar memiliki karakteristik yang likuid, maka dengan sendirinya akan berfluktuasi sesuai dengan penggunaannya. Bentuk

investasi yang dilakukan berupa asset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya) dengan rata-rata pertumbuhan 0,03%.

- c. Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018 dengan rata-rata sebesar 85,39%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang baik secara tepat waktu.
- d. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2014-2018, merupakan kewajiban jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek (atau kewajiban lancar) berupa utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya yang meningkat sebesar 0,78 %. Kewajiban jangka pendek ini masih ditutupi dengan aset lancar yang dimiliki dan dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak memiliki kewajiban jangka panjang.
- e. Ekuitas dana yang meliputi dana lancar dan dana investasi merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,7 % yang berarti ekuitas dana cukup sehat

Perkembangan Neraca Daerah dari Tahun 2014-2018 dapat dilihat tabel III.32.

Tabel III.32

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	336.581.522.153,71	354.821.504.563,62	235.487.309.498,46	161.279.900.542,67	367.282.600.406,23	17,00
1.1.1.	Kas	325.665.761.941,17	337.693.977.136,14	217.350.414.204,06	110.649.986.772,00	304.799.410.235,25	23,61
1.1.2.	Piutang	4.196.087.830,70	4.904.541.665,22	5.200.699.808,70	2.469.698.963,19	5.095.138.651,38	19,18
1.1.3.	Persediaan	6.719.672.381,84	12.222.985.762,26	12.936.195.485,70	48.160.214.807,48	57.362.054.213,60	94,78
1.1.4.	Biaya Dibayar Di Muka (Uang Muka Proyek)	-	-	-	-	25.997.306,00	
1.2.	INVESTASI	80.192.603.080,41	80.369.021.802,92	82.237.317.816,27	77.625.597.367,77	77.800.341.510,06	(0,71)
1.3.	ASET TETAP	3.934.635.477.255,26	2.921.949.259.971,30	3.400.008.327.539,19	3.610.675.201.291,90	3.729.241.652.344,41	0,03
1.3.1.	Tanah	730.335.823.971,00	355.192.113.597,00	372.119.606.315,00	651.804.492.713,00	654.759.377.563,00	7,25
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	401.001.644.557,38	408.649.937.762,00	529.400.666.385,41	747.579.419.837,29	822.098.441.502,51	20,66
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	810.085.813.261,36	700.080.821.527,97	885.491.468.775,92	1.159.714.109.736,30	1.227.543.841.556,73	12,43
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.517.825.546.201,34	1.716.568.302.414,82	2.258.185.675.506,80	2.546.022.960.677,54	2.712.482.234.293,29	15,98
1.3.5.	Aset tetap lainnya	24.925.514.239,00	18.317.369.165,00	24.893.432.457,06	38.316.449.219,00	47.538.848.491,00	21,85
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	450.461.135.025,18	433.597.800.152,58	32.191.566.715,00	53.659.895.692,77	69.930.518.677,88	0,17
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	-710.457.084.648,07	-802.274.088.616,00	(1.586.422.126.584,00)	(1.805.111.609.740,00)	41,48
1.4.	ASET LAINNYA	7.277.422.525,47	34.310.278.567,19	38.898.122.400,31	144.139.121.561,70	80.228.121.406,67	152,76

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	39.966.800,00	9.446.900,00	-	-	-	
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-	
1.4.3.	kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	
1.4.4.	Aset tak berwujud	29.140.000,00	519.255.400,00	622.604.400,00	1.365.519.411,00	3.277.233.188,83	490,29
1.4.5.	Aset Lain-lain	7.208.315.725,47	33.781.576.267,19	38.275.518.000,31	142.773.602.150,70	76.950.888.217,84	152,22
	JUMLAH ASET DAERAH	4.358.687.025.014,85	3.391.450.064.905,03	3.756.631.077.254,23	3.993.719.820.764,04	4.254.552.715.667,37	0,35
2.	KEWAJIBAN	91.260.272.553,28	35.312.623.656,24	115.183.779.404,41	71.075.327.807,10	223.874.892.226,72	85,39
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	91.260.272.553,28	35.312.623.656,24	115.183.779.404,41	71.075.327.807,10	223.874.892.226,72	85,39
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	12.096.827,00	136.363,00	23.928.474,00	87.699.171,00	93.532.330,00	44,054
2.1.2.	Utang Bunga	-	-	-	-	-	
2.1.3.	Utang Pajak	-	-	-	-	-	
2.1.4.	Bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2.1.5.	Pendapatan Diterima dimuka	-	-	-	26.700.000,00	26.700.000,00	-
	Utang Beban				608.968.626,00	21.546.912.381,42	34,38
2.17.	Utang jangka pendek lainnya	91.248.175.726,28	35.312.487.293,24	115.159.850.930,41	70.351.960.010,10	202.207.747.515,30	0,78
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.1.	Utang dalam negeri	-	-	-	-	-	
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	
2.2.3.	Utang jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	
3.	EKUITAS DANA	4.267.426.752.461,57	3.356.137.441.248,79	3.641.447.297.849,82	3.922.644.492.956,92	4.030.677.823.451,65	(2,70)

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

3.1.2.2 Rasio Neraca

(1.) Rasio Likuiditas

Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam penghitungan rasio likuiditas yang sering digunakan adalah rasio lancar dan quick rasio. Nilai rasio lancar dan quick rasio pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tabel III.33 berada pada 3,69-10,05 pada tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 mempunyai kemampuan baik dalam melunasi kewajibannya. Rasio likuiditas lebih dari 1 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu melunasi kewajibannya sedangkan nilai rasio kurang dari 1 menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Bangka Belitung melunasi hutang sangat rendah Data rasio likuiditas selama 5 (lima) tahun terakhir 2014-2018 sebagaimana tabel III.33

Tabel III.33

Rasio Likuiditas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Rasio Likuiditas	Rumus	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Lancar	Aset Lancar/Kewajiban Jangka Pendek	3,69	10,05	2,04	2,27	1,64
Quick Rasio	(Aset Lancar-Persediaan) / Kewajiban Jangka Pendek	3,61	9,70	1,93	1,59	1,38
Rasio total hutang terhadap total aset	Total Hutang/Total Aset	0,02	0,01	0,03	0,02	0,05
Rasio Utang terhadap Modal	Total Hutang/Total Ekuitas	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

(2.) Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Pengukuran rasio solvabilitas ini menggunakan 2 pendekatan yaitu rasio kewajiban terhadap total aset yang mengukur kemampuan daerah dalam penjaminan hutang dengan jumlah aktiva yang dimilikinya dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang mengukur seberapa besar daerah dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan ekuitas. Tabel III.34 menunjukkan bahwa rasio solvabilitas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018 antara 0,01-0,05. Nilai rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu dalam membayar kewajiban jangka panjangnya dimana nilai maksimal dari rasio ini adalah 200 %. Berikut Rasio Solvabilitas Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2014-2018 sebagaimana pada Tabel III.34.

Tabel III.34
Rasio Solvabilitas Neraca Daerah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Rasio Likuiditas	Rumus	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Kewajiban terhadap Total Aset	Kewajiban/Total Aset	0,02	0,01	0,03	0,02	0,05
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	Kewajiban/Total Ekuitas	0,02	0,01	0,03	0,02	0,02

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

3.1.3 Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah

Dari analisis kemampuan keuangan daerah sejak 2014-2018, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, ternyata terjadi defisit anggaran setiap tahunnya. Artinya kemampuan pendapatan masih lebih kecil dari belanja yang ditetapkan. Untuk periode 2017-2022, telah ditetapkan RPJMD yang juga memuat indikasi anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun tersebut. Oleh karena itu untuk meyakinkan terselenggaranya seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD, maka harus dilakukan perubahan rancangan kemampuan keuangan daerah pada sisa tahun kedepan, terutama total pendapatan, baik dari pendapatan asli daerah maupun sumber dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah. Prediksi 5 tahun mulai dari tahun 2017-2022, kemampuan pendapatan daerah yang sudah direalisasikan dan direncanakan kembali seperti tabel berikut ini.

Tabel III.35
Prediksi Kemampuan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Sumber Pendapatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendapatan asli daerah	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	884.562.215.880,37	963.634.368.637,38	950.410.204.161,90	985.775.080.753,05
	-Pajak daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	790.139.435.584,04	850.307.137.560,93	841.315.435.249,12	868.153.397.633,57
	-Retribusi daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	9.315.527.150,00	16.194.191.546,00	13.621.384.587,96	16.470.978.243,76
	-Hasil pengelolaan kekeyaaan daerah yang dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	-Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	79.607.253.146,33	91.633.039.530,45	89.973.384.324,82	95.650.704.875,72
2	Dana Perimbangan	1.539.960.002.502,00	1.694.218.759.243,00	1.766.282.638.000,00	1.193.285.213.000,00	1.766.282.638.000,00	1.766.282.638.000,00
	-Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00	228.805.440.000,00	140.907.497.000,00	228.805.440.000,00	228.805.440.000,00
	-Dana alokasi umum	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	1.052.377.716.000,00	1.046.862.622.000,00	1.046.862.622.000,00
	-Dana alokasi khusus	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00	490.614.576.000,00	490.614.576.000,00	490.614.576.000,00	490.614.576.000,00
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	111.588.302.000,00	144.418.347.120	111.588.302.000,00	111.588.302.000,00
	TOTAL	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.762.433.155.880,37	2.301.337.928.757,38	2.842.178.644.161,90	2.877.543.520.753,04

Karena indikasi anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun, sebagaimana tertuang dalam Bab III, ternyata lebih besar dari kemampuan anggaran yang diprediksi, maka selain sumber PAD dan Dana Perimbangan, maka dibutuhkan dana APBN yang dilaksanakan di daerah, serta dana investasi serta kerjasama usaha, disamping dukungan dana APBD Kabupaten/Kota yang ada. Artinya pelaksanaan seluruh program yang telah ditetapkan di RPJMD, akan didanai tidak hanya dari APBD Provinsi, tetapi juga APBN yang dilaksanakan di daerah, Dana investasi dan kerja sama badan usaha, serta dana APBD Kabupaten/Kota.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014-2018

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2014-2018, rata-rata realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memenuhi kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung adalah 84,94 persen, Sedangkan rata-rata penganggaran untuk belanja pegawai selama periode 2014-2018 sebesar 16,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pegawai relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan. Secara rinci proporsi penggunaan anggaran dapat dilihat pada Tabel III.36.

Tabel III.36

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Presentase belanja pegawai terhadap pengeluaran
1	2	3	4
2014	274.339.635.936,42	1.596.086.858.479,20	17,19%
2015	312.375.890.443,08	1.886.998.635.504,14	16,55%
2016	396.188.131.149,20	2.069.868.292.386,32	19,14%
2017	620.836.142.868,21	2.359.078.163.818,47	26,32%
2018	659.760.322.587,62	2.556.977.711.924,35	25,80%
Jumlah	2.263.500.122.984,53	10.469.009.662.112,50	21,62%

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014-2018

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan, pembiayaan pengeluaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun tahun 2014-2018 sebesar 92-95% yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi. Defisit riil anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diuraikan pada Tabel III.37.

Tabel III.37
Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.719.774.423.456,42	1.886.998.635.504,14	1.950.153.950.302,77	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.596.086.858.479,20	1.869.958.486.295,70	2.070.521.259.422,32	2.359.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	5.000.000.000,00	-	-	-
	Surplus/ (Defisit) Riil	123.687.564.977,22	12.040.149.208,44	(120.367.309.199,55)	(108.053.511.397,99)	192.632.148.337,55

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat pada Tahun 2016 dan 2017 terjadi defisit anggaran dikarenakan komposisi pendapatan lebih kecil dari belanja, untuk menutupi defisit anggaran tersebut terdapat komposisi penutup anggaran seperti pada Tabel III.38.

Tabel III.38
Komposisi Penutup Defisit Anggaran
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Uraian	Proporsi dari total Surplus/(defisit) riil				
		2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	61,24	3,7	(35,64)	(49,64)	175,7
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dilihat dari tabel di atas defisit riil anggaran pada tahun 2014-2018 dapat ditutupi dengan menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, adapun realisasi sisa lebih perhitungan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel III.39.

Tabel III.39
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	5	7	9	11
1	Jumlah SiLPA	325.653.645.641,17	337.693.794.849,61	217.692.026.730,06	109.638.515.332,07	302.270.663.669,62
2	Pelampauan Penerimaan PAD	6.365.973.563,59	12.831.671.101,60	(7.139.367.004,49)	(27.359.911.116,68)	60.811.955.265,48
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(9.231.925.325,00)	(49.087.004.551,00)	(304.488.402.655,00)	(79.144.920.048,00)	9.100.116.093,00
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	223.305.000,00	5.168.850.000,00	244.323.167.102,00	(28.767.531.900,00)	69.912.071.358,48
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	328.296.292.402,58	356.395.900.757,78	284.996.629.287,55	239.910.878.396,75	232.358.592.311,31
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan Daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Sejumlah permasalahan pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan Daerah dimasa lalu, sehingga menjadi fokus perhatian untuk pembangunan di masa mendatang.

4.1.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan daerah adalah masalah utama daerah yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

1. masih rendahnya PDRB sub sektor pertanian;
2. masih rendahnya PDRB sub sektor perikanan;
3. masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
4. masih rendahnya PDRB sub sektor pertambangan dan energi;
5. masih rendahnya PDRB sub sektor industri pengolahan dan perdagangan;
6. masih adanya masyarakat yang menganggur;
7. masih lambatnya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
8. masih lambatnya penurunan tingkat kemiskinan;
9. masih rendahnya kesejahteraan masyarakat desa;
10. masih kurangnya ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum;
11. masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar;
12. masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan;
13. masih rendahnya kesempatan pendidikan masyarakat;
14. masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat;
15. masih rendahnya kesejahteraan anak;
16. masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
17. masih rendahnya pembangunan yang responsif gender;
18. masih rendahnya kualitas pemuda;

19. masih belum optimalnya pembangunan olah raga
20. masih rendahnya kesejahteraan sosial;
21. masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
22. belum optimalnya penatakelolaan pemerintah;
23. masih rendahnya kebebasan sipil masyarakat;
24. masih rendahnya partisipasi partisipasi politik masyarakat;
25. masih rendahnya peran lembaga demokrasi masyarakat;
26. masih rendahnya kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana;
27. masih belum optimalnya pengendalian terhadap lingkungan hidup.

4.1.2 Permasalahan Daerah Berdasarkan Urusan

Permasalahan Daerah berdasarkan urusan adalah masalah yang terkait langsung atau pun tidak langsung dengan masalah utama Daerah, yaitu sebagai berikut:

A. Urusan Wajib

1. Pendidikan (DIJAWAB DENGAN INDIKATOR PROGRAM)

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain:

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja, Hal ini karena masyarakat yang masuk dalam usia produktif rata-rata lama sekolahnya yang sangat rendah dan di tambah lagi dengan masih tingginya tingkat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang berada di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Masih rendahnya harapan lama sekolah masyarakat yang disebabkan oleh: 1). Masih belum optimalnya Partisipasi sekolah masyarakat yang dikarenakan Masih belum maksimalnya akses pelayanan terhadap pendidikan; 2). Masih belum optimalnya peningkatan Kualitas pelayanan
- c. pendidikan yang dikarenakan Masih belum optimalnya peningkatan mutu layanan pendidikan

2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan antara lain:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi minimal utama
- b. Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi. Hal ini terjadi yang salah satunya banyak di sumbang dari tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.
- c. Masih rendahnya tingkat Kesehatan Masyarakat yang disebabkan oleh Belum maksimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dikarenakan Belum optimalnya Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, Belum optimalnya Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta Masih rendahnya Pengendalian terhadap Penyalahgunaan Napza

- d. Masih ditemukannya kasus kematian bayi dan kasus kematian ibu melahirkan serta Masih ditemukan balita dengan status stunting.

3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain:

- a. Sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi terganggu.
- c. Belum optimalnya tata kelola pemanfaatan ruang dalam pembangunan dengan pendekatan kawasan
- d. Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
- e. Masih adanya ketidak sesuaian antara tata ruang dengan pembangunan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dalam pembangunan.
- f. Belum optimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan serta jembatan
- g. Banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi.
- h. Lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada.
- i. Pembangunan yang kurang mempedomanin tata ruang

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Permasalahan di bidang Perumahan Rakyat dan permukiman antara lain:

- a. Masih rendahnya pemenuhan infrastruktur dasar
- b. Masih rendahnya ketersediaan jalan lingkungan yang memadai dikarenakan Belum maksimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan
- c. Belum optimalnya penataan kawasan permukiman dikarenakan Belum optimalnya Tata kelola penataan kawasan permukiman serta Belum adanya TPA Regional
- d. Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin
- e. Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan

5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Menurunya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dipengaruhi oleh:

- 1). belum optimalnya Kebebasan sipil masyarakat hal ini terlihat dari belum optimalnya kebebasan berdemokrasi yang dikarenakan Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam berdemokrasi serta Masih belum optimalnya Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas);
- 2). Belum optimalnya penggunaan hak-hak politik oleh masyarakat hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi politik masyarakat yang dikarenakan masih belum maksimalnya pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat;
- 3). Belum optimalnya partisipasi kelembagaan demokrasi masyarakat hal ini terlihat masih rendahnya kualitas terhadap pengembangan lembaga demokrasi yang dikarenakan masih belum maksimalnya pelayanan terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

6. Sosial

Permasalahan di bidang Sosial antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dipengaruhi Besarnya pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, Rendahnya pendapatan masyarakat miskin serta Masih rendahnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Masih rendahnya Kapsitas daerah terhadap penanggulangan bencana yang disebabkan oleh: 1). Masih belum optimalnya kemampuan terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana dikarenakan Masih belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana; 2). Masih kurangnya kawasan berbasis penanggulangan bencana dikarenakan Masih kurangnya Pengelolaan terhadap kawasan rawan bencana alam dan Belum tertatanya hilir dan hulu daerah rawan bencana banjir.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang Tenaga Kerja antara lain:

- a. Masih belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka dikarenakan Masih rendahnya kesempatan kerja bagi masyarakat.
- b. Masih belum optimalnya hubungan industrial tenaga kerja
- c. Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja terhadap jaminan tenaga kerja
- d. Masih kurangnya kuliatas angkatan kerja
- e. Masih kurangnya lapangan pekerjaan

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Masih belum optimalnya Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan.
- c. Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;
- d. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- e. Masih Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta masih rendahnya pendapatan ekonomi perempuan

9. Pangan

Permasalahan di bidang Pangan antara lain:

- a. Masih tingginya tingkat ketergantungan beras dengan daerah lainnya.
- b. Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat.
- c. Kecenderungan masyarakat terhadap pangan pokok beras yang tinggi.
- d. Masih adanya daerah rawan pangan.
- e. Masih rendahnya kualitas produk olahan pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau kelompok masyarakat.
- f. Masih perlu ditingkatkan terkait dengan keamanan pangan

10. Pertanahan

Permasalahan di bidang Pertanahan antara lain:

- a. Masih lemahnya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat.
- b. Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat
- c. Belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat
- d. Masih kurangnya ketersediaan tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Masih belum optimalnya Pengendalian Terhadap Lingkungan Hidup hal ini terlihat dari masih rendahnya kualitas air dikarenakan masih kurangnya pengendalian terhadap kualitas air sungai, masih rendahnya kualitas udara dikarenakan masih kurangnya pengendalian terhadap kualitas udara, masih kurangnya cakupan tutupan hutan dikarenakan masih kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan hutan, serta masih tingginya emisi

gas rumah kaca dikarenakan masih kurangnya pengelolaan terhadap lingkungan yang berkelanjutan

- b. Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penambangan liar (*ilegallogging*).
- c. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah kerusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya program atau kegiatan kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain.
- d. Perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah yang masih kaya akan SDA. Sumberdaya alam tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kebijakan pembangunan yang dibuat hanya mengejar peningkatan ekonomi semata maka yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu perumusan kebijakan pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga.
- e. Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.
- f. Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak para penjahat lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

- a. Masalah struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih.
- b. Dalam jangka panjang terjadi peningkatan kepada struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan kependudukan rendah.
- c. Masih rendahnya pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
- d. Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta

mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

- e. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap administrasi kependudukan

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Masih adanya desa tertinggal yang harus di intervensi untuk mengelurkannya dari ketertinggalanya.
- b. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa di dalam menjalankan pembangunan desa
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi, kelembagaan desa dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing serta pengembangan kawasan pedesaan.
- d. Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- e. Belum optimalnya pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam meningkatkan sektor pertanian, pariwisata dan perikanan

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk, sehingga perlu lakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
- b. Permasalahan demografi yang selama ini dialami adalah terkait dengan kualitas, kemampuan, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terpusat di perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta tidak berkorelasi dengan perkembangan potensi ekonomi. Khusus untuk Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah terpadat berpotensi terhadap tingginya beban permasalahan perkotaan yang dihadapi.
- c. Masih rendahnya penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.

15. Perhubungan

Permasalahan di bidang Perhubungan antara lain:

- a. Masih adanya wilayah yang belum Terkonektivitas

- b. Masih belum Optimalnya pengembangan konektivitas perhubungan laut dikarenakan Belum optimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan laut
- c. Masih belum optimalnya pengembangan konektivitas perhubungan darat dikarenakan Belum optimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan darat
- d. Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain.
- e. Belum optimlanya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan.
- f. Masih sempitnya ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
- g. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.

16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Masih adanya wilayah/desa yang belum terlayani jaringan telekomunikasi dikarenakan Belum optimalnya Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi
- b. Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar
- c. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi didalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha
- d. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi
- e. Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi
- f. Masih banyaknya desa yang belum melek terhadap terhadap teknologi informasi
- g. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan darah kepada masyarakat

17. Koperasi Usaha Kecil dan menengah

Permasalahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Masih lemahnya Koperasi dan UKM pada upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari.
- b. Masih kurangnya stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
- c. Masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
- d. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat

18. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang Penanaman Modal antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, energi dan perindustrian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mutlak diciptakan.
- c. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Belum optimalnya kualitas promosi terhadap investasi daerah
- e. Masih perlu ditingkatkan terhadap pelayanan Terpadu satu pintu (PTSP) dalam pengurusan semua perizinan

19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- a. Masih belum optimalnya dukungan keolahragaan serta kepemudaan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan unggulan daerah.
- b. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
- c. Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan di dalam mendukung pembangunan daerah;
- d. Masih lambatya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan olah raga dan kepemudaan

20. Statistik

Permasalahan di bidang Statistik antara lain:

- a. Masih belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam melihat hasil pembangunan dan merencanakan pembangunan Daerah
- b. Masih lemahnya kesadaran dan kualitas sumber daya manusia di dalam menyiapkan kebutuhan data untuk pembangunan Daerah
- c. Belum optimalnya koordinasi dan pemberian reward atau punishment didalam pelaksanaan penyediaan data untuk pembangunan Daerah

21. Persandian

Permasalahan di bidang Persandian antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah serta pengelolaan keamanan informasi
- b. Belum teroprasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah

22. Kebudayaan

Permasalahan di bidang Kebudayaan antara lain:

- a. Masih belum optimlanya dukungan kebudayaan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan unggulan daerah.
- b. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.
- c. Kurangnya SDM bidang kebudayaan dalam pelestarian seni budaya lokal dan pengelolaan warisan budaya
- d. belum adanya komitmen pelaku seni dan budaya.

23. Perpustakaan

Permasalahan di bidang Perpustakaan antara lain:

- a. Rendahnya minat baca masyarakat.
- b. Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah
- c. Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
- d. Masih perlunya peningkatan kualitas pustakawan
- e. Masih perlunya peningkatan kualitas perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah

24. Kearsipan

Permasalahan di bidang Kearsipan antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelola arsip.
- b. Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku

- c. Masih kurangnya pengelolaan arsip in aktif yang masih di kelola
- d. Masih perlunya peningkatan kualitas arsiparis
- e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan arsip

B. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang Kelautan dan Perikanan antara lain:

Masih rendahnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan yang disebabkan oleh: 1). Masih rendahnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya dikarenakan Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Masih belum optimalnya Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Masih kurangnya sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 2). Belum berkembangnya kawasan sentra Kelautan dan Perikanan dikarenakan Belum optimalnya Pengembangan Kawasan Strategis untuk Perikanan

2. Pertanian

Permasalahan di bidang Pertanian antara lain:

Masih rendahnya pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian yang disebabkan oleh: 1). Masih rendahnya produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan dikarenakan Masih kurangnya sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan, Masih belum optimalnya Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Masih Belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, dan Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi Pertanian, perkebunan dan Peternakan ; 2). Belum berkembangnya kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan dikarenakan Masih lambatnya perkembangan Kawasan Strategis peruntukan Pertanian, perkebunan dan peternakan

3. Pariwisata

Permasalahan di bidang Pariwisata antara lain:

Masih rendahnya pertumbuhan PDRB sektor pariwisata yang disebabkan oleh: 1). Masih belum optimalnya pengembangan pariwisata

dikarenakan Masih rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif, Masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata, Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata, Masih belum optimalnya Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata, Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan serta Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan pariwisata; 2). Masih belum optimalnya pengembangan kawasan pendukung pariwisata dikarenakan Masih lambatnya Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata, Belum adanya Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera serta Masih lambatnya Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata

4. Kehutanan

Permasalahan di bidang Kehutanan antara lain:

Masih rendahnya pertumbuhan PDRB sub sektor kehutanan dan penebangan kayu yang disebabkan oleh Masih rendahnya Produksi dan Nilai tambah hasil kehutanan dikarenakan Masih belum optimalnya tata kelola kehutanan serta Masih rendahnya pemanfaatan kawasan hutan

5. Energi dan Sumber daya Mineral

Permasalahan di bidang Energi dan Sumber daya Mineral antara lain:

- a. Menurunnya pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan yang disebabkan oleh 1). Masih rendahnya produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, Masih belum optimalnya tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan serta Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan sumber daya mineral
- b. Masih rendahnya pertumbuhan PDRB sub sektor ketenagalistrikan dan Masih kurangnya ketersediaan energi listrik masyarakat yang disebabkan oleh Masih kurangnya produksi dan pasokan energi listrik dikarenakan Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi listrik daerah

6. Perdagangan

Permasalahan di bidang Perdagangan antara lain:

Masih turun naiknya laju inflasi daerah yang disebabkan oleh Belum optimalnya pengendalian harga terhadap komoditas penyumbang inflasi dikarenakan Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi masyarakat baik komoditas pangan mau pun komoditas non pangan.

7. Perindustrian

Permasalahan di bidang Perindustrian antara lain:

Menurunya pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan yang disebabkan oleh Masih rendahnya produksi dan nilai tambah Industri Pengolahan disebabkan karena Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan, masih belum optimalnya Pembinaan hubungan industri serta Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri

8. Transmigrasi

Permasalahan di bidang Transmigrasi antara lain:

- a. Tidak tersedianya lagi lahan untuk pembukaan kawasan transmigrasi baru
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

C. Urusan Penunjang Pemerintah

Permasalahan di bidang Penunjang Pemerintah antara lain:

1. Perencanaan

Belum optimalnya pelaksanaan Birokrasi yang akuntabel dari sisi perencanaan hal ini terlihat dari masih belum Maksimalnya peningkatan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja yang dikarenakan Belum optimalnya Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan

2. Penganggaran

Belum optimalnya pelaksanaan Birokrasi yang akuntabel dari sisi penganggaran hal ini terlihat dari Masih belum optimalnya pengelolaan aset dan laporan keuangan daerah dikarenakan masih belum optimlnya tata kelola manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran

3. Pengawasan

- a. Belum optimalnya pelaksanaan birorasi yang bersih dari sisi pengawasan hal ini terlihat dari belum optimalnya Pengendalian internal Pemerintah Daerah dikarenakan Belum optimlnya Peningkatan Implementasi pengendalian internal pemerintah Daerah
- b. Masih belum maksimalnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dikarenakan Masih belum optimalnya kualitas pengadaan, akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik

4.1.3. PERMASALAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan prioritas pembangunan daerah adalah masalah utama daerah dan masalah daerah berdasarkan urusan yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Misi 1 : Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah

1. Masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan,
 - b. Masih belum optimalnya Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,
 - c. Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,
 - d. Masih Belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan,
 - e. Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi Pertanian, perkebunan dan Peternakan;
 - f. Lambatnya perkembangan pembangunan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan.
2. Masih rendahnya nilai tambah sektor perikanan yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya,
 - b. Masih belum optimalnya Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya,
 - c. Masih kurangnya sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya,
 - d. Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
 - e. Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - f. Belum berkembangnya kawasan sentra Kelautan dan Perikanan
3. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif,
 - b. Masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata,
 - c. Masih rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata,

- d. Masih belum optimalnya Peran serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata,
 - e. Masih belum optimalnya peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
 - f. Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan pariwisata;
 - g. Masih lambatnya pengembangan kawasan pendukung pariwisata
 - h. Masih lambatnya Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung,
 - i. Masih lambatnya Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka,
 - j. Masih lambatnya Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
 - k. Belum berkembangnya pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan peruntukan pariwisata
 - l. Masih lambatnya Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata.
4. Masih rendahnya nilai tambah sektor Pertambangan dan Penggalian yang dipengaruhi oleh:
- a. Masih belum optimalnya tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
 - b. Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan nilai tambah sumber daya mineral.
5. Masih rendahnya nilai tambah sektor Industri Pengolahan dan perdagangan yang dipengaruhi oleh :
- a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri
 - b. Masih lambatnya Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
 - c. Masih lambatnya Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
 - d. Masih belum optimalnya tata kelola industri pengolahan
6. Masih rendahnya nilai tambah sektor ketenagalistrikan yang dipengaruhi oleh :
- a. Masih kurangnya produksi dan pasokan energi listrik
 - b. Masih kurangnya ketersediaan energi listrik masyarakat

- c. Masih kurangnya Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi listrik daerah.
- 7. Masih lambatna peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih adanya angkatan kerja yang belum bekerja
 - b. Masih belum optimalnya hubungan industrial tenaga kerja
 - c. Masih rendahnya keikutsertaan tenaga kerja terhadap jaminan tenaga kerja
- 8. Masih adanya masyarakat yang menganggur yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya kuliatas angkatan kerja
 - b. Masih kurangnya lapangan pekerjaan
- 9. Masih lambatna penurunan tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih tingginya beban pengeluaran masyarakat miskin
 - b. Masih rendahnya pendapatan masyarakat miskin
- 10. Masih rendahnya pendapatan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendah kualitas SDM dalam pengelolaan pembangunan desa
 - b. Masih rendahnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam desa
 - c. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat desa

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan konektifitas

- 1. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur Pekerjaan umum yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur binamarga
 - b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air
 - c. Masih adanya ketidak sesuaian antar pembangunan infrastruktur dan tata ruang
 - d. Masih kurang kualitas SDM pembanguna infrastruktur
- 2. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar yang di pengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman
 - b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur keciptakaryaan
- 3. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan yang di pengaruhi oleh :

- a. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan darat
- b. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan laut
- c. Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur perhubungan udara

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

1. Masih rendahnya partisipasi pendidikan masyarakat yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendahnya partisipasi sekolah menengah atas
 - b. Masih rendahnya partisipasi sekolah menengah kejuruan
 - c. Masih rendahnya partisipasi sekolah luar biasa
2. Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Masih belum optimalnya pengembangan kurikulum
3. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih belum optimalnya Pengendalian tingkat kelahiran penduduk
 - b. Masih belum optimalnya penataan administrasi kependudukan
4. Masih rendahnya kesejahteraan anak yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih kurangnya pemberian hak-hak kepada anak
 - b. Masih adanya kekerasan terhadap anak
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan perempuan yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendahnya pendapatan perempuan
 - b. Masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan
 - c. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan
6. Masih rendahnya kualitas pemuda yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih sedikitnya pemuda berwirausah
 - b. Masih sedikitnya pemuda yang aktif dalam organisasi
7. Masih belum optimalnya pengembangan olah raga yang dipengaruhi oleh :
 - a. Masih rendah partisipasi masyarakat berolah raga
 - b. Masih kurangnya akses untuk berolah raga
8. Masih rendahnya kesejahteraan Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh :

- a. Masih belum optimalnya pelayanan sosial terhadap PMKS
- b. Masih belum optimalnya rehabilitasi sosial terhadap PMKS
- c. Masih belum optimalnya pemberdayaan terhadap Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan Kesehatan

- 1. Masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh:
 - a. Belum optimalnya Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
 - b. Belum optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - c. Masih rendahnya pengendalian terhadap penyalahgunaan Napza.

Misi 5 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi

- 1. Belum optimalnya Penata kelolaan keuangan daerah yang di pengaruhi oleh :
 - a. Masih belum optimalnya pengelolaan aset dan laporan keuangan daerah
 - b. Masih belum optimlnya tata kelola manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran;
- 2. Belum optimalnya penata kelolaan pemerintah yang di pengaruhi oleh :
 - a. Masih belum optimalnya pengendalian internal Pemerintah Daerah
 - b. Masih belum maksimalnya peningkatan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja hal ini terlihat dari belum optimalnya peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan;
 - c. Masih belum maksimalnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa hal ini terlihat dari masih belum optimalnya kualitas pengadaan, akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik;
 - d. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas pengawasan daerah hal ini terlihat dari masih belum optimalnya tata kelola pengawasan.
 - e. Masih belum optimalnya terhadap penataan peraturan perundang-undangan hal ini terlihat dari masih belum optimalnya tata kelola terhadap penataan peraturan perundang-undangan;
 - f. Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi dan profesional aparatur hal ini terlihat dari Masih belum optimalnya tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah;

- g. Masih belum optimalnya kualitas implementasi pemerintahan berbasis elektronik hal ini terlihat dari Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
 - h. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik
3. belum optimalnya pelaksanaan demokarsi yang dipengaruhi oleh :
- a. Masih belum optimalnya kebebasan berdemokrasi hal ini terlihat dari Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam berdemokrasi sertamasih belum optimalnya peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
 - b. Belum optimalnya pemberian hak-hak politik kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh masih rendahnya partisipasi politik masyarakat hal ini terlihat dari kurangnya pelayanan terhadap hak-hak politik masyarakat.
 - c. Belum optimalnya peran kelembagaan demokrasi masyarakat yang dipengaruhi oleh masih rendahnya kualitas pengembangan lembaga demokrasi hal ini terlihat dari masih kurangnya pemberdayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Misi6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

1. Masih rendahnya Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih belum optimalnya kemampuan terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana hal ini terlihat dari masih belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. Masih kurangnya kawasan berbasis penanggulangan bencana hal ini terlihat dari masih kurangnya pengelolaan terhadap kawasan rawan bencana alam serta Belum tertatanya hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur.
2. Masih belum optimalnya pengendalian terhadap Lingkungan Hidup yang dipengaruhi oleh:
 - a. Masih rendahnya kualitas air hal ini terlihat dari Masih kurangnya pengendalian terhadap kualitas air sungai;
 - b. Masih rendahnya kualitas udara hal ini terlihat dari Masih kurangnya pengendalian terhadap kualitas udara;
 - c. Masih kurangnya cakupan tutupan hutan hal ini terlihat dari Masih kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan hutan;

- d. Masih rendahnya pengendalian terhadap Emisi Gas Rumah Kaca hal ini terlihat dari Masih kurangnya terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

4.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis dalam jangka menengah daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Kesesuaian dengan RPJPD-P.

Berdasarkan identifikasi dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi melambat dan cenderung stagnan

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2018 mencapai 4,54 persen, meningkat dibanding tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,29 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2018 mencapai Rp3.233,25 triliun atau sekitar 21,58 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Perekonomian

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp73,07 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp52,21 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencapai Rp50,05 juta.

a. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh 4,45 persen, melambat dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,47 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha pertambangan dan Penggalian serta Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 1,08 persen dan 5,60 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,72 persen; diikuti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan yang masing-masing tumbuh sebesar 9,18 persen dan 9,00 persen.

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp73,07 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp52,21 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 mencapai Rp50,05 juta. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 tumbuh sebesar 4,45 persen, melambat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 4,47 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur perekonomian Kepulauan Bangka Belitung menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh lima lapangan usaha utama yakni Industri Pengolahan (20,64 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,01 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 3 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Sepeda Motor (15,70 persen), Pertambangan dan Penggalian (10,59 persen) serta Konstruksi (9,73 persen). Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan negatif

(terkontraksi). Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2018 juga dipengaruhi oleh Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari adanya surat edaran ICDX (*Indonesia Commodity and Derivatives Exchange*) pada bulan Oktober 2018 yang menolak surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia. Sementara sebagian besar perusahaan smelter timah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung menggunakan jasa Surveyor Indonesia. Dengan ditolaknya surat keterangan asal bijih timah yang dikeluarkan oleh Surveyor Indonesia, sebagian besar perusahaan smelter timah berhenti berproduksi pada akhir tahun 2018.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, sebesar 1,00 persen pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 berasal dari pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, diikuti Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,92 persen serta Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,49 persen. Peningkatan volume produksi dibanding tahun sebelumnya pada beberapa komoditas strategis seperti komoditas perikanan, perkebunan, dan *Crude Palm Oil* (CPO) menjadi sumber pertumbuhan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2018 mencapai 4,54 persen, meningkat dibanding tahun 2017 yang tumbuh sebesar 4,29 persen. Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2018 mencapai Rp3.233,25 triliun atau sekitar 21,58 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,49 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

b. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

Dari sisi Pengeluaran, Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung secara kumulatif tumbuh melambat sebesar 4,45 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPR) yang tumbuh sebesar 8,22 persen. Komponen yang tumbuh tertinggi kedua adalah pembentukan modal tetap bruto dengan laju sebesar 6,02 persen, dilanjutkan dengan komponen pengeluaran rumah tangga dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 5,68 persen.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPR tumbuh cukup tinggi pada tahun ini didukung oleh adanya kegiatan lembaga dan organisasi untuk meramaikan berbagai even seperti acara hari besar agama, even

budaya dan olahraga baik nasional maupun internasional, adanya pemilu serentak dan persiapan pemilihan presiden dan calon legislatif di tahun 2019 baik dalam rangka kampanye maupun pengkaderan. Terjadinya beberapa bencana di wilayah Indonesia seperti Palu dan Lombok membuat kegiatan lembaga kemanusiaan juga lebih menggeliat dan menyumbang pertumbuhan pada komponen ini.

Kinerja Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong komponen ekspor yang menjadi salah satu tumpuan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung memiliki kinerja yang kurang baik pada Tahun 2018. Laju pertumbuhan ekspor total Bangka Belitung tercatat turun sebesar 1,45 persen. Hal ini didorong oleh turunnya kinerja ekspor luar negeri yang mencapai -2,23 persen. Penurunan ini didorong oleh turunnya seluruh komoditas ekspor mulai dari industri pembekuan ikan, logam timah, karet dan CPO. Sementara itu, komponen pengurang PDRB yakni impor barang dan jasa mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan komponen ekspor yaitu -1,44 persen. Hal ini didukung oleh komponen impor luar negeri dengan pertumbuhan mencapai 42 persen. Tumbuhnya impor luar negeri disumbang oleh impor komoditas barang modal, bahan baku dan kebutuhan rumah tangga.

Struktur ekonomi Kepulauan Bangka Belitung menurut pengeluaran secara kumulatif pada tahun 2018 didominasi oleh komponen pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi sebesar 60,45 persen. Komponen ekspor secara total mencakup ekspor luar negeri dan ekspor antar daerah menyumbang porsi sebesar 48,05 persen namun sumbangan dari komponen pengurang ekspor yakni impor luar negeri dan impor antar daerah mengambil porsi lebih besar pada perekonomian Bangka Belitung sebesar 48,95 persen. Komponen pembentukan modal tetap bruto dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan sumbangan pada perekonomian dengan kontribusi masing-masing sebesar 27,78 persen dan 11,18 persen.

Sumber pertumbuhan ekonomi utama masih dipegang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan 2,99 persen. Meskipun laju pertumbuhannya sendiri mengalami perlambatan tetapi porsinya yang besar masih mampu mendukung perekonomian Kepulauan Bangka Belitung. Pertumbuhan komponen ini secara kumulatif didorong oleh stabilnya harga komoditas kebutuhan masyarakat dan dibangunnya dua pabrik tapioka baru mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat. Sumber pertumbuhan tertinggi kedua dipegang oleh komponen pembentukan modal tetap bruto dengan nilai

sebesar 1,34 persen, disusul oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dengan sumbangan 0,18 persen.

3. Masih lambatnya peningkatan usia harapan hidup masyarakat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH). Angka Harapan Hidup menggambarkan aspek kesehatan, yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator AHH maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama. Indikator umur harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada saat lahir (Eo) tercatat meningkat dari 69,15 tahun pada tahun 2010 menjadi 69,95 tahun pada tahun 2017. Angka sebesar 69,95 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 hingga akhir hayatnya.

Secara nasional, angka harapan hidup penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 menempati peringkat 14, sementara dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat 4 di bawah Provinsi Riau, Jambi dan Lampung. Umur harapan hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung memang menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih di bawah angka nasional yang pada tahun 2017 mencapai 71,06 tahun. Secara umum, peningkatan angka harapan hidup penduduk pada saat lahir di suatu wilayah menggambarkan kualitas kesehatan penduduk yang semakin membaik.

Terlebih pada kelompok bayi dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) serta kelompok wanita berusia produktif. Fenomena peningkatan kualitas kesehatan penduduk ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan infrastruktur dan sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan.

Di samping penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan layanan persalinan secara adil dan merata bagi semua penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung juga turut mendorong peningkatan usia harapan hidup penduduk. Faktor lain yang turut berpengaruh terhadap tingginya angka harapan hidup di Kepulauan Bangka Belitung adalah gaya hidup masyarakat yang saat ini semakin peduli dengan kesehatan, terutama kesehatan wanita hamil.

Selama periode 2010-2017, jumlah infrastruktur rumah sakit baik swasta maupun pemerintah mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hanya ada 7 rumah sakit pemerintah dan 4 rumah sakit swasta di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2017, sudah ada 10 rumah sakit

pemerintah, 9 rumah sakit swasta dan 2 rumah bersalin di Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan jumlah rumah sakit juga diiringi oleh peningkatan kapasitas tempat tidur dari 1.001 unit di tahun 2010 menjadi 1.729 unit di tahun 2017 atau meningkat sebesar 72,73 persen selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.

Tidak semua penduduk yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan bisa dan mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit, karena ketersediaan sarana yang belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami keluhan/gangguan kesehatan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang berbasis wilayah kecamatan yang dekat dengan tempat tinggal penduduk serta berbiaya murah dengan sistem berjenjang yang dikenal dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Untuk menjangkau daerah sulit dan terpencil, pemerintah mengaktifkan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling serta mengaktifkan peran posyandu pada level desa/kelurahan untuk melayani pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan penduduk lansia.

Sampai dengan tahun 2017, terdapat 63 unit puskesmas di Kepulauan Bangka Belitung, yang artinya di masing-masing kecamatan di Kepulauan Bangka Belitung sudah tersedia Puskesmas sebagai sarana penunjang kesehatan. Selain itu, jumlah puskesmas pembantu tercatat sebanyak 170 unit dan posyandu sebanyak 1.171 unit. Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, tercatat jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 5.715 orang yang terdiri dari 703 tenaga medis, 2.678 perawat, 1.195 bidan, 380 tenaga farmasi, 135 ahli gizi, 214 tenaga kesehatan masyarakat, 230 teknisi medis dan 114 tenaga sanitasi dan 66 tenaga terapi fisik.

Ketersediaan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan yang representatif diyakini menjadi syarat yang diperlukan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Namun, hal tersebut belum menjadi syarat kecukupan. Artinya, masih ada aspek yang harus dipenuhi terutama berkaitan dengan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membayar jasa layanan kesehatan yang diaksesnya maupun kemampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Pada tahun 2017, tercatat masih ada 71 bayi yang mengalami gizi buruk dan 1.037 bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini yang masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera diatasi agar pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat

Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf (AMH) yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Harapan lama sekolah dihitung dari jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung tercatat memiliki pola yang semakin meningkat selama periode 2010-2017. Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah mencapai 11,83 tahun, meningkat dibanding tahun 2010 yang sebesar 10,48 tahun. Angka 11,83 tahun ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun sekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Sementara, indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 7,07 tahun di tahun 2010 menjadi 7,78 tahun di tahun 2017. Angka sebesar 7,78 tahun ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini setara dengan tamat pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (human capital) di Kepulauan Bangka Belitung yang semakin meningkat. Meskipun terjadi peningkatan, namun angka tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berhasil diterapkan di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai level SD.

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka yang pendek. Output kegiatan pendidikan berupa peningkatan kualitas modal manusia akan dirasakan pada masa mendatang. Pencapaian kedua indikator pendidikan baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah menggambarkan tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa sekarang dan masa lampau.

Secara nasional, angka harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 berada di peringkat 2 terendah, dan dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah. Sementara angka rata-rata lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung secara nasional berada pada peringkat 10 terbawah, dan dalam tingkat regional Sumatera menempati peringkat terbawah. Meskipun capaian indikator pengetahuan Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari peringkatnya, Kepulauan Bangka Belitung masih tertinggal dari provinsi lainnya.

Rendahnya capaian indikator pengetahuan di Kepulauan Bangka Belitung menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pola pikir masyarakat yang

masih kurang mementingkan pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu pemerataan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama bagi anak-anak yang masih dalam usia sekolah sangat diperlukan guna meningkatkan capaian indikator ini.

5. Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 telah mencapai nilai “B” (65,39) dan untuk kabupaten/kota tahun 2018 kabupaten bangka tengah sudah mencapai nilai “B” sedangkan kabupaten/kota yang lain masih “C” dan “CC” bahkan ada 2 kabupaten yang belum melakukan PMPRB. Data menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun mengalami peningkatan pada komponen pengungkit reformasi birokrasi dengan daftar nilai sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel IV.1
8 (Delapan) Area Perubahan

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
A.	KOMPONEN PENGUNGKIT					
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,11	1,88	3,04	2,98
2.	Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,46	2,09	2,09
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,49	2,84	2,84	2,84
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,67	2,54	2,75	2,66
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,17	11,03	12,32	12,18
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	2,65	3,14	3,27
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	2,88	4,50	6,46	5,66
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,16	3,07	3,98	3,80
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	28,59	29,97	36,62	35,48
B.	KOMPONEN HASIL					
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	-	8,53	8,65	8,91

2.	Survei Internal Organisasi	6,00	-	4,18	4,37	3,97
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	-	5,74	5,97	5,88
4.	Opini Objek	3,00	-	2,00	2,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	-	8,13	7,88	8,15
	Total Komponen (B)	40,00	-	28,58	28,87	29,91
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	57,18	58,55	65,49	65,39
	Tingkat Reformasi Birokrasi		-	CC	B	B

- a. Implementasi RB belum dilakukan secara terintegrasi pada seluruh perangkat Daerah, melainkan masih berfokus pada masing-masing kelompok kerja (Pokja) atau Tim RB yang dibentuk;
- b. Peran agen perubahan belum terlihat dalam upaya membawa perubahan yang nyata guna mendukung pencapaian RB;
- c. Sebagian besar unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis, sehingga belum menggambarkan efektifitas dan efisiensi hubungan kerja antar unit organisasi
- d. Hasil Pengukuran Kinerja Individu belum dijadikan salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment* dan pengembangan karir dan kompetensi pegawai; dan Efektivitas sistem pengawasan internal belum dilakukan secara optimal, khususnya terhadap mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengawasan, seperti; penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), dan zona integritas.
- e. Melakukan reviu atas road map Reformasi Birokrasi dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. *Road Map* ini sebaiknya terintegritas dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta selaras dengan *Road Map* RB Nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
- f. Melakukan internalisasi arah perubahan kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar mereka memahami arah perubahan dan dilibatkan dalam proses perubahan;
- g. Memperkuat peran agen perubahan dalam mendorong perubahan khususnya di setiap unit kerja dengan membuat perencanaan berupa target-target yang akan diwujudkan yang diikuti dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala guna identifikasi langkah-langkah

perbaikan yang diperlukan agar tujuan perbuatan pola pikir dan budaya kerja aparatur dapat terwujud;

- h. Menetapkan peta proses bisnis untuk setiap unit organisasi yang selaras dengan tugas dan fungsi sesuai dengan kinerja yang diharapkan dicapai;
- i. Melakukan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu, serta penetapan ukuran kinerja individu. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara berkala dijadikan salah satu dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* dan pengembangan karir pegawai;
- j. Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan melalui implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), dan benturan kepentingan, serta pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniatur RB dengan mengacu pada Permen PANRB nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- k. Menindaklanjuti hasil survei integritas terhadap jabatan dan organisasi sehingga dapat meningkatkan pemahaman setiap pegawai kinerja yang akan dicapai, dan
- l. Memaklumkan semua standar pelayanan yang ada, diikuti dengan implementasi budaya pelayanan prima di seluruh unit kerja, peningkatan inovasi pelayanan public, pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan, serta evaluasi atas efektifitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan survei kepuasan masyarakat.

6. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencapai 80,11 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2016 yang capaiannya sebesar 83,00. Capaian kinerja demokrasi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 masih berada pada kategori “baik”. Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2017 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Kepulauan Bangka Belitung hanya sebesar 67,01. Angka ini terus mengalami perubahan. Titik terendahnya berada pada tahun 2010 sebesar 65,94 dan titik tertingginya pada tahun 2016 sebesar 83,00. Pada 2017 angka IDI kembali mengalami penurunan menjadi 80,11. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI

disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence-based) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI Kepulauan Bangka Belitung 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 83,07; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 82,30; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 72,89. Pada periode 2009-2017 Aspek Hak-Hak Politik menunjukkan kecenderungan trend yang semakin meningkat. Sementara itu, aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi cenderung berfluktuasi. Capaian aspek Kebebasan Sipil masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dua aspek lainnya.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2017, aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan, sedangkan aspek Hak-Hak Politik mengalami peningkatan. Indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami kenaikan sebesar 1,21 poin. Sedangkan indeks aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 4,58 poin dan 7,31 poin. Berbeda dengan tahun 2016 dimana seluruh indeks aspek sudah berada pada kategori “baik”, indeks aspek Lembaga Demokrasi pada 2017 kembali mengalami perubahan kategori menjadi kategori “sedang”. Sedangkan aspek Kebebasan Sipil dan aspek Hak-Hak Politik masih bertahan pada kategori “baik”.

Pada tahun 2017 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks dan dua variabel yang mengalami peningkatan. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, satu di antaranya menurun cukup tajam. Variabel Peran Peradilan yang Independen menurun paling tajam yaitu sebesar 75,00 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 25,00 pada 2017. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapatan yang turun 27,11 poin, dari 100,00 pada 2016 menjadi 72,89 pada 2017. Di sisi lain, variabel Peran DPRD meningkat cukup tinggi sebesar 49,34 poin, dari 44,33 pada 2016 menjadi 93,67 pada 2017. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Peran DPRD dari kategori “buruk” menjadi kategori “baik”. Variabel lain yang juga meningkat adalah Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel ini meningkat sebesar 2,42 poin dari 88,88 pada 2016 menjadi 91,30 pada 2017.

7. Degradasi kualitas lingkungan hidup

a. Penurunan Tutupan Hutan

Secara umum indeks kualitas tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2014 – 2018 selalu di bawah rata-rata nasional. Tahun 2018, nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah 46,91 sedangkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Nasional adalah 46,91.

Kondisi ini disebabkan karena kondisi tutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semakin menurun. Kegiatan penambangan timah dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan monokultur seperti kelapa sawit, lada dan karet oleh masyarakat dan perusahaan adalah salah satu faktor utama menurunnya tutupan dan kualitas lahan. Selain kondisi tutupan lahan yang sudah banyak rusak tersebut, disebutkan bahwa potensi lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 794.718,497 ha atau 47,6% dari total luasan darat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPDASHL Baturusa Cerucuk, 2018)

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung dari keseluruhan luas lahan 1.669.419 ha dengan luas tanpa data sebesar 503 ha, didapatkan seluas 20.428 ha merupakan lahan kritis, 260 ha berkategori sangat kritis, seluas 392.437 ha berkategori agak kritis. Lahan berpotensi kritis seluas 794.718 ha, lahan tidak kritis sebesar 461.576 ha. Luasan terbesar berupa kondisi lahan yang potensial kritis mencapai persentase 47,60%, kemudian diikuti oleh lahan tidak kritis sebesar 27,65%, lahan agak kritis sebesar 23,51%, lahan kritis 1,22% dan lahan sangat kritis memiliki persentase luasan yang sangat kecil sebesar 0,02%.

b. Penanganan Sampah Belum Optimal

Tahun 2017 terdapat sebesar 368.512 ton timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi yang mampu ditangani oleh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya sebesar 248.234,17 ton atau sebesar 67% dari timbulan yang ada. Ini mengindikasikan sebesar 33% sisanya belum mampu dikelola oleh TPA yang tersedia di semua kabupaten/kota. Pada semua Kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung, jumlah sampah yang masuk ke TPA jauh lebih rendah dibandingkan timbulan sampah.

Kota Pangkalpinang merupakan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menanggung tekanan jumlah sampah yang besar setiap tahunnya dengan timbulan sampah mencapai 53,63% dari total timbulan sampah di Kepulauan Bangka Belitung. Jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang besar di masa yang akan datang berupa sebaran sampah yang tidak pada tempat semestinya yang telah disiapkan. Dampak terbesar adalah pencemaran lingkungan sekitar oleh keberadaan sampah yang tidak mampu ditangani oleh TPA. Sisa makanan mendominasi komposisi sampah dan cenderung meningkat persentasenya dari tahun ke tahun, diikuti oleh sampah plastik, jenis sampah lainnya dengan persentase cukup besar berupa kertas/karton, diikuti oleh sampah taman, nappies, kain dan Produk tekstil, kayu, gelas

dan dengan persentase terkecil berupa logam. Cukup banyak keterdapat sampah yang tidak mampu diuraikan secara alami (sampah anorganik), akumulasinya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia terutama jika berupa logam berat. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen pengelolaan sampah yang bersifat terpadu, dengan mengkombinasikan prinsip daur ulang dan pemakaian kembali produk hasil daur ulang sampah berupa produk tertentu.

4.3. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wajib dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dilakukan dengan mengkaji materi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam RPJMD 2017-2022. Kajian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perumusan isu pembangunan berkelanjutan, isu pembangunan berkelanjutan paling strategis, isu pembangunan berkelanjutan paling prioritas, identifikasi dan analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program di dalam RPJMD terhadap isu prioritas, analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup, perumusan mitigasi, alternatif perbaikan, hingga perumusan rekomendasi perbaikan materi kebijakan, rencana, dan/atau program.

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif dan juga hasil keseluruhan proses KLHS. Berdasarkan hasil keseluruhan proses KLHS, maka telah dirumuskan beberapa rekomendasi KLHS yang harus diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD 2017-2022, sebagai berikut.

1. Merevisi beberapa indikator kinerja program pada beberapa kebijakan umum, antara lain:
 - a) Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat Belinyu, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok, Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik, Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok tidak perlu adanya kegiatan pembangunan pemecah gelombang. Sebagai kompensasinya, pemecah gelombang alami berupa hutan mangrove yang masih ada perlu dipertahankan dan ditambah ketebalannya.
 - b) Pengembangan kawasan mandiri terpadu (KTM Batu Betumpangdan KTM Gantung) perlu memasukkan indikator tingkat produktivitas pertanian dan tingkat kesejahteraan petani (transmigran).

- c) Pada Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Sektor Kelautan dan Perikanan; Peningkatkan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Produk Pertanian Khususnya Komoditas Karet, Lada dan Sapi; serta Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata; indikatornya perlu dibuat lebih rinci dan perlu disebutkan lokasi kegiatan.
 - d) Judul kebijakan umum Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Pengolahan Kepariwisata perlu diganti menjadi Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Industri Kepariwisata
 - e) Pada kebijakan umum Peningkatkan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Industri Pengolahan Sumber Daya Alam Pertambangan Khususnya Sumberdaya Alam Pertambangan Timah, untuk indikator kinerja Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah diubah menjadi Pertumbuhan industri pengolahan pertambangan timah dan mineral ikutannya.
2. Memasukkan program pencegahan dan mitigasi bencana di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Gantung.
 3. Mengintegrasikan rumusan mitigasi dan/atau alternatif kedalam bentuk program-program disertai dengan indikator-indikator, waktu pelaksanaan dan pembiayaannya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat hasil perumusan mitigasi dan/atau alternatif.
 4. Setiap rencana pengembangan kawasan strategis perlu didahului dengan penyusunan rencana induk pengembangan (RIP) dan rencana strategis (renstra) dan dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebelum dilakukan pembangunan fisik.
 5. Untuk beberapa kebijakan yang berlokasi di area yang di dalamnya terdapat kawasan lindung, seperti: 1) Pengembangan kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga, 2) pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera, 3) Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat, dan 4) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka, perlu memilih lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dengan tidak mengganggu area kawasan lindung yang ada di dalamnya.
 6. Pemerintah Provinsi harus segera menerbitkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai pedoman penggunaan ruang pesisir dan laut untuk mendukung sejumlah kebijakan pengembangan kawasan strategis yang berada di wilayah pesisir dan laut.

7. Dalam pengembangan kawasan peruntukan pariwisata perlu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, mengingat sebagian besar lokasi pengembangan sudah dikelola oleh masyarakat melalui BUMDes maupun karang taruna.
8. Pemerintah Provinsi perlu memetakan dan menetapkan kawasan produksi pangan provinsi agar kebijakan/program pemantapan ketahanan pangan lebih fokus pada kawasan tertentu dan mencegah terjadinya perubahan peruntukan kawasan pertanian untuk kepentingan non pertanian.
9. Pemerintah provinsi perlu segera mengidentifikasi dan menginventarisasi kawasan lindung yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mencegah terjadinya okupasi oleh masyarakat dan perubahan fungsi lindung. Selanjutnya hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan di masa datang, pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun instalasi pengolahan air bersih beserta jaringan penyalurannya dengan air baku berasal dari air permukaan seperti air kolong dan air sungai terdekat.

Kemudian rekomendasi integrasi KLHS dengan RPJMD ini terbagi menjadi rekomendasi berdasarkan pada daya tampung dan daya dukung daerah yang terdiri dari rekomendasi dengan upaya tambahan maupun tanpa upaya tambahan. Berikut rekomendasi dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan

A. Rekomendasi daya tampung dan daya dukung daerah dengan upaya tambahan

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan dengan rekomendasi yaitu peningkatan layanan sumber air minum dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada (sumber-sumber air baku yang ada), mengkonservasi ekosistem yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan penyedia sumber air baku untuk air minum, rehabilitasi sarana dan prasarana untuk penyediaan air minum layak yang telah ada, pemantauan kualitas air minum secara berkala agar sesuai dengan standar yang berlaku, kondisi dan kerusakan lahan mempengaruhi kualitas air yang tersedia, sehingga perlu pengolahan air lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan sebagai air minum layak dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, Kerusakan lahan, Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.

2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan dengan rekomendasi menerapkan program peningkatan infrastruktur pemukiman di daerah yang akses terhadap sanitasinya masih rendah, Menyusun program penyuluhan kesadaran pentingnya sanitasi pemukiman, . Menjaga daya dukung jasa penyediaan air agar tidak terlampaui dengan tetap menjaga area konservasi yang berperan penting dalam penyerapan air, serta pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu, Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah, Melaksanakan program minimasi sampah dengan prinsip 3R, Pembangunan dan optimalisasi saluran drainase, Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Ketersediaan air bersih yang terbatas, Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal, Banjir, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
3. Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dengan rekomendasi Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH), Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), Menyelenggarakan penyuluhan pertanian secara berkala, Mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, Membuat kerjasama dengan provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional (*government to government*) dalam rangka mencukupi kekurangan pasokan pangan, Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, Meningkatkan ketersediaan pangan lokal dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang tersedia seperti sawah hasil pencetakan, lahan-lahan perkebunan karet dan kelapa sawit, dan lahan bekas tambang, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan pangan yang tersedia, Meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, Meningkatkan produksi hasil perikanan, dan Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Kemandirian pangan rendah, dan Kerusakan lahan.
4. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan dengan rekomendasi Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH), Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), Mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk distribusi pangan, Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, Meningkatkan ketersediaan pangan lokal dengan mengoptimalkan lahan-

lahan yang tersedia seperti sawah hasil pencetakan, lahan-lahan perkebunan karet dan kelapa sawit, dan lahan bekas tambang, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung jasa penyediaan pangan yang tersedia, Meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, Meningkatkan produksi hasil perikanan, dan Meningkatkan alokasi anggaran untuk program kegiatan yang berkaitan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Kemandirian pangan rendah, dan Kerusakan lahan

5. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air dengan rekomendasi Mengkampanyekan pola hidup bersih kepada masyarakat seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, Membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum, dan Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Ketersediaan air bersih yang terbatas, dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
6. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan rekomendasi Mengkampanyekan untuk pola hidup bersih kepada masyarakat seperti kebiasaan tidak buang air sembarangan, dan kebiasaan mencuci tangan, Membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau tempat-tempat umum yang tidak memiliki fasilitas sanitasi, dan Meningkatkan kerja sama dengan mitra-mitra pemerintah terkait untuk kegiatan penyuluhan ke masyarakat desa dan penyediaan fasilitas buang air besar di desa-desa yang belum ditetapkan sebagai desa ODF.

B. Rekomendasi daya tampung dan daya dukung daerah dengan tanpa daya tambahan

1. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dengan rekomendasi Mempertahankan dan meningkatkan program-program yang mendukung penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita, Meningkatkan lagi monitoring terhadap kesehatan balita terutama di wilayah dengan frekuensi kasus kekurangan gizi pada balita yang tinggi, dan Melaksanakan penyuluhan secara berkala tentang kebutuhan gizi pada balita untuk mempertahankan capaian yang telah ada. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Ketersediaan air bersih terbatas, kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Tingkat pendidikan SDM masih rendah, dan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kal/kapita/hari dengan rekomendasi Mempertahankan dan meningkatkan

program-program yang mendukung kecukupan pangan di seluruh wilayah provinsi, dan Meningkatkan program bantuan subsidi pangan kepada masyarakat tidak mampu. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Tingkat pendidikan SDM masih rendah, dan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

3. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan rekomendasi. Mengkampanyekan untuk pola hidup bersih kepada masyarakat seperti tidak buang air sembarangan, dan kebiasaan mencuci tangan, Membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau tempat-tempat umum yang belum memiliki fasilitas sanitasi dan Peningkatan kerja sama dengan mitra-mitra pemerintah untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. Indikator ini mempunyai isu strategis tentang Ketersediaan air bersih yang terbatas, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal, dan Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
4. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang kewajiban lembaga penyusun RTRW untuk melibatkan lembaga pengelola DAS/stakeholder dalam penyusunan RTRW dan pembuatan rasio/persentase jumlah RPDAST yang harus diinternalisasi ke dalam RTRW, Melakukan pengkajian tentang kondisi DAS yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pemantauan secara rutin dan Memperhatikan DAS yang status DDDT-nya terlampaui hampir 50% dari total luas DAS-nya. Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih yang terbatas, Kerusakan lahan, Rawan bencana (Banjir), Lingkungan banyak yang rusak, dan Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.

C. Rekomendasi dengan upaya tambahan, untuk indikator yang belum mencapai target RPJMN 2019 serta indikator yang belum memiliki data

1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerja sama dengan jaminan asuransi kesehatan, Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan, Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas,

Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, dan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.

2. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan rekomendasi . Meningkatkan peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan, Sosialisasi secara rutin kepada perusahaan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah.

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap dengan rekomendasi. Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan), Meningkatkan kegiatan kampanye tentang imunisasi pada masyarakat, dan Memberikan edukasi khusus kepada orang tua atau kelompok masyarakat yang menolak imunisasi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, dan Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.

3. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas kompetensi petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan), Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan), Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi, peningkatan promosi program KB melalui kerjasama dengan media informasi (media cetak, media elektronik). Indikator ini mempunyai isu strategis Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, dan Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
4. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan dengan rekomendasi Fasilitasi upaya penurunan luas kawasan kumuh di perkotaan, dan Penyediaan fasilitas sanitasi, persampahan, pengolahan limbah rumah tangga yang layak dan berkelanjutan. Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih yang terbatas, Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Rawan bencana (Banjir), Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat, Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah

untuk bersekolah, Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah.

6. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. dengan rekomendasi Mengidentifikasi lokasi yang memiliki risiko bencana dan membuat program dalam penguatan lokasi untuk mengurangi risiko bencana, Menyusun program mitigasi bencana untuk mengurangi dampak/risiko yang timbul akibat bencana. dan Mengidentifikasi lokasi yang memiliki risiko bencana dan membuat program dalam penguatan lokasi untuk mengurangi resiko bencana. Indikator ini mempunyai isu strategis Rawan bencana, Banjir.
7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita dan Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, Menggiatkan program anak sehat dan bergizi, Meningkatkan pendidikan orang tua, dan mengurangi jumlah pernikahan dini, Meningkatkan ketersediaan tanaman pangan sehat, Menerapkan kebiasaan gemar makan ikan. Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Kemandirian pangan rendah dan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
8. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dengan rekomendasi Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI bagi bayi, Mendorong dan meningkatkan program pemberian ASI eksklusif bagi bayi, Menyediakan ruang LAKTASI di setiap perangkat daerah. Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
9. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). dengan rekomendasi Mendorong penciptaan dan pengembangan lapangan kerja informal, Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, Mengadakan pelatihan/ kursus sesuai dengan kegiatan yang diperlukan seperti keterampilan tertentu, peningkatan daya jual produk pertanian. Indikator ini mempunyai isu strategis Kemandirian pangan masih rendah, Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah

10. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan), Pencegahan pernikahan usia dini, Meningkatkan fasilitas kesehatan dan kapasitas SDM tenaga medis. Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
11. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga gizi ibu hamil untuk kesehatan bayi, Menggiatkan program-program yang meningkatkan kesehatan ibu hamil; Menggiatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil kepada petugas medis (dokter kandungan atau bidan). Indikator ini mempunyai isu strategis Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
12. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan), Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga gizi ibu hamil untuk kesehatan bayi, Menggiatkan program-program yang meningkatkan kesehatan ibu hamil, Menggiatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan ibu hamil kepada petugas medis (dokter kandungan atau bidan). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah.
13. Kejadian Malaria per 1.000 orang dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah malaria seperti sosialisasi tentang menjaga kebersihan, penggunaan kelambu, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, Mengurangi luasan kawasan kumuh.. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rendah

14. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah malaria seperti sosialisasi tentang menjaga kebersihan, penggunaan kelambu, dll; Sosialisasi tentang pola hidup bersih untuk mencegah serangan penyakit malaria, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis, Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu, Mengurangi luasan kawasan kumuh. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
15. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penularan hepatitis B, Sosialisasi tentang pola hidup bersih untuk mencegah serangan penyakit hepatitis, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis, Pemberian vaksin/imunisasi pada ibu hamil, Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Ketersediaan air bersih, Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
16. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penyebaran penyakit tropis, Sosialisasi tentang pola hidup sehat dan bersih, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. Pemberian obat-obatan sebagai pencegah penyakit, Mengurangi luasan kawasan kumuh. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
17. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) dengan rekomendasi Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan penyebaran penyakit tropis, Sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis. Pemberian obat-obatan sebagai pencegah penyakit Mengurangi luasan kawasan kumuh. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.
18. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun dengan rekomendasi Pendidikan tentang kesehatan sejak dini dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tentang bahaya merokok, Menggiatkan kampanye tentang bahaya merokok, Memperbanyak jumlah kawasan tanpa rokok. Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat. Indikator ini mempunyai isu strategis

yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah,

19. Prevalensi tekanan darah tinggi dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pola hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, gaya hidup dan lain-lain (GERMAS), Meningkatkan pelayanan kesehatan terkait POSBINDU. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
20. Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis dan jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi yang dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol, Sosialisai tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
21. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol; Sosialisai tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
22. Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alkohol; Sosialisai tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini

mempunyai isu strategis yaitu Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas

23. Prevalensi penyalahgunaan narkoba dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, serta fasilitas rehabilitasi kecanduan narkoba dan alcohol, Sosialisasi tentang cara mengakses layanan rehabilitasi. Subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan rehabilitasi. Menggiatkan pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini. Pencegahan peredaran narkoba dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dari aparat penegak hukum (BNN dan Polisi). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
24. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern dengan rekomendasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan); Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
25. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerjasama dengan jaminan asuransi kesehatan, Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan. Mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan untuk ikut dalam asuransi jaminan kesehatan. Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan SDM yang melayani jaminan kesehatan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
26. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerjasama dengan jaminan asuransi kesehatan; Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan. Mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan untuk ikut dalam asuransi jaminan kesehatan. Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang

mampu. Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas

27. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun dengan rekomendasi Pendidikan tentang kesehatan sejak dini dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tentang bahaya merokok; Pembuatan regulasi tentang batasan umur yang dapat membeli rokok. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
28. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan dengan rekomendasi Pengaturan rasio antara tenaga medis dengan jumlah pasien yang harus dilayani dalam satu daerah. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas..
29. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dengan rekomendasi Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, dan Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat
30. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), indikator ini mempunyai isu strategis Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
31. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dengan rekomendasi Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat
32. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat, dan Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah

33. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan rekomendasi Menggiatkan pendidikan-pendidikan non-formal yang bergerak di bidang TIK, dan Memberikan subsidi kepada lembaga formal dan non-formal yang bergerak di bidang TIK. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
34. Rasio angka partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat, Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah, dan Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
35. Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik dengan rekomendasi Pemberian subsidi bagi tenaga pendidik yang mengambil sertifikat tenaga pendidik, dan Pemberian insentif bagi guru SMA yang bersertifikat pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah
36. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan dengan rekomendasi Kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintahan atau LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perguruan tinggi untuk memberi masukan dan kajian bagi pembuatan regulasi tentang pemberdayaan perempuan. Pembuatan regulasi tentang pemberdayaan perempuan. Menggiatkan peran aktif lembaga pemerintah seperti PKK dalam pemberdayaan perempuan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal, Kondusivitas demokrasi belum stabil
37. Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun dengan rekomendasi Kampanye tentang bahayanya menikah di usia muda, Pembuatan regulasi tentang batasan usia pernikahan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah

38. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
39. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang presentase jumlah tenaga kerja perempuan di setiap perusahaan Mengkampanyekan kesetaraan gender dalam pekerjaan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah
40. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dengan rekomendasi Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan) Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan) Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat, Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
41. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan rekomendasi Memberikan pendidikan/pelatihan/sosialisasi terhadap penggunaan telepon genggam untuk kegiatan-kegiatan yang produktif atau kegiatan-kegiatan usaha. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
42. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau dengan rekomendasi Intervensi teknologi yang hemat air untuk daerah-daerah yang presentase luas daerah dengan kelas jasa ekosistem sangat rendah dari pada daerah yang lain seperti Kabupaten Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkal Pinang, Peningkatan kapasitas air baku, Mempertahankan hutan rawa dan rawa yang ada sebagai kawasan tangkapan air agar tidak berubah peruntukannya sebagai kawasan terbangun, Penghitungan sumber daya air permukaan yang layak untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku, Perhitungan detail tentang penggunaan air untuk kegiatan industry dan Mengkampanyekan untuk menjaga kelestarian wilayah-wilayah tangkapan air seperti rawa, hutan rawa dan tubuh air kepada masyarakat. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik, Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas,

Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau, Lingkungan hidup banyak yang rusak. Pemanfaatan sumber daya air permukaan yang ada dengan bijak pada daerah-daerah yang belum terlampaui dayung dukung dan daya tampungnya

43. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dengan rekomendasi Membangun fasilitas-fasilitas sanitasi terpadu di wilayah pedesaan atau yang tidak memiliki fasilitas sanitasi, Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan fasilitas dan sosialisasi untuk sanitasi dan cuci tangan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas kesehatan masyarakat, Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah, Mengkampanyekan untuk pola hidup bersih kepada masyarakat seperti tidak buang air sembarangan, dan mencuci tangan
44. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah dengan rekomendasi Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah untuk industri, rumah tangga, dan lembaga pemerintahan, Pemetaan potensi air tanah di wilayah Bangka Belitung, Pemberian insentif bagi masyarakat, industri dan lembaga pemerintahan yang bijak dalam memanfaatkan air tanah (minim menggunakan air tanah), Pembangunan instalasi pengolahan air permukaan sebagai air baku. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Ketersediaan air bersih yang terbatas, Kerusakan lahan, Lingkungan hidup banyak yang rusak
45. Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS dengan rekomendasi Memberikan insentif bagi masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan yang melaporkan penebangan hutan ilegal, Pembuatan regulasi untuk penebangan kayu di kawasan DAS, Pembuatan kajian dan regulasi tentang rasio luas hutan minimal untuk setiap kawasan DAS. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Lingkungan hidup banyak yang rusak, Kerusakan lahan, Banyaknya lahan tidak produktif
46. Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi dengan rekomendasi Memaksimalkan rehabilitasi lahan dalam KPH, Pemberian izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tata ruang yang berlaku sehingga meminimalkan terjadinya tumpang tindih lahan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan Lahan Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
47. Konsumsi listrik per kapita dengan rekomendasi Pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu untuk instalasi listrik oleh daerah, Mempermudah jalur birokrasi dalam pendaftaran instalasi baru, Menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber tenaga

listrik. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi.

48. Rasio penggunaan gas rumah tangga Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi. Melakukan monitoring terhadap jumlah gas rumah kaca pada suatu wilayah permukiman seperti pendirian stasiun pemantauan kualitas udara. Mulai memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam kegiatan rumah tangga. Pembuatan regulasi yang mengatur ambang batas dari gas rumah kaca di wilayah permukiman
49. Laju pertumbuhan PDB per kapita dengan rekomendasi Meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah, Membuat program yang dapat menciptakan iklim Usaha Kecil Menengah, Memfasilitasi kemudahan dalam legalitas Badan Usaha Kecil Menengah, dan Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, dan Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
50. PDB per kapita dengan rekomendasi Meningkatkan kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah, Membuat program yang dapat menciptakan iklim Usaha Kecil Menengah, Memfasilitasi kemudahan dalam legalitas Badan Usaha Kecil Menengah, dan Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
51. Proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin dengan rekomendasi Mendorong penciptaan lapangan kerja, Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan, dan Mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja sebelum terjun ke lapangan kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan Tingkat pendidikan SDM masih rendah
52. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian Mendorong penciptaan dan pengembangan lapangan kerja informal; Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal; mengadakan pelatihan/ kursus sesuai dengan kegiatan yang diperlukan seperti keterampilan tertentu, peningkatan daya jual produk pertanian. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat

pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan dan Tingkat pendidikan SDM masih rendah

53. Upah rata-rata per jam pekerja Penetapan standar minimum upah yang sesuai dengan kebutuhan dengan rekomendasi Mengembangkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan Tingkat pendidikan SDM masih rendah, dan Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
54. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur serta Persentase setengah pengangguran dengan rekomendasi Mendorong penciptaan lapangan kerja, Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan, Mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja sebelum terjun ke lapangan kerja. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, Tingkat pendidikan SDM masih rendah dan Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
55. Persentase usia muda (15-24) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan dengan rekomendasi Mendorong penciptaan dan pengembangan lapangan kerja informal, Mengembangkan kewirausahaan berbasis ekonomi lokal, Mengadakan pelatihan/ kursus sesuai dengan kegiatan yang diperlukan seperti keterampilan tertentu, peningkatan daya jual produk pertanian. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi, Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan Tingkat pendidikan SDM masih rendah
56. Jumlah wisatawan mancanegara dengan rekomendasi Mengembangkan infrastruktur dan sarpras destinasi wisata yang telah ada dan baru; Meningkatkan promosi wisata yang telah ada dan baru; Menjaga kebersihan lingkungan destinasi; Mempertahankan budaya lokal yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Indikator ini mempunyai isu

strategis yaitu Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan, Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik, dan Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas

57. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan rekomendasi Mengembangkan insfrastruktur dan sarpras destinasi wisata yang telah ada dan baru, meningkatkan promosi wisata yang telah ada dan baru, Menjaga kebersihan lingkungan destinasi, mempertahankan budaya lokal yang dapat meningkatkan daya tarik wisata. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan, Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik, Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas, dan Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
58. a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah fasilitas ATM di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
 - b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah fasilitas kantor bank di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
59. Jumlah dermaga penyeberangan dengan isu strategis yaitu Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau, Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi, Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik dan Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
60. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita. dengan rekomendasi Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal Mengembangkan industri sektor non migas (pariwisata, perkebunan, pertanian, UKM, dll.) yang berwawasan lingkungan, Meningkatkan skill dan kompetensi tenaga kerja terkait, Pengembangan produk hilirasi pertanian/perkebunan dan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung, dengan berbasis potensi unggulan daerah. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Tingkat Investasi Rendah Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah. Tingginya tingkat inflasi Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan

61. Persentase Perubahan Emisi CO₂/Emisi Gas Rumah Kaca dengan rekomendasi Menyusun dan Melaksanakan RAD GRK, Melakukan Upaya aksi mitigasi dan adaptasi GRK, Meningkatkan tutupan lahan berupa vegetasi seperti RTH pada kawasan industri, taman kota dll. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal
62. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dengan rekomendasi Mempeluas jangkauan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni dan daerah terpencil dan tertinggal. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
63. Proporsi individu yang menggunakan internet dengan rekomendasi Mempeluas jangkauan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni dan daerah terpencil dan tertinggal. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
64. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dengan rekomendasi Meningkatkan peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Investasi Rendah dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
65. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dengan rekomendasi Meningkatkan capaian rumah layak huni bagi semua masyarakat (hingga tahun 2017 mencapai 98,47%; yang harus dicapai hingga 2019 sebesar 1,53%). Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, dan Tingkat Laju Pertumbuhan Penduduk
66. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan dengan rekomendasi Menggalakkan program penggunaan fasilitas transportasi umum terutama untuk anak-anak sekolah (jika memungkinkan gratis); Meningkatkan kenyamanan fasilitas transportasi umum. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
67. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dengan rekomendasi Mengidentifikasi wilayah atau lokasi yang memiliki potensi rawan bencana dan perubahan cuaca ekstrim di Bangka Belitung; Jika diperlukan

membangun stasiun pada wilayah berpotensi atau rawan bencana atau perubahan iklim; Menambah jumlah alat pendeteksi dini bencana atau perubahan cuaca dan iklim pada stasiun yang telah ada. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Lingkungan hidup banyak yang rusak, Rawan bencana,,Banjir,,Kerusakan lahan

68. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan dengan rekomendasi Mengidentifikasi wilayah atau lokasi yang memiliki potensi rawan bencana dan perubahan cuaca ekstrim di Bangka Belitung, Jika diperlukan membangun stasiun pada wilayah berpotensi atau rawanbencana atau perubahan iklim, dan Menambah jumlah alat pendeteksi dini bencana atau perubahan cuaca dan iklim pada stasiun yang telah ada. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Rawan bencana, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
69. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) dengan rekomendasi Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 pada kawasan industri; Mengembangkan kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Lingkungan hidup banyak yang rusak, Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal
70. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang dengan rekomendasi Sosialisasi dan menggalakkan program daur ulang sampah; Meningkatkan keterampilan masyarakat tentang pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang terutama di sekitar TPS 3R; Menambah sarana TPS 3R Pengelolaan sampah dan limbah yang masih kurang optimal. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Lingkungan hidup banyak yang rusak
71. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah dengan rekomendasi Melakukan kajian yang mendalam terkait isu patahan di Selat Nasik, Meningkatkan Dokumen Perencanaan terkait PRB, implementasi pelaksanaan dan evaluasi, Melengkapi data PRB, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Rawan bencana, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal, Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
72. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dengan rekomendasi Menetapkan target Provinsi, Melengkapi data, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Rawan bencana

73. Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional. Mengingat sering terjadinya konflik di wilayah laut sehingga perlu segera ditetapkan perda terkait Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Perlu adanya terkait terkait Pengelolaan kawasan Konservasi. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan laut dan pesisir. Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang.
74. Persentase kepatuhan pelaku usaha. Pendataan seluruh pelaku usaha sarana prasarana produksi perikanan, garam, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta melakukan pengklasifikasian; Sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan pelaku usaha terkait; Membuat program dan mengalokasikan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan laut dan pesisir. Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang.
75. Jumlah nelayan yang terlindungi dengan rekomendasi. Mengingat terdapat program asuransi Nelayan dari pemerintah pusat sehingga pendataan penggunaan asuransi Nelayan di Seluruh Kabupaten Kota, dan Kemudahan dalam mengakses segala bentuk program pemerintah terkait perlindungan nelayan dan keluarganya. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan laut dan pesisir. Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang.
76. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dengan rekomendasi. Menetapkan target Provinsi; Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
77. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya dengan rekomendasi. Perlunya melakukan kajian terkait degradasi lingkungan di kawasan konservasi dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk perguruan tinggi; Menyusun program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
78. Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dengan rekomendasi instansi terkait melakukan pendataan; Menyusun program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten.
79. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan rekomendasi. Meningkatkan kapasitas SDM setiap KPH; Mempertahankan program dan kinerja;

Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kerusakan lahan, Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang, Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten

80. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan, Kerusakan lahan, Konflik sengketa lahan dan pemanfaatan ruang dengan rekomendasi Menetapkan target Provinsi, dan Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
81. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir dengan rekomendasi Menetapkan target provinsi, Membuat program dan alokasi anggaran untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan monitoring terkait kejahatan pembunuhan. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
82. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dengan rekomendasi Menetapkan target provinsi, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
83. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Menetapkan target provinsi, Pendataan dan Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda, Tingkat pendidikan SDM masih rendah
84. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah Kabupaten Kota yang WTP, Mempertahankan program dan kinerja di Pemprov. Kep. Babel, dan Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
85. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). dengan rekomendasi Meningkatkan pemahaman terhadap SKIP di Seluruh OPD baik di pemerintah provinsi dan di Kabupaten Kota, Mempertahankan program dan kinerja dan Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator

ini mempunyai isu strategis yaitu Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.

86. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang Mempertahankan program dan kinerja dan Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
 87. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). dengan rekomendasi Melengkapi data dan Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kondusivitas demokrasi belum stabil
 88. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB dengan rekomendasi Pendataan, dan Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Tingkat Investasi Rendah dan Menetapkan target provinsi
 89. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik dengan rekomendasi Pendataan, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator Tingkat Investasi Rendah. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi dan Menetapkan target provinsi.
 90. Proporsi individu yang menggunakan internet Meningkatkan jumlah individu menggunakan internet; Melengkapi data; Melaksanakan program pendataan berbasis internet, Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator. Indikator ini mempunyai isu strategis yaitu Tingkat pendidikan SDM masih rendah Kurangnya kualitas pendidikan dan masalah lain generasi muda Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
 91. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet dengan rekomendasi Membuat program dan alokasi anggaran untuk mencapai target indikator dan mempunyai isu strategis yaitu keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika dan melengkapi data.
- D. Rekomendasi tanpa upaya tambahan, untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target RPJMN 2019
1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan rekomendasi Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; Meningkatkan bantuan jaminan sosial terutama bagi

masyarakat miskin; Memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat berwirausaha

2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan dengan rekomendasi Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; Memberikan pelatihan untuk mendapatkan keterampilan bagi masyarakat miskin agar dapat berwirausaha
3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dengan rekomendasi Meningkatkan fasilitas, layanan, dan jangkauan akses melahirkan terutama di desa-desa dan daerah terpencil
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
5. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran dengan rekomendasi Meningkatkan layanan dan fasilitas dalam pembuatan akte kelahiran
6. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN dengan rekomendasi Memberikan subsidi penerangan bagi masyarakat rentan dan miskin . Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
7. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu; Menggiatkan program anak sehat dan bergizi
8. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu; Menggiatkan program anak sehat dan bergizi
9. Prevalensi anemia pada ibu hamil Sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala pada ibu hamil dengan rekomendasi Menggiatkan program kesehatan bagi ibu hamil.
10. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan rekomendasi Meningkatkan pelayanan dan jumlah fasilitas kesehatan di setiap Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, Mempertahankan dan meningkatkan program-program terdahulu dan mutu pelayanan kesehatan di setiap tingkat (Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi)

dan Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan disetiap tingkat pemerintahan.

11. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Meningkatkan pelayanan dan jumlah fasilitas kesehatan di setiap Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dengan rekomendasi Mempertahankan dan meningkatkan program-program terdahulu dan mutu pelayanan kesehatan disetiap tingkat (Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi), dan Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan disetiap tingkat pemerintahan.
12. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi, dengan rekomendasi Menggiatkan imunisasi dasar lengkap di posyandu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya (Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik Kesehatan).
13. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pola hidup bersih untuk mencegah serangan penyakit-penyakit kusta Peningkatan jumlah dan mutu dari fasilitas dan tenaga medis.Pemberian obat-obatan sebagai pencegah penyakit.Subsidi jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu
14. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pola hidup sehat seperti olahraga, makanan sehat, gaya hidup dan lain-lain
15. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri dengan rekomendasi Peningkatan pendidikan kerohanian untuk menjaga mental masyarakat.
16. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dengan rekomendasi Peningkatan tenaga kesehatan kejiwaan dan fasilitas kejiwaan pada level Kecamatan (Puskesmas) dan Kabupaten (Rumah Sakit Umum Daerah)
17. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan) dengan rekomendasi Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan); Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan); Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.
18. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dengan rekomendasi Sosialisasi tentang bahaya pernikahan muda; Sosialisasi untuk mejaga kesuburan bagi perempuan

19. Total Fertility Rate (TFR) Sosialisasi tentang bahaya pernikahan muda dengan rekomendasi Sosialisasi untuk menjaga kesuburan bagi perempuan
20. Unmet need pelayanan kesehatan dengan rekomendasi Peningkatan jumlah fasilitas/layanan kesehatan dan tenaga medis yang berkerjasama dengan jaminan asuransi kesehatan; Sosialisasi tentang pentingnya jaminan kesehatan.Mewajibkan seluruh pegawai pemerintahan untuk ikut dalam asuransi jaminan kesehatan.Pemberian bantuan jaminan kesehatan oleh daerah bagi masyarakat yang kurang mampu. Peningkatan pelayanan, fasilitas, dan pegawai yang melayani jaminan kesehatan.
21. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Subsidi vaksin dengan rekomendasi Pengawasan distribusi obat ke puskesmas-puskesmas, Pembagian jatah vaksin untuk puskesmas-puskesmas yang ada.
22. Persentase SD/MI berakreditasi minimal dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat dan Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah.Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik
23. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah.Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik
24. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah.Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik
25. Rata-rata lama sekolah penduduk umur $\geq$ 15 tahun dengan rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kepada masyarakat; Subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu oleh daerah untuk bersekolah.Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik
26. Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq$ 15 tahun dengan rekomendasi Penggiatan lembaga-lembaga pendidikan non-formal; Subsidi pendidikan bagi yang tidak mampu.Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.
27. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun Penggiatan lembaga-lembaga pendidikan non-formal dengan

rekomendasi Subsidi pendidikan bagi yang tidak mampu. Peningkatan kualitas dan kuantitas dari fasilitas dan tenaga pendidik.

28. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dengan Pembuatan regulasi yang melindungi anak dari kekerasan Mengkampanyekan tentang bahaya kekerasan terhadap anak perempuan Peningkatan jumlah fasilitas dan pegawai yang melayani aduan tentang kekerasan anak terhadap perempuan.
29. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. dengan rekomendasi Pembuatan regulasi yang melindungi anak dari kekerasan Mengkampanyekan tentang bahaya kekerasan terhadap anak perempuan Peningkatan jumlah fasilitas dan pegawai yang melayani aduan tentang kekerasan anak terhadap perempuan.
30. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Kampanye tentang bahayanya menikah diusia muda dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang batasan usia pernikahan.
31. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Kampanye tentang bahayanya menikah diusia muda dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang batasan usia pernikahan.
32. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dengan rekomendasi Peningkatan jumlah dan mutu dari petugas kesehatan (penyuluh KB dan Bidan) dan Subsidi pemasangan alat kontrasepsi di tenaga-tenaga kesehatan (bidan) Sosialisasi tentang jenis-jenis dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.
33. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku dengan rekomendasi Meningkatkan capaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dengan secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas sungai dan meningkatkan kegiatan pencegahan pencemaran air serta pemeliharaan kualitas sungai secara berkelanjutan.
34. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rekomendasi Pembuatan regulasi tentang kewajiban lembaga penyusun RTRW untuk melibatkan lembaga pengelola DAS/stakeholder dalam penyusunan RTRW dan pembuatan rasio/persentase jumlah RPDAST yang harus diinternalisasi ke dalam RTRW, dan Melakukan pengkajian tentang kondisi DAS yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memperhatikan DAS yang status DDDT-nya yang terlampaui hampir 50% dari total luas DAS-nya seperti DAS Par dan DAS Tuwing

35. Rasio elektrifikasi dengan rekomendasi Mempertahankan program dan kinerja, dan Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran
36. Persentase tenaga kerja formal dengan rekomendasi Mendorong penciptaan lapangan kerja, Mengembangkan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan dan Mengadakan pelatihan bagi para pencari kerja sebelum terjun ke lapangan kerja
37. Koefisien Gini dengan rekomendasi Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; Meningkatkan kreatifitas dan inovatif pada UKM
38. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan rekomendasi Mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berbasis masyarakat; Meningkatkan kreatifitas dan inovatif pada UKM dan Meningkatkan bantuan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin
39. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil dengan rekomendasi Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas kota pusaka Muntok di Bangka Barat menjadi wisata sejarah
40. Persentase sampah perkotaan yang tertangani dengan rekomendasi Meningkatkan layanan persampahan di perkotaan, Mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, Mulai menerapkan pengurangan penggunaan bahan-bahan yang menimbulkan sampah non-organik seperti penggunaan kantong plastik belanja, contoh sosialisasi di masyarakat (berbelanja membawa keranjang atau tas dari rumah) dan inisiasi di pusat perbelanjaan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik
41. Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU dengan rekomendasi Mempertahankan capaian dan berusaha meningkatkan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat meningkat ke peringkat yang lebih tinggi (hijau atau emas).Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan dalam rangka pembinaan perusahaan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
42. Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan rekomendasi Tetap melaksanakan penyusunan dokumen pelaporan penurunan emisi GRK secara rutin.Melaksanakan upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran untuk menurunkan emisi GRK
43. Jumlah luas kawasan konservasi perairan dengan rekomendasi Mempertahankan dan tetap menjaga kawasan konservasi sesuai dengan

peruntukannya, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

44. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Meningkatkan kapasitas SDM setiap KPH dengan rekomendasi Mempertahankan program dan kinerja; Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran
45. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan rekomendasi Meningkatkan jumlah Kabupaten Kota yang WTP; Mempertahankan program dan kinerja di Pemprov. Kep. Babel Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran
46. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan rekomendasi Meningkatkan pemahaman terhadap SKIP di Seluruh OPD baik di pemerintah Provinsi dan di Kabupaten Kota; Mempertahankan program dan kinerja; Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran
47. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan barang dengan rekomendasi Mempertahankan program dan kinerja; Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang.. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang. Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015–2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2034 dan visi-misi dan program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah *“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Maju, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan 2025”*, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari;
2. meningkatkan kualitas dan daya saing SDM;
3. mewujudkan pemerintahan yang amanah;
4. mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
5. mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Fokus pembangunan pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 adalah pada upaya menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM. Pada tahapan ini, peningkatan perekonomian daerah, perlu diberikan perhatian pada upaya memberikan nilai tambah hasil produk unggulan provinsi. Keterkaitan industri ke depan dan ke belakang menjadi perhatian utama dalam mengembangkan nilai tambah produk unggulan daerah ini. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi, komoditas ini dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang berbahan baku utama ubi, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO juga bisa menghasilkan biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan laut dapat dikembangkan menjadi produk-

produk makanan berbasis hasil produksi tersebut, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengalengan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara itu, pengembangan kualitas SDM (dalam semua aspek) menjadi perhatian sejalan dengan upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAK yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kualitas SDM ini menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai "pemain/subjek" dan bukan "penonton/objek" dari pesatnya pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, diyakini perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju dan karenanya pengembangan SDM di sini adalah SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai untuk mengelola data mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Guna mencapai target dari sasaran pokok pembangunan tersebut, maka:

- a. Dalam meningkatkan perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 1. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
 2. penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
 3. mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
 4. peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
 5. peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
 6. pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
 7. peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
 8. pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;

9. pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
 10. peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
 11. pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
 12. penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
 13. peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
 14. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
 15. peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- b. Sedangkan untuk tercapainya sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:
1. peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
 2. peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
 3. peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
 4. pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

Sementara itu, visi RPJMN untuk periode 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** dengan 9 (sembilan) misi, yaitu :

1. peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan;

5.1. Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, periode 2017-2022 adalah:

“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah.
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil, tingkat kesehatan dan pendidikan serta sosial yang tinggi.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju dalam penyediaan infrastruktur dan konektifitas, pengendalian terhadap lingkungan hidup serta pengendalian terhadap potensi kejadian bencana.
4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah yang salah satunya unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. *Efisien dan Cepat berbasis teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi serta berdemokrasi untuk mendorong percepatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju dan unggul serta masyarakatnya sejahtera.

Pokok-pokok visi yang dijabarkan dari makna pernyataan visi sebagai dasar penyusunan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- b. Seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. *Sejahtera* menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, kesenjangan pendapatan antar masyarakat relatif kecil, tingkat kesehatan dan pendidikan serta sosial yang tinggi, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
 - b. Pendidikan masyarakat
 - c. Sosial masyarakat
 - d. Kesehatan masyarakat
 3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju dalam penyediaan infrastruktur dan konektivitas, pengendalian terhadap lingkungan hidup serta pengendalian terhadap potensi kejadian bencana, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Infrastruktur
 - b. Konektivitas
 - c. Bencana
 - d. Lingkungan hidup
 4. *Unggul* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah yang salah satunya unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 5. *Efisien dan Cepat berbasis teknologi* dimaknai dengan penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi serta berdemokrasi untuk mendorong percepatan pencapaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang maju dan unggul serta masyarakatnya sejahtera, memiliki pokok-pokok visi yaitu :
 - a. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - b. Berdemokrasi

5.2. Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Pembangunan ekonomi* adalah pembangunan bidang ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat desa dan pengentasan masyarakat miskin.
- b. *Berbasis potensi daerah* adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diprioritaskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan, serta industri pengolahan dan perdagangan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. *Infrastruktur* adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. *Konektivitas daerah* adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mobilisasi penduduk, barang dan jasa semakin cepat, efisien dan berkualitas.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. *Sumber daya manusia* adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. *Unggul dan handal* adalah mempunyai tingkat pendidikan kompetensi dan daya saing yang baik yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan kemampuan bersaing ditengah-tengah pembangunan.

4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. *Kesehataan Masyarakat* adalah tingkat kesehatan seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibangun agar mempunyai derajat kesehataan yang tinggi yang diukur dari angka usia harapan hidup.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik* adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
- b. *Pembangunan demokrasi* adalah pembangunan yang menitikberatkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. *Pengendalian bencana* adalah kemampuan dan kecepatan mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. *Kualitas lingkungan hidup* adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan RPJPD 2005–2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; RPJM Nasional 2015–2019; RPJM Nasional 2020–2024, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih; RPJMD Provinsi tetangga yang berbatasan dan terdekat. Permasalahan yang ada, isu-isu strategis, serta capaian kinerja urusan pemerintahan 5 tahun yang lalu (2012-2017), maka dalam Perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan tujuan sebagai berikut, untuk tujuan lama berjumlah 9 tujuan dengan 10 indikator dan untuk tujuan baru berubah menjadi 10 tujuan dengan 10 indikator, dengan rincian terlihat pada tabel V.1:

Tabel V.1
Perubahan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

VISI : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU
1	2	3	4
Pokok Visi : Pertumbuhan Ekonomi			
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pokok Visi : Pendapatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			
2. Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Dan Masyarakat	2 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	1 Pengeluaran Pemerintah Perkapita, (Dalam Ribuan)	1 Indeks Gini
		2 Pendapatan Perkapita, (Dalam Ribuan)	
Pokok Visi : Infrastruktur Dan Konektivitas			
3 Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas	3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	1 Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur
Pokok Visi : Pendidikan Dan Sosial Masyarakat			
4 Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	4 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)
	5 Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat		1 Indeks Pembangunan Sosial
	6 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		1 Indeks Pembangunan Budaya
Pokok Visi : Kesehatan Masyarakat			
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	7 Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU
		Perempuan)	Perempuan)
Pokok Visi : Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi
Pokok Visi : Pembangunan Demokrasi			
7 Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	9 Meningkatnya Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi
Pokok Visi : Bencana			
8 Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	10 Menurunnya Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana
Pokok Visi : Lingkungan Hidup			
9 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mencapai tujuan ini, maka dalam Perubahan RPJMD 2012-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sasaran sebagai berikut, sasaran lama berjumlah 22 sasaran dengan 37 indikator sedangkan untuk sasaran baru berjumlah 27 dengan 27 indikator, terlihat pada tabel V.2 berikut:

Tabel V.2
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1 2	3	4	5
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
1 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Jasa Perkebunan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
2 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perikanan	2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
3 Meningkatnya Pengembangan	3 Meningkatkan Kunjungan	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	1 Laju Pertumbuhan Kunjungan wisatawan

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
4	Pembangunan Pariwisata Meningkatnya Produksi Sektor Pertambangan	Wisatawan 4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Pertambangan Dan Penggalan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
5	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Industri	5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
6	Terwujudnya Kemandirian Energi		1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Ketenagalistrikan	
7	Meningkatnya Belanja Pemerintah Daerah		1 Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah	
8	Menurunnya Angka Pengangguran	6 Menurunkan Tingkat Pengangguran 7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	1 Persentase Angka Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka 1 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan	1 Angka Kemiskinan
10	Menurunnya Angka Inflasi		1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	
		9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa		1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas				
12	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Pengembangan Potensi Daerah	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Terbangunnya Daerah Irigasi (Ha)	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
13	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2 Ketersediaan Air Baku (M3) 1 Persentase Lingkungan Yang Tertata	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar
			2 Persentase Bangunan Yang Tertata 3 Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	
		12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan		1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
14	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah		1 Persentase Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Laut 2 Persentase Armada Pengangkutan 3 Persentase Jalan Kondisi Mantap	
Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal				
15	Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Masyarakat	13 Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	1 Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1 Angka Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
		14 Meningkatkan Kualitas Pendidikan		1 Persentase sekolah dengan akreditasi A
		15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak		1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Laju Pertumbuhan Penduduk
		17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender		1 Indeks Pemberdayaann Gender (IDG)
		18 Meningkatkan Kualitas Pemuda		1 Indeks Pembangunan Pemuda
		19 Meningkatkan Pembangunan Olah Raga		1 Indeks Pembangunan Olah Raga
		20 Meningkatkan		1 Persentase PMKS

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
		Kesejahteraan Sosial 21 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan		Sejahtera Indeks Pembangunan Budaya
Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat				
16 Peningkatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat		22 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi				
17 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel		23 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	1 Indeks Reformasi Birokrasi
			2 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	
			3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	
			4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	
18 Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien			1 Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan	
19 Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas			2 Indeks Profesionalitas ASN 1 Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	
			2 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	
20 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak Politik Dan Lembaga Demokrasi Masyarakat		24 Meningkatkan Kebebasan Sipil	1 Skor Aspek Kebebasan Sipil	1 Nilai Kebebasan Sipil
		25 Meningkatkan Hak-Hak Politik	1 Skor Aspek Hak-Hak Politik	1 Nilai Hak-Hak Politik
		26 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1 Skor Aspek Lembaga Demokrasi	1 Nilai Kelembagaan Demokrasi

SASARAN LAMA		SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5
Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup				
21	Meningkatkan Kapasitas Terhadap Penanggulangan Bencana	27	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1 Indeks Kapasitas Bencana Daerah
22	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	28	Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup	1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
			2 Indeks kualitas udara	
			3 Indeks tutupan lahan	
			4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	

Baik tujuan maupun sasaran, semuanya ditetapkan indikatornya, disertai target-target capaian selama 5 tahun (2017-2022), sehingga bisa diukur keberhasilan pencapaiannya, dan ditetapkan dalam RPJMD ini menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterkaitan dan konsistensi perubahan tujuan, indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran digambarkan seperti pada Tabel V.3 berikut ini.

Tabel V.3

Keterkaitan Perubahan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan RPJMD Tahun 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
Visi “Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”							
Pokok Visi : Pertumbuhan Ekonomi				Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1. Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Jasa Perkebunan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
				2 Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perikanan	2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
				3 Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Pariwisata	3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	1 Laju Pertumbuhan Kunjungan wisatawan
				4 Meningkatnya Produksi Sektor Pertambangan	4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Pertambangan Dan Penggalian	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
				5 Meningkatnya Pembangunan Berbasis Industri	5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
				6 Terwujudnya Kemandirian Energi		1 Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Ketenagalistrikan	
Pokok Visi : Pendapatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat				Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah			
2. Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Dan Masyarakat	2 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	1 Pengeluaran Pemerintah Perkapita,(Dalam Ribuan)	1 Indeks Gini	7 Meningkatnya Belanja Pemerintah Daerah		1 Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah	
		2 Pendapatan Perkapita,(Dalam Ribuan)		8 Menurunnya Angka Pengangguran	6 Menurunkan Tingkat Pengangguran 7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	1 Persentase Angka Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka 2 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
				9 Menurunnya Angka Kemiskinan	8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan	1 Angka Kemiskinan
				10 Menurunnya Angka Inflasi		1 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi	

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kepulauan Bangka Belitung	
				11 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	
					9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa		1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
Pokok Visi : Infrastruktur Dan Konektivitas				Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas			
3 Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas	3 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	1 Pertumbuhan Subsektor Jasa Konstruksi	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur	12 Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Pengembangan Potensi Daerah	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1. Terbangunnya Daerah Irigasi (Ha) 2 Ketersediaan Air Baku (M3)	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
				13 Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1 Persentase Lingkungan Yang Tertata	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar
						2 Persentase Bangunan Yang Tertata	

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
						3 Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	
					12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan		1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
Pokok Visi : Pendidikan Dan Sosial Masyarakat				Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal			
4 Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	5 Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	15 Meningkatnya Kesempatan Pendidikan Bagi Masyarakat	13 Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	1 Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	1 Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
					14 Meningkatkan Kualitas Pendidikan		1 Persentase sekolah dengan akreditasi A
	6 Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat		1 Indeks Pembangunan Sosial		15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak 16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk		1 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 1 Laju Pertumbuhan Penduduk

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
					17 Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender		1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
					18 Meningkatkan Kualitas Pemuda 19 Meningkatkan Pembangunan Olah Raga		1 Indeks Pembangunan Pemuda 1 Indeks Pembangunan Olah Raga
	7 Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan		1 Indeks Pembangunan Kebudayaan		20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 21 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan		1 Persentase PMKS Sejahtera 1 Indeks Pembangunan Kebudayaan
Pokok Visi : Kesehatan Masyarakat				Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat			
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	7 Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	16 Peningkatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat	21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat
Pokok Visi : Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
6 Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	17 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	1 Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
						2 Tingkat Kematangan Maturitas SPIP	
						3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkatkan 4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkatkan	
				18 Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien		1 Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan	
						2 Indeks Profesionalitas ASN	
				19 Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas		1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	
						2 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	

TUJUAN LAMA	TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN LAMA	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
Pokok Visi : Berdemokrasi				Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi			
7 Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	9 Meningkatnya Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	20 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak Politik Dan Lembaga Demokrasi Masyarakat	25 Meningkatkan Kebebasan Sipil	1 Skor Aspek Kebebasan Sipil	1 Nilai Kebebasan Sipil
					26 Meningkatkan Hak-Hak Politik	1 Skor Aspek Hak-Hak Politik	1 Nilai Hak-Hak Politik
					27 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1 Skor Aspek Lembaga Demokrasi	1 Nilai Lembaga Demokrasi
Pokok Visi : Bencana				Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
8 Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	10 Menurunnya Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	21 Meningkatkan Kapasitas Terhadap Penanggulangan Bencana	28 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1 Indeks Kapasitas Bencana Daerah	1 Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Pokok Visi : Lingkungan Hidup				Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup			
9 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	22 Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	29 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Air Sungai	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
						2 Indeks Kualitas Udara	
						3 Indeks Tutupan Lahan 4 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	

Dari perubahan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran maka ditetapkan keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator kinerja tujuan yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan PDRB sub sektor pertanian, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian;
 - b. Meningkatkan PDRB sub sektor perikanan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan;
 - c. Meningkatkan Kunjungan wisatawan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator Meningkatkan Kunjungan Wisatawan;
 - d. Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan dan energi;
 - e. Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan yang diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks gini yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Menurunkan tingkat pengangguran, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator tingkat pengangguran terbuka;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan;
 - c. Menurunkan tingkat kemiskinan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase angka kemiskinan;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator pendapatan perkapita masyarakat desa.

Misi II : Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dengan indikator kinerja tujuan Indeks ketersediaan Infrastruktur yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum;
 - b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur dasar;
 - c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator persentase ketersediaan infrastruktur perhubungan.

Misi III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendidikan masyarakat dengan indikator tujuan rata-rata lama sekolah (rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan), yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan kesempatan mendapat pendidikan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran angka harapan lama sekolah (angka harapan lama sekolah laki-laki, angka harapan lama sekolah perempuan);
 - b. Meningkatkan kualitas pendidikan, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Persentase sekolah dengan akreditasi A.
2. Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat dengan indikator kinerja tujuan indeks pembangunan sosial yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Anak, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Perlindungan Anak (IPA);
 - b. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran laju pertumbuhan penduduk;

- c. Meningkatkan pembangunan responsif gender, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - d. Meningkatkan kualitas pemuda, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan pemuda;
 - e. Meningkatkan pembangunan olah raga, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks pembangunan olah raga;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan sosial, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran persentase PMKS sejahtera.
3. Meningkatnya pembangunan Kebudayaan dengan indikator kinerja tujuan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang diintervensi dengan sasaran Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);

Misi IV : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat dengan indikator tujuan angka usia harapan hidup, (angka usia harapan hidup laki-laki, angka usia harapan hidup perempuan), yang diintervensi dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kesehatan masyarakat, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran angka kesehatan masyarakat.

Misi V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks reformasi birokrasi;
- 2. Meningkatnya Demokrasi dengan indikator kinerja tujuan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, yang diintervensi dengan sasaran :

- a. Meningkatkan kebebasan sipil, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran nilai kebebasan sipil;
- b. Meningkatkan hak-hak politik, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran nilai hak-hak politik;
- c. Meningkatkan peran lembaga demokrasi, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Nilai Lembaga Demokrasi .

Misi VI : Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menurunnya Resiko Bencana dengan indikator kinerja tujuan Indeks Resiko Bencana (IRB), yang diintervensi dengan sasaran meningkatkan kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran indeks kapasitas bencana daerah.
2. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup dengan indikator tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH], yang diintervensi dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup, yang keberhasilan pencapaiannya diukur dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup [IKLH];

Keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan indikator sasaran dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022 terlihat pada tabel V.4 berikut.

Tabel V.4

Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
Visi			
“Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”			
Pokok Visi : Pertumbuhan Ekonomi		Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
		2 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
		3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	1 Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
		4 Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
		5 Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
2 Meningkatnya pemerataan pendapatan	1 Indeks Gini		
		6 Menurunkan Tingkat Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka
		7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
		8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1 Persentase Angka Kemiskinan
		9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	1 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
Pokok Visi : Infrastruktur Dan Konektivitas		Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah Yang Berkualitas	
3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	1 Indeks Ketersediaan Infrastruktur	10 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
		11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
		12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan
Pokok Visi : Pendidikan Dan Sosial Masyarakat		Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal	
4 Meningkatnya Pendidikan masyarakat	1 Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)	13 Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	1 Angka Harapan Lama Sekolah , (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)
		14 Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1 Persentase sekolah dengan akreditasi A
5 Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	1 Indeks Pembangunan Sosial	15 Meningkatkan Kesejahteraan Anak	1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)
		16 Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Laju Pertumbuhan Penduduk
		17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		18 Meningkatkan Kualitas Pemuda	1 Indeks Pembangunan Pemuda
		19 Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	1 Indeks Pembangunan Olah Raga
		20 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	1 Persentase PMKS Sejahtera
Pokok Visi : Kesehatan Masyarakat		Misi 4. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	
7 Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat	1 Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	21 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kesehatan Masyarakat

TUJUAN BARU	INDIKATOR KINERJA TUJUAN BARU	SASARAN BARU	INDIKATOR KINERJA SASARAN BARU
1	2	3	4
Pokok Visi: Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dan Pembangunan Demokrasi	
8 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi	22 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1 Indeks Reformasi Birokrasi
Pokok Visi : Berdemokrasi		Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dan Pembangunan Demokrasi	
9 Meningkatnya Demokrasi	1 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	23 Meningkatkan Kebebasan Sipil	1 Nilai Kebebasan Sipil
		24 Meningkatkan Hak-Hak Politik	1 Nilai Hak-Hak Politik
		25 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi	1 Nilai Lembaga Demokrasi
Pokok Visi : Bencana		Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan	
10 Menurunnya Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	1 Indeks Kapasitas Bencana Daerah
Pokok Visi : Lingkungan Hidup		Misi 6. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan	
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

5.4. Keselarasan RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD 2017-2022 Perubahan

RPJMD 2017-2022 Perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD 2005-2025 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJMN 2020-2024. Selanjutnya RPJMN 2020-2024

menjadi pedoman bagi penyusunan perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Melalui penyelarasan antara RPJMD DIY dengan RPJMN tersebut, diharapkan dapat terwujud capaian dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai upaya sinergi antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan.

Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 tersebut didasarkan pendekatan perencanaan pembangunan nasional dan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial (HITS) dalam lingkup kewilayahan secara lintas bidang dan antar bagian urusan pemerintahan. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional tersebut dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*.

Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan :

- 1) Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah
- 2) Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- 3) Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 4) Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan
- 6) Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2015-2019 ialah, “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-

Royong” melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun tujuan pembangunan nasional dapat dilihat pada Nawa Cita Presiden Joko Widodo sebagai berikut:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman kepada seluruh warga negara;

2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, demokratis, dan terpercaya;

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan;

4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

10 Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPn/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor

0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keterkaitan Visi-Misi-Tujuan Pembangunan Nasional dan Visi-Misi-Tujuan Pembangunan Daerah dalam RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan, salah satu tujuan SDGs adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi pihak. Berikut 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) :

1. Tanpa kemiskinan. Tujuan dari indikator ini adalah tidak ada lagi kelaparan dalam bentuk apapun di seluruh dunia;
2. Tanpa kelaparan. Tujuan dari Indikator ini adalah tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin kehidupan sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4. Pendidikan berkualitas. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang;
5. Kesetaraan gender. Tujuan dari indikator ini adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
6. Air bersih dan sanitasi. Tujuan indikator ini adalah menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
7. Energi bersih dan terjangkau. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpecaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;

8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Tujuan dari indikator ini adalah mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Tujuan dari indikator ini adalah membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan. Tujuan dari indikator ini adalah mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Tujuan dari indikator ini adalah membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Tujuan dari indikator ini adalah menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
13. Aksi terhadap iklim. Tujuan dari indikator ini adalah bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Kehidupan bawah laut. Tujuan dari indikator adalah melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan;
15. Kehidupan di darat. Tujuan dari indikator ini adalah melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah;
16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Tujuan dari indikator ini adalah meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari indikator ini adalah memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel V.4

Target Indikator Kinerja Tujuan Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB			4,47	4,3	4,45	4,4	1,65			
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi						3,25	4,25	4,25
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Masyarakat	Pengeluaran Pemerintah Perkapita, (Dalam Ribuan)			1.864	1.890	N.a	1.940	1.980			
		Pendapatan Perkapita Masyarakat, (Dalam Ribuan)			46.457	50.732		53.015	55.401			
			Meningkatnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	0,282		0,281	0,280	0,260	0,260	0,255	0,255
3	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas Mendukung Pengembangan Potensi Daerah	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi			5,64	6,95	5,76	7,0	7,1			

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	9%	13%	14%	20%	25%	42%	67%	80%
4	Meningkatnya Lama Sekolah Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)			7,68	7,76	7,84	7,83	7,89			
					L=8,90	L = 7,90	L = 68,32	L= 7,94	L = 7,96			
					P=7,76	P=6,76	P = 72,11	P = 6,98	P = 6,99			
			Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah, (Rata-Rata Lama Sekolah Laki-Laki, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan)		7,84		7,98		8,05	8,19	8,19
										L = 7,98	L= 8,00	L= 8,00
										P = 7,00	P = 7,05	P = 8,10
			Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Sosial	44,04					44,28	44,36	44,36
			Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks pembangunan Kebudayaan								
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)			69,97	69,98	70,18	70,16	70,23			
					L=68,17	L = 68,24		L = 68,37	L = 68,40			
					P=71,96	P = 72,00		P = 72,12	P = 72,23			
			Meningkatnya Usia Harapan	Angka Usia Harapan Hidup,						70,36	70,48	70,48

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Hidup Masyarakat	(Angka Usia Harapan Hidup Laki-Laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)						L = 68,50	L = 68,60	L = 68,60
										P = 72,30	P = 72,45	P = 72,45
6	Mewujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi			63,15	64,08	67,17	65,39	67,41			
			Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi					67,41	68,43	69,50	69,50
7	Terwujudnya Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi			80,11	74,77	73,43	75,24	75,65			
			Meningkatnya Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi					75,65	75,83	76,00	76,00
8	Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana			162	159		156	153			
			Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana					153	150	147	147
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			58,59	58,76	63,07	59,32	59,81			
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85				59,81	75,74	75,99	75,99

Tabel V.5

Target Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019		2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1	Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Jasa Perkebunan		4,76	4,8	4,17	4,9	1,42	3,15			
			Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,76		4,17		1,42	3,15	4,86	4,98	4,86
2	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Perikanan	2	Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan		3,74	3,8	8,11	3,85	5,87	3,9			
			Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,74		8,11		5,87	3,45	4,35	5,0	5,0
3	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	3	Tingkat Kunjungan Wisatawan		330.322	389.009	425.942	389.009	438.373	217.345			
			Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	0,57 %		15,30 %		2,92 %	-48,85 %	21,05 %	21,74 %	21,74 %

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD		
							2018		2019		2020	2021		2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	
4	Meningkatnya Produksi Sektor Pertambangan	5	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Pertambangan Dan Penggalan			1,52	0,53	-0,97	0,57	0,87	0,63				
				4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	1,52		-0,97		0,87	0,63	1,74	1,76	1,76
5	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Industri	6	Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan			2,62	2,63	4,00	2,65	1,17	1,25				
				5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	2,62		4,00		1,17	1,25	1,5	2,0	2,0
6	Terwujudnya Kemandirian Energi	7	Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Ketenagalistrikan			5,91	12,8	8,8	12,83	N.A	12,86				
7	Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	8	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah						0,253	N.A	0,257				
8	Menurunnya Angka Pengangguran	9	Persentase Angka Pengangguran			3,7	5,7	3,65	5,6	3,62	5,42				

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				6 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	5,7	3,65	5,6	3,62	5,42	5,50	5,60	5,60
				7 Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58,83	N.A	63,23	N.A	63,82	60,00	64,00	64,80	64,80
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	10	Persentase Angka Kemiskinan			5,3	5,22	4,77	5,15	4,5	5,1			
				8 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	5,30	5,22	4,77	5,15	4,5	5,77	5,50	5,00	5,00
				9 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.120.353	N.A	1.214.930	1.271.837	N.A	1.334.870	1.409.026	1.479.389	1.479.389
10	Menurunnya Angka Inflasi	11	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			6,75	06.42	3,18	06.31	2,62	06.24			
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	12	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk			2,11	2,09	2,03	2,09	N,A	2,08			
12	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Pengembangan Potensi Daerah	13	Terbangunnya Daerah Irigasi (Ha)			1.034	1.084	N.A	1.135	N,A	1.187			
		14	Ketersediaan Air Baku (M3)			N.A	N.A	N.A	N,A	N,A	90.000			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021		2022
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		Target
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				10 Meningkatkan Ketersedian Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	9%						86%	100%	100%
13	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Masyarakat	15	Persentase Lingkungan Yang Tertata			N.A	14%	N.A	34%	N,A	54%	86%	100%	100%
		16	Persentase Bangunan Yang Tertata			N.A	16%	N.A	38%	N,A	56%	89%	100%	100%
		17	Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi			N.A	83		85	83,77	87	90	92	92
				11 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Dasar	20						25%	54%	80
14	Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	18	Persentase Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Laut			0.17%	0.17%	N.A	0.18%	N,A	0.19%	0.20%	0.21%	0.21%
		19	Persentase Armada Pengangkutan			N.A	0.33%	N.A	0.34%	N,A	0.35%	0.36%	0.37%	0.37%
		20	Persentase Jalan Kondisi Mantap			92,20	93,50	N.A	94,50	N,A	95,50	96	96,50	96,50
				12 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan .	50						69,45	71,84	71,84

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019		2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
15	Meningkatnya Pendidikan Bagi Masyarakat	21	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)		11,71	0,516667	11,87	12,12	11,94	12,19			
					L=11,93	L=12,08		L=12,37		L=12,51			
					P=12,07	P=12,21		P=12,46		P=12,63			
			13	Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah, (Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	11,71					12,32	12,45	12,45
											L = 11,81	L = 11,98	
											P= 12,15	P = 12,37	
			14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Persentase sekolah dengan akreditasi A						A	A	A
			15	Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	N.A	N.A	N.A	N.A	68,1	68,5	68,5
			16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,11	2,09	2,03	2,09	N.A	2,08	2,08	2,08
			17	Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,15		89,00	89,00	89,25	89,50	89,50

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021		2022
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		Target
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				18 Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	40%					53%	54%	54,5%	54,5%
				19 Meningkatkan Pembangunan Olah Raga	Indeks Pembangunan Olah Raga	0,10					0,25	0,30	0,35	0,35
				20 Meningkatkan Kesejahteran Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	35%					64%	65,92%	67%	67%
				21 Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan									
16	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	22	Angka Kesehatan Masyarakat			76,94	71,6	N.A	77,58	88,48	82,97	85,92	89,98	89,98
				22 Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	79	71,6	N.A	77,58	88,48	82,92	85,92	89,98	89,98
17	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	23	Opini Audit Bpk Atas Laporan Keuangan			WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
				23 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	30						45	50	50
		24	Tingkat Kematangan Maturitas SPIP			3	3	3	3	3	3			
		25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat			63	65		70	79,26	72			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)	SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019		2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
		26	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat		N.A	2,75		2,78		2,8			
18	Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien	27	Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan		N.A	30		35		40			
		28	Indeks Profesionalitas ASN		60	63		67,5	70,18	73,5			
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		N.A	1	5	5	5	5			
		30	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat		N.A	B	B	B	B	B			
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	31	Skor aspek kebebasan sipil		81,7	87,75	78,46	87,76	77,20	87,79			
		32	Skor aspek hak-hak politik		80,25	81,72	65,79	81,76	70,71	81,79			
		33	Skor aspek lembaga demokrasi		80,1	80,3	75,25	80,33	78,73	80,36			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD	
							2018		2019		2020	2021		2022
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target		Target
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				24 Meningkatkan Kebebasan Sipil Masyarakat	Nilai Kebebasan Sipil	81,70						87.82	87.94	87.94
				25 Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	Nilai Hak-Hak Politik	80,25						81,85	81,95	81,95
				26 Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi Masyarakat	Nilai Kelembagaan Demokrasi	80,10						80,56	80.,69	80.69
21	Meningkatnya Kapasitas Terhadap Penanggulangan Bencana	34	Indeks Kapasitas Bencana Daerah			0,1	0,15		0,2		0,25			
				27 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Terhadap Bencana Daerah	0,10						0,30	0,35	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	35	Indeks Kualitas Air Sungai			64,56	65,85		67,8		67,16			
		36	Indeks kualitas Udara			82,81	85,3		87,86		90,49			
		37	Indeks Tutupan Lahan			37,51	37,88		38,26		38,64			
		38	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			N.A	7.745,58		7.280,85		6.843,99			
				28 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85					59,81	75,74	75,99	75,99

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab V, maka dirumuskan dan ditetapkan strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah haruslah tepat mewujudkan sasaran, sehingga sasaran yang dicapai juga dapat mencapai Tujuan yang ditetapkan. Dengan Demikian maka Misi dapat dicapai, yang akan berujung pada terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan juga haruslah tepat dan konsisten dengan sasaran, tujuan, misi dan visi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,25 sementara itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan tingkat kualitas SDM diharapkan meningkat menjadi 71,05.

Guna mencapai target sasaran pokok meningkatnya perekonomian daerah, arah kebijakan prioritas dalam RPJPD yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;

11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;

Sedangkan untuk tercapainya sasaran pokok terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, arah kebijakan yang dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan relevansi dan daya saing;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat;
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan;
4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan yang telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah merupakan aturan hukum kaidah-kaidah, norma yang menjamin agar pencapaian tujuan dan sasaran tercapai dengan baik.

Strategi pembangunan dalam RPJMD ini telah didahului oleh analisis yang cermat atas kondisi makro ekonomi yang ada di daerah dan nasional serta kondisi mikro di daerah. Sebelum masuk pada strategi pembangunan, telah diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menggunakan analisis, akhirnya ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk mencapai setiap sasaran pembangunan lengkap dengan indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

6.1.1. Strategi pencapaian sasaran

Strategi yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai sasaran dengan strategi lama terdiri 46 (empat puluh enam) strategi lama sedangkan dengan perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi 70 (tujuh puluh) strategi baru yaitu :

Tabel VI.1
Perbandingan Strategi Pembangunan

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan dengan arah kebijakan Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	1 Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan
2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	2 Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		3 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		4 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
3	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan	
4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	5 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	6 Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan	7 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
		8 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	9 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif
8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	10 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata
9	Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	11 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata
		12 Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
		13 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung
		14 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka
		15 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
		16 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata pulau punai
		17 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
		18 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	19 Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
		20 Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat
11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	21 Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
		22 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
		23 Peningkatan tata kelola industri
		24 Peningkatan tata kelola perdagangan
12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah	
13	Meningkatkan pendapatan asli daerah	
14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	25 Peningkatan kesempatan kerja
		26 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja
		27 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
		28 Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	29 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
		30 Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
		31 Peningkatan pendapatan masyarakat desa
16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	
17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	
18	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	32 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	33 Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang
		34 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi
20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	35 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman	
22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	
23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	36 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	
25	Meningkatkan aksesibilitas	
26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	37 Peningkatan akses pelayanan pendidikan
27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	38 Peningkatan mutu layanan pendidikan

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
		39 Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
		40 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
		41 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
		42 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
		43 Peningkatan Insan pemuda yang berprestasi
		44 Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
		45 Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	46 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
		47 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	48 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
30	Meningkatkan tata kelola pengawasan	49 Meningkatkan Tata kelola pengawasan
31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	50 Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
		51 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
		52 Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)
32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	53 Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah

No	Strategi Lama	Strategi Baru
1	2	3
33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	54 Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa
34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	55 Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	
36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	56 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
		57 Peningkatan kompetensi dan profesional ASN
37	Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	
38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	58 Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	59 Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
		60 Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	61 Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi
41	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	62 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	63 Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
		64 Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur

No	Strategi Lama		Strategi Baru
1	2		3
43	Meningkatkan kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
44	Meningkatkan kualitas Udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
		68	Peningkatan tata kelola kehutanan
		69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
46	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

Untuk melihat lebih jelas keterkaitan dan konsistensi antara strategi dengan sasaran, tujuan, misi dan visi dapat dilihat pada tabel VI.2 berikut ini.

Tabel VI.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1			2		3		4		5		6		7
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah													
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan	1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor pertanian	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan
										2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
												3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
										3	Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perternakan		
												4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
				2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor sektor perikanan	4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	5	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
										5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	6	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
												7	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												8	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
										6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan		
				3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Pariwisata	3	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	9	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif
										8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												11	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata
												12	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
												13	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung
												14	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka
												15	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												16	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Pulau punai
												17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
										9	Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
				4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4	Meningkatnya Produksi sektor per-tambangan	4	Meningkatnya PDRB sektor pertambangan dan energi	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
												20	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1			2		3		4		5		6		7
						5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5	Meningkatnya PDRB Sektor industri pengolahan dan perdagangan	11	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	21	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
												22	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
												23	Peningkatan tata kelola industri
												24	Peningkatan tata kelola perdagangan
						6	Terwujudnya kemandirian energi			12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah		
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat	2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	5	PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	7	Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah			13	Meningkatkan pendapatan asli daerah		

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
				6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	8	Menurunnya angka Pengangguran	6	Menurunkan tingkat pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	25	Peningkatan kesempatan kerja
												26	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja
												27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
								7	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja			28	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
						9	Menurunnya angka kemiskinan	8	Menurunkan tingkat kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap	29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.		
												30	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
								9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa			31	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
						10	Menurunnya angka Inflasi			16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang		

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
											inflasi		
						11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk			17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk		
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas													
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	3	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur	7	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	12	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengembangan potensi daerah	10	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan Umum	18	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	32	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
										19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
												34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
						13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	11	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
										21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman		
										22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat		
						14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	12	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	36	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
										24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat		
										25	Meningkatkan aksesibilitas		

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1			2	3		4			5		6		7
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal													
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	4	Meningkatnya pendidikan masyarakat	8	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	13	Meningkatkan kesempatan pendidikan	26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	37	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
								14	Meningkatkan kualitas pendidikan	27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		5	Meningkatnya Pembangunan Sosial Masyarakat					15	Meningkatnya kesejahteraan anak			39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak
								16	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk			40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
								17	Meningkatkan pembangunan resposif gender			41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
												42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
								18	Meningkatkan kualitas pemuda			43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
								19	Meningkatkan pembangunan olah raga			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolah raga
								20	Meningkatkan kesejahteraan sosial			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat													
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9	PEMBANGUNAN KESEHATAN	16	Meningkatnya kesehatan masyarakat	21	Meningkatnya kesehatan masyarakat	28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
												47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi													

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1			2		3		4		5		6		7
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	6	Terwujudnya reformasi birokrasi	10	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK	17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah
										30	Meningkatkan tata kelola pengawasan	49	Meningkatkan Tata kelola pengawasan
										31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
												51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
												52	Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)
										32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
										33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa
						18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien			34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
												56	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
										35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	57	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1			2		3		4		5		6		7
						19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas			36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik		
										37	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik		
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	7	Meningkatnya demokrasi indonesia	11	PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI	20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	23	Meningkatnya Kebebasan sipil	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi
								24	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
												60	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1		2		3		4		5		6		7	
													masyarakat (Linmas)
								25	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup													
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	8	Menurunya Resiko Bencana	12	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN	21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	41	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	62	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
										42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
												64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur
9	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	13	PENEGNDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	22	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	43	Meningkatkan kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai

TUJUAN		TUJUAN BARU		UNGGULAN PEMBANGUNAN DAERAH		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU	
1			2		3		4		5		6		7
										44	Meningkatkan kualitas udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara
										45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
												68	Peningkatan tata kelola kehutanan
												69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
										46	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

6.1.2. Arah Kebijakan

Strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan keberhasilannya dalam implementasi haruslah didukung oleh arah kebijakan yang tepat dan memadai, agar pencapaian sasaran melalui strategi yang telah ditetapkan, dapat terjamin realisasinya.

Oleh karena itu setiap strategi yang ada harus dikuatkan dan didukung oleh arah kebijakan yang tepat serta memadai. Dari hasil evaluasi terkait pencapaian sasaran pembangunan pada tahun 2018-2019 pada RPJMD 2017-2022 yang lama maka telah dirumuskan dan ditetapkan arah kebijakan yang baru sebanyak 70 (tujuh puluh) arah kebijakan berubah yang semula sebanyak 102 arah kebijakan dan terekam di dalam RPJMD 2017-2022 Perubahan dan akan dilaksanakan untuk tahun 2021-2022.

Keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan dengan strategi, sasaran, tujuan, misi dan visi diuraikan dalam tabel VI.3

Tabel VI.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi : “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah															
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan
							2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan	2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan	2	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan
									3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		
										4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas			4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas
												7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian			
								3	Mengembang-kan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan			8	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang			
												9	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung			
												10	Pengembangan Kawasan Budaya Pertanian dan peternakan			
												11	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
					Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2	Meningkatnya PDRB Sub sektor perikanan	4	Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	5	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	12	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	5	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
								5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	6	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	13	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan	6	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
										7	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	14	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	7	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
										8	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	8	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya
												17	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.			
												18	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		
												19	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik			
								6	Mengembang-kan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan			20	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga			
												21	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar			
					Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Pariwisata	3	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	7	Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	9	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	22	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	9	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif
										10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	23	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
										11	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata	24	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	11	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata
										12	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	25	kualitas, partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	12	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata
										13	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung	28	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	13	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
										14	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka	29	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	14	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka
										15	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	30	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	15	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
								8	Mengembang-kan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	16	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata pulau punai	31	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	16	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata pulau punai
										17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	32	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
										18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	33	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata
												34	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba			
												35	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung			
												36	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		
								9	Mengembang- kan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan			37	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera			
												38	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil			
					Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	4	Meningkatnya PDRB sektor pertambangan dan energi	10	Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	39	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan
										20	Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat	41	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	20	Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat	Peningkatan ketersedian energi listrik masyarakat
												42	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
												43	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral		
					Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5	Meningkatnya PDRB industri pengolahan dan perdagangan	11	Mengembang-kan Kawasan industri berbasis potensi daerah	21	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	44	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	21	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular
										22	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	45	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	22	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
										23	Peningkatan tata kelola industri	46	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	23	Peningkatan tata kelola industri

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
										24	Peningkatan tata kelola perdagangan	47	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	24	Peningkatan tata kelola perdagangan	Peningkatan tata kelola perdagangan
												48	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu			
												49	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri			
					Terwujudnya kemandirian energi			12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah			50	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;			
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat				Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah			13	Meningkatkan pendapatan asli daerah			51	Peningkatan potensi penggalian sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.			
		2	Meningkatnya pemerataan pendapatan		Menurunnya angka Pengangguran	6	Menurunkan tingkat pengangguran	14	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	25	Peningkatan kesempatan kerja	52	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	25	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesempatan kerja

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	
										26	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja			26	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja
										27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan			27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan
						7	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja			28	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	53	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	28	Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja
					Menurunnya angka kemiskinan	8	Menurunkan tingkat kemiskinan	15	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan	29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	54	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	29	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
								non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.							
									30	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin	55	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	30	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Peningkatkan pendapatan masyarakat miskin
					9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa			31	Peningkatan pendapatan masyarakat desa			31	Peningkatan pendapatan masyarakat desa	Peningkatan pendapatan masyarakat desa
					Menurunnya angka Inflasi		16	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi			56	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi			
											57	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		9
					Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk			17	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk			58	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas																
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur		Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengembangan potensi daerah	10	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan Umum	18	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	32	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	59	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	32	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum
								19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang	60	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang
										34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi			34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
					Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	11	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	61	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman
								21	Meningkatkan penataan kawasan permukiman			62	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi		
								22	Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat			63	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat		
					Meningkatnya konektivitas antar wilayah	12	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	23	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	36	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	64	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	36	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan
								24	Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat			65	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal		

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
								25	Meningkatkan aksesibilitas			66	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan			
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal																
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	4	Meningkatnya Pendidikan masyarakat		Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	13	Meningkatkan Kesempatan Pendidikan	26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	37	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	67	peningkatan akses pelayanan pendidikan	37	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	Peningkatan akses pelayanan pendidikan
						14	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan	68	peningkatan mutu layanan pendidikan.	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Peningkatan mutu layanan pendidikan
												69	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal			
		5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat			15	Meningkatnya Kesejahteraan Anak			39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	70	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
						16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk			40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
						17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender			41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
										42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender			42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender
						18	Meningkatkan Kualitas Pemuda			43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi			43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi
						19	Meningkatkan Pembangunan Olah Raga			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga			44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
						20	Meningkatkan kesejahteraan sosial			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial			45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat															
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Meningkatnya kesehatan masyarakat	21	Meningkatnya kesehatan masyarakat	28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	71	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
										47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	72	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
												73	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza		
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi															
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	7	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas		Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	74	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		
								30	Meningkatkan tata kelola pengawasan	49	Peningkatan tata kelola pengawasan	75	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	49	Peningkatan tata kelola pengawasan	Peningkatan tata kelola pengawasan
								31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	76	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
										51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	77	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	51	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah
										52	Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)			52	Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)	Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)
								32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	78	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
								33	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa	79	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa
					Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien			34	Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	80	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
										56	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			56	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi
								35	Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	57	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN	81	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	57	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN
												82	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur		

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		
					Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas			36	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik			83	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat			
								37	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik			84	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien			
												85	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa			

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1		2		3		4		5		6		7		8		
												86	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,			
												87	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.			
												88	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			
												89	Menjamin hak anak dalam pembangunan			
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	8	Meningkatnya demokrasi Indonesia		Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	23	Meningkatnya Kebebasan sipil	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	90	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021		2022
1		2		3		4		5		6		7		8		9
												91	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)			
						24	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	92	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
										60	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)			60	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
						25	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	40	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi	93	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU		
														2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Misi VI. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup																
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	9	Menurunnya Resiko Bencana		Meningkanya kapasitas terhadap penanggulang an bencana	26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulang-an Bencana	41	Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	62	Peningkatan kualitas penyelenggara an penanggulanga n bencana	94	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	62	Peningkatan kualitas penyelenggara an penanggulanga n bencana	Peningkatan kualitas penyelenggara an penanggulanga n bencana
								42	Mengembangkann kawasan berbasis penanggulangan bencana	63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	95	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
										64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur	96	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	27	Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup	43	Meningkatkan kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	97	Pengendalian kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai
								44	Meningkatkan kualitas udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara	98	pengendalian kualitas udara	66	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara

TUJUAN LAMA		TUJUAN BARU		SASARAN LAMA		SASARAN BARU		STRATEGI LAMA		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN LAMA		ARAH KEBIJAKAN BARU	
														2021	2022
1		2		3		4		5		6		7		8	9
								45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan	99	Peningkatan tutupan lahan	67	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan
										68	Peningkatan tata kelola kehutanan			68	Peningkatan tata kelola kehutanan
										69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan			69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan
								46	meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	100	Pengembangan Perhutanan Sosial	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
												101	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		
												102	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		

6.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah telah dirumuskan dan ditetapkan. Selain sebagai solusi penyelesaian masalah dan isu strategis, maka yang utama adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dukungan strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya.

Dengan memperhatikan tujuan, sasaran, permasalahan dan isu-isu strategis, berkaitan dengan tujuan, sasaran, program kementerian/lembaga sebagai penjabaran RPJMN 2015-2019; serta dengan mencermati program-program berkaitan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat, serta hasil analisis SWOT, maka dirumuskan dan ditetapkan 53 (lima puluh tiga) Program Pembangunan Daerah, yang dikembangkan dari 12 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

6.2.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terdapat Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi unggulan pembangunan daerah, setelah dicermati, dianalisis, serta memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD. Unggulan pembangunan daerah tersebut ada 12 (dua belas) yaitu sebagai berikut:

1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

2. PEMBANGUNAN BAHARI

Fokus kegiatan Memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat yang modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Babel, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk; Mendukung pelaku usaha sektor bahari untuk mengembangkan sektor usaha yang ramah lingkungan.

3. PENGEMBANGAN PARIWISATA

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

4. PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Fokus kegiatan Zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatnya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

5. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

6. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus

menguatkan brand Babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir (Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kementerian ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

7. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Fokus kegiatan Membangun kultur masyarakat Babel yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bermoral melalui kegiatan keagamaan bernuansa religius seperti Babel mengaji, sajadah fajar, ruahan, dll secara rutin; Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar-menengah di seluruh wilayah Babel (SD-SMP-SMA); Meningkatkan kualitas Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai salah satu Universitas Unggul Nasional dengan mendatangkan Professor bertaraf internasional secara periodik sebagai dosen tamu; Program beasiswa (S2-S3) dan pelatihan untuk para tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas guru maupun dosen; Menarik praktisi pendidikan kepariwisataan untuk membangun sekolah Tinggi Pariwisata dan Babel dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM/entrepreneur bidang pariwisata di Babel

8. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fokus kegiatan Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas alat-alat kesehatan di Rumah Sakit; Kemudahan layanan kesehatan hingga biaya gratis bagi warga tidak mampu; Program ambulan keliling 24 jam untuk mencegah resiko kematian ibu dan Bayi; penguatan kapasitas para tenaga kesehatan melalui training, beasiswa (S2-S3), hingga rekrutmen tenaga-tenaga kesehatan baik dengan insentif khusus untuk menunjang kinerja; Program Babel Sehat melalui pembinaan jasmani dan rohani secara terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Babel.

9. PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK

Fokus kegiatan Nongkrong bareng ("Nobar") program rutin bersama SKPD, Wakil Gubernur, bupati/Walikota untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi yang sebelumnya tidak terjalin dengan baik. Melalui kumpul di dunia nyata (Kantor, Restoran, warung, dsb) dan maya (WhatsApps Groups atau BBM Groups); Babel sebagai provinsi dengan integrasi pelayanan publik yang memberi kemudahan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi (smart city); Mengutakan sistem pelayanan publik yang mudah dan cepat, sehingga waktu pengurusan izin dan administrasi kependudukan menjadi lebih ringkas; Mempermudah pelayanan dengan berbagi perangkat teknologi yang terintegrasi

seperti email, website, sosial media, aplikasi dan lainnya; Reformasi birokrasi berbasis kompetensi (meritokrasi) yaitu dengan proses promosi jabatan di Pemprov melalui fit and proper test dengan lelang jabatan

10. PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif dewan; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi

11. PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN

Fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulangnya. Baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

12. PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kegiatan pengendalian terhadap kualitas air, udara serta tutupan lahan; pengendalian terhadap efek Gas Rumah Kaca

6.2.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Unggulan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam menyusun RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pendekatan perencanaan pembangunan Tematik, Holistik, Integratif, dan spasial (THIS). Pendekatan THIS pada dasarnya adalah pendekatan yang memberi penekanan pada keterpaduan, bukan pendekatan yang berangkat dari sektor atau tugas dan fungsi semata tetapi tugas dan fungsi mendukung keterpaduan. Karena penekanannya pada keterpaduan, perencanaan ini, berangkat dari tema pembangunan yang menjadi dasar atau starting pointnya dalam lingkup daerah, tema bisa bersumber dari isu-isu strategis dan/atau prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Inilah titik pusat (core) dari perencanaan berbasis pendekatan THIS.

Tema pembangunan berdasarkan prioritas Kepala Daerah biasanya tema makro kemudian diturunkan dengan tema-tema yang lebih kecil. Dalam konteks penyusunan RPJMD 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tema besarnya adalah Visi yang diturunkan ke tema-tema yang lebih kecil dan saling berhirarki ke Misi, Tujuan, Indikator tujuan, sasaran, indikator Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan. Hirarki dari visi sampai ke Arah kebijakan ini dinamakan tema, sedangkan arah kebijakan sendiri merupakan tema yang paling kecil, yang akan membagikan Perangkat Daerah mana saja yang akan terlibat dalam membangun tema kecil tersebut. Dalam hal ini perangkat daerah yang terlibat tersebut kita namakan integratif. Kemudian program-program dan kegiatan yang ada pada setiap Perangkat Daerah yang terlibat untuk membangun suatu tema kecil itu dinamakan Holistik. Kemudian spasial digunakan untuk mendukung pembangunan tematik besarnya yang akan menjadi tema kecil yang diintervensi oleh banyak Perangkat Daerah yang juga dinamakan integratif dan masing-masing perangkat daerah mengintervensi dengan program dan kegiatan yang dinamakan juga holistik.

Atas dasar inilah arah kebijakan merupakan tema kecil, berasal dari turunan tema besar yang merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, yang membagi perangkat daerah serta program dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut. Dengan pendekatan tematik, holistic, integrative dan spasial (THIS) tersebut, telah dirumuskan dan ditetapkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Program Pembangunan Daerah, yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Atas dasar ke 47 program ini diperinci lebih lanjut oleh perangkat daerah ke dalam program perangkat daerah dan program perangkat daerah ke dalam kegiatan. Sehingga terdapat 204 program perangkat daerah yang telah habis terbagi kepada setiap perangkat daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra perangkat daerah telah mencantumkan ke 197 program perangkat daerah tersebut ke dalam 1210 kegiatan. Semua ini didasarkan pada ke 47 Program Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Tabel VI.4
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
(Sebelum Perubahan)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah											
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Produksi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan		Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel			Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT			Pertanian	DISTAN
						Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Pertambahan Ketersediaan bibit lada			Pertanian	DISTAN
							Pertambahan Ketersediaan bibit karet			Pertanian	DISTAN
							Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi			Pertanian	DISTAN
							Pertambahan			Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ketersediaan bibit ayam					
						Pertambahan Ketersediaan anakan sapi				Pertanian	DISTAN
					Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)				Kehutanan	Dishut
						Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)				Kehutanan	Dishut
			2	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	persentase pertambahan jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura			Pertanian	DISTAN
						Program Pengembangan Perkebunan	persentase pertambahan jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil perkebunan			Pertanian	DISTAN
						Program Pengembangan Peternakan Dan	persentase pertambahan jumlah			Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kesehatan Hewan	kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing dan nilai tambah hasil peternakan					
				Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A				Pendidikan	DINDIK
						Persentase SMK Pertanian				Pendidikan	DINDIK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)					
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase koperasi				Koperasi dan Usaha Kecil	DINAS KUKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						sektor pertanian berkualitas sesuai standar				Menengah	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						Persentase peningkatan produk usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang dikembangkan dengan bantuan peralatan tepat guna				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian				PERINDUSTRIAN	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian				PERINDUSTRIAN	DISPERINDAG
					Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber					BIRO PEREKONOMIAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	Daya Alam	alam yang diimplementasikan					
					Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian				Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian				Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi				Penanaman Modal	DPMPTSP
					Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dengan dunia usaha dalam daerah					
						persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian	Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian				Pemberdayaan Masyarakat	Pemdes
					Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura				Urusan Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Perkebunan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan				Urusan Pertanian	DISTAN

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
								2018	2019	2020			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan						
						Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan				Urusan Pertanian	DISTAN	
				3	Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang				Urusan Pertanian	DISTAN
							Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang				Urusan Pertanian	DISTAN	
							Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang				Urusan Pertanian	DISTAN	
						Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Batu Betumpang					
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang				Urusan Transmigrasi	DISNAKER
				Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						an					
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung				Urusan Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung				Urusan Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan				Urusan Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kota Terpadu Mandiri Gantung					
						Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung				Urusan Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung				Urusan Transmigrasi	DISNAKER
				Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan	Program Pengembangan Perkebunan	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada				Urusan Pertanian	DISTAN
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan				Urusan Pertanian	DISTAN
				Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi				Urusan Pertanian	DISTAN
						Tersedianya Kawasan				Urusan Pertanian	DISTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						budidaya komoditi cabai					
						Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah				Urusan Pertanian	DISTAN
					Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi				Urusan Pertanian	DISTAN
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	4	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						Program Peningkatan Pelaku Usaha	Persentase			Urusan Kelautan dan	DKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	yang Taat Aturan (%)				Perikanan	
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin				Urusan Kelautan dan Perikanan	DISHUB
			5	Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi			Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja sektor Perikanan				Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Dan Pengembangan	Persentase Jumlah SMK dengan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan Pendidikan Kejuruan	program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A					
						Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
					Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						Volume Produksi Olahan (ton)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						Nilai Tukar				Urusan	DKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nelayan (Indeks)				Kelautan dan Perikanan	
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI
					Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						Persentase pertumbuhan				Urusan Koperasi,	DINAS KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan				Usaha Kecil dan Menengah	
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
				Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program	Presentase				Urusan	DINAS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi				Penanaman Modal	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
				Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program	persentase				Urusan	DINAS KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi				Urusan Pekerjaan Umum dan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan				Penataan Ruang	
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan	Persentase koperasi aktif di kawasan				Urusan Koperasi, Usaha Kecil	DINAS KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	strategis etalase perikanan selat nasik				dan Menengah	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nasik					
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik				Urusan Perhubungan	DISHUB
			6	Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						mendapatkan Izin Usaha					
						persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga					
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga				Urusan Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan				Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Manggar					
		Meningkatnya Pengembangan Pembangunan Pariwisata	7 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisata	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi				Urusan Pariwisata	BUDPAR
						Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih				Urusan Pariwisata	BUDPAR
						Pertumbuhan kelembagaan pariwisata				Urusan Pariwisata	BUDPAR
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan	KUMKM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)				Menengah	
						persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase objek wisata yang terkelola			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase tingkat kunjungan wisatawan			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata			Urusan Perhubungan	DISHUB
						Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam			Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						menunjang Daerah Tujuan Wisata					
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu KUKM	Pertumbuhan produk parekraf				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
				Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan				Urusan Tenaga Kerja	UPD BLKI
					Program Peningkatan	Persentase peningkatan				Urusan Tenaga Kerja	UPTD BALAI PRODUKTIFIT

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	produksi per tenaga kerja bidang pariwisata					AS
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profe si pihak 1 (LSP-P1)				Urusan Pendidikan	DINDIK
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
					kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kepemudaan Dan Olahraga	terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional					
					Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina				Urusan Kebudayaan	BUDPAR
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisata	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun				Urusan Pariwisata	BUDPAR
					Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						Program Pengembangan				Urusan Perindustria	DISPERINDAG

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sumberdaya, Fasilitas Dan Akses Industri	yang terserap di industri pariwisata				n	
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	Program Peningkatan Koordinasi Bumda, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI
					Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dan Sistem Informasi	disektor pariwisata dengan rencana investasi					SATU PINTU
				Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian				Urusan Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang				Urusan Perhubungan	DISHUB
			8	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				Urusan Pariwisata	BUDPAR
						Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan dikelola				Urusan Pariwisata	BUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan	Persentase pemenuhan sarana				Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perhubungan Darat	parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka					
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana			Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang					
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
									2018	2019	2020		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
								Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan					
							Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang				Urusan Perhubungan	DISHUB
							Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok				Urusan Pariwisata	BUDPAR
							Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam				Urusan Pekerjaan Umum dan	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok				Penataan Ruang	
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Program Penataan Ruang Dan	Persentase jumlah				Urusan Pekerjaan	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	Pertanahan	Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba yang diimplementasikan				Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba				Urusan Pariwisata	BUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba				Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						yang digunakan dalam perencanaan kawasan					
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
				Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung				Urusan Pariwisata	BUDPAR
					Program Pengembangan Dan	Persentase pemenuhan				Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pembangunan Perhubungan Darat	sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung					
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
				Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan					
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing				Urusan Pariwisata	BUDPAR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang per hubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing				Ruang	
			9 Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan				Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera					
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera				Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
				Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan	Persentase panjang talud				Urusan Pekerjaan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Sumber Daya Air	yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil				Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil				Urusan Perhubungan	DISHUB
						Jumlah armada pengangkutan				Urusan Perhubungan	DISHUB
		Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	10 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Peningkatan	Persentase cadangan				Urusan Energi dan	DINAS ESDM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Mineral bukan logam dan batuan yang potensial				Sumber Daya Mineral	
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI
					Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitas Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
						pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase industri yang memenuhi standar				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						Program Peningkatan tenaga kerja				Urusan Tenaga Kerja	UPD BLKI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan					
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral				Urusan Tenaga Kerja	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS UMKM
					Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan				Urusan Perindustrian	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				mineral	Pengendalian Mutu Produk	disertifikasi					N MUTU
				Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI
					Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya pembangunan berbasis industri	11 Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular				Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(KIPT) Tanjung Ular					
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan				Urusan Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunakan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						untuk perencanaan kawasan					
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik				Urusan Perhubungan	DISHUB
				Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis ekonomi khusus Tanjung Berikat				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat				Urusan Kehutanaan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan					
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase jumlah Regulasi Penataan				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan				Ruang	
				Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Program Kebinamargaan	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis Industri Sadai				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai				Urusan Perhubungan	DISHUB
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPT				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Sadai					
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu			Urusan Perhubungan	DISHUB
						Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan				Urusan Perindustria n	DISPERINDAG

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
									2018	2019	2020		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
								Terpadu di Teluk Klabat Belinyu					
							Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
							Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Industri/Sentra /Kawasan Industri				Urusan Perindustria n	DISPERINDAG
			Terwujudnya kemandirian energi	12	Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase penggunaan EBT				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	ESDM
							Program Peningkatan	Prosentase Jumlah				Fungsi Penunjang	BIRO EKONOMI

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
								2018	2019	2020			
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
							Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan				Urusan Pemerintahan	
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat	Pengeluaran pemerintah perkapita,(dalam ribuan)	Meningkatnya Pendapatan Pemerintah Daerah	13	Meningkatkan pendapataan asli daerah	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
							Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
							Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan				Urusan Kesehatan	DINKES
							Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase kontribusi penyelenggara				Fungsi Penunjang Urusan	BKPSDM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Manusia Asn	an diklat terhadap Retribusi Daerah				Pemerintahan	
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Pengawasan Dan Peralatan	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN BELITUNG
					Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
					Program	Pertambahan				Urusan	DKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengembangan Perikanan Tangkap	pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)				Kelautan dan Perikanan	
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)				Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
					Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolaan perhubungan udara				Urusan Perhubungan	DISHUB
	Pendapatan perkapita masyarakat, (dalam ribuan)	Menurunnya angka Pengangguran	14 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase pemuda yang bekerja				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap				Urusan Kelautan dan Perikanan	DISKEPORA
					Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dan jembatan				Urusan Pekerjaan Umum dan	DINAS PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya				Penataan Ruang	
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase wirausaha				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Pengembangan Pendayagunaan SDA, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
						Persentase KPM yang aktif				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
				Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Menurunnya angka kemiskinan	15 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera				Urusan Sosial	DINSOS
					Program Pembangunan Perumahan	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Pelayanan Kesehatan	Persentase kepesertaan				Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						JKN					
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi				Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
				Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha				Urusan Sosial	DINSOS
					Program Pengembangan Perdagangan	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan				Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	NTP subsektor Tanaman Pangan				Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I				Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						persentase penyelesaian kasus tenaga kerja				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						persentase penurunan kecelakaan kerja				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		Menurunnya angka Inflasi	16 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	Program Perlindungan Konsumen Dan Kemetrolagian	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
						Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
						Persentase jumlah Standarisasi				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Lab. Kemetrolagian yang memenuhi standar					
					Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)				Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu				Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan				Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang				Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						intervensi program/kebijakan					
					Program Pengembangan Perhubungan Laut	Persentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar				Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit				Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah				Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
					Program Pengembangan	Persentase kontribusi				Urusan Kelautan	DINAS KELAUTAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perikanan Tangkap	komoditas ikan dalam menyumbang inflasi				dan Perikanan	PERIKANAN
					Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	17 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP				Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian				Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase unmeet need				Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Peningkatan	Persentase grand design				Urusan Pengendalian	DINAS PPA, DUKCAPIL,

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
								2018	2019	2020			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				Penduduk dan Keluarga Berencana	PENGENDALIA N PENDUDUK KB	
							presentase KB MKJP				Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA N PENDUDUK KB	
Misi II. Mewujudkan Infrastruktur Dan Konektifitas Daerah Yang Berkualitas													
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pengembangan potensi daerah	18	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
							Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				19	Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan volume air baku				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	20	Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Program Keciptakaryaan Dan Permukiman	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	DINAS PRKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						permukiman				Pemukiman	
						Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
			21 Meningkatkan penataan kawasan permukiman	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	Program Keciaptakaryaan Dan Permukiman	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
			22 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	23 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
			24 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	Program Pengembangan Perhubungan Darat	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
					Program Peningkatan Pengendalian, Operasional Dan	Persentase sarana dan prasarana fasilitas				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kebandarudaraan	bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi					
			25	Meningkatkan aksesibilitas	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	Program Kebinarmargaan	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
							Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
Misi III. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul Dan Handal											
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	26	Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	peningkatan akses pelayanan pendidikan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	APK SMA		Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
							Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	APK SMK		Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Program	APK SLB			Urusan	DINAS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus					Pendidikan	PENDIDIKAN
			27	Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	peningkatan mutu layanan pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
							Persentase Guru Bersertifikat Pendidik			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
							Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase SMA terakreditasi A			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
							Rata-rata nilai UN SMA			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK terakreditasi A			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
							Rata-rata nilai UN SMK			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Program Peningkatan Dan	Persentase SLB terakreditasi A			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus						
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	presentase perpustakaan terakreditasi;				Urusan Perpustakaan	DKPUS
					Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan				Urusan Pemuda dan olahraga	DISKEPORA
					Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Dan Pemuda	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana,				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan					
					Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	APK sekolah keagamaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
Misi IV. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat											
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia	Meningkatnya kesehatan masyarakat	28	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase status kesehatan masyarakat		Urusan Kesehatan	DINKES

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Harapan Hidup Perempuan)										
					Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular				Urusan Penunjang administrasi	BIRO KESRA
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda Dan Pariwisata	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
					Program Keciaptakaryaan Dan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
						Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
						Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Provinsi					
						Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi					
						Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi					
					Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
					Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
						persentase pangan yang aman dikonsumsi				Urusan Pangan	DINAS PANGAN

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
									2018	2019	2020		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
							Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
								Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan				Urusan Pangan	DINAS PANGAN
							Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitas Dan Akses Industri	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.				Urusan Perindustria n	DISPERINDAG
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja				Urusan Tenaga kerja	UPTD HYPERKES
							Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
							Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas				Urusan Perhubungan	DISHUB
						peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase standarisasi pelayanan				Urusan Kesehatan	DINKES

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kesehatan					
					Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar				Urusan Kesehatan	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	LOS (Length of Stay)				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Badan Layanan Umum Daerah RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program	Rata-rata Lama				Urusan	RSJ

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)				Kesehatan	
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ				Urusan Kesehatan	RSJ
						Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Program Pengendalian Penyakit Menular Dan Tidak Menular				Urusan Kesehatan	DINKES

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						IPWL) Napza					
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi				Urusan Kesehatan	RSJ
					Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase korban napza				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
Misi V. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pembangunan Demokrasi											
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	29	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
							Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
							Program Peningkatan Tata	Nilai aset daerah yang		Fungsi Penunjang	BAKUDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kelola Aset Daerah	dapat diyakini kewajarannya				Urusan Pemerintahan	
						Peningkatan persentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
					Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
			30 Meningkatkan tata kelola pengawasan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
					Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
						Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						kas daerah.					
						Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
					Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
						Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
			31	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
						Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
						Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						PPAS)					
						Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
						Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPd)				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
						Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
					Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan RKPd				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
					Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAPPEDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						infrastruktur dan pengembangan wilayah dengan RKPD				(Perencanaan)	
					Program Perencanaan Sosial, Budaya Dan Pemerintahan	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPD				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
					Program Penelitian Dan Pengembangan	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai,				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1 = tidak sesuai]					
						Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
					Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMBANGUNAN
					Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMBANGUNAN
					Program Perencanaan Setda	Nilai Lakip Setda Provinsi				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMBANGUNAN
					Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik Dan Persandian				Urusan Persandian	DISKOMINFO

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai standar persandian					
						Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan				Urusan Statistik	DISKOMINFO
			32	Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
						Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
						Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
						Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			33 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat diakses masyarakat				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan yang dapat diakses masyarakat				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	34 Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
						Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
				35 Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUMAS
						Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi,	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUMAS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Publikasi Media Dan IT	kebijakan pembangunan pemerintah daerah					
					Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUMAS
					Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						pembangunan daerah					
					Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokoler Dewan	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
				Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
					Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan ASN	Persentase ASN yang menerima penghargaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Persentase kasus pelanggaran				Fungsi Penunjang Urusan	BKPSDM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						disiplin minimal sedang				Pemerintahan	
						Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN	Persentase Pegawai ASN yang meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Persentase Pegawai ASN yang meningkatkan pendidikan formalnya;				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
						Nilai akreditasi Diklat				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	36 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
					Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka					
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
					Program Peningkatan Fungsi	Nilai Indeks Kepuasan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur					
					Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut Kumkm	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM				Urusan Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Umum Provinsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit				Urusan Kesehatan	RSUP
					Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik				Urusan Kesehatan	RSJ

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan					
					Program Pelayanan Teknis Laboratuim Kesehatan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes				Urusan Kesehatan	UPTD DINKES
			37	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
					Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
						Persentase luas				Fungsi	BIRO

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat				Penunjang Urusan Pemerintahan	PEMERINTAH AN
						Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAH AN
					Program Pengembangan Otonomi Daerah	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAH AN
					Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta /luar negeri yang diimplementasikan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAH AN
					Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip				Urusan Kearsipan	DKPUS
					Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)				Urusan Kearsipan	DKPUS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;				Urusan Perpustakaan	DKPUS
					Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan interaktif				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Program Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi				Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
					Program Pengadministrasian Kependudukan Dan	Persentase Jumlah data base kependudukan				Urusan Administrasi Kependuduk	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Catatan Sipil	tingkat provnsi yang akurat				an dan Pencatatan Sipil	N PENDUDUK KB
					Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat				Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
					Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	Program Peningkatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
						Persentase Posyandu aktif				Urusan Pemberdayaan Masyarakat	DPMD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										dan Desa	
						Persentase PKK aktif				Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	DPMD
					Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun				Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	DPMD
					Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya				Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	DPMD
						Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina				Urusan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	DPMD
					Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan				Urusan Transmigrasi	DISNAKER
					Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial			Urusan Sosial	DINSOS
						Program Peningkatan	Persentase PMKS			Urusan Sosial	UPTD PANTI SOSIAL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pelayanan Teknis Panti Sosial	penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial					
					Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial				Urusan Sosial	UPTD PANTI SOSIAL
					Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
					Program Kesehatan Masyarakat	Persentase lansia yang				Urusan Kesehatan	DINKES

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dilayani sesuai standar kesehatan					
					Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Persentase lansia yang berkompotensi keagamaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
						Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaa n				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						Persentase Eks korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaa n				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaa n				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
				Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
						Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial				Urusan Sosial	DINSOS
				Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan	Program Peningkatan	Menurunkan Rasio				Urusan Pemberdayaa	DINAS PPA, DUKCAPIL,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				anak	Perlindungan Perempuan Dan Anak	Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi				n Perempuan dan Perlindungan Anak	PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
					Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
								2018	2019	2020			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Menjamin hak anak dalam pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak				Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA N PENDUDUK KB	
						Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas				Urusan Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA N PENDUDUK KB	
						Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial				Urusan Sosial	DINAS SOSIAL	
						Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan				Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN	
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	38	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
					Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kot a				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
					Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
						Persentase Jumlah sanggar/paguy uban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
					Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
						Program Perlindungan Masyarakat				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	SATPOL PP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dalam penyelenggaraan kantrantibmas				Perlindungan Masyarakat	
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan penegakan perda				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
			39	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
			40	Meningkatkan pengembangan lembaga	Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga	Program Pembinaan Politik	persentase rekomendasi			Urusan Ketentraman,	KESBANGPOL

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			demokrasi	Demokrasi	Dalam Negeri	pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti				Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Misi VI. Meningkatkan Pengendalian Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup											
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	41 Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulanga n Bencana			Urusan Sosial	BPBD
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			Urusan Sosial	DINSOS
						Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan			Urusan Pangan	DINAS PANGAN
						Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulanga n bencana yang dapat di akses oleh masyarakat			Urusan Komunikasi dan Informatika	KOMINFO
						Proram	Persentase			Urusan	DINKES

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon				Kesehatan	
					Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
					Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulanga n Bencana				Urusan Sosial	BPBD
					Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi				Urusan Kesehatan	DINKES
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan				Urusan Kesehatan	RSUP
					Program Pengembangan Sumber Daya Air	persentase Panjang Talud yang				Urusan Pekerjaan Umum dan	PUPR

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah				Penataan Ruang	
						Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan berfungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Perumahan Rakyat	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PRKP
					Program Kebinamargaan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi				Urusan Sosial	BPBD

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
									2018	2019	2020		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
							Bencana	Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					
							Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi				Urusan Kesehatan	DINKES
							Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa				Urusan Kesehatan	RSJ
				42	Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								panjang penahan tanah akibat erosi				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
							Program Peningkatan Pengelolaan Das	Persentase DAS kritis yang di kelola				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Dan Pemberdayaan Masyarakat						
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
				Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Perumahan Rakyat	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PRKP
					Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Penataan Ruang Dan	Persentase luas lahan yang				Urusan Pekerjaan	PUPR

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
									2018	2019	2020		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
							Pertanahan	bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Umum dan Penataan Ruang	
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	43	Meningkatkan kualitas air	Pengendalian kualitas air	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
				44	Meningkatkan kualitas udara	pengendalian kualitas udara	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
							Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
				45	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	Peningkatan tutupan lahan	Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
							Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			46 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	Pengembangan Perhutanan Sosial	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	persentase perusahaan yang mengimplemen tasikan kajian lingkungan hidup				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase penanganan tindak pidana kehutanan				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan				Urusan Lingkungan Hidup	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
									2018	2019	2020		
1		2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
							Lingkungan	yang terakreditasi					
							Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
								Nilai jaminan reklamasi				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
							Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
								Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
								Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
							Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
							Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi				urusan perhubungan	DISHUB
						Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan	Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup,	Pertumbuhan volume pengolahan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN			URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional					
					Program Keciapta Karya Dan Permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PRKP
						Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional				Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PRKP
					Program Kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
					Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional				Urusan Pertanahan	PUPR
					Program Pengembangan SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR

Tabel VI.5
Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
(Setelah Perubahan)

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2021	2022			2021	2022			
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah														
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan			1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Persentase peningkatan luas tanam Hortikultura			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Jumlah ketersediaan pakan ternak (Ha)			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)			Pertanian	DINAS PERTANIAN
										Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase peredaran benih/bibit pertanian yang tidak bersertifikat			Pertanian	DINAS PERTANIAN
					2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pengolahan dan pemasaran pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Persentase Prasarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang tersedia			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Jumlah Angka kelahiran Ternak			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian di UPTD Balai Benih Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
						Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian untuk UPTD Balai Proteksi Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN
		2 Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			1 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kasus Penyakit Hewan menular			Pertanian	DINAS PERTANIAN
					2 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dokumen Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Pertanian	DINAS PERTANIAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase penurunan intensitas serangan/gangguan Organisme pengganggu tanaman			Pertanian	DINAS PERTANIAN
					3	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya		Pertanian	DINAS PERTANIAN
					4	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Pokok		Pangan	DINAS PANGAN
					5	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi-Padian b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan 3) Klompok pangan buah dan syuran		Pangan	DINAS PANGAN
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi-Padian b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan 3) Klompok pangan buah dan syuran		Pangan	DINAS PANGAN
							Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada kelompok Pangan a) Umbi-umbian, b) Kacang-kacangan c) buah dan sayur		Pangan	DINAS PANGAN
					6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah orang Tertanganinya masyarakat rawan pangan		Pangan	DINAS PANGAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
				3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya				Pertanian	DINAS PERTANIAN
				4	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas			1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam perkebunan				Pertanian	DINAS PERTANIAN
		2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	5	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				6	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya			1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
								2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
								3	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
								4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)				Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
								5 Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				7 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya				1 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
								2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase sarana dan prasarana perikanan budidaya dalam kondisi baik			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
				8 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya				1 Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		9 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif				1 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase unit usaha kreatif untuk pengembangan usaha			Urusan Pariwisata	BUDPAR

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase kabupaten/kota yang teridentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif			Urusan Pariwisata	BUDPAR
					2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Kemitraan Pariwisata yang terbentuk		Urusan Pariwisata	BUDPAR
						Persentase Lembaga LSP P1 yang terbentuk			Urusan Pariwisata	BUDPAR
					3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM bidang pariwisata yang diberdayakan		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
		10	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata		1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Derstinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar		Urusan Pariwisata	BUDPAR
		11	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata		1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi		Urusan Pariwisata	BUDPAR
					2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase SDM UMKM bidang pariwisata yang terlatih		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
								3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi bidang pariwisata yang terlatih				Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
				12	Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata			1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pertumbuhan komunitas olahraga				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
				13	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung			1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar				Urusan Pariwisata	BUDPAR
				14	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka			1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar				Urusan Pariwisata	BUDPAR
				15	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang			1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar				Urusan Pariwisata	BUDPAR
				16	Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata pulau punai			1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar				Urusan Pariwisata	BUDPAR

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
				17	Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera			1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar				Urusan Pariwisata	BUDPAR
				18	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata			1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar				Urusan Pariwisata	BUDPAR
		4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	19	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan			1	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
								2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				20	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat			1	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
		5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	21	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular			1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri				Urusan Perindustrian	DISPERINDAG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai			1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		23 Peningkatan tata kelola industri			1 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap di SIINAS			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Verifikasi Teknis			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		24 Peningkatan tata kelola perdagangan			1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam tertib Niaga			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah DED			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Jumlah Sarana Perdagangan			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Bapokting			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
						Terkendalinya harga Bapokting			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
					4 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Volume Ekspor			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	6	Menurunkan tingkat pengangguran	25	Peningkatan kesempatan kerja			1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase dokumen perencanaan yang terlaksana				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
								2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang tersertifikasi				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
								3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompetitif dan Berdaya Saing				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
								4	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase kepatuhan perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan				Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
				26	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan kesempatan kerja			1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin Usaha Simpan Pinjam yang dikeluarkan				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
								2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
								3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang terlatih					
								4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan					
										Persentase Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan					

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
								5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase UMKM yang diberdayakan			
										Persentase Peningkatan Omset UMKM			
								6	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan			
										Persentase SDM UMKM yang terlatih			
										Persentase Peningkatan Pembiayaan UMKM			
				27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan lapangan pekerjaan			1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor Yang Berinvestasi			Penanaman Modal DPMPTSP
								2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Kebijakan Investasi yang Terimplementasikan			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DINAS KUKM
								3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP			
								4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Investor Yang Patuh Melaksanakan Regulasi			
								5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7 Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja	28 5Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja			1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase penurunan tingkat perselisihan hubungan industrial			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
					2 Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase kepatuhan perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
	8 Menurunkan tingkat kemiskinan	29 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin			1 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					2 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terehabilitasi kesejahteraan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
					3 Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penanganan sosialnya			Urusan Sosial	DINSOS
		30 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin			1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan			Urusan Sosial	DINSOS
	9 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	31 Peningkatan pendapatan masyarakat desa			1 Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparaturnya desa dan BPD yang meningkat kompetensinya			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
					2 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang terimplementasikan			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
					3 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun			Urusan Transmigrasi	DINAS TENAGA KERJA

Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	10	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan Umum	32	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum			1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penyediaan Air Baku			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								3 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan persampahan yang layak			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								6 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman dalam kondisi baik			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022				2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7	8	9	10	11
								7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah bangunan gedung yang tertata			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
								9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				33	Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang			1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
				34	Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi			1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		1 1	meningkatkan etersedian nfrastruktur dasar	35	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman			1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
								2 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman dalam kondisi baik			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PRKP
								3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PRKP
		1 Meningkatkan tersediaan 2 Infrastruktur perhubungan		36 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan				1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Darat			Urusan Perhubungan	DISHUB
								2 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYANAN	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Laut			Urusan Perhubungan	DISHUB
								3 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Prosentase Pemenuhan Prasarana Kebandarudaraan			Urusan Perhubungan	DISHUB
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal													
4 Meningkatnya pendidikan masyarakat		1 Meningkatkan kesempatan pendidikan		37 Peningkatan akses pelayanan pendidikan				1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
									APK SMK			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						APK PENDIDIKAN KHUSUS			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa SMA berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa SMK berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa PK berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah siswa jenjang SD dan SMP berprestasi di Tingkat nasional/internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						jumlah siswa/mahasiswa yang menerima beasiswa			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Nilai rata-rata UK GTK			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Persentase GTK Bersertifikasi			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						Jumlah GTK yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						APK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Cabdin			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di CABDIN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
										Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
										Persentase Sekolah penerima BOS				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
								2	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah kebijakan perizinan pendidikan yang dihasilkan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		1 4	meningkatkan kualitas pendidikan	38	Peningkatan mutu layanan pendidikan			1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kebijakan Kurikulum Muatan Lokal yang dihasilkan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
								2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah kebijakan GTK yang dihasilkan				Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
5	meningkatkan pembangunan sosial masyarakat	1 5	meningkatkan kesejahteraan anak	39	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak			1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PENDIDIKAN
		1 6	mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	40	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)				Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
		17	Meningkatkan pembangunan responsif gender	41	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				42	Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender			1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
								2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kegiatan yang responsif gender				Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		18	Meningkatkan kualitas pemuda	43	Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi			1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
										Persentase Pemuda Yang Berprestasi				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
										Persentase Organisasi Pemuda yang memiliki Standarisasi				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
										Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda yang termanfaatkan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		1 9	Meningkatkan embanguna olah aga	44	Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga			1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar yang berprestasi				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
										Persentase pertumbuhan komunitas olahraga				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
										Persentase Standarisasi Tenaga Keolahragaan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
										Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang termanfaatkan				Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		2 0	Meningkatkan esejahteraan sosial	45	Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial			1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terehabilitasi kesejahteraan sosialnya				Urusan Sosial	DINSOS
								2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penanganan sosialnya				Urusan Sosial	DINSOS
								3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya				Urusan Sosial	DINSOS

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2021	2022			2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat														
6	Meningkatnya erajat esehatan masyarakat	2 1	Meningkatnya esehatan masyarakat	46	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat			1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat			Urusan Kesehatan	DINKES
										Persentase fasilitas kesehatan yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang dipersyaratkan			Urusan Kesehatan	DINKES
								2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensi			Urusan Kesehatan	DINKES
								3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alata kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi syarat			Urusan Kesehatan	DINKES
								4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif			Urusan Kesehatan	DINKES
				47	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat			1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kesehatan yang memenuhi syarat			Urusan Kesehatan	DINKES
								2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Rumah Sakit			Urusan Kesehatan	RSUP

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
								3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Urusan Kesehatan	RSUP
								4	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat		Urusan Kesehatan	RSUP
								5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Rumah Sakit Jiwa		Urusan Kesehatan	RSJ
								6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Urusan Kesehatan	RSJ
								7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Blud Rs	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat		Urusan Kesehatan	RSJ
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi													
7	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	2	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	48	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah			1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Urusan Keuangan	BAKUDA
								2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap nilai aset daerah yang dianggap belum diyakini kewajarannya/tidak memadai		Urusan Keuangan	BAKUDA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peersentase Peningkatan pertumbuhan PAD			Urusan Keuangan	BAKUDA
	2 3	1 Peningkatan tata kelola pemerintahan	49	Peningkatan tata kelola pengawasan	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Urusan Pengawasan	INSPEKTORAT
					2 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang tingkat maturitas SPIP- nya level 3			Urusan Pengawasan	INSPEKTORAT
			50	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPd dengan RPJMD			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					2 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					3 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaanbidang infrastruktur dan kewilayahan			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					4 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			Urusan Perencanaan	BAPPEDA
					5 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan			Urusan Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		51 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah			1 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Jumlah perangkat daerah yang ditata			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO ORGANISASI
					2 program pengelolaan arsip	program pengelolaan arsip			Urusan Kearsipan	DKPUS
					3 program perlindungan dan penyelamatan arsip	program perlindungan dan penyelamatan arsip			Urusan Kearsipan	DKPUS
					4 program perizinan penggunaan arsip	program perizinan penggunaan arsip			Urusan Kearsipan	DKPUS
					5 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pengelolaan Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO PERECONOMIA N
					6 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Evaluasi Administrasi Pembangunan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO PEMBANGUNAN
					7 Program Penataan Administrasi Umum	Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO UMUM
					8 Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pimpinan			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
					9 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
					10 Program Pelayanan Penghubung	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Urusan Penghubung	BADAN PENGHUBUNG
		52 Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)			1 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO PEMERINTAHAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022				2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7	8	9	10	11
				53	Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah			1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO HUKUM
								2	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya			Urusan Sekretariat Dewan	SETWAN
								3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Kesesuaian antar Informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah			Urusan Sekretariat Dewan	SETWAN
				54	Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa			1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengadaan Barang dan Jasa			Urusan Sekretariat Daerah	BIRO LAYANAN PENGADAAN
				55	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik			1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi dan komunikasi pemerintahan yang terpublikasi			Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
								2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	jumlah aplikasi informatika yang terkelola			Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
								3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terbentuknya Forum Data Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO
								4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				Urusan Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMINFO

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
				56	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peersentase Peningkatan pertumbuhan PAD				Urusan Keuangan	BAKUDA
								2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
								3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit Umum				Urusan Kesehatan	RSUP
								4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit Jiwa				Urusan Kesehatan	RSJ
								5	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase penambahan pengunjung perpustakaan				Urusan Perpustakaan	DKPUS
								6	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	penambahan koleksi perpustakaan				Urusan Perpustakaan	DKPUS
		2 4	meningkatnya kualitas ASN	57	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN			1	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi				Urusan Kepegawaian	BKPSDM

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2021	2022			2021	2022			
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
								2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang tersertifikasi			Urusan Kepegawaian	BKPSDM
8	Meningkatnya demokrasi Indonesia	26	Meningkatnya kebebasan sipil	58	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi			1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Indeks Kinerja Ormas			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		27	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	59	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat			1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
				60	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)			1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
										Persentase penegakkan pelanggaran Perda			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
										Persentase Satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kanrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
						2021	2022			2021	2022			
1		2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	
								2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
								3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		28	Meningkatnya peran lembaga demokrasi masyarakat	61	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi			1	Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
Misi VI. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup														
9	Menurunnya Resiko Bencana	29	Meningkatnya kapasitas daerah terhadap bencana	62	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana			1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (PB)			Urusan Sosial	BPBD
										Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penangulangan Bencana (PB)			Urusan Sosial	BPBD

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
										Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota Yang di Rehabilitasi Dan di Rekonstruksi				Urusan Sosial	BPBD
								2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terfasilitasi penanganan sosialnya				Urusan Sosial	DINSOS
								3	Program Penanggulangan Kebakaran	Cakupan relawan pemadam kebakaran di kabupaten dan kota				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
				63	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam			1	Program Penanggulangan Bencana					Urusan Sosial	BPBD
				64	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur			1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	30	Meningkatnya kualitas air	65	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai			1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen lingkungan hidup yang digunakan dalam perencanaan kawasan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
								2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase BOD, COD dan TSS				Urusan Lingkungan Hidup	DLH

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
			2021	2022			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase SDM bidang lingkungan hidup yang terlatih			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					4 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup yang ditangani			Urusan Kehutanan	DLH
	3 1 Meningkatnya kualitas udara	66 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara			1 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
					2 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase lembaga pembedayaan masyarakat kehutanan yang terbina			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
	3 2 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	67 Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan			1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penurunan luas kerusakan hutan			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
		68 Peningkatan tata kelola kehutanan			1 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan yang terkelola			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					2 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase penurunan luas kerusakan hutan			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		INDIKATOR PROGRAM		TAHUN PROGRAM		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
						2021	2022					2021	2022		
1		2		3		4	5	6		7		8	9	10	11
				69	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan			1	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase lembaga pembedayaan masyarakat kehutanan yang terbina				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
		33	Menurunnya efek emisi gas rumah kaca	70	Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan			1	Program Pengelolaan Persampahan	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan				Urusan Lingkungan Hidup	DLH
								2	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase luas Perhutanan Sosial				Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
								3	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
										Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
								4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun.				Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM

6.2.3. Tema Prioritas Pembangunan Daerah

1. Tahun 2018, Tema Prioritas Pembangunan “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia”.
2. Tahun 2019, Tema Prioritas Pembangunan “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”.
3. Tahun 2020, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Kesehatan masyarakat dan Pendidikan Masyarakat”.
4. Tahun 2021, Tema Prioritas Pembangunan “**Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat Dan Peningkatan Pelayanan Dasar**”.
5. Tahun 2022, Tema Prioritas Pembangunan “Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur”

6.2.4. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah telah ditetapkan dan dirumuskan sejumlah 197 Program. Ke 197 program ini telah diuraikan oleh perangkat daerah ke dalam 1210 kegiatan. Program dan kegiatan ini telah dirumuskan, disusun dan ditetapkan dalam Renstra masing-masing perangkat daerah. Ke 197 program ini, bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah telah disusun indikatif besaran anggaran pelaksanaannya selama 5 (lima) tahun (2018-2022). Besaran total dana berjurut-turut 2018 sebesar Rp. 1.472.388.414.348,-; Tahun 2019 sebesar Rp. 2.484.684.550.885,-; Tahun 2020 sebesar Rp. 3.322.861.079.194,-; Tahun 2021 sebesar Rp. 4.316.315.130.399,- dan Tahun 2022 sebesar Rp. 3.770.981.525.567,-.

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, Program Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang semula sebelum perubahan berjumlah 197 program berubah menjadi 177 Program Perangkat daerah yang tersebar di 34 Perangkat Daerah. Adapun jumlah pagu indikatif yang semula pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.316.315.130.399,- berubah menjadi Rp. 2.883.443.678.214,87 dan tahun 2022 semula sebesar Rp. 3.770.981.525.567,- berubah menjadi Rp. 2.892.240.376.817,39,-

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kegiatan Perangkat Daerah dapat digambarkan pada table VI.6 berikut ini :

Tabel VI.6
Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 – 2022

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah				
Tujuan 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi				
1 Meningkatkan PDRB Sub sektor pertanian	1 Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	1 Meningkatnya Rasio jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian dengan luas lahan pertanian	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		2 Meningkatnya Rasio jumlah Prasarana dan Sarana Pertanian dengan luas lahan pertanian	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		3 Meningkatnya benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		4 Meningkatnya benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		5 Meningkatnya Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Urusan Pertanian	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		6 Menurunnya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	Urusan Pertanian	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
		7 Meningkatnya Ketersediaan bibit ayam yang baik untuk berternak	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		8 Meningkatnya Ketersediaan bibit lada yang siap tanam	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		9 Meningkatnya Ketersediaan anakan sapi siap ternak	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		10 Meningkatnya Ketersediaan bibit karet siap tanam	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		11 Meningkatnya Ketersediaan benih sumber padi siap tanam	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		12 Meningkatnya Ketersediaan sarana prasarana pembibitan	Urusan Pertanian	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		13 Meningkatnya Luas Jaringan Irigasi pertanian yang beroperasi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
	2 Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatkan produksi lada	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		2 Meningkatkan produksi Karet	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		3 Meningkatkan produksi Komoditas Perkebunan lainnya	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		4 Meningkatkan produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi)	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		5 Meningkatkan produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah)	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		6 Meningkatkan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit)	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		7 Meningkatkan Populasi ternak besar sapi	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		8 Meningkatkan Populasi ternak besar sapi	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		9 Meningkatkan Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) untuk pengolahan hasil pertanian	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
	3 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatkan Persentase masyarakat petani yang mendapat pelatihan pertanian	Urusan Tenaga Kerja	UPTD BLKI

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja sektor Peritanian	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		3 Meningkatkan Persentase tenaga kerja pertanian bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		4 Meningkatnya Persentase Siswa SMK Program Keahlian Pertanian memiliki Sertifikasi Profesi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatkan kelompok masyarakat ternak yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		6 Meningkatkan kelompok masyarakat perkebunan yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		7 Meningkatkan kelompok masyarakat tanaman pangan dan hortikultura yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultur	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		8 Meningkatkan persentase SDM koperasi pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		9 Meningkatkan persentase SDM usaha kecil pengolahan hasil pertanian terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	4 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatkan volume usaha koperasi pertanian	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		2 Meningkatkan produk usaha kecil pengolahan hasil pertanian yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	5 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi Pertanian, perkebunan dan Peternakan	1 Meningkatnya investasi disektor pertanian	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		2 Meningkatnya informasi ke masyarakat terkait produksi pertanian	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		3 Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang pertanian yang di implementasikan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
	6 Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas	1 Meningkatkan kawasan lada yang dikelola	Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
2 Meningkatkan PDRB Sub sektor perikanan	7 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1 Meningkatkan Persentase masyarakat nelayan yang mendapat pelatihan produksi dan pengolahan hasil perikanan	Urusan Tenaga Kerja	UPTD BLKI
		2 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja terkait produksi dan pengolahan hasil perikanan	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		3 Meningkatkan Persentase tenaga kerja perikanan bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		4 Meningkatnya Persentase Siswa SMK Program Keahlian Perikanan memiliki Sertifikasi Profesi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatkan persentase SDM koperasi pertikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		6 Meningkatkan persentase SDM usaha kecil pengolahan hasil perikanan terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	8 Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1 Meningkatkan Volume Produksi Perikanan Budidaya	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatkan Volume Produksi Olahan ikan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		3 Meningkatkan Volume Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		4 Meningkatkan Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) untuk	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
	9 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatkan Persentase Pelaku Usaha perikanan yang Taat Aturan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		2 Meningkatkan Panjang Pengerukan dan Pengendalian air dikawasan perikanan	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		3 Meningkatkan Produksi Benih Ikan air laut yang Unggul	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		4 Meningkatkan Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		5 Meningkatkan Produksi Benih Ikan air payau yang Unggul	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
	10 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatkan volume usaha koperasi perikanan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		2 Meningkatkan produk usaha kecil pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
	11 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	1 Meningkatnya investasi disektor perikanan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		2 Meningkatnya informasi ke masyarakat terkait cara meningkatkan produksi perikanan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		3 Meningkatnya rekomendasi kebijakan bidang perikanan yang di implementasikan	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	12 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif	1 Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		2 Meningkatnya kelembagaan pariwisata yang berkualitas	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		3 Meningkatkan pengelolaan kawasan desa wisata	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
	13 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata	1 Meningkatkan sarana prasarana di daya tarik wisata yang terbangun dan memenuhi standar	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		2 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju destinasi wisata	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		3 Menurunkan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan di destinasi wisata	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		4 Meningkatkan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun di destinasi wisata	Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
		5 Meningkatnya sarana prasarana penunjang perhubungan darat di destinasi wisata	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	14 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	1 Meningkatkan SDM pariwisata yang mendapat pelatihan	Urusan Tenaga Kerja	UPTD BLKI
		2 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja sektor Pariwisata	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		3 Meningkatkan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		4 Meningkatnya Siswa SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki Sertifikasi Profesi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatnya sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		6 Meningkatnya sumberdaya pariwisata yang terlatih di Pulau Belitung	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		7 Meningkatkan SDM koperasi ekonomi kreatif pendukung pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
				DAN MENENGAH
		8 Meningkatkan SDM usaha kecil ekonomi kreatif pendukung pariwisata terlatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	15 Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata	1 Meningkatnya budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi event wisata	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		2 Meningkatnya event olah raga yang dapat dikembangkan menjadi event wisata	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
	16 Peningkatan peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	1 Meningkatkan volume usaha ekonomi kreatif pendukung pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		2 Meningkatkan produk usaha kecil ekonomi kreatif pendukung pariwisata yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
	17 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan pariwisata	1 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik melalui media promosi	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		2 Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui media promosi	Urusan Pariwisata	BUDPAR
		3 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
		4 Meningkatnya informasi ke masyarakat terkait pengembangan pariwisata	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		5 Meningkatnya rekomendasi kebijakan pengembangan pariwisata yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO EKONOMI
	18 Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya fokus	1 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung			
		2 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	19 Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Belinyu-Sungailiat dan sekitarnya fokus Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka	1 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	20 Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pulau Belitung fokus Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung kelayang	1 Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata KEK Tanjung Kelayang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata KEK Tanjung Kelayang	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
	21 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata pulau punai	Meningkatkan Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata pulau punai	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang perhubungan darat menuju Kawasan Peruntukan Pariwisata KEK pulau punai	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	22 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	1 Meningkatkan luas tanah provinsi di pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatkan ketersediaan dokumen pendukung perencanaan di kawasan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		3 Meningkatkan kerjasama di pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera dengan Prov. Sumsel	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
	23 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata	1 Meningkatnya sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam mendukung pariwisata	Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		2 Meningkatnya pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil dalam mendukung pariwisata	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
4 Meningkatkan PDRB sektor pertambangan dan energi	24 Peningkatan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan Persentase cadangan Mineral yang potensial	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
	25 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan sumber daya mineral	1 Meningkatnya investasi di sektor Sumberdaya mineral	Urusan Penanaman Modal	DINAS PMPTSP
	26 Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat	Meningkatkan Persentase EBT yang digunakan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
	27 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi	Meningkatnya investasi di sektor Energi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
	listrik daerah			
5 Meningkatkan PDR industri pengolahan dan perdagangan	28 Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular dan sekitarnya	1 Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
	29 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai dan sekitarnya	1 Meningkatnya Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri sadai dan sekitarnya	Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
	30 Peningkatan tata kelola industri		Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
	31 Peningkatan tata kelola perdagangan		Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
Tujuan 2 : Meningkatnya pemerataan pendapatan				
6 Menurunkan tingkat pengangguran	32 Peningkatan kesempatan kerja	1 Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		2 Meningkatnya Tenaga Kerja Industri	Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
		3 Meningkatnya pemuda yang bekerja	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		4 Meningkatnya wirausaha	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS UMKM
		5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
		6 Meningkatnya tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
7 Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja	33 Peningkatan kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja	1 Meningkatnya pembinaan Hubungan Industrial	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
8 Menurunkan tingkat kemiskinan	34 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	1 Meningkatnya PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
		2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	DINAS PERKIM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
			Pemukiman	
		3 Meningkatkan Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		4 Meningkatkan siswa/masyarakat miskin mendapatkan beasiswa	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatkan masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
	35 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	1 Meningkatkan pembedayaan PMKS	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
		2 Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
		3 Meningkatkan kenaikan upah tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
9 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	36 Peningkatan pembangunan desa	Meningkatnya peran kelembagaan desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PEMDES
Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas				
Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur				
10 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	37 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum	Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi yang berfungsi baik	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		Meningkatkan infrastruktur sumber daya air tersedia dan berfungsi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
	38 Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang	Meningkatkan rekomendasi pemanfaatan ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
	39 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi	Meningkatkan SDM konstruksi yang terlatih	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
11 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	40 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	1 Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaan tersedia dan berfungsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		1 Tersusunnya dokumen perencanaan dan teknis TPA Regional	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		2 Meningkatnya infrastruktur TPA regional yang terbangun	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		3 Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menuju TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		4 Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW untuk kepentingan di TPA Regional	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
12 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	41 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan	1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia dan berfungsi baik	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
		2 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia dan berfungsi baik	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
		3 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan udara yang tersedia dan berfungsi baik	Urusan Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
Tujuan 1 : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat				
13 Meningkatkan kesempatan Pendidikan	42 Peningkatan akses pelayanan pendidikan	1 Meningkatnya partisipasi sekolah SMA	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		2 Meningkatnya partisipasi sekolah SMK	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		3 Meningkatnya partisipasi sekolah SLB	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		4 Meningkatnya Sekolah penerima BOS	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatnya siswa yang berprestasi di bidang olah	Urusan Kepemudaan dan	DISKEPORA

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		raga	Olahraga	
		6 Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan pendidikan yang diimplementasikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO KESRA
14 Meningkatkan kualitas pendidikan	43 Peningkatan mutu layanan pendidikan	1 Meningkatnya Rata-rata nilai UN SMA	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		2 Meningkatnya SMA terakreditasi	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		3 Meningkatnya SLB terakreditasi A	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		4 Meningkatnya SMK terakreditasi A	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		5 Meningkatnya SMA terakreditasi A	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		6 Meningkatnya Guru Berkualifikasi S1/D4	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		7 Meningkatnya Guru Bersertifikat Pendidik	Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		8 Meningkatnya perpustakaan terakreditasi	Urusan Perpustakaan	DKPUS
Tujuan 2 : Meningkatnya Pembangunan sosial masyarakat				
15 Meningkatkan kesejahteraan anak	44 Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak	1 Meningkatnya Kab/Kota Layak Anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Meningkatnya anak memiliki identitas	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		3 Meningkatnya anak terlantar yang mendapat hak asuh	Urusan Sosial	DINSOS
16 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	45 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	1 Mengendalikan tingkat kelahiran	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Meningkatnya jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang teradministrasi kependudukan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		3 Meningkatnya Jumlah data base kependudukan tingkat provinsi yang akurat	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan	DP3ACSKB

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
			Perlindungan Anak	
		4 Tersedianya kebijakan grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		5 Meningkatnya Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayanan ke masyarakat	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
17 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender	46 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender	1 Meningkatnya perempuan yang bekerja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Meningkatkan PD menyusun PPRG	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
	47 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 Menurunkan tindak kekerasan terhadap anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		2 Menurunkan tindak kekerasan terhadap perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		3 Menurunkan anak yang bermasalah dengan hukum	Urusan Sosial	DINSOS
18 Meningkatkan kualitas pemuda	48 Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		Meningkatnya pemuda mandiri	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
19 Meningkatkan pembangunan olahraga	49 Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		Meningkatnya masyarakat berolahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
20 Meningkatkan kesejahteraan sosial	50 Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial	Meningkatnya PMKS mendapatkkan rehabilitasi sosial	Urusan Sosial	DINSOS
		Meningkatnya PMKS mendapatkkan jaminan sosial	Urusan Sosial	DINSOS
		Meningkatnya PMKS mendapatkan perlindungan sosial	Urusan Sosial	DINSOS
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
21 Meningkatkan kesehatan masyarakat	51 Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1 Meningkatnya masyarakat sehat	Urusan Kesehatan	DINKES
		2 menurunkan penderita penyakit menular dan tidak menular	Urusan Kesehatan	DINKES
		3 Meningkatnya masyarakat yang terlayani kesehatan	Urusan Kesehatan	DINKES
		4 Meningkatnya SDM kesehatan yang berkompeten	Urusan Kesehatan	DINKES
		5 Meningkatnya Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		6 Meningkatnya jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		7 Meningkatnya cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		8 Meningkatnya sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		9 Meningkatnya peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
	52 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Menurunkan Lama hari rawat (Length of Stay)	Urusan Kesehatan	RSUP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya penduduk yang terlayani pelayanan medis	Urusan Kesehatan	RSUP
		3 Meningkatnya pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	Urusan Kesehatan	DINKES
		4 Meningkatnya penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang terlayani pelayanan medis kejiwaan	Urusan Kesehatan	RSJ
		5 Meningkatnya penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang terlayani pelayanan keperawatan jiwa	Urusan Kesehatan	RSJ
	53 Peningkatan penanganan stunting	Meningkatkan akses terhadap air bersih		
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
Tujuan 6 : Terwujudnya reformasi birokrasi				
22 Meningkatkan tata kelola pemerintahan	54 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	1 Meningkatnya Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal penetapan APBD dan perubahan APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
		2 Meningkatnya Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
	55 Meningkatkan tata kelola pengawasan	1 Meningkatnya Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
	56 Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	1 Meningkatnya persentase ketepatan jadwal penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
		2 Meningkatnya Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
	57 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	1 Meningkatnya Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		3 Meningkatnya Persentase ASN yang produktif	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
	58 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	1 Meningkatnya presentase perpustakaan terakreditasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Urusan Perpustakaan	DKPus
		2 Meningkatnya persentase Perangkat daerah yang melaksanakan tata laksana sesuai standar	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
		1 Meningkatnya persentase kesesuaian antar laporan LAKIP dengan dokumen perencanaan dan evaluasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
	59 Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah (tambah biro ekonomi, Kesra, Biro Pemerintahan)	2 Meningkatnya Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
		3 Meningkatnya Persentase Jumlah pegawai yang menyampaikan LHKPN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
		4 Meningkatnya Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
		5 Meningkatnya Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUMAS
		6 Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BADAN PENGHUBUNG
		7 Meningkatnya Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
		8 Meningkatnya Presentase peningkatan fungsi lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
	60 Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1 Meningkatnya Persentase informasi priotas pembangunan yang terpublikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		2 Meningkatnya persentase perangkat daerah yang memanfaatkan IT	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
		3 Meningkatkan Persentase data untuk perencanaan yang tersedia	Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
	61 Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa			
	62 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah (BKD)			
	63 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			
	64 Peningkatan kompetensi ASN (Diklat)			
Tujuan : Meningkatkan demokrasi indonesia				
23 Meningkatkan kebebasan sipil	61 Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi	1 Meningkatnya Persentase masyarakat yang memahami kebebasan sipil	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
	62 Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	1 Meningkatnya Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		2 Menurunnya Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
24 Meningkatkan hak-hak politik	63 Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	1 Meningkatnya persentase masyarakat yang paham tentang politik	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Persentase keterwakilan perempuan dilembaga politik	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
		Meningkatnya Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3ACSKB
25 Meningkatkan peran lembaga demokrasi	64 Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi	1 Meningkatkan Persentase peran lembaga demokrasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
		2 Meningkatkan Persentase pembinaan dan pengawasan ormas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
Misi VI . Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup				
Tujuan : Menurunkan Resiko Bencana				
26 Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	65 Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Meningkatkan Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	BPBD
		2 Meningkatkan Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Urusan Sosial	DINAS SOSIAL
		3 Meningkatkan Persentase Cadangan Pangan	Urusan Pangan	DINAS PANGAN
		4 Meningkatkan Persentase persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
		5 Meningkatkan Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	Urusan Sosial	BPBD
		6 Meningkatkan Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	Urusan Kesehatan	RSUP

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
		7 Meningkatnya persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		8 Meningkatnya Persentase rumah akibat bencana yang tertangani	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PERKIM
		9 Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		10 Meningkatnya proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		11 Meningkatnya Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Urusan Sosial	BPBD
		12 Meningkatnya Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	Urusan Kesehatan	RSJ
	66 Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	1 Meningkatnya persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di kawasan rawan bencana	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatnya Persentase DAS kritis yang di kelola	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		3 Meningkatnya Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	67 Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur	1 Meningkatnya persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2 Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		3 Meningkatnya persentase ketaatan terhadap RTRW di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
27 Meningkatnya Pengendalian	69 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai	1 Persentase penurunan konsentrasi BOD, COD dan TSS	Urusan Lingkungan Hidup	DLH

MISI/TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	SASARAN KEGIATAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
Lingkungan Hidup				
		2 Persentase Kawasan lindung (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	70 Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara	1 Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		2 Persentase penurunan luas kebakaran Hutan dan lahan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	71 Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap kawasan hutan	1 Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		2 persentase penanganan tindak pidana kehutanan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	72 Peningkatan tata kelola kehutanan	1 Menurunya Luas Kerusakan Hutan dan Lahan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	73 Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan	1 Meningkatkan Persentase luas Kawasan Hutan yang terkelola	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
	74 Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1 Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup	Urusan Lingkungan Hidup	DLH
		2 Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		3 Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		4 Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
		5 Persentase pengelolaan kawasan hutan oleh UPTD KPH	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN
		6 Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAN

Tabel VI.4
Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH	
							2021	2022		2021	2022			
	1	2		3		4	6	7	8	11	12	13	14	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1	Meningkatnya PDRB sub sektor pertanian	1	Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan, dan perternakan			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Pertanian	DISTAN	
												PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian	DISTAN
					2	Peningkatan Produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian, Perkebunaan dan Peternakan						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian	DISTAN
												PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pertanian	DISTAN
												PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian	DISTAN
					3	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Pertanian, Perkebunan dan Peternakan						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian	DISTAN
												PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	DINDIK
												PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
												PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			4	Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
			5	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi Pertanian, perkebunan dan Peternakan		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Penanaman Modal	DPMPSTP
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DINAS KUKM
			6	Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Teknopark Lada Air Gegas		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			Pertanian	DISTAN
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		2	Meningkatnya PDRB Sub sektor perikanan	7	Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
			8	Peningkatan produksi dan Pengelolaan Hasil Produksi Perikanan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			Tangkap dan Perikanan Budidaya							
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
			9 Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
			10 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan nilai tambah hasil Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Urusan Kelautan dan Perikanan	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
			11 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan produksi dan nilai Tambah hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Penanaman Modal	DPMPTSP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
		3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	12 Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata serta Pengembangan ekonomi kreatif			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
			13 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi pariwisata			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			14 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pariwisata			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINDIK
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	KUMKM
			15 Peningkatan Peran serta kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan dalam pengembangan pariwisata			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			Urusan Kebudayaan	BUDPAR
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Urusan Kebudayaan	BUDPAR
			16 Peningkatkan peran KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Urusan Perindustrian	DINAS KUMKM
			17 Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Penanaman Modal	DPMPTSP

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			pengembangan pariwisata							
			18 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	BUDPAR
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			19 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lintas timur Pulau Bangka			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	BUDPAR
			20 Pengembangan hinterland dan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Urusan Lingkungan	DLH

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
									Hidup	
			21 Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata pulau punai			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	BUDPAR
			22 Pengembangan pintu masuk wisatawan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	BUDPAR
			23 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil pendukung pariwisata			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Urusan Pariwisata	BUDPAR

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
		4	Meningkatnya PDRB sektor pertambangan dan energi	24	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
				25	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam pengembangan sumber daya mineral	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				26	Peningkatan ketersediaan energi listrik masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
				27	Peningkatan Promosi, koordinasi, kerjasama, dan investasi dalam peningkatan pemenuhan energi listrik daerah	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		5	Meningkatnya PDRB industri pengolahan dan perdagangan	28	Pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		2021	2022		
	1	2		3		4	6	7	8	11	12	13	14
					29	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Urusan Pertanahan	DINAS PUPR
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
									PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					30	Peningkatan tata kelola industri			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			Urusan Perindustrian	DISPERINDAG
					31	Peningkatan tata kelola perdagangan			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
									PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			Urusan Perdagangan	DISPERINDAG
2	Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	6	Menurunkan tingkat pengangguran	32	Peningkatan kesempatan kerja			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			Urusan Kelautan dan Perikanan	DKP
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KUMKM
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		7 Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja	33 Peningkatan Kompetensi, hubungan industrial dan keselamatan tenaga kerja			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Urusan Tenaga Kerja	DISNAKER
		8 Menurunkan tingkat kemiskinan	34 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			35 Peningkatan pendapatan masyarakat miskin			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU		SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
								2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4		6	7	8		11	12	13	14
										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Urusan Pertanian	DINAS PERTANIAN
										PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Urusan Komunikasi dan Informatika	DISKOMINFO
				9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	36	Peningkatan pendapatan masyarakat desa			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINAS PMD
3	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Indeks ketersediaan Infrastruktur	10	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan Umum	37	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
										PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			38 Peningkatan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan tata ruang			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
			39 Peningkatan ketersediaan dan kapasitas SDM Konstruksi			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
		11 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	40 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	DINAS PRKP
		12 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perhubungan	41 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana perhubungan			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			Urusan Perhubungan	DISHUB
						PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			Urusan Perhubungan	DISHUB

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		2021	2022		
	1	2		3		4	6	7	8	11	12	13	14
4	Meningkatnya Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	13	Meningkatkan kesempatan pendidikan	42	Peningkatan akses pelayanan pendidikan			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
			14	Meningkatkan kualitas pendidikan	43	Peningkatan mutu layanan pendidikan			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
									PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			Urusan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
5	Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Sosial	15	Meningkatnya kesejahteraan anak	44	Peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak-hak anak			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
									PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PENDIDIKAN
			16	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	45	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
		17 Meningkatkan pembangunan resposif gender	46 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			47 Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		18 Meningkatkan kualitas pemuda	48 Peningkatan Insan pemuda yang mandiri dan berprestasi			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		19 Meningkatkan pembangunan olah raga	49 Peningkatan prestasi dan peran serta masyarakat dalam berolahraga			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Urusan Kepemudaan dan Olahraga	DISKEPORA
		20 Meningkatkan kesejahteraan sosial	50 Peningkatan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Urusan Sosial	DINSOS
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		2021	2022		
1		2	3		4		6	7	8	11	12	13	14
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Urusan Sosial	DINSOS
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Urusan Sosial	DINSOS
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Urusan Sosial	DINSOS
6	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	21	Meningkatnya kesehatan masyarakat	51	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	DINKES
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Urusan Kesehatan	DINKES
									PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Urusan Kesehatan	DINKES
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Urusan Kesehatan	DINKES
									PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Urusan Pekerjaan Umum	DINAS PRKP
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Urusan Pangan	DINAS PANGAN
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Urusan Pangan	DISPERINDAG
					52	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Urusan Kesehatan	DINKES
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA			Urusan Kesehatan	UPTD BALAI LABORATORIUM

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU		SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
								2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4		6	7	8		11	12	13	14
										MANUSIA KESEHATAN					KESEHATAN
										PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Urusan Kesehatan	RSUP
										PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Urusan Kesehatan	RSJ
7	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	22	Meningkatkan tata pemerintahan	53	Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
										PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
										PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
					54	Peningkatan tata kelola pengawasan				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	INSPEKTORAT
					55	Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan				PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
										PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
										PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
						PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	BAPPEDA
			56 Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO ORGANISASI
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN
						program pengelolaan arsip			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	DKPUS
						program perlindungan dan penyelamatan arsip			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	DKPUS
						program perizinan penggunaan arsip			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	DKPUS
			57 Peningkatan penataan peraturan perundangan dan kebijakan daerah			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO HUKUM
						Program Layanan dan Administrasi Keuangan			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	SETWAN
			58 Peningkatan transparansi Pengadaan barang dan jasa			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			59 Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BIRO LAYANAN PENGADAAN

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU		SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
								2021	2022			2021	2022		
1		2		3		4		6	7	8		11	12	13	14
						60	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BAKUDA
										PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Urusan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Urusan Kesehatan	RSUP
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Urusan Kesehatan	RSJ
						61	Peningkatan kompetensi dan profesional ASN			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
										PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Urusan Kepegawaian	BKPSDM
8	Meningkatnya demokrasi indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	23	Meningkatnya Kebebasan sipil	62	Peningkatan peran serta masyarakat dalam berdemokrasi				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
			24	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	63	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
					64	Peningkatan Penyelenggaraan ketertiban umum dan				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum	SATPOL PP

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		2021	2022		
	1	2		3		4	6	7	8	11	12	13	14
						ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)						dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
									PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL
			25	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	65	Peningkatan pengembangan Lembaga-Lembaga Demokrasi			Program Penanggulangan Kebakaran			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
	Menurunnya Resiko Bencana												BPBD
9		Indeks Bencana	Resiko	26	Meningkatnya Kapasitas daerah terhadap penanggulangan bencana	66	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
										PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Urusan Sosial
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			Urusan Pangan	DINAS PANGAN
										Program Penanggulangan Kebakaran			Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

TUJUAN BARU		INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU		STRATEGI BARU		ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
							2021	2022		2021	2022		
	1	2		3		4	6	7	8	11	12	13	14
					67	Peningkatan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
									PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			Urusan Sosial	BPBD
					68	Peningkatan penataan hilir dan hulu daerah rawan bencana teluk bayur			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PUPR
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	27	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	69	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas air sungai			Program Perencanaan Lingkungan Hidup				Urusan Lingkungan Hidup
									Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
									Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
									Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Urusan Kehutanan	DLH
					70	Peningkatan pengendalian terhadap kualitas udara			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
					71	Peningkatan pengendalian dan pengawasan hutan			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				Urusan Kehutanan

TUJUAN BARU	INDIKATOR TUJUAN BARU	SASARAN BARU	STRATEGI BARU	ARAH KEBIJAKAN BARU		PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90	TAHUN PROGRAM SESUAI PERMENDAGRI 90		URUSAN	PERANGKAT DAERAH
				2021	2022		2021	2022		
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14
			72 Peningkatan tata kelola kehutanan			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			73 Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
			74 Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan			Program Pengelolaan Persampahan			Urusan Lingkungan Hidup	DLH
						PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			Urusan Kehutanan	DINAS KEHUTANAAN
						Program Peningkatan Geologi dan Air Tanah			Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS ESDM
						Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam dan Batuan			urusan perhubungan	DINAS ESDM

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan diperlukan, agar dapat memastikan kemampuan riil keuangan daerah, untuk membiayai program jangka menengah RPJMD 2017-2022 (selama 5 tahun).

Untuk itu dilakukan dulu analisis keuangan daerah, karena dengan melakukan analisis keuangan daerah akan diperoleh: (1) Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dan (2) Kerangka pendanaan dan pedoman indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan daerah.

7.1. Analisis Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah ini dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu diwujudkan dalam APBD, sehingga analisa keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Keuangan daerah dalam APBD terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan.

7.1.1. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Selama lima tahun sebelumnya (2012-2016) realisasi Pendapatan daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel VII.1, berikut ini:

Tabel VII.1**Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	1.719.774.423.456,42	1.886.998.635.504,14	1.949.866.524.266,77	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	563.108.840.861,42	571.802.890.055,14	574.258.443.819,77	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35
1.1.1.	Pajak Daerah	508.844.014.371,82	506.944.936.060,22	507.983.460.531,72	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.357.405.765,00	11.520.365.059,00	8.651.866.891,72	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	5.243.416.236,78	5.613.342.582,77	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	44.138.193.812,09	48.094.172.699,14	52.009.773.813,56	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64
1.2.	Dana Perimbangan	1.034.374.722.920,00	1.130.400.495.449,00	1.126.284.913.345,00	1.537.241.446.289,00	1.694.218.759.243,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	184.182.116.920,00	188.157.236.449,00	142.860.016.345,00	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	806.820.146.000,00	897.887.443.000,00	905.526.208.000,00	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	43.372.460.000,00	44.355.816.000,00	77.898.689.000,00	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.522.785.000,00	184.795.250.000,00	249.323.167.102,00	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00

sumber :Badan Keuangan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel VII.1 merupakan data tentang realisasi pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2018. Pada tahun 2014, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.719.774.423.456,42 rupiah dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 563.108.840.861,42 rupiah. Kemudian pada tahun 2015, pendapatan daerah menjadi 1.886.998.635.504 rupiah atau naik sebesar 167.224.212.047,72 rupiah atau tumbuh sebesar 9,72 %. Setelah itu, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menaik dengan pendapatan rata-rata sebesar 10,52 persen.

Berdasarkan pada tabel VII.1, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum dengan rata-rata sebesar 921.793.257.161,80 rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,071 persen. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan yang signifikan dari 43.372.460.000,00 rupiah pada tahun 2014 menjadi 460.227.704.831,00 rupiah atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 136,52 persen selama 5 tahun. Persentase DAK besar ini disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada tahun anggaran 2016-2017 dengan DAK pada tahun 2016 sebesar 77.898.689.000,00 rupiah menjadi 438.826.469.824,00 rupiah atau naik sebesar 360.927.780.824,00 rupiah. Rata-rata pendapatan dari DAK selama 5 tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 212.936.227.931,00 rupiah.

Setelah dilakukan analisis realisasi pendapatan selama lima tahun sebelumnya (2012-2016), termasuk analisis perkembangan neraca daerah serta peluang-peluang optimalisasi penerimaan di masa datang, maka disusunlah proyeksi pendapatan daerah lima tahun kedepan seperti pada tabel VII.2 berikut ini.

Tabel VII.2
Proyeksi dan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.763.433.155.880,37	2.874.236.165.757,38	2.940.990.420.387,71	3.007.744.675.017,04
1.1	Pendapatan asli daerah	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	884.562.215.880,37	963.634.368.637,38	1.030.388.623.267	1.097.142.877.896,00
1.1.1	Pajak daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	790.139.435.584,04	850.307.137.560,93	907.314.557.672	964.465.763.799,68
1.1.2	Retribusi daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	9.315.527.150,00	16.194.191.546,00	17.333.655.676,17	18.616.905.823,41
1.1.3	Hasil pengelolaan kekeyaaan daerah yang dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	79.607.253.146,33	91.633.039.530,45	99.524.730.893,17	108.560.208.272,95
1.2	Dana Perimbangan	1.537.241.446.289,00	1.694.218.759.243,00	1.766.282.638.000,00	1.766.183.450.000	1.766.183.450.000	1.766.183.450.000
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00	228.805.440.000,00	140.897.249.000,00	140.897.249.000,	140.897.249.000,
1.2.2	Dana alokasi umum	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	1.052.377.716.000,00	1.052.377.716.000,00	1.052.377.716.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00	490.614.576.000,00	572.908.485.000,00	572.908.485.000,00	572.908.485.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	111.588.302.000,00	144.418.347.120,00	144.418.347.120,00	144.418.347.120,00
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	86.102.500.000,00	101.004.857.120,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	0,00	25.485.802.000,00	43.413.490.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.763.433.155.880,37	2.874.236.165.757,38	2.940.990.420.387,71	3.007.744.675.017,04

Sumber :Badan Keuangan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel VII.2 menunjukkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022. Secara keseluruhan, pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2.251.024.652.420,48 rupiah kemudian naik sebesar 305.953.059.503,87 rupiah dengan tingkat pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 14 persen. Setelah itu, pada tahun 2022 pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan mencapai 3.007.313.316.965,83 dengan asumsi pendapatan dana perimbangan dari pusat sama seperti pada tahun 2020. Dengan demikian, pada tahun 2022 rata-rata pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,05 % dari tahun 2017.

Selain itu, pada tabel VII.2 ini menunjukkan beberapa item yang menjadi sumber pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017-2022. Dana perimbangan dari pusat masih menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2017, dana perimbangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.539.960.002.502 rupiah. Kemudian pada tahun 2019, dana perimbangan ini naik menjadi 1.766.282.638.000 rupiah atau rata-rata pertumbuhan sebesar 14 persen dari tahun 2017. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dana perimbangan dari tahun 2017 sebesar 99.188.000 rupiah dan hal terjadi akibat adanya penurunan penerimaan dana bagi hasil (DBH).

Sektor kedua yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pajak daerah. Pada tahun 2017, pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 629.136.457.212,39 rupiah. Pada tahun 2018, pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 158.098.962.826,44 rupiah dari tahun 2017 dan terus menaik sebesar 2.904.015.545,21 rupiah pada tahun 2019. Kenaikan pajak daerah yang meningkat ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua dan empat. Pada tahun 2022, diproyeksikan pajak daerah naik dari tahun 2017 dengan analisis berdasarkan pada realisasi pada tahun 2017-2019. Diproyeksikan Rata-rata pertumbuhan pajak daerah naik sebesar 9,22 persen dari tahun 2017-2022.

Selain dari pajak daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga membuat kebijakan terkait peningkatan pendapatan daerah melalui sektor retribusi dengan memperbaharui peraturan daerah terkait dengan sumber retribusi baru. Pada tahun 2017 retribusi daerah sebesar 5.434.540.818 rupiah dan naik sebesar 7.613.352.47 pada tahun 2018 serta 9.315.527.150 rupiah. Pada tahun 2020, retribusi ditargetkan naik sebesar 16.194.191.546 rupiah atau naik sebesar 6.878.664.396 rupiah dari tahun 2019 sehingga realisasi retribusi daerah pada akhir 2020 menjadi lebih baik.

7.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah dan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lima tahun (2014-2018) sebelumnya, perkembangan dapat dilihat data-datanya pada Tabel VII.3 berikut ini :

Tabel VII.3
Realisasi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2018

Tahun Anggaran	Realisasi
1	3
2014	1.596.086.858.479,20
2015	1.869.958.486.295,70
2016	2.069.868.292.386,32
2017	2.359.078.163.818,47
2018	2.364.345.563.586,80
Jumlah	10.259.337.364.566,50

Dari tabel VII.3 menunjukkan bahwa belanja daerah dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Belanja daerah merupakan pembiayaan daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, penggunaan SILPA daerah dan belanja hibah. Pada tahun 2014, belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1.596.086.858.479,20 rupiah dan naik sebesar 768.258.705.107,60 rupiah dalam kurun waktu 4 tahun

7.1. KerangkaPendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan memperhatikan pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan mewujudkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Saat ini telah ditetapkan kebijakan *money follow priority program*, bukan lagi *money follow function*.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi

Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2012–2017 diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan asas pemerataan pembangunan; dan (4) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

7.1.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Strategi belanja daerah Tahun 2017-2022 diarahkan untuk mendukung:

- a. Pencapaian pembangunan nasional 2015-2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA) dan RPJM 2020-2024;
- b. *Dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Peningkatan sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan,

kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Untuk itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2017-2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
2. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.

9. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
10. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di pedesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
11. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
14. Pengembangan daerah otonomi baru (DOB)
15. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan

untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;

- f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga terdapat peluang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran;

3. Penyertaan modal disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 sebagaimana ditampilkan pada Tabel VII.1.

Tabel VII.1
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Belanja Tidak Langsung	855.780.981.423,84	1.080.851.837.395,72	1.209.394.930.768,63	1.330.059.029.641,26	1.360.176.219.327,02	12,61
1	Belanja Pegawai	274.339.635.936,42	312.375.890.443	396.188.131.149,20	620.836.142.868,21	657.760.322.587,62	25,84
2	Belanja Bunga	0,00		-	-	-	
3	Belanja Subsidi	0,00		0,00		0,00	0,00
4	Belanja Hibah	167.022.782.500,00	257.790.335.224,00	403.743.237.430,00	254.263.301.000,00	267.958.447.520,00	19,83
5	Belanja Bantuan Sosial	745.500.000,00	666.700.000,00	717.060.000,00	700.000.000,00	479.075.000,00	(9,24)
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	212.859.716.663,42	303.413.474.847,19	156.076.110.183,43	351.012.561.851,05	261.064.334.164,64	(39,36)
7	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	200.796.461.884,00	206.510.260.515,00	251.916.010.142,00	102.528.477.024,00	170.854.282.754,76	8,04
8	Belanja Tidak Terduga	16.884.440,00	95.176.366,45	754.381.864,00	718.546.898,00	59.757.300,00	6,06
B	Belanja Langsung	740.305.877.055,36	789.106.648.899,98	860.473.361.617,69	1.029.019.134.177,21	1.004.169.344.259,78	8,20
1	Belanja Pegawai	70.712.733.013,01	81.446.272.543,00	99.601.380.686,93	143.373.444.944,00	36.915.135.524,00	1,79
2	Belanja Barang dan Jasa	364.039.655.088,00	473.942.522.699,00	531.095.000.241,86	517.435.756.892,24	651.856.375.641,14	16,41
3	Belanja Modal	305.553.488.954,35	233.717.853.657,98	229.776.980.688,90	368.209.932.340,97	315.397.833.094,64	5,18
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	5.000.000.000,00	-	100
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	-	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	100
4	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	1.596.086.858.479,20	1.874.958.486.295,70	2.069.868.292.386,32	2.364.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80	10,52

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

7.1.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Jika memperhatikan kinerja pendapatan daerah pada 2017-2022, pendapatan daerah akan diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun kondisi perekonomian Bangka Belitung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah yang telah diuraikan diatas dalam meningkatkan Pertumbuhan dan realisasi PAD. Hal ini dapat dipahami karena disparitas PAD memiliki kecenderungan yang tinggi akibat kepastiannya masih rendah. Selama ini pendapatan daerah masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor yang bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan (terbatasan oleh ketersediaan ruang dan sarana prasarana infrastruktur), sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Jika memperhatikan proyeksi perekonomian nasional yang akan mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7%-8,0% pada periode 2017-2022 dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami penurunan dalam periode 2010, stabilitas sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam, maka pendapatan daerah pada tahun 2017 – 2022 diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah rata-rata sebesar 84,62-89,90 persen.

Tabel VII.2

Prediksi Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD %
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	2.251.024.652.420,48	629.136.457.212,39	27,94
2018	2.556.977.711.924,35	787.235.420.038,83	30,78
2019	2.762.433.155.880,37	790.139.435.584,04	28,60
2020	2.874.236.165.757,38	850.307.137.560,93	29,58
2021	2.940.990.420.387,71	907.314.557.672,77	30,85
2022	3.007.313.316.965,83	964.321.977.782,61	32,0

Sumber :BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Prediksi Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2017-2022 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 6,05 persen. Sedangkan untuk pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara bertahap rata-rata sebesar 9,22 persen pertahun, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil. Demikian juga dengan kontribusi

retribusi daerah terhadap PAD, dengan asumsi tumbuh rata-rata sebesar 29,98 persen.

Tabel VII.3
Realisasi dan Prediksi PAD dan Retribusi Daerah
Provinsi Kep Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Tahun	PAD	Retribusi Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	709.832.181.818,48	5.434.540.818,00	0,77
2018	850.441.774.831,35	7.613.352.047,00	0,90
2019	884.562.215.880,37	9.315.527.150,00	1,05
2020	963.634.368.637,38	16.194.191.546,00	1,68
2021	1.030.388.623.267,71	17.333.655.676,17	1,68
2022	1.096.711.519.845,83	18.473.119.806,34	1,68

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dalam era otonomi daerah, proporsi belanja daerah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut. Diperkirakan dalam periode 2017–2022, kebutuhan belanja daerah akan mengalami kenaikan sebesar 9–15 persen. Hal ini disebabkan harapan masyarakat Bangka Belitung terhadap keseimbangan pembangunan antara desa dan kota serta mendukung pencapaian pembangunan nasional 2017-2022 dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional (NAWACITA). Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyampaikan Visi dan Misi Pembangunan yang merupakan *dedicated program* sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung. Untuk itu, maka proporsi belanja langsung dan tidak langsung dalam periode 2017-2022 diupayakan sebesar 60-65 persen dan 35-40 persen.

Tabel VII.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

TAHUN	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)
2017	2.359.078.163.818,47
2018	2.364.345.563.586,80
2019	3.064.703.819.549,99
2020	3.062.554.203.541,42
2021	2.810.096.306.561,47
2022	2.967.325.392.508,68

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Kondisi pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun Tahun 2017-2022 dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran, sedangkan sisanya untuk melakukan investasi.

Untuk realisasi sisa lebih perhitungan anggaran pemerintah daerah, dengan kurun waktu yang sama pada Tahun 2017-2022, gambarannya seperti terlihat pada Tabel VII.5.

Tabel VII.5
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Lalu (SILPA) pada APBD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Tahun	Realisasi
(1)	(2)
2018	86.078.107.369,51
2019	0
2020	0
2021	0
2022	0
Jumlah	86.078.107.369,51

Sumber : BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

7.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Jika memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada, maka merupakan modal pemerintah daerah untuk membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah serta melaksanakan amanat pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan

dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel VII.6 berikut:

Tabel VII.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan	2.386.297.015.485,16	2.487.065.640.565,87	2.709.871.336.952,00	2.874.236.165.757,38	3.036.882.549.181,45	3.199.528.932.605,53
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0	0				
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran (defisit)	(212.692.026.730,06)	(109.638.515.332,24)	(212.150.362.880,72)	155.590.452.215,95	278.351.278.531,28	401.112.104.846,62
	Total penerimaan	2.173.604.988.755,10	2.377.427.125.233,63	2.497.720.974.071,28	3.029.826.617.973,33	3.315.233.827.712,73	3.600.641.037.452,15
	Dikurangi						
4	Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.847.505.552.264,82	1.840.783.755.975,91	2.136.400.788.419	2.187.020.028.675	2.346.143.228.447,44	2.412.897.483.077,77
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	326.099.436.490,28	536.643.369.257,72	361.320.185.652,56	842.806.589.298,33	969.090.599.265,29	1.187.743.554.374,38

Sumber: BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang terus bertambah hingga Tahun 2022, demikian juga dengan proyeksi jumlah pengeluaran terus meningkat, maka terdapat sejumlah pertimbangan alokasi belanja ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu pengetatan dalam memilah program dan kegiatan sesuai urutan prioritasnya.
2. Perlunya peningkatan keperan sertaan sektor swasta dalam pendanaan pembangunan, baik melalui skenario kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *corporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kepulauan Bangka Belitung;
3. Reorganisasi struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dengan posisi dan kedudukan pemerintahan provinsi yang lebih difokuskan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada skala regional dan lintas kabupaten/kota. Dengan reorganisasi ini, akan diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang makin ahli dengan penguatan jabatan fungsional di berbagai lini.

Adapun rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel VII.7.

Tabel VII.7
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

No	Uraian	Proyeksi				
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.487.065.640.565,87	2.709.871.336.952,00	2.874.236.165.757,38	3.036.882.549.181,45	3.199.528.932.605,53
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja Langsung	1.135.511.218.578,25	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	1.448.857.028.490,84	1.426.618.916.832,58
II.b	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	1.135.511.218.578,25	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	1.448.857.028.490,84	1.426.618.916.832,58
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	1.351.554.421.987,62	1.312.914.999.180,00	1.495.509.970.750,38	1.588.025.520.690,61	1.772.910.015.772,95
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.a	Belanja Tidak Langsung	705.272.537.397,66	776.087.070.545,72	808.293.833.668,00	897.286.199.956,00	986.278.566.245,19
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	705.272.537.397,66	776.087.070.545,72	808.293.833.668,00	897.286.199.956,00	986.278.566.245,19
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	646.281.884.589,96	536.827.928.634,28	687.216.137.082,38	690.739.320.734,61	786.631.449.527,76

Sumber : Proyeksi dan Perhitungan Bakuda, 2016

Selanjutnya Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022, digambarkan seperti terlihat pada Tabel VII.8.

Tabel VII.8
Realisasi dan Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)			Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.762.433.155.880,00	2.874.236.165.757,38	0	0	10.444.671.685.982,20
1.1	Pendapatan asli daerah	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	884.562.215.880,37	963.634.368.637,38	0	0	2.558.028.766.336,23
1.1.1	Pajak daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	790.139.435.584,04	850.307.137.560,93	0	0	3.056.818.450.396,19
1.1.2	Retribusi daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	9.315.527.150,00	16.194.191.546,00	0	0	38.557.611.561,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekeyasaan daerah yang dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0	0	21.420.509.718,93
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	79.607.253.146,33	91.633.039.530,45	0	0	291.673.969.491,46
1.2	Dana Perimbangan	1.539.960.002.500	1.694.218.759.243,00	1.766.282.638.000,00	1.766.183.450.000,00	0	0	6.763.926.293.532,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	120.836.218.678,00	215.555.879.603,00	228.805.440.000	140.897.249.000,00	0	0	706.094.787.281,00
1.2.2	Dana alokasi umum	980.297.314.000,00	1.018.435.174.809,00	1.046.862.622.000,00	1.052.377.716.000,00	0	0	4.097.972.826.809,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	438.826.469.824,00	460.227.704.831,00	490.614.576.000,00	572.908.485.000,00	0	0	1.962.577.235.
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1.232.468.100,00	12.317.177.850,00	111.588.302.000,00	144.418.347.120,00	0	0	269.556.295.070,00
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	0	0	0	0	0	0	0
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0	0	0	0	0
1.3.7	Pendapatan lainnya	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pendapatan	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.762.433.155.880,37	2.874.236.165.757,38	0	0	10.444.671.685.982,60

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)			Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	BELANJA DAERAH	2.359.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80	3.064.703.819.550,99	2.718.645.713.541,43	0	0	10.506.773.260.496,70
2.1.1	Belanja pegawai	620.836.142.868,21	659.760.332.587,62	831.673.001.025,99	808.293.833.668,00	0	0	2.920.563.300.149,82
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	812.500.000,00	0	3.000.000.000,00	0	0	3.812.500.000,00
2.1.4	Belanja hibah	254.263.301.000,00	267.958.447.520,00	289.082.219.060,00	114.974.840.000,00	0	0	926.278.807.580,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	700.000.000	479.075.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0	0	2.679.075.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	351.012.561.851,05	261.064.334.164,64	446.568.577.113,00	350.006.099.384,43	0	0	1.408.651.572.513,12
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	102.528.477.024,00	170.854.282.754,76	95.095.479.172,00	57.894.745.482,00	0	0	426.372.984.432,76
2.1.8	Belanja tidak terduga	718.546.898,00	59.757.300,00	4.578.205.407,00	5.000.000.000,00	0	0	10.356.509.605,00
2.2	Belanja langsung	1.029.019.134.177,21	1.004.169.344.259,78	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	0	0	4.808.871.011.215,69
2.2.1	Belanja pegawai	143.373.444.944,00	36.915.135.524,00	68.572.393.000,00	224.263.920.234,57	0	0	473.134.893.702,57
2.2.2	Belanja barang dan jasa	517.435.756.892,24	651.856.375.641,14	850.980.385.728,00	778.337.336.149,04	0	0	2.798.609.854.410,42
2.2.3	Belanja Modal	368.209.932.340,97	315.397.833.094,64	477.403.559.044,00	376.114.938.623,39	0	0	1.537.126.263.103,00
	Jumlah belanja	2.359.078.163.818,47	2.364.345.563.586,80	3.064.703.819.549,99	2.718.645.713.541,43	0	0	10.506.773.260.496,70
	Surplus/(defisit)	-108.053.511.397,99	192.632.148.337,55	-302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	-62.101.574.514,11
	Penerimaan pembiayaan			302.270.663.669,62				
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	108.053.511.397,99	192.632.148.337,55	302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	758,546.775.621,11
	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0

No	Uraian	Realisasi (Rp)			Proyeksi (Rp)			Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0
	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Pembentukan dana cadangan	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah penerimaan pembayaran	108.053.511.397,99	192.632.148.337,55	302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	758,546.775.621,11
	Penyertaan modal (investasi) daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Pembayaran pokok utang	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah pembiayaan netto	108.053.511.397,99	109.638.515.332,07	302.270.663.669,62	155.590.452.215,95	0	0	758,546.775.621,11
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0	0	0	0	0

Tabel VII.9
Realisasi dan Proyeksi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

No	Uraian	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.883.443.678.214,87	2.892.240.376.817,39	5.775.684.055.032,26
1.1	Pendapatan asli daerah	972.841.881.093,87	981.638.579.696,39	1.954.480.460.790,26
1.1.1	Pajak daerah	850.483.494.524,53	851.249.037.634,17	1.701.732.532.158,70
1.1.2	Retribusi daerah	17.333.655.676,17	18.473.119.806,34	35.806.775.482,51
1.1.3	Hasil pengelolaan kekeyaaan daerah yang dipisahkan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	11.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	99.524.730.893,17	106.416.422.255,88	205.941.153.149,05
1.2	Dana Perimbangan	1.766.183.450.000,00	1.766.183.450.000,00	3.532.366.900.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	140.897.249.000,00	140.897.249.000	281.794.498.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.052.377.716.000,00	1.052.377.716.000	2.104.755.432.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	572.908.485.000,00	572.908.485.000	1.145.816.970.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	144.418.347.121,00	144.418.347.121,00	288.836.694.242,00
1.3.1	Hibah	0	0	0
1.3.2	Dana darurat	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	0	0	0
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0	0	0
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	0	0	0
1.3.6	Sumbangan pihak ketiga	0	0	0
1.3.7	Pendapatan lainnya	0	0	0
	Jumlah pendapatan	2.883.443.678.214,87	2.892.240.376.817,39	5.775.684.055.032,26
2	BELANJA DAERAH	2.936.443.678.214,87	2.976.240.376.817,39	5.912.684.055.032,26

No	Uraian	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
2.1	Belanja Operasi	2.169.841.203.116,21	2.236.405.041.664,90	4.406.246.244.781,11
2.1.1	Belanja Pegawai	1.153.277.414.102,35	1.212.995.672.596,78	2.366.273.086.699,13
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	813.392.918.981,29	820.143.421.226,94	1.633.536.340.208,23
2.1.3	Belanja Bunga	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	6.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	199.420.870.032,57	199.515.947.841,18	398.936.817.873,75
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00
2.2	Belanja Modal	379.472.895.363,80	348.685.449.106	728.158.344.469,80
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	382.129.579.734,86	386.149.886.046,88	768.279.465.781,74
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	249.875.788.588,53	253.805.774.975,90	503.681.563.564,43
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	132.253.791.146,33	132.344.111.070,98	264.597.902.217,31
	Jumlah Belanja daerah	2.936.443.678.214,87	2.976.240.376.817,39	5.912.684.055.032,26
	Surplus/(defisit)	-53.000.000.000,00	-84.000.000.000,00	-137.000.000.000,00
	Penerimaan pembiayaan	0	0	
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	53.000.000.000,00	84.000.000.000,00	137.000.000.000,00
	Pencairan dana cadangan	0	0	0
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0
	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0
	Penggunaan Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	0	0	0
	Pencairan dana cadangan	0	0	0

No	Uraian	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	0
	Penerimaan piutang daerah	0	0	0
	Pembentukan dana cadangan	0	0	0
	Jumlah penerimaan pembayaran	0	0	0
	Penyertaan modal (investasi) daerah	0	0	0
	Pembayaran pokok utang	0	0	0
	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	0	0	0
	Jumlah pembiayaan netto	53.000.000.000,00	84.000.000.000,00	137.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0	0	0

Sumber : Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Kebijakan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung tahun anggaran 2017-2022 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, ekonomis, efisien dan efektif, yaitu:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung *dedicated program* Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka mendukung program prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
3. Belanja daerah dialokasikan dalam rangka pelaksanaan urusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil risiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
7. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, peningkatan akses terhadap pendidikan serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
9. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.

10. Pengembangan sektor pariwisata terutama pada daerah-daerah tujuan wisata, pemberdayaan masyarakat di daerah tujuan wisata, budaya dan olah raga dalam mendukung pengembangan pariwisata serta pemenuhan sarana prasarana keolah ragaan dalam mendukung pariwisata.
11. Penurunan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
12. Dalam mendukung pengembangan aktivitas pembangunan ekonomi di perdesaan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
13. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 30%, pengendalian bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
14. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
15. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan.
16. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
 - d. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- e. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah;
- f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi provinsi yang bersifat khusus dari Provinsi. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota maupun kecamatan/kelurahan/Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu mendukung keseimbangan pembangunan desa dan kota. Secara khusus belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan melalui Program Gerakan Pembangunan Memajukan Desa (GERBANG MASA)

Kemudian dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005. Seiring dengan perubahan peraturan tersebut maka, uraian dalam postur keuangan daerah berubah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan daerah yang baru seperti yang tertera dalam tabel VII.9. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 terdapat perubahan dalam uraian belanja daerah. Perubahan uraian tersebut yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Uraian perubahan tersebut untuk mengganti uraian pada Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 yaitu belanja langsung dan tidak langsung.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bunga dan belanja subsidi dimasukkan dalam belanja operasi. Untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan dimasukkan dalam belanja transfer. Sedangkan untuk belanja modal dan belanja tidak terduga menjadi uraian belanja sendiri.

Dalam melaksanakan program Perangkat Daerah kita senantiasa mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian maka program yang disusun memberi keyakinan akan dapat dibiayai sehingga mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya gambaran kerangka pendanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel VII.9.

Tabel VII.10
Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas Riil Keuangan					
	BELANJA					
	Belanja Tidak Langsung	1.360.176.219.327,02	1.667.747.481.777,99	1.339.919.518.534,43	1.591.417.712.871,27	1.680.694.400.133,25
	Belanja Pegawai	659.760.322.587,62	831.673.001.025,99	808.293.833.668,00	897.286.199.956,60	986.278.566.245,19
	Belanja Bunga	0,00	0,00			
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Belanja Hibah	267.958.447.520,00	289.082.219.060,00	114.974.840.000,00	233.487.690.667,14	233.582.464.324,93
	Belanja Bantuan Sosial	479.075.000,00	750.000.000,00	750.000.000	750.000.000	750.000.000
	Belanja Bagi Hasil	261.064.334.164,64	446.568.577.113,00	350.006.099.384,43	297.047.279.497,58	297.142.053.155,38
	Belanja Bantuan Keuangan	170.854.282.754,76	95.095.479.172,00	57.894.745.482,00	154.846.542.749,95	154.941.316.407,75
	Belanja Tidak Terduga	59.757.300,00	4.578.205.407,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000	5.000.000.000
	Belanja Langsung	1.004.169.344.259,78	1.396.956.337.772,00	1.378.726.195.007,00	1.448.857.028.490,84	1.426.618.916.832,58
	Belanja Pegawai	36.915.135.524,00	68.572.393.000,00	224.273.920.234,57	255.991.214.145,76	257.790.046.500,03
	Belanja Modal	651.856.375.641,14	850.980.385.728,00	778.337.336.149,04	813.392.918.981,29	820.143.421.226,94
	Belanja Barang dan Jasa	315.397.833.094,64	477.403.559.044,00	376.114.938.623,39	379.472.895.363,80	348.685.449.105,61

Sumber : Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel VII.11
Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kapabilitas Riil/Belanja	Proyeksi		Jumlah
		2021	2022	
1	2	3	4	5
	Kapabilitas riil keuangan			
	BELANJA			
2.1	Belanja Operasi	1.390.515.104.769,50	1.481.401.077.070,15	2.871.916.181.839,65
2.1.1	Belanja Pegawai	1.153.277.414.102,36	1.244.068.612.745,22	2.397.346.026.847,58
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	379.472.895.363,80	348.685.449.105,61	728.158.344.469,41
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	3.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	233.487.690.667,14	233.582.464.324,93	467.070.154.992,07
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	750.000.000	750.000.000	1.500.000.000,00
2.2	Belanja Modal	813.392.918.981,29	820.143.421.226,94	1.633.536.340.208,23
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	451.893.822.247,53	452.083.369.563,13	903.977.191.810,66
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	297.047.279.497,58	297.142.053.155,38	594.189.332.652,96
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	154.846.542.749,95	154.941.316.407,75	309.787.859.157,70

Sumber : Bakeuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Tabel VII.11 merupakan penyusunan kapasitas riil pembangunan daerah berdasarkan uraian belanja yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah. Menurut Kementerian Dalam Negeri, Kapasitas riil ini digunakan dalam melakukan pembiayaan yang dialokasikan untuk melakukan pembiayaan prioritas 1, 2 dan 3. Pada Prioritas 1 pembiayaan dilakukan pada prioritas yang berkaitan dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas pertama dan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah seperti bansos, tambahan penghasilan dan belanja hibah serta prioritas 2 merupakan pembiayaan kegiatan prioritas.

7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi program prioritas untuk perencanaan strategis yaitu untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah serta program prioritas untuk perencanaan operasional yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Sebagaimana telah dirumuskan pada Bab VI, indikasi rencana program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terdiri dari 45 program pembangunan daerah yang dirumpunkan kedalam 24 Urusan Wajib, 6 Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan program prioritas dibutuhkan sejumlah dana sehingga disusunlah pagu indikatif yang penghitungannya berdasarkan pendekatan prioritas program. Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya. Namun demikian, pagu indikatif yang dicantumkan dalam Tabel VII.1 hanya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaanselengkapanya disajikan padaTabel VII.10.

Tabel VII.10
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN WAJIB																
TERKAIT PELAYANAN DASAR																
PENDIDIKAN																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Pendidikan	Nilai 4	Nilai 4	19.577.236.000	Nilai 4	22.951.669.825	Nilai 5	43.615.598.300	Nilai 5	36.980.000.000	Nilai 5	37.500.000.000	Nilai 5	160.624.504.125	DINDIK
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Pendidikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Pendidikan	100%	100%	12.449.061.000	0%	29.221.004.500	100%	37.859.645.000	100%	21.315.000.000	100%	27.700.000.000	80%	128.544.710.500	DINDIK
	Rata-rata nilai UN SMA	Pendidikan	63 poin	63		6,5		6,8		7		7,3		7,3		DINDIK
	APK SMA Perempuan	Pendidikan	39,25%	39,25		42,44								46,16		DINDIK
	APK SMA,	Pendidikan	35,29%	35,29		38,88		40,63		43,43		43,94		43,94		DINDIK
	APK SMA Laki-Laki	Pendidikan	31,55%	31,55		35,52								41,85		DINDIK
	Persentase SMA terakreditasi A	Pendidikan	37,88%	37,88		42,42		50		56,06		60,61		60,61		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-	Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Pendidikan	0%	0	23.612.491.000	50	44.836.815.424	50	33.821.936.500	100	44.400.000.000	100	40.700.000.000	100	187.371.242.924	DINDIK
	Persentase SMK dengan program keahlian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang memiliki Akreditasi A	Pendidikan	100%	100		100		100		100		100		100		DINDIK
	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi minimal A	Pendidikan	100%	100		100		100		100		100		100		DINDIK
	APK SMK	Pendidikan	34,98%	34,98		38,38		40,63		44,32		48,62		48,62		DINDIK
	APK SMK Perempuan	Pendidikan	33,72%	33,72		37,44								49,07		DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	APK SMK Laki-laki	Pendidikan	36,17%	36,17		39,27								48,19		DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terkreditasi A	Pendidikan	100%	100		100		100		100		100		100		DINDIK
	Persentase SMK Kelautan dan perikanan Terkreditasi A	Pendidikan	50%	50		100		100		100		100		100		DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Pendidikan	33,33%	33,33		33,33		66,66		66,66		100		100		DINDIK
	Rata-rata nilai UN SMK	Pendidikan	64 poin	6,4		6,5		6,7		6,8		7		7		DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Pendidikan	0%	0		0		100		100		100		100		DINDIK
	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal	Pendidikan	100%	100		100		100		100		100		100		DINDIK
	Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Pendidikan	50%	50		100		100		100		100		100		DINDIK
	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Pendidikan	100%	100		0		100		100		100		80		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-	APK SLB	Pendidikan	26,21%	26,21	9.359.178.000	29,47	5.902.154.500	29,47	12.853.388.010		15.200.000.000		17.500.000.000		60.814.720.510	DINDIK
	Persentase SLB terakreditasi A	Pendidikan	30%	30		50		80		90		100		100		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4,	Pendidikan	95%	95	3.587.971.904	97	2.615.988.343	100	16.601.873.000	100	19.500.000.000	100	24.000.000.000	100	66.305.833.247	DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-																
	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	Pendidikan	36%	36		40		45		50		60		60		DINDIK
	Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	Pendidikan	85%	85		90		95		100		100		100		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	Pendidikan	100	100	65.476.087.397	100	94.786.811.800	100	66.448.122.000	100	75.885.381.427	100	94.989.211.800	100	397.585.614.424	DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Pendidikan	76,61%	76,61	34.452.540.000	79,29	36.315.130.000	81,97	41.916.781.840		49.368.600.000		49.368.600.000		211.421.651.840	DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%		87,75		92,56		92,56		DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas	Pendidikan						68 poin		7		7,3		7,3		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	Pendidikan	76,61%	76,61	13.735.620.000	79,29	14.278.363.000	81,97	16.976.523.360		20.014.400.000		20.014.400.000		85.019.306.360	DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%		87,75		92,56		92,56		DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir,	Pendidikan						68		7		7,3		7,3		DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas							poin								
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Pendidikan	76,61%	76,61	26.921.510.000	79,29	30.412.850.000	81,97	33.343.240.000		38.832.200.000		38.832.200.000		168.342.000.000	DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%		87,75		92,56		92,56		DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas	Pendidikan						68 poin		7		7,3		7,3		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	Pendidikan	76,61%	76,61	23.035.240.000	79,29	23.494.749.500	81,97	30.883.974.040		46.532.200.000		49.032.200.000		172.978.363.540	DINDIK
	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%		87,75		92,56		92,56		DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas	Pendidikan						68 poin		7		7,3		7,3		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Tengah	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%	30.883.974.040	87,75	46.532.200.000	92,56	49.032.200.000	92,56	126.448.374.040	DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas	Pendidikan						68 poin		7		7,3		7,3		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK
																DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%	30.000.000.000	87,75	31.000.000.000	92,56	33.000.000.000	92,56	94.000.000.000	DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas	Pendidikan						68 poin		7		7,3		7,3		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK
																DINDIK
Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Selatan	APK Pendidikan Menengah di Cabang Dinas	Pendidikan						81,26%	30.000.000.000	87,75	31.000.000.000	92,56	33.000.000.000	92,56	94.000.000.000	DINDIK
	APK Pendidikan khusus di Cabang Dinas	Pendidikan						29,47%		32,74		36		36		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di Cabang Dinas	Pendidikan						68 poin		7		7,3		7,3		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan						60 orang		60		60		180		DINDIK
		Pendidikan														
Program Penunjang Urusan	Nilai Sakip PD (pakai angka)	Pendidikan								A	54.728.700	A	54.728.700	A	99.517.400.0	DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemerintah Daerah											.000		.000		00	
																DINDIK
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA	Pendidikan								43,43		43,94			409.631.300.000	DINDIK
	APK SMK	Pendidikan								44,32		48,62		43,94		DINDIK
	APK PENDIDIKAN KHUSUS	Pendidikan								32,74		36		48,62		DINDIK
	jumlah siswa SMA berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	Pendidikan								7	4.500.000.000	10	6.000.000.000	36		DINDIK
	jumlah siswa SMK berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	Pendidikan								7	3.500.000.000	10	5.000.000.000	4		DINDIK
	jumlah siswa PK berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	Pendidikan								3	1.500.000.000	5	1.500.000.000	22		DINDIK
	Jumlah siswa jenjang SD dan SMP berprestasi di Tingkat nasional/internasional	Pendidikan								7	6.000.000.000	10	6.000.000.000	6		DINDIK
	jumlah siswa/mahasiswa yang menerima beasiswa	Pendidikan								1200	13.000.000.000	1200	13.500.000.000	22		DINDIK
	Nilai rata-rata UK GTK	Pendidikan								80	4.450.000.000	90	4.750.000.000	4		DINDIK
	Persentase GTK Bersertifikasi	Pendidikan								50	800.000.000	60	1.000.000.000	9		DINDIK
	Jumlah GTK yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	Pendidikan								7	1.000.000.000	10	1.000.000.000	90		DINDIK
	APK PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI CABDIN	Pendidikan								87,75	43.701.300.000	92,56	53.702.300.000	60		DINDIK
	rata-rata nilai ujian akhir, UK GTK SMA, SMK, SLB di CABDIN	Pendidikan								6,8	16.436.000.000	7	49.400.000.000	22		DINDIK
	Jumlah siswa SMA/SMK/PK dan GTK yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Pendidikan								22	9.350.000.000	25	13.700.000.000	92,56		DINDIK
	Persentase Sekolah	Pendidikan								100		100		7		DINDIK

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	penerima BOS															
	Persentase Sekolah penerima BOS	Pendidikan								22		25		25		DINDIK
		Pendidikan								100		100		100		DINDIK
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kebijakan Kurikulum yang dihasilkan	Pendidikan								3	4.500.000.000	3	4.500.000.000	9	17.592.518.000	DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah kebijakan GTK yang dihasilkan	Pendidikan								1	750.000.000	1	1.000.000.000	3	1.950.000.000	DINDIK
		Pendidikan														DINDIK
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah kebijakan perizinan pendidikan yang dihasilkan	Pendidikan								1	20.000.000	1	20.000.000	6	90.000.000	DINDIK
Kesehatan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan Balai Labkes	Kesehatan	-	70,51 persen	4.307.593.119	75 persen	9.011.485.472	80 persen	6.068.000.000					80 persen	19.387.078.591	Dinas Kesehatan
	Predikat (nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi	Kesehatan	67,98	75,55	347.440.480	80	114.210.000	90	660.000.000					90	1.121.650.480	Dinas Kesehatan
Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun	Kesehatan	60 persen	85,71 persen	366.004.180	80 persen	1.545.745.000	90 persen	2.026.000.000					90 persen	3.937.749.180	Dinas Kesehatan
	Angka kematian ibu per kelahiran hidup	Kesehatan	24/26021	44 / KH	2.693.157.280	22 / KH	3.201.990.000	21 / KH	1.695.000.000					21 / KH	7.590.147.280	Dinas Kesehatan
	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Kesehatan	7,22 per 1000 KH	6,31 per 1000 KH	672.472.000	7,18 per 1000 KH	465.240.700	7,16 per 1000 KH	1.324.000.000					7,16 per 1000 KH	2.461.712.700	Dinas Kesehatan
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen)	Kesehatan	14,40 persen	2,25 persen	1.219.679.480	14,30 persen	1.566.060.000	14,25 persen	2.274.000.000					14,25 persen	5.059.739.480	Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	Kesehatan	76,98 persen	85,98 persen	500.758.630	81,96 persen	364.096.000	84,46 persen	1.393.000.000					84,46 persen	2.257.854.630	Dinas Kesehatan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	Kesehatan	60 persen	100 persen	119.297.000	65 persen	54.099.600	70 persen	318.000.000					70 persen	491.396.600	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kabupaten/ Kota dengan angka	Kesehatan	57,14 persen	69,08 persen	188.353.800	85,70 persen	146.035.000	85,70 persen	272.000.000					85,70 persen	606.388.800	Dinas Kesehatan
	keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif															
	(Success Rate) minimal 85%															
	Prevalensi HIV (persen) pada penduduk beresiko	Kesehatan	6,2 persen	0,43 persen	475.632.800	< 10 persen	398.400.000	< 10 persen	693.000.000					< 10 persen	1.567.032.800	Dinas Kesehatan
	Persentase Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria	Kesehatan	71,43 persen	71,43 persen	186.889.500	85,71 persen		100 persen	266.000.000					100 persen	452.889.500	Dinas Kesehatan
	persentase penanganan penyakit menular lainnya	Kesehatan	85 persen	99,99 persen	585.786.000	87 persen	377.765.000	88 persen	978.000.000					88 persen	1.941.551.000	Dinas Kesehatan
	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	Kesehatan	5,7 persen	26,74 persen	80.218.000	22,5 persen	78.040.000	27,5 persen	137.000.000					27,5 persen	295.258.000	Dinas Kesehatan
	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya	Kesehatan	80 persen	101,49 persen	187.199.000	86 persen	134.309.600	87 persen	276.000.000					87 persen	597.508.600	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota yang 20 % Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Kesehatan	70 persen	100 persen	416.796.100	80 persen	163.963.000	90 persen	843.000.000					90 persen	1.423.759.100	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	Kesehatan	70 persen	100 persen	1.823.233.400	80 persen	699.985.000	90 persen	2.922.000.000					90 persen	5.445.218.400	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	Kesehatan	13 kecamatan	47 kecamatan	858.387.800	38 kecamatan	3.009.150.648	47 kecamatan	1.786.000.000					47 kecamatan	5.653.538.448	Dinas Kesehatan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	Kesehatan	5 RSUD	10 RSUD	1.004.980.928	10 RSUD	1.065.645.000	10 RSUD	1.905.000.000					10 RSUD	3.975.625.928	Dinas Kesehatan
	Persentase kepesertaan JKN	Kesehatan	62,5 persen	78,52 persen	16.440.348.260	65,5 persen	16.535.207.000	67 persen	21.291.000.000					67 persen	54.266.555.260	Dinas Kesehatan
	Persentase PKM yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	Kesehatan	45 persen	80,95 persen	365.631.600	75 persen	41.675.000	85 persen	514.000.000					85 persen	921.306.600	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan	Kesehatan	2592	1718	1.595.149.200	4028	1.692.810.120	4746	2.023.000.000					4746	5.310.959.320	Dinas Kesehatan
	yang ditingkatkan															
	kompetensinya (kumulatif)															
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin essensial	Kesehatan	85 persen	100 persen	1.515.158.035	94 persen	522.013.000	96 persen	1.510.000.000					96 persen	3.547.171.035	Dinas Kesehatan
	Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	Kesehatan	88 persen	91,87 persen	187.617.000	91 persen	86.256.000	92 persen	276.000.000					92 persen	549.873.000	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	Kesehatan	1400	1990	1.178.586.700	2200	916.504.370	2600	1.291.000.000					2600	3.386.091.070	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD (pakai angka)	Kesehatan								90	28.388.000.000	90	28.529.940.000	90	76.305.018.591	DINKES
		Kesehatan														DINKES
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan Rumah Sakit									85,25%	25.666.720.000	85,25%	27.638.503.600	85,25%	27.638.503.600	DINKES
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan									72,15%	1.754.500.000	72,15%	1.857.500.000	72,15%	1.857.500.000	DINKES
		Kesehatan														DINKES
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan sarana dan alat kesehatan	Kesehatan								78,50%	50.000.000	78,50%	50.250.000	78,50%	50.250.000	DINKES

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab		
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Kesehatan								52,50%	661.406.000	52,50%	664.713.030	52,50%	664.713.030	DINKES		
																DINKES		
RSUD Dr(hc) Ir SOEKARNO																		
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Kesehatan	85	85	8.934.452.300	85	15.040.724.550	85	30.486.460.070						54.461.636.920	RSUP		
	Nilai sakiip perangkat daerah	Kesehatan	0	70		74		75										RSUP
	tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit	Kesehatan	0	40		50		55										RSUP
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat	Kesehatan	0	0	4.000.000.000	20	15.000.000.000	25	22.500.000.000						41.500.000.000	RSUP		
	persentase ketersediaan pelayanan di RS dari dana BLUD	Kesehatan	90	90		90		90										RSUP
Program Pelayanan Teknis Keperawatan	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan di RSUP	Kesehatan	50	70	3.311.070.600	100	1.053.966.200	100	854.512.000						5.219.548.800	RSUP		
	Lama hari rawat (Length of Stay)	Kesehatan	70	0		0		0										RSUP
Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis	indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan teknis medis dan penunjang medis	Kesehatan	65	70	14.933.913.000	100	28.855.275.000	100	14.162.545.000						57.951.733.000	RSUP		
	Persentase ketersediaan pelayanan di rumah sakit	Kesehatan	65	70		0		75										RSUP
	Persentase kesiapan sumber daya RS dalam penanggulangan bencana	Kesehatan	0	70		75		75										RSUP
	Persentase SDM yang sesuai standar rumah sakit kelas B	Kesehatan	0	0		0		0										RSUP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Nilai tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS)	Kesehatan	0	0		0		0								RSUP	
	Jumlah pegawai yang sudah mendapat latihan siaga bencana	Kesehatan	0	0		0		0									
Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	Kesehatan	80	80	90.341.756.154	85	71.325.431.300	85	14.289.785.000						175.956.972.454	RSUP	
	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit	Kesehatan	80	80		85		85									RSUP
	Persentase sarana prasarana yang tersedia sesuai standar kelas B	Kesehatan	0	0		0		0									RSUP
		Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana rumah sakit	Kesehatan	0		0		0		0							
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Kesehatan	85	0		0	0	0	0	90		90		87		RSUP	
Program Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan		Kesehatan		0		0	0	0	0							RSUP	
Program Peningkatan Promosi RS, Teknologi Informasi, Hukum dan Humas		Kesehatan		0		0	0	0	0							RSUP	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip PD (pakai angka)									92	16.201.543.772	92	16.366.933.767	92	16.366.933.767	RSUP	
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP	Persentase dana BLUD yang digunakan untuk kegiatan operasional dan	Kesehatan								90%	27.000.000.000	90%	32.400.000.000	90%	32.400.000.000	RSUP	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pelayanan kepada masyarakat															
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana yang Tersedia di Rumah Sakit	Kesehatan								82,75%	28.764.262.000	84,75%	28.948.229.600	87,75%	28.948.229.600	RSUP
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan								68,58%	14.842.471.500	70,25%	14.881.021.094	72,50%	14.881.021.094	RSUP
RSJ																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Kesehatan	80	80	12.474.155.000	85	26.454.226.400	90	36.227.496.140	95	33.471.582.300	100	35.664.566.780	90	144.292.026.620	RSJD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ	Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar	Kesehatan	70	75	7.500.000.000	80	8.000.000.000	85	8.500.000.000	90	9.000.000.000	95	9.500.000.000	85	42.500.000.000	RSJD
	Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD RSJ		0	75		80		85		90		95		85		
Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan	Kesehatan	85	90	9.038.778.283	90	11.821.089.000	95	8.566.730.000	95	9.843.500.000	95	10.022.500.000	93	49.292.597.283	RSJD
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA	50		42		42		42		42		42		
Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan jiwa	Kesehatan	50	55	1.047.190.000	60	1.297.309.000	65	1.182.000.000	90	1.557.000.000	75	1.533.000.000	65	6.616.499.000	RSJD
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan		75		90		95		100		100		100		

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	NAPZA															
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	Kesehatan	80	90	24.571.304.717	95	22.521.252.000	100	23.834.319.375	100	98.531.893.437	100	98.892.010.649	97	268.350.780.178	RSJD
		Kesehatan														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Kesehatan								92	5.840.000.000	92	5.840.000.000	92	5.840.000.000	RSJD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Kesehatan								80		80		80		RSJD
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RS	persentase Mutu pelayanan Kesehatan BLUD RS	Kesehatan								90	7.500.000.000	95	10.000.000.000	85	33.669.403.963	RSJD
		Kesehatan														RSJD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah	Kesehatan								95	10.437.050.000	95	11.405.372.000	93	22.533.967.190	RSJD
		Kesehatan														RSJD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan	Kesehatan								75,50%	5.228.022.180	77,50%	5.152.500.000	77,50%	10.380.522.180	RSJD
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	100%	4.120.049.254	100%	5.651.510.500	100%	6.447.611.550	100%	7.092.372.705	100%	7.801.609.976	100%	31.113.153.985	DPUPR
Program Pengembangan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.043	1.334	3.958.590.000	1.495	732.240.000	1.676	677.725.535	1.870	2.276.098.089	2.057	2.503.707.897	2.057	10.148.361.521	DPUPR
	Persentase Penyediaan Air Baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,09%	0,10%	326.220.000	0,10%	1.046.115.000	0,11%	1.255.338.000	0,11%	1.380.871.800	0,12%	1.518.958.980	0,12%	5.527.503.780	DPUPR
	persentase peningkatan	Pekerjaan	1,11%	0,02%	12.906.020.000	0,13%	15.462.427	0,20%	35.435.56	0,32%	45.995.672	0,50%	53.041.846	1,17%	162.841.527.	DPUPR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Umum dan Penataan Ruang					.200		0.499		.599		.869		166	
Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Ketaatan terhadap RTRW	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16,67	20	3.543.610.000	30	14.354.920.000	40	19.018.260.800	50	22.560.086.880	61	19.310.095.568	61	78.786.973.248	DPUPR
Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0%	20%	975.290.000	20%	680.279.000	20%	680.279.000	20%	1.307.185.000	20%	551.072.500	100,00%	4.194.105.500	DPUPR
Program Kebinamargaan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93%	83,66%	140.041.812.567	84,16%	269.756.518.200	84,66%	416.287.992.120	85,16%	450.284.993.712	85,56%	480.619.642.583	85,56%	1.756.990.959.182	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URURAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								100%	7.092.372.705	100%	7.801.609.976	100%	31.113.153.985	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URURAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								85,16%	1.284.993.712	85,56%	1.619.642.583	85,56%	1.756.990.959.182	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Rasio Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								1.870	2.276.098.089	2.057	2.503.707.897	2.057	10.148.361.521	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Penyediaan Air Baku	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								0,11%	1.380.871.800	0,12%	1.518.958.980	0,12%	5.527.503.780	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak	Pekerjaan Umum dan Penataan								0,32%	35.995.672.599	0,50%	38.041.846.869	1,17%	162.841.527.166	DPUPR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	air	Ruang														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								50	7.560.086.880	61	9.310.095.568	61	78.786.973.248	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								20%	1.307.185.000	20%	551.072.500	100,00%	4.194.105.500	DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								85,16%	130.284.993.712	85,56%	140.619.642.583	85,56%	270.904.636.295	DPUPR
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap kesekretariatan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100%	100%	2.789.365.000	100%	3.973.851.793	100%	4.170.131.672	100%	4.560.144.839	100%	4.620.438.193	100%	20.113.931.497	PERKIM
	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	76	76		78		82		85		88		88		PERKIM
Program Pembangunan Perumahan Rakyat	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22,48%	22,48%	11.759.260.000	22,51%	23.348.486.250	22,54%	25.697.259.188	22,56%	28.286.498.066	22,58%	31.134.587.776	22,58%	120.226.091.280	PERKIM
Program Penyediaan Infrastruktur Kawasan	Persentase Tersedianya Infrastruktur Kawasan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan	0%	0%	-	5%	640.000.000	10%	24.640.000.000	15%	24.690.000.000	20%	21.890.000.000	20%	71.860.000.000	PERKIM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pemukiman														
Program Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	Persentase berkurangnya lingkungan Permukiman Kumuh Provinsi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,01%	0,01%	1.491.250.000	0,00%	4.384.200.000	0,00%	6.203.230.000	0,00%	5.320.200.000	0,00%	3.448.100.000	0,00%	20.846.980.000	PERKIM
Program Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	68,14%	68,14%	1.473.000.000	68,52%	2.099.000.000	69,21%	4.059.000.000	69,90%	4.059.000.000	77,42%	8.509.000.000	77,42%	20.199.000.000	PERKIM
Program Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	83,56%	83,56%	900.000.000	83,65%	2.250.000.000	83,77%	2.250.000.000	83,85%	2.250.000.000	85%	3.250.000.000	85%	10.900.000.000	PERKIM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap kesekretariatan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								100%	3.560.144.839	100%	4.620.438.193	100%	16.167.828.879	PERKIM
	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								85		88		88		PERKIM
Program Pengembangan Perumahan	Persentase berkurangnya rumah tidak layak huni									22,56%	12.282.122.147	23%	13.134.587.776	23%	79.990.135.811	PERKIM
Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang terbangun di Permukiman															PERKIM
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rumah Tangga yang memilki akses terhadap layanan persampahan yang layak	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								15%	690.000.000	20%	2.890.000.000	20%	23.560.000.000	PERKIM
		Urusan Perumahan														PERKIM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rakyat dan Kawasan Pemukiman														
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								69,90%	4.059.000.000	77%	8.509.000.000	77%	20.199.000.000	PERKIM
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman														PERKIM
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								83,85%	2.250.000.000	85%	3.250.000.000	85%	10.900.000.000	PERKIM
		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman														PERKIM
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	100	5.602.000.000	100	8.158.033.650	100	9.195.628.132	100	9.195.628.132	100	9.195.628.132	100	41.346.918.046	Satpol PP
	Predikat SAKIP perangkat daerah	Bidang Ketentraman dan	B	B	110.000.000									B	110.000.000	Satpol PP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
	Nilai SAKIP perangkat daerah	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	63,38			69	57.000.000	77	143.396.000	78	143.396.000	80	143.396.000	80	487.188.000	Satpol PP
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	100	1.888.084.150	100	1.379.270.500	100	2.450.000.000						5.717.354.650	Satpol PP
Program Penegakan Perda dan Perkada	Cakupan penegakan perda	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100	100	301.522.600	100	161.065.000	100	320.000.000						782.587.600	Satpol PP
Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penyelenggaraan kanrantibnas	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12,4	1,51	91.341.500	5,74	286.521.000	2,72	794.891.000						1.172.753.500	Satpol PP
	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan	Bidang Ketentraman dan	6,05	4,23		6,05	201.806.300	6,05	515.210.000						938.275.300	Satpol PP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kebakara	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satpol PP	Persentase pembinaan dan pengembangan personil satpol pp	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32,46	1,62	317.113.000	16,23	245.256.000	16,23	475.000.000						1.037.369.000	Satpol PP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								78	141.091.000	80	141.091.000	80	282.182.000	SATPOL PP
	Survey kepuasan pelayanan internal (persentase)									90	8.902.258.000	95	9.902.258.000	95	39.804.516.000	SATPOL PP
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran tibumtranmas yang ditindak	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								100	2.658.387.000	100	2.708.387.000	100	5.366.774.000	SATPOL PP
	Persentase penegakkan pelanggaran Perda	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								100	309.809.880	100	389.809.880	100	699.619.760	SATPOL PP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Masyarakat														
	Persentase Satlinmas yang terlatih dalam penyelenggaraan kantrantibmas dan membantu penanganan bencana dan kebakaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								44,78	255.000.000	55,07	480.000.000	55,07	735.000.000	SATPOL PP
	Persentase personil Satpol PP yang berkualitas									83,75	302.924.000	87,5	313.424.000	87,5	616.348.000	SATPOL PP
Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase masyarakat dan aparatur yang memiliki kemampuan dalam pemadam kebakaran										70.000.000		975.000.000		1.045.000.000	SATPOL PP
		Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
Kesbangpol																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Lakip Badan Kesbangpol		75	75	226.512.737	80	424.740.000	82	479.688.000	84	542.625.600	85	614.850.720	85	2.288.417.057	Bakesbangpol
	Nilai kepuasan pelayanan sekretariat Badan Kesbangpol		100%	100	1.586.800.774	100	4.184.088.000	100	4.602.496.800	100	5.062.546.480	100	5.569.021.128	100	21.004.953.182	Bakesbangpol
Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	17	12	316.049.170	9	1.275.000.000	7	6.680.000.000		0		0	4	8.271.049.170	Bakesbangpol

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Masyarakat														
Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		0	-0		358.000.000	0	2.250.000.000						2.608.000.000	Bakesbangpol
	persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	3	1.063.837.150	2	2.334.000.000	1	5.750.000.000						9.147.837.150	Bakesbangpol
Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		25	130.993.950	35	724.000.000	45	1.050.000.000					65	1.904.993.950	Bakesbangpol
	Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		0	-40		77.000.000	50	2.080.000.000					70	2.157.000.000	Bakesbangpol
	pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan		50	43.261.960	500	303.000.000	0	1.450.000.000					1100	1.796.261.960	Bakesbangpol

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		n Masyarakat														
Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		7	242.566.000	7	983.000.000	7	1.125.000.000					7	2.350.566.000	Bakesbangpol
	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		40	215.054.600	50	555.000.000	60	2.065.000.000					80	2.835.054.600	Bakesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								90	2.233.202.347	90	2.470.603.393	90	4.703.805.740	BAKESBANG POL
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Jumlah Kasus Penistaan terhadap simbol - simbol Negara.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	4.000.000.000	BAKESBANG POL
		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan														BAKESBANG POL

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlindungan Masyarakat														
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	Indeks Kinerja Ormas	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									200.000.000		200.000.000		400.000.000	BAKESBANG POL
		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														BAKESBANG POL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Angka Kriminalitas Menurun	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								Menurun	500.000.000	Menurun	500.000.000	Menurun	1.000.000.000	BAKESBANG POL
		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														BAKESBANG POL
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase Ketidakhadiran Masyarakat dalam Pemilu/Pemilu Kada	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan								75,50%	700.000.000	76,52%	700.000.000	0,7652	1.400.000.000	BAKESBANG POL

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.		Perlindungan Masyarakat														
		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat														BAKESBANG POL
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Potensi Konflik Sosial Menurun.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								menurun	700.000.000	Menurun	852.932.906	Menurun	1.552.932.906	BAKESBANG POL
Sosial																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Sosial	100	20,45	2.796.430.000	11,36	5.040.990.000	22,73	5.190.990.000	22,73	5.340.990.000	22,73	5.340.990.000	100	23.710.390.000,00	Dinas Sosial
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah			10,64	778.543.000	19,15	1.078.130.000	23,4	1.690.000.000	23,4	1.690.000.000	23,4	1.690.000.000	100	6.926.673.000,00	Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase PPKS/PSKS yang tertangani kesejahteraan sosialnya	Sosial	100	32,21	10.696.967.500	32,76	3.592.465.000	32,92	4.675.200.000	1,06	2.427.000.000	1,06	2.427.000.000	100	23.818.632.500,00	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya	Sosial	100	22,99	246.146.000	24,89	1.385.870.000	24,89	1.500.000.000	13,25	600.000.000	13,97	600.000.000	100	4.332.016.000,00	Dinas Sosial
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			3,26	779.520.000	20	896.980.000	20	950.000.000	20	818.400.000	20	982.080.000	83,26	4.426.980.000,00	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang terehabilitasi	Sosial	100	10,17	380.695.000	20,47	2.188.820.000	20,49	2.228.600.000	22,4	1.800.000.000	26,65	1.900.000.000	100,17	8.498.115.000,00	Dinas Sosial

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kesejahteraan sosialnya															
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan	Sosial	100	5,18	817.471.000	6,34	1.669.652.000	19,3	2.032.250.000	34,04	2.046.323.000	35,41	2.063.823.000	100,27	8.629.519.000,00	Dinas Sosial
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase PPKS terehabilitasi kesejahteraan sosialnya melalui pelayanan teknis panti sosial	Panti Sosial Bina Serumpun	100	7,37	627.008.000	18,35	1.222.150.000	19,06	1.192.000.000	25,9	3.334.000.000	28,78	1.471.000.000	99,46	7.846.158.000,00	Panti Sosial Bina Serumpun
Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase PPKS terehabilitasi kesejahteraan sosialnya melalui Penyelenggaraan Panti Sosial	Panti Sosial Bina Laras Hijrah	100	16,18	1.236.490.000	17,63	2.120.000.000	23,12	1.450.000.000	17,34	1.570.000.000	17,34	1.430.000.000	91,62	7.806.490.000,00	Panti Sosial Bina Laras Hijrah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Survey kepuasan pelayanan internal	Sosial								1	4.429.611.712	1	4.629.611.712	1	4.629.611.712	DINAS SOSIAL
	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sosial								85	259.120.000	88	325.000.000	88	325.000.000	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS/PSKS yang terberdayakan	Sosial								75%	1.356.250.000	75%	1.475.000.000	75%	1.475.000.000	DINAS SOSIAL
																DINAS SOSIAL
		Sosial														DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terehabilitasi kesejahteraan sosialnya	Sosial								67%	1.375.000.000	67%	1.500.000.000	67%	1.500.000.000	DINAS SOSIAL
		Sosial														DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang terlindungi dan terjamin kesejahteraan sosialnya	Sosial								85%	2.452.000.000	85%	2.650.000.000	85%	2.650.000.000	DINAS SOSIAL
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Sosial								100%		100%		1		DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN	Persentase korban bencana	Sosial								100%	1.125.000.	100%	1.250.000.	1	1.250.000.00	DINAS

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BENCANA	yang terfasilitasi penanganan sosialnya										000		000		0	SOSIAL
Penanggulangan Bencana																
Penigkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	72	1.620.460.029	74	2.632.253.700	76		78		80		76		BPBD
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2	2		3		3		4		5		5		BPBD
Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		72	816.541.930,00	74	2.385.749.000,00	76	1.099.260.000					74	4.301.550.930	BPBD
Kedaruratan Dan Logistik / Peralatan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan Penangulangan Bencana	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		100	2.838.890.000,00	100	3.152.720.000,00	100	3.668.700.000					100	9.660.310.000	BPBD
Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Urusan Ketentraman, Ketertiban		75	262.925.000,00	75	401.193.500,00	80	474.215.000					76,6	1.138.333.500	BPBD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Umum dan Perlindungan Masyarakat														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah									100	2.487.138.806	100	2.568.230.766	85	5.055.369.572	BPBD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal									4		5		5		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (PB)	Trantibum Dan Linmas								14,29	1.027.750.000	14,29	1.030.000.000	14,29	2.057.750.000	BPBD
	Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)	IndikatorProgram 2 : Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)	IndikatorProgram 2 : Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)	IndikatorProgram 2 : Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)	IndikatorProgram 2 : Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)	IndikatorProgram 2 : Persentase Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota yang diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana (PB)				14,29	3.580.000.000	14,29	3.600.000.000	14,29	7.180.000.000	BPBD
	Persentase Pelayanan Kebencananaan di 7 Kabupaten/Kota Yang di Rehabilitasi Dan di Rekonstruksi	Trantibum Dan Linmas								14,29	450.000.000	14,29	660.000.000	14,29	1.110.000.000	BPBD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																
Ketenagakerjaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan		0	100	4.479.642.971		12.602.892.654									DISNAKER
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)		54,55	76											DISNAKER	
Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	Tenaga Kerja		30	639.601.650		2.634.995.000									DISNAKER
	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Tenaga Kerja		2											DISNAKER	
	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Tenaga Kerja		1,2											DISNAKER	
	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	Tenaga Kerja		1,6											DISNAKER	
	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibinasesuai standar	Tenaga Kerja		1,36											DISNAKER	
	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja	Tenaga Kerja		0											DISNAKER	
	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	Tenaga Kerja		0,5											DISNAKER	
	persentase penurunan kecelakaan kerja	Tenaga Kerja		0,34											DISNAKER	
	Program Pengembangan	Persentase peningkatan	Tenaga			0,05		261.341.331		3.086.909.						

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung gjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	Kerja					142									
	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	Tenaga Kerja	150000000													DISNAKER
	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Tenaga Kerja	17,14													DISNAKER
	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
	Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
	Persentase wanita Tuna sosial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	0													DISNAKER
Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaa	Tenaga Kerja	0													DISNAKER	
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	Tenaga Kerja		2,73	156.460.400		220.500.000									DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kerja																
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	Tenaga Kerja		0,14	1.495.500.000		9.250.000.000									DISNAKER
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi	Tenaga Kerja		0,001											DISNAKER	
	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	Tenaga Kerja		0,11											DISNAKER	
	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	Tenaga Kerja		0,14											DISNAKER	
	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi	Tenaga Kerja		0,25												DISNAKER
Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	Tenaga Kerja	0,02	0,02	183.705.000											DISNAKER
	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	Tenaga Kerja	0,12	0,12												DISNAKER
	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	Tenaga Kerja	0	0,05												DISNAKER
	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	Tenaga Kerja	0	0,05												DISNAKER
Penunjang Urusan Pemda	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Tenaga Kerja								80	3.245.850.000	80	3.465.850.000	80	3.465.850.000	DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	Tenaga Kerja								BB		BB		BB		DISNAKER
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen perencanaan makro ketenagakerjaan yang dikerjakan	Tenaga Kerja								4 Dok	1.682.155.981	4 Dok	1.753.748.364	4 Dok	3.435.904.345	DISNAKER
		Tenaga Kerja														DISNAKER
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan sektor pertanian yang dibina									72,50%	756.500.000	73,50%	500.000.000	73,50%	500.000.000	DISNAKER
	Persentase perusahaan sektor kelautan yang dibina									68,85%		69,85%		69,85%		DISNAKER
	Persentase perusahaan sektor pariwisata yang dibina									81,50%		83,00%		83,00%		DISNAKER
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	persentase penyelesaian kasus tenaga kerja									52%	875.000.000	52%	700.000.000	52%	700.000.000	DISNAKER
	persentase penurunan kecelakaan kerja									34,50%		34,50%		34,50%		DISNAKER
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi									42,50%	1.375.000.000		1.985.000.000		1.985.000.000	DISNAKER
	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing									175 juta		185 juta		185 juta		DISNAKER
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan									35,50%	1.452.500.000	38,50%	2.145.000.000	0,385	2.145.000.000	DISNAKER
		Tenaga Kerja														
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase kegiatan yang responsif gender	Pemberdayaan Perempuan			462.910.500		749.802.000		1.395.812.500		1.465.603.125		1.538.883.281			DP3ACSKB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		dan Perlindungan Anak														
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1.488.146.850		1.508.069.000		2.057.834.000		2.160.725.700		2.268.761.985			DP3ACSKB
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN ANAK	Rasio ketersediaan SDM Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah									92	1.820.193.092	92	2.728.202.747	92	4.548.395.839	DP3ACSKB
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								7,31	1.620.000.000	7,31	2.075.000.000	7,31	3.695.000.000	DP3ACSKB
	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan									8,25		8,35		8,35		DP3ACSKB
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD									3,61		3,64				DP3ACSKB
	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik									29,81		29,81		29,81		DP3ACSKB
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan								30	800.000.000	30	1.400.000.000	30	2.200.000.000	DP3ACSKB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		n Anak														
																DP3ACSKB
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								32,97	1.000.000.000	34,67	800.000.000	34,67	1.800.000.000	DP3ACSKB
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									600.000.000		660.000.000		1.260.000.000	DP3ACSKB
																DP3ACSKB
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								85,71	1.070.000.000	88,65	1.172.000.000	88,65	2.242.000.000	DP3ACSKB
Pangan																
PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Skor PPH Ketersediaan	Pangan	78,78	79,8	1.335.200.000	81,9	3.450.000.000	84	4.390.000.000	86	4.365.000.000	88	4.625.000.000	88	18.165.200.000	DINAS PANGAN
	persentase penduduk rawan pangan yang difasilitasi	Pangan		1		1,1		1,1		1,1		1,1		5,4		DINAS PANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Coefisien Varian Harga Pangan	Pangan		CV Beras ≤ 5%	855.447.455	CV Beras ≤ 5%	1.750.000.000	CV Beras ≤ 5%	1.845.000.000	CV Beras ≤ 5%	1.890.000.000	CV Beras ≤ 5%	2.070.000.000	CV Beras ≤ 5%	8.410.447.455	DINAS PANGAN
						CV Cabe≤ 25%		CV Cabe≤ 25%		CV Cabe≤ 25%		CV Cabe≤ 25%				
				CV Cabe≤ 35%		CV Daging Ayam 10%		CV Daging Ayam		CV Daging Ayam		CV Daging Ayam				

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab			
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
								10%		10%		10%		10%					
			CV Daging Ayam 10%																
	persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah	Pangan		2,5		2,7		2,8		2,9		3		13,6		DINAS PANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	Pangan	78	80	1.521.649.500	83	4.920.000.000	86	5.300.000.000	89	5.800.000.000	92	6.350.000.000	92	23.891.649.500	DINAS PANGAN			
	Peningkatan Skor PPH Konsumsi	Pangan	77,1	79		81		83		85		87		87					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD									90	2.050.000.000,00	90	2.330.000.000,00	90	4.380.000.000	DINAS PANGAN			
																DINAS PANGAN			
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Coefisien varian harga pangan (a. pokok/beras, b. hortikultura/cabe merah, c.hewani/ayam)									a. 5%, b. 25%, c. 10%	780.000.000,00	a. 5%, b. 25%, c. 10%	845.000.000,00	a. 5%, b. 25%, c. 10%	1.625.000.000	DINAS PANGAN			
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan a) Kelompok Pangan Padi-Padian, b) Kelompok Pangan Kacang-kacangan, c) Kelompok Pangan buah dan sayur									a)23,9; b) 9,9; c) 25,6	2.365.000.000,00	a) 24,3; b)10; c) 27	2.625.000.000,00	a) 24,3; b)10; c) 27	4.990.000.000	DINAS PANGAN			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah orang Tertanganinya masyarakat rawan pangan										1.380.000.000,00		1.645.000.000,00		3.025.000.000	DINAS PANGAN			
Pertanahan																			

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Lingkungan Hidup																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan				1.648.117.743		3.840.478.824									DLH
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)														DLH	
program pengendalian dan penaatan lingkungan hidup	Indikator : Persentase Konsentrasi parameter kualitas lingkungan	Lingkungan Hidup		2%	534.465.000	2%	412.579.000	2%	881.538.000	2%	925.614.900	2%	971.895.645	10%	3.726.092.545	DLH
program Peningkatan Layanan Teknis Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	Indikator : Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang terakreditasi	Lingkungan Hidup		49,18%	1.323.820.000	52,46%	779.161.376	55,74%	2.341.346.000	59,02%	2.458.413.300	62,30%	2.581.333.965	62,30%	9.484.074.641	DLH
program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indikator : Persentase instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terpenuhi	Lingkungan Hidup		75%	1.403.798.116	75%	670.431.300	75%	1.336.096.500	100%	1.402.901.325	100%	1.473.046.391	100%	6.286.273.632	DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indikator : Persentase Pengurangan Sampah	Lingkungan Hidup		18%	901.398.000	20%	975.105.000	22%	1.698.485.964	24%	1.783.410.262	26%	1.872.580.775	26%	7.230.980.002	DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Lingkungan Hidup														DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup								100%	1.402.901.325	100%	1.473.046.391	100%	6.286.273.632	DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup								2%	925.614.900	2%	971.895.645	10%	3.726.092.545	DLH
		Lingkungan Hidup														DLH

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Lingkungan Hidup														DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		Lingkungan Hidup														DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Lingkungan Hidup														DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Pengelolaan Persampahan		Lingkungan Hidup								24%	1.783.410.262	26%	1.872.580.775	26%	7.230.980.002	DLH
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Lingkungan Hidup								81	3.493.811.376	82	3.843.192.513	82	3.843.192.513	DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup								100%	1.402.901.325	100%	1.473.046.391	100%	6.286.273.632	DLH
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Konsentrasi parameter kualitas lingkungan dibawah baku mutu	Lingkungan Hidup								2%	925.614.900	2%	971.895.645	10%	3.726.092.545	DLH
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pertumbuhan Ketaatan Usaha/Kegiatan erhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup								110 Usahan dan/atau Kegiatan	350.000.000	120 Usahan dan/atau Kegiatan	400.000.000	120 Usaha dan/atau Kegiatan yang dibina	1.187.308.000	DLH

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														dan diawasi		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup								30%	725.000.000	40%	750.000.000	50%	775.000.000	DLH
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Nominasi Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup tingkat Provinsi									4 penghargaan	375.000.000	5 penghargaan	400.000.000	5 penghargaan	400.000.000	DLH
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	Lingkungan Hidup								17 Pengaduan Masyarakat	120.000.000	20 Pengaduan Masyarakat	150.000.000	89 Pengaduan Masyarakat	469.216.000	DLH
		Lingkungan Hidup														DLH
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pencapaian Rencana Pengelolaan Persampahan yang terlaksana	Lingkungan Hidup								24%	1.783.410.262	26%	1.872.580.775	26%	7.230.980.002	DLH
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		28,57%	1.818.862.562		1.914.966.000		398.066.350		417.969.668		438.868.151			DP3ACSKB
	Persentase PD yang mengadakan perjanjian kerjasama (PKS)	Kependudukan dan Pencatatan Sipil		9,37%												
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK,	Kependudukan dan Pencatatan								68,35%	1.200.000.000	70,25%	502.500.000	0,7025	1.702.500.000	DP3ACSKB

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	KTP, KIA)	Sipil														
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil														DP3ACSKB
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	Kependudukan dan Pencatatan Sipil								72,15%	775.000.000	72,15%	913.750.000	72,15%	1.688.750.000	DP3ACSKB
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil														DP3ACSKB
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan database kependudukan yang terintegrasi	Kependudukan dan Pencatatan Sipil								75,45%	900.000.000	75,45%	995.000.000	75,45%	1.895.000.000	DP3ACSKB
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil														DP3ACSKB
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	100	2.312.197.023	100	3.474.775.000	100	4.400.238.750	100	3.838.750.688	100	4.075.188.222	100	18101149683	DPMD
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3		3		3		3		3		3		DPMD
Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	Urusan Pemberdayaan	8,95	0,86	1.411.127.668	1,94	2.065.649.051	1,94	2.311.431.504	1,94	2.462.003.079	1,94	2.617.603.233	8,62	10867814535	DPMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Masyarakat dan Desa														
	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	286	21		21		21		21		21		105		DPMD
program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PKK aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,16	1,94	1.188.045.082	3,24	1.843.301.336	3,24	1.914.364.251	3,24	2.032.239.723	3,24	2.133.851.709	14,9	9111802101	DPMD
	Persentase Posyandu aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26,24	14,48		14,48		14,48		14,48		14,93		72,85		DPMD
	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31,91	6,38		8,51		10,64		12,77		14,89		53,19		DPMD
program Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat	Persentase KPM yang aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,16	1,94	1.188.045.082	3,24	1.843.301.336	3,24	1.914.364.251	3,24	2.032.239.723	3,24	2.133.851.709	14,9	9111802101	DPMD
	Persentase Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26,24	14,48		14,48		14,48		14,48		14,93		72,85		DPMD
	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	31,91	6,38		8,51		10,64		12,77		14,89		53,19		DPMD
Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang diintervensi	Urusan Pemberdayaan	0	0,65	1.107.901.157	0,65	1173296215	0,65	3.488.151.026	0,65	3.645.183.077	0,65	3.785.556.732	3,25	13200088207	DPMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Masyarakat dan Desa														
																DPMD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								85	3.838.750.688	85	4.075.188.222	85	4.075.188.222	DPMD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														DPMD
Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								1,94	2.462.003.079	1,94	2.617.603.233	8,62	10.867.814.535	DPMD
	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								21		21		105		DPMD
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								3,24	1.250.000.000	3,24	2.133.851.709	14,9	9.111.802.101	DPMD
	Persentase Posyandu aktif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								14,48		14,93		72,85		DPMD
	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa									12,77%		14,89%		53,19%		DPMD
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama Desa yang dilaksanakan									65,50%	1.300.000.000	67,50%	1.800.000.000	67,50%	2.700.000.000	DPMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana																
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Persentase Kampung KB	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		29,16%	1.230.249.350		997.365.818		680.169.000		714.177.450		749.886.323			DP3ACSKB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Dokumen pengendalian penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								2 Dokumen	175.000.000	8 dokumen	1.102.500.000	8 dokumen	1.277.500.000	DP3ACSKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	jumlah kab/kota yang dibina	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								7 kab/kota	300.000.000	7 kab/kota	1.155.000.000	7 kab/kota	1.455.000.000	DP3ACSKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	jumlah keluarga pra sejahtera	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								7 kab/kota	525.000.000	7 kab/kota	1.995.000.000	7 kab/kota	2.520.000.000	DP3ACSKB
Perhubungan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indikator 1 : Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1.338.807.303		7.105.804.618									
	Indikator 2 : Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Perhubunga n	75	22,3	8.124.431.500	24,5	12.931.264.130	25,7	24.197.177.489	26,47	25.401.258.417	28,47	27.535.401.500	28,47	105.693.885.190	DISHUB
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Perhubunga n		27,5	1.092.865.200	36,6	2.275.620.125	44	15.454.832.220	67	24.769.154.842	85	13.573.370.326	85	57.165.842.713	DISHUB
Program Peningkatan Pengendalian dan Operasional dan Kebandarudaraan	Prosentase Pemenuhan Prasarana Kebandarudaraan	Perhubunga n		10	1.674.985.000	10	8.909.200.000	20	3.195.695.000	-	-	-	-	40	13.779.880.000	DISHUB
	Persentase Angkutan umum yang laik jalan	Perhubunga n		14,22	253.684.000	14,1	433.660.000	13,85	818.660.000	-	-	-	-	42,17	1.506.004.000	DISHUB
Program Pengembangan Kebandarudaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara	Perhubunga n		10	1.674.985.000	10	11.150.316.829	20	5.909.885.000	20	5.557.400.000	35	3.967.400.000	95	28.259.986.829	DISHUB
Program Peningkatan Pengendalian dan Operasional	persentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas	Perhubunga n		2,61	-	2,61	718.660.000	2,61	2.036.410.000	2,61	1.728.322.500	2,61	2.055.030.000	13	6.989.855.000	DISHUB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip A	Perhubunga n								85	6.971.140.912	85	7.482.447.622	87	7.482.447.622	DISHUB
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubunga n								26,47	15.401.258.417	28,47	27.535.401.500	28,47	105.693.885.190	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Prosentase Pemenuhan Infrastruktur Pelayaran	Perhubunga n								67	8.769.154.842	85	13.573.370.326	85	57,165,842,713.00	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas bandara	Perhubunga n								20	5.557.400.000	35	3.967.400.000	95	28,259,986,829.00	DISHUB
		Perhubunga n														
Komunikasi dan Informatika																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap	Urusan Pemberday			3.813.483.160		2.564.045.204			4	4.825.721.930	4	4.985.250.000	4	4.985.250.000	kominfo

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pelayanan kesekretariatan	aan Masyarakat dan Desa														
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA = 6 A = 5 BB = 4 B = 3 CC = 2 C = 1)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								BB		BB		BB		kominfo
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	Urusan Komunikasi dan Informatika	-	9449%	3.029.205.000	95	5.858.380.000	95	9.333.636.456	95	9.800.318.279	97	10.290.334.193	97	38.311.873.928	kominfo
	Jumlah data/informasi pemerintah daerah	Urusan Komunikasi dan Informatika		5		5		5		6		6		6		kominfo
	Jumlah mitra yang terfasilitasi	Urusan Komunikasi dan Informatika		60		60		60		60		60		60		kominfo
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi	Urusan Komunikasi dan Informatika	-	94,14%	3.296.250.000	100	6.723.552.480	97	7.685.841.156	97	8.070.133.214	97	8.473.639.874	97	34.249.416.724	kominfo
	Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbbasis e-Government	Urusan Komunikasi dan Informatika		40		5		5		5		6		6		kominfo
	Kapasitas jaringan komunikasi data	Urusan Komunikasi dan Informatika		1		1		1		1		2		2		kominfo
	jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi	Urusan Komunikasi dan Informatika		0		0		0		0		0		0		kominfo
Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan	Urusan Komunikasi dan Informatika	-	92,97%	497.317.220	93	1.431.917.785	95	566.047.338	97	594.349.705	98	624.067.190	98	3.713.699.238	kominfo

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pengambilan kebijakan															
	Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	-			6		6		6		6		6		kominfo
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Urusan Komunikasi dan Informatika								90	4.825.721.930	90	4.985.250.000	90	4.985.250.000	kominfo
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal									80		80		80		kominfo
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyebarluasan informasi dan komunikasi pemerintahan yang terpublikasi	Urusan Komunikasi dan Informatika								95.00	9.800.318.279	97.00	10.290.334.193	97.00	38.311.873.928	kominfo
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	jumlah aplikasi informatika yang terkelola	Urusan Komunikasi dan Informatika								97.00	8.070.133.214	97.00	8.473.639.874	97.00	34.249.416.724	kominfo
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	3		3		4		4		5		5		DKUKM
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (Ket: angka sementara sebelum di konfirmasi ke kepala skpd)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	100	3.218.763.750	100	5.980.767.500,00	100	3.793.111.700	100	4.400.000.000	100	5.000.000.000	100	22.392.642.950	DKUKM
Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan	persentase pertumbuhan koperasi aktif	Urusan Koperasi,	0	15,5	614.307.840	15,5	1.218.276.500,00	15,5	500.000.000	15,5	2.590.000.000	15,5	3.490.000.000	15,5	8.412.584.340	DKUKM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab				
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
Pengawasan Koperasi		Usaha Kecil dan Menengah														DKUKM				
	persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	12,7				12,7				12,7					12,7		12,7	
	persentase peningkatan koperasi berkualitas	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	6,6				6,6				6,6					6,6		6,6	
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	persentase peningkatan volume usaha koperasi	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	10	605.011.630	10		11		11		12		12	10.757.815.130	DKUKM				
	persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	4		4		1.205.219.500,00		4		800.000.000		4		3.870.720.000	4	4.276.864.000	4	DKUKM
	persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	7		7		7		7		7		7		7	7	7	DKUKM	
Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	5	3.680.045.900	10		15		20		25		25	25.620.601.780	DKUKM				
	persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	15		15		2.784.850.000,00		15		3.055.705.880		15		7.500.000.000	15	8.600.000.000	15	DKUKM
	persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang	Urusan Koperasi,	0	4		4		4		4		4		4		4	4	4	DKUKM	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dikembangkan	Usaha Kecil dan Menengah														
	pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	20		20		20		20		20		20		
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	persentase SDM koperasi terlatih	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	185	4,13	2.907.202.350	10,32	5.819.903.000,00	10,32	2.053.244.000	12,38	4.420.000.000	14,49	4.700.000.000	14,49	19.900.349.350	DKUKM
	persentase SDM Usaha Kecil terlatih	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	541	0,68		1,07		1,12		1,16		1,23		1.052		DKUKM
Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0	71.830.100	0	281.266.000,00	0	850.444.000	0	1.720.000.000	0	1.885.000.000	0	4.808.540.100	DKUKM
	Pertumbuhan produk parekraf	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	10		10		10		10		10		10		DKUKM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								4	4.400.000.000	5	5.000.000.000	5	22.392.642.950	DKUKM
	survey kepuasan pelayanan internal	Usuran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								100		100		100		DKUKM
PROGRAM PELAYANAN IZIN	jumlah koperasi aktif	Usuran								95	350.000.00	110	450.000.00	110	1.700.000.00	DKUKM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
USAHA SIMPAN PINJAM		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									0		0		0	
																DKUKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koerasi yang diawasi dan diperiksa	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								135	429.000.000	138	514.000.000	138	943.000.000	DKUKM
																DKUKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								15	200.000.000	18	257.000.000	18	457.000.000	DKUKM
																DKUKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM	Jumlah Koperasi yang dididik dan dilatih	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								28	4.585.000.000	30	5.020.000.000	30	2.464.048.750	DKUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi melalui pendampingan, promosi dan pemasaran									36	1.358.500.000	40	1.658.450.000	40	3.016.950.000	DKUKM
																DKUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								35	1.250.000.000	37	1.345.250.000	37	2.595.250.000	DKUKM
Penanaman Modal																
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	1 Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penanaman Modal	3	3	1.553.962.747	3	3.289.842.699	3	3.415.447.730	BB	5.240.000.000	BB	5.680.000.000	BB	19.179.253.176	
	2 Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan	Penanaman Modal	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kesekretariatan															
		Penanaman Modal														DPMPTSP
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1 Jumlah Profil Investasi	Penanaman Modal	-	1	247.038.221											DPMPTSP
	2 Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor	Penanaman Modal	-	1												DPMPTSP
	1 Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Pertanian Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Pertanian	Penanaman Modal	-			0		0	726.727.670							DPMPTSP
	2Pertambahan Jumlah UMK Pertanian Yang Bermitra Dengan Investor	Penanaman Modal	-			1		1								DPMPTSP
	3 Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan YAng Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Kelautan Dan Perikanan	Penanaman Modal	-			0	466.129.456	0								DPMPTSP
	4 Pertambahan Jumlah UMK Kelautan dan Perikanan Yang Bermitra Dengan Investor	Penanaman Modal	-			1		1								DPMPTSP
	5 Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Pariwisata Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Pariwisata	Penanaman Modal	-			0		0								DPMPTSP
	6 Pertambahan Jumlah UKM Pariwisata Yang Bermitra Dengan Investor	Penanaman Modal	-			1		1								DPMPTSP
	7 Pertambahan Jumlah Profil Sumber Daya Mineral	Penanaman Modal	-			3		3								DPMPTSP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Yang Bermitra Dengan Investor															DPMPTSP	
	8 Pertambahan Jumlah UMK Sumber Daya Mineral Yang Bermitra Dengan Investor	Penanaman Modal	-			1				1							
		Penanaman Modal														DPMPTSP	
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	1 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pertanian	Penanaman Modal	-	2	599.807.818	3	299.411.000	3	753.296.500							DPMPTSP	
	2 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Kelautan dan Perikanan	Penanaman Modal	-	1		2		2									DPMPTSP
	3 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pariwisata	Penanaman Modal	-	2		3		3									DPMPTSP
	4 Pertambahan Jumlah Investor Sektor Sumber Daya Mineral	Penanaman Modal	-	2		3		3									DPMPTSP
	Jumlah Investor	Penanaman Modal	-	7												DPMPTSP	
		Penanaman Modal														DPMPTSP	
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	1 Persentase Perusahaan Sektor Pertanian Yang Sesuai Realisasi Investasi dengan Rencana Investasi	Penanaman Modal	-	0,43%		0,44%	318.061.260	45%	524.488.500							DPMPTSP	
	2 Persentase Perusahaan Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	Penanaman Modal	-	0,43%		0,44%		45%								DPMPTSP	
	3 Persentase Perusahaan Sektor Pariwisata Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	Penanaman Modal	-	0,43%		0,44%		45%								DPMPTSP	
	4 Persentase Perusahaan Sektor Sumber Daya	Penanaman Modal	-	0,43%		0,44%		45%								DPMPTSP	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Mineral Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi																
		Penanaman Modal														DPMPTSP	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1 Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Sumber Daya Mineral	Penanaman Modal	-	79%	514.517.984	79%	365.893.670	82%	700.100.644							DPMPTSP	
	2 Rata-rata Ketepatan Waktu Penyelesaian Perjanjian	Penanaman Modal	-	11		10		10									DPMPTSP
	Persentase Penerbitan Izin Tepat Waktu	Penanaman Modal	-	78%													DPMPTSP
Belum ada Program Rutin																	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kebijakan Investasi yang Terimplementasikan	Penanaman Modal								100%	1.608.741.000	100%	1.650.000.000	100%	4.698.636.347	DPMPTSP	
		Penanaman Modal															
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor Yang Berinvestasi	Penanaman Modal								90%	1.356.290.000	90%	1.559.733.500	90%	4.568.538.818	DPMPTSP	
		Penanaman Modal															
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP	Penanaman Modal								89%	1.845.000.000	90%	1.920.000.000	90%	5.345.512.298	DPMPTSP	
		Penanaman Modal															
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Investor Yang Patuh Melaksanakan Regulasi	Penanaman Modal								85%	885.650.000	86%	950.000.000	86%	2.678.199.760	DPMPTSP	
		Penanaman Modal															
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	Penanaman Modal								85%	480.000.000	86%	552.000.000	86%	634.800.000	DPMPTSP	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	NA	75	3.393.386.111	80	3.732.724.772	85	4.105.997.194							DISKEPORA
	Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	NA	75	3.751.358.661	80	3.938.926.594	85	4.199.001.945							DISKEPORA
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	NA	62	525.200.000	70	577.720.000	73	635.492.000							DISKEPORA
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	57,01	76		82		85								DISKEPORA
Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	0,04	0,08	3.726.427.000	0,16	4.009.069.700	0,24	4.508.976.670							DISKEPORA
	Persentase Pemuda Berprestasi	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	NA	0,2287	3.421.427.000	0,2287	4.099.069.700	0,2287	4.508.976.670							DISKEPORA
	Persentase Kunjungan Pemuda Lintas Negara	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	200	200	415.000.000	220	456.500.000	240	502.150.000							DISKEPORA
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	NA	0,2	415.000.000	0,0667	456.500.000	0,0625	502.150.000							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase Insan Kepemudaan yang Berprestasi dan berdedikasi Yang mendapatkan pembinaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	6,41	6,41	100.000.000	12,82	110.000.000	19,23	121.000.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	641	100.000.000	0,0641	110.000.000	0,0641	121.000.000							DISKEPORA
	Persentase Pemuda yang menciptakan peluang lapangan Pekerjaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	0,003	0,003	300.770.106	0,005	330.847.117	0,011	363.931.828							DISKEPORA
	Persentase pemuda yang bekerja	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,102	300.770.106	0,102	330.847.117	0,102	363.931.828							DISKEPORA
		Urusan Kepemudaa n dan Olahraga														DISKEPORA
Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Peserta yang mengikuti Babel Sport Tourism	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	20	20	1.500.000.000	22	1.650.000.000	24	1.815.000.000							DISKEPORA
	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,02	500.000.000	0,04	550.000.000	0,06	605.000.000							DISKEPORA
	persentase atlet pelajar berprestasi yang memperoleh medali yang dibina di tingkat provinsi	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	5,08	5.903.531.075	5,42	6.493.884.183	5,76	7.143.272.601							DISKEPORA
	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,05	5.474.531.075	0,05	6.208.984.183	0,05	6.829.982.601							DISKEPORA
	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Urusan Kepemudaa n dan	NA	0,004	426.036.567	0,005	468.640.224	0,006	515.504.246							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Olahraga														
	Persentase pelajar penyandang Disabilitas yang dibina dalam bidang keolahragaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	4,02	259.000.000	4,24	284.900.000	4,46	313.390.000							DISKEPORA
	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0	351.036.567	0	386.140.224	0	424.754.246							DISKEPORA
	Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,0402	259.000.000	0,0402	284.900.000	0,0402	313.390.000							DISKEPORA
	Persentase lansia yang mengikuti olahraga khusus	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,19	75.000.000	0,21	82.500.000	0,22	90.750.000							DISKEPORA
	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,0019	75.000.000	0,0019	82.500.000	0,0019	90.750.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Olahraga Yang Beprestasi dan Berdedikasi yang mendapatkan pembinaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	3,39	150.000.000	3,73	165.000.000	4,07	181.500.000							DISKEPORA
	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,05	150.000.000	0,05	165.000.000	0,05	181.500.000							DISKEPORA
	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang mendapatkan pembinaan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	2,67	120.000.000	2,93	132.000.000	3,2	145.200.000							DISKEPORA
	Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,0267	120.000.000	0,0267	132.000.000	0,0267	145.200.000							DISKEPORA
Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan	Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Urusan Kepemudaa	NA	20	1.150.000.000	30	3.200.000.000	20	2.600.000.000							DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Yang Terbangun	n dan Olahraga														
	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,0833		0,1667		0,1667								DISKEPORA
	Persentase Sarana dan Prasarana Untuk Event Olahraga Tingkat Regional dan Nasional Yang Terbangun	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	8,33	3.194.898.774	16,67	642.250.000.000	16,67	809.100.000.000							DISKEPORA
	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	Urusan Kepemudaa n dan Olahraga	NA	0,0833	3.007.917.057	0,1667	753.250.000.000	0,1667	409.100.000.000							DISKEPORA
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)	Kepemudaa n dan Olahraga								77	364.000.000	77	364.000.000	77	728.000.000	DISKEPORA
	survey kepuasan pelayanan internal	Kepemudaa n dan Olahraga								80	3.402.953.921	80	3.402.953.921	80	6.805.907.842	DISKEPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Persentase Pemuda yang Memiliki Keterampilan	Kepemudaa n dan Olahraga								0,05	240.350.000	0,06	240.350.000	0,06	480.700.000	DISKEPORA
	Persentase Pemuda Yang Berprestasi	Kepemudaa n dan Olahraga								0,1	3.185.949.390	0,12	3.185.949.390	0,12	6.371.898.780	DISKEPORA
	Persentase Organisasi Pemuda yang memiliki Standarisasi	Kepemudaa n dan Olahraga								7,41	150.000.000	11,11	150.000.000	11,11	300.000.000	DISKEPORA
	Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda yang dimanfaatkan	Kepemudaa n dan Olahraga								100	500.000.000	100	700.000.000	100	1.200.000.000	DISKEPORA
		Kepemudaa n dan Olahraga														DISKEPORA
Program Pengembangan	Persentase atlet pelajar	Kepemudaa								40,48	4.187.216.	41,67	4.237.216.	41,67	8.424.432.87	DISKEPORA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daya Saing Keolahragaan	yang berprestasi	n dan Olahraga									437		437		4	
	Persentase pertumbuhan komunitas olahraga	Kepemudaan dan Olahraga								3,78	4.227.034.786	4,54	4.227.034.786	4,54	8.454.069.572	DISKEPORA
	Persentase Standarisasi Tenaga Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga								79,49	175.000.000	87,18	175.000.000	87,18	350.000.000	DISKEPORA
	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimanfaatkan	Kepemudaan dan Olahraga								100	17.500.000.000	100	18.000.000.000	100	35.500.000.000	DISKEPORA
Statistik																
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terbentuknya Forum Data Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pimpinan OPD : Kepala dan Kabid)	Statistik								97	594.349.705	98	624.067.190	98	3.713.699.238	kominfo
Persandian																
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persandian								100	125,000,000	100	131,250,000	100	256,250,000	kominfo
Kebudayaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Kebudayaan	76	78	4.469.243.000	80	11.144.155.450	81	9.045.544.700	81	9.665.260.500	82	10.398.142.500	82	44.722.346.150	BUDPAR
	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Kebudayaan	70	75		75		77		80		85				
Program Pelestarian Budaya	Pertumbuhan Warisan Budaya Daerah	Kebudayaaa n	6	17,29	4.713.898.000	29,37	6.853.981.800	4238	11.092.929.800	55,39	20.718.831.500	69,52	17.279.097.550	42,79	60.658.738.650	BUDPAR

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD (pakai angka)	Kebudayaaa n								81	3.547.000.000	82	3.119.500.000	82	3.617.500.000	BUDPAR
	survey kepuasan pelayanan internal	Kebudayaaa n								80		85		85		BUDPAR
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang dikelola	Kebudayaaa n								55	1.240.250.000	62	1.392.996.812	65	2.633.246.812	BUDPAR
		Kebudayaaa n														BUDPAR
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Kebudayaaa n								55	2.652.402.013	62	2.853.275.000	65	5.505.677.013	BUDPAR
		Kebudayaaa n														
Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah	Kebudayaaa n								35	715.000.000	45	875.000.000	55	1.590.000.000	BUDPAR
		Kebudayaaa n														
Program Pelestarian dan Pengelolaan Budaya	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola	Kebudayaaa n								50	1.900.000.000	60	2.175.000.000	65	3.975.000.000	BUDPAR
		Kebudayaaa n														
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum provinsi yang dikelola	Kebudayaaa n								100	300.000.000		300.000.000	100	600.000.000	BUDPAR
Perpustakaan																
Program pengembangan sumber daya perpustakaan	Persentase perpustakaan terakreditasi	perpustakaa n		0%	0	20%	69.669.850	18,18%	66.487.500	70%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	1.236.157.350	Dinas kearsipan dan perpustakaa n
	Persentase perpustakaan sekolah yang terakreditasi	perpustakaa n		18,18%	130.189.700	0%	0	0	0%	0%	0	0%	0	18,18%	130.189.700	Dinas kearsipan dan perpustakaa n
	Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan	perpustakaa n		40	230.395.440	0	43.191.500	40	208.393.500	-	-	-	-	-	481.980.440	Dinas kearsipan dan

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	sesuai standar															perpustakaan
	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan	perpustakaan		0	- 0		- 0		-		-		-		-	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka	perpustakaan		308	118.651.500	14	22.460.000	400	142.957.000		-		-		284.068.500	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Pertambahan pengunjung perpustakaan	perpustakaan		8131	461.666.400	5907	253.910.000	12500	371.957.500		-		-		1.087.533.900	Dinas kearsipan dan perpustakaan
program pembinaan perpustakaan	persentase perpustakaan yang dibina	perpustakaan								50%	1.293.022.500	50%	1.250.522.500	50%	2.543.545.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
		perpustakaan														
program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	penambahan koleksi perpustakaan	perpustakaan								510	100.000.000	500	100.000.000	500	200.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Kearsipan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Kearsipan														Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pelayanan	Kearsipan														

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kesekretariatan															
Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Persentase lembaga yang melaksanakan tertib arsip	Kearsipan		0%		0%		20%	297.639.000	20%	475.000.000	25%	510.000.000	45%	1.282.639.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertip arsip	Kearsipan		46%	487.103.500	17%	140.699.000							46%	627.802.500	Dinas kearsipan dan perpustakaan
Program peningkatan pengelolaan dan pelestarian kearsipan	Pertambahan jumlah arsip yang terkelola (dinamis dan statis)	Kearsipan		320 arsip	290.887.400	200 arsip	192.492.000	378 arsip	314.204.000	1150 arsip	850.000.000	1400 arsip	1.050.000.000	2550 arsip	2.697.583.400	Dinas kearsipan dan perpustakaan
program penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kearsipan								80	12.329.000.000	80	12.574.500.000	80	24.903.500.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
program pengelolaan arsip	Pertambahan jumlah arsip yang terkelola (dinamis dan statis)	Kearsipan								450 arsip	670.000.000	700 arsip	730.000.000	700 arsip	1.400.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
program perlindungan dan penyelamatan arsip	persentase arsip yang dilindungi	Kearsipan								30%	105.000.000	30%	135.000.000	0,3	240.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
program perizinan penggunaan arsip	persentase izin penggunaan arsip	Kearsipan								30%	75.000.000	30%	85.000.000	30%	160.000.000	Dinas kearsipan dan perpustakaan
		Kearsipan														

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
URUSAN PILIHAN																
Kelautan dan Perikanan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai LAKIP	Urusan Kelautan dan Perikanan		BB	4.299.755.000	BB	12.577.218.460	A	8.117.479.383	A	8.421.142.710	AA	8.972.199.845	AA	42387795398	DKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan		1,6	5.100.000.000	2,13	6.210.000.000	2,13	9.466.000.000	2,13	11.317.200.000	2,66	13.688.400.000	3	45.781.600.000	DKP
	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	Urusan Kelautan dan Perikanan		815,077	195.020.000	820,077	2.100.000.000	825,077	2.220.000.000	830,077	2.629.000.000	835,077	3.114.800.000	835,077	10.258.820.000	DKP
	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan		60	880.520.000	65	516.000.000	75	570.000.000	80	639.600.000	85	714.720.000	85	3.320.840.000	DKP
Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan		65	1.216.773.000	70	2.550.000.000	75	2.860.000.000	80	3.090.000.000	85	3.600.000.000	85	13.316.773.000	DKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Urusan Kelautan dan Perikanan	181.000	211.300	6.026.470.900	215300	20.945.000.000	219300	25.370.000.000	223300	31.935.000.000	227300	32160000000	227300	116.436.470.900	DKP
	Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	Urusan Kelautan dan Perikanan	107	108	182.230.000	109	2.900.000.000	110	3.100.000.000	111	3.300.000.000	112	3.500.000.000	112	12.982.230.000	DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan				- 19500	610.000.000	22500	1.220.000.000	26500	1.220.000.000	31000	1.830.000.000	99500	4.880.000.000	DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase	Urusan Kelautan dan				- 33000	610.000.000	35000	1.220.000.000	37000	1.220.000.000	39000	1.830.000.000	144000	4.880.000.000	DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Perikanaan Selat Nasik (Ton)	Perikanan														
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan				- 10	457.500.000	13125	915.000.000	14250	915.000.000	15,75	1.372.500.000	53,125	3.660.000.000	DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan				- 10000	152.500.000	13125	305.000.000	14250	305.000.000	15750	457.500.000	53125	1.220.000.000	DKP
Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	17.080	11.620	559.168.000	12120	1.564.000.000	12620	2.489.000.000	13120	2.614.000.000	13620	3.604.000.000	13620	10.830.168.000	DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan				- 220	73.000.000	270	113.000.000	330	133.000.000	420	163.000.000	420	482.000.000	DKP
	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan				- 121	73.000.000	163	113.000.000	225	133.000.000	307	163.000.000	307	482.000.000	DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan		8,75	276.672.000	9,63	885.000.000	10,59	1.140.000.000	11,65	1.245.000.000	12,81	1.250.000.000	53,42	4.796.672.000	DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan		0,05	223.906.000	0,06	540.000.000	0,07	600.000.000	0,08	645.000.000	0,09	690.000.000	0,34	2.698.906.000	DKP
Pembenihan Ikan Laut																
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Urusan Kelautan dan Perikanan			560.600.000											DKP
Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	Urusan Kelautan dan	49	53	734.620.000	54	1.446.000.000	55	1.485.000.000	56	1.500.000.000	57	1.545.000.000		6.710.620.000	DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perikanan		Perikanan														
	Volume Produksi Olahan (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan	24	20.610	1.907.545.000	21110	2.645.000.000	21610	2.750.000.000	22110	2.865.000.000	22610	2.930.000.000	22610	12.807.838.912	DKP
	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga (Ton)	Urusan Kelautan dan Perikanan			-	121	5.400.000.000	163	6.430.000.000	225	7.664.000.000	307	9.137.800.000	307	28.631.800.000	DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan	-	80	-	84	700.000.000	88	600.000.000	92	500.000.000	96	550.000.000	96	2.350.000.000	DKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	-	-	1.941.740.000	360	2.200.000.000	480	2.400.000.000	600	2.600.000.000	750	2.600.000.000	2,19	11.741.740.000	DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	25	25	863.730.400	26,25	1.850.000.000	28,88	1.900.000.000	31,76	1.925.000.000	34,94	1.950.000.000	146,83	8.488.730.400	DKP
Program Peningkatan Pelayanan Teknis	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	150	75	789.380.000	82,5	1.200.000.000	86,63	1.300.000.000	93,56	1.350.000.000	102,91	1.400.000.000	440,59	6.039.380.000	DKP
Pembenihan Ikan Laut																
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan (Juta Rupiah)	Urusan Kelautan dan Perikanan	150	75	820.286.000	82,5	900.000.000	86,63	950.000.000	93,56	1.000.000.000	102,91	1.200.000.000	440,59	4.870.286.000	DKP
program Rutin Belum ada	Nilai Sakip PD (pakai angka)	Urusan Kelautan dan								75	4.356.250.000	75	4.758.650.250	75	9.114.900.250	DKP

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perikanan														
	survey kepuasan pelayanan internal															
Program Pengelolaan Ruang Laut	Luasan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil yang termanfaatkan (Ha)	Urusan Kelautan dan Perikanan								1.050.000	3.600.000.000	1.100.000	3.350.000.000	3.150.000	12.859.299.000	DKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan								75	2.350.000.000	77	2.640.000.000	224	6.355.000.000	DKP
Program Pengembangan perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan								1,85%	12.855.000.000	1,90%	14.197.000.000	0	36.653.058.967	DKP
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan								4,20%	7.205.000.000	4,30%	8.060.000.000	0	17.581.662.244	DKP
Program Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (%)	Urusan Kelautan dan Perikanan								3,30%	2.820.000.000	3,50%	3.326.000.000	0	7.817.569.520	DKP
		Urusan Kelautan dan Perikanan														
Pariwisata																
Program Pelestarian Budaya	Pertumbuhan Warisan Budaya Daerah	Pariwisata	6	17,29	4.713.898.000	29,37	6.853.981.800	4238	11.092.929.800	55,39	20.718.831.500	69,52	17.279.097.550	42,79	60.658.738.650	BUDPAR
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	Pariwisata	0,32	0,35	6.296.385.000	0,38	11.656.079.400	0,41	23.312.425.700	0,45	25.511.946.800	0,49	27.709.362.900	0,41	94.486.199.800	BUDPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisaata yang Bersertifikat	Pariwisata	12,35	2,77	2.064.009.000	6,45	13.714.426.300	7,38	21.230.129.160	8,3	23.461.142.576	8,39	25.609.167.877	6,65	86.079.874.913	BUDPAR
	Persentase Sumber Daya Pariwisata yang	Pariwisata														

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Bersertifikat di Pulau Belitung															
Program Pengembangan Desrinasi Pariwisata	Persentase Derstinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar	Pariwisata	0	81,52	6.874.615.000	44,44	12.793.498.800	70,37	14.614.300.000	96,3	15.742.949.375	100	17.654.168.548	65,92	69.679.531.723	BUDPAR
	Persentase Destinasi Pariwisata yang Memenuhi Standar di Pulau Belityung	Pariwisata														
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pangsa Pasar Wisatawan Daerah	Pariwisata								9,7	5.952.994.784	10,5	5.496.625.288	20,3	11.449.620.072	BUDPAR
Ptrogram Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Persentase kabupaten/kota yang terindentifikasi untuk pengembangan kabupaten/kota kreatif, ruang kreasi dan jaringan orang kreatif	Pariwisata								1,9	790.000.000	1,94	990.000.000	3,88	1.780.000.000	BUDPAR
	Persentase produk kreatif yang potensial untuk perluasan pasar	Pariwisata								3,38		3,38		7,78		BUDPAR
	Persentase unit usaha kreatif untuk pengembangan usaha	Pariwisata														BUDPAR
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif terlatih dan terserfikasi	Pariwisata								29,14	935.000.000	31,65	1.065.000.000	81,33	2.000.000.000	BUDPAR
	Persentase Kemitraan Pariwisata yang terbentuk	Pariwisata								82,85	100.000.000	57,15	125.000.000	100	225.000.000	BUDPAR
	Persentase Lembaga LSP P1 yang terbentuk	Pariwisata								33	75.000.000	33	75.000.000	66	150.000.000	BUDPAR
	Persentase Asesor bidang yang terlatih	Pariwisata								50	180.000.000	50	200.000.000	100	380.000.000	BUDPAR
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang memenuhi standar	Pariwisata								70	6.000.000.000	85	7.865.000.000	85	13.865.000.000	BUDPAR
		Pariwisata														
Pertanian																

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	Pertanian	4	5	7.194.525.000	5	7.558.834.825	6	9.601.891.900	-	-	-	-	6	46.535.622.014	Dinas Pertanian
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah									80		80		80		
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan (%)		80	80		90		100		100	10.562.081.090	100	11.618.289.199	100		
Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) (Ton)	Pertanian	38.393	40.313,00	1.552.435.000	43.135	964.202.000	47.017	1.683.605.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar) (Ton)	Pertanian	2.284,80	2.528,54		2.813,28		3.113,22		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	Produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) (Ton)	Pertanian	1.916,10	2.257,43		2.651,13		3.095,08		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	Produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	Pertanian	65,4	81,72		98,11		114,51		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	Kawasan komoditas padi	Pertanian	1	-		1		-		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	Kawasan komoditi cabai	Pertanian	1	-		1		-		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	Kawasan bawang merah	Pertanian	1	-		1		-		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	-	30		40		50		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	NTP subsektor Tanaman Pangan	Pertanian	93,08	94,08		95,08		97,08		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
	NTP subsektor Hortikultura	Pertanian	100,35	100,55		100,75		100,95		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	
Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan produksi lada (ton)	Pertanian	39.153	41.111	4.088.978.500	43.577	4.515.562.000	46.628	5.737.225.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan produksi karet (ton)	Pertanian	56.864	58.438		60.173		61.407		-	-	-	-	-	Dinas Pertanian	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pengembangan kawasan lada (ton)	Pertanian	3	1		1		1		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	Pertanian	6	31		56		81		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	NTP subsektor Perkebunan	Pertanian	97,03	98,8		100,6		102,4		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah populasi ternak besar sapi (ekor)	Pertanian	11.545	13.090	3.649.402.000	14.399	2.878.432.750	15.838	3.047.927.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Jumlah populasi ternak ayam (ekor)	Pertanian	11.500.000	12.075.000		12.678.800		13.312.700		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Kawasan pengembangan ternak sapi	Pertanian	2	1		1		-		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	Pertanian	4	8		14		20		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	NTP subsektor Peternakan	Pertanian	92,86	93,86		94,86		95,86		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pertanian	17	14	4.551.447.720	15	4.998.825.500	15	12.839.194.000	15	14.123.113.400	16	15.535.424.740	75	52.048.005.360	Dinas Pertanian
	Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Pertanian	-	1		2		1		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian	Pertanian	10	10		10		10		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	Pertanian	10	10		10		10		-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian	Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	Pertanian	1	6	5.288.106.200	1	8.856.022.000	1	3.593.065.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian
	Ketersediaan bibit ayam	Pertanian	1	5		6		8		-	-	-	-	-	-	Dinas

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(ekor)															Pertanian
	Ketersediaan anakan sapi (ekor)	Pertanian	8	15		20		25		-	-	-			Dinas Pertanian	
	Ketersediaan benih sumber padi (ton)	Pertanian	-	2		4		6		-	-	-			Dinas Pertanian	
	Ketersediaan bibit lada (polibag)	Pertanian	-	25		50		75		-	-	-			Dinas Pertanian	
	Ketersediaan bibit karet (polibag)	Pertanian	200	40		40		40		-	-	-			Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	Pertanian	5	5	368.380.000	5	1.323.491.000	5	550.000.000					5	2.241.871.000	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel (polibag)	Pertanian	750	1.050.000	441.573.000	1.310.000	353.411.000	1.570.000	553.530.000	-	-			1.570.000	1.348.514.000	Dinas Pertanian
	Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel (ton)	Pertanian	100	125		150		175		-	-	-	175	Dinas Pertanian		
	Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel (polibag)	Pertanian	1	1.250		1.500		1.750		-	-	-	1.750	Dinas Pertanian		
	Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (produsen)	Pertanian	34	40		44		47		-	-	-	47	Dinas Pertanian		
	Jumlah varietas unggul yang didaftarkan	Pertanian	2	2		2		2		-	-	-	2	Dinas Pertanian		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Predikat Penilaian SAKIP	Pertanian								6	9.309.650.000	6	9.357.650.000	6	18.667.300.000	Dinas Pertanian
																Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan luas tanam Tanaman Pangan	Pertanian								69,58	1.471.085.000	83,32	1.621.085.000	83,32	3.092.170.000	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan									14,21		16,91		16,91		Dinas

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	luas tanam Hortikultura															Pertanian
	Persentase peningkatan pengolahan dan pemasaran pertanian	Pertanian									95.990.000		95.990.000		191.980.000	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan luas tanam perkebunan	Pertanian								10,17	4.400.000.000	11,96	4.600.000.000	11,96	9.000.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase Prasarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang tersedia	Pertanian								4	1.167.738.109	4	1.267.738.109	8	2.435.476.218	Dinas Pertanian
	Persentase Pertambahan Angka Kelahiran Ternak									356,32	2.375.000.000	434,1	2.575.000.000	434,1	4.950.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular									100		100		100		Dinas Pertanian
	Peningkatan unit usaha yang bersertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner)									90		100		100		Dinas Pertanian
	Jumlah ketersediaan pakan ternak (Ha)									25		25		50		Dinas Pertanian
	Jumlah Angka kelahiran Ternak									365,32	150.000.000	434,1	150.000.000	434,1	300.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian									15	200.000.000	15	200.000.000	15	400.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase Ketersediaan benih/bibit pertanian tingkat lapang (daerah)										1.525.000.000		1.525.000.000		3.050.000.000	Dinas Pertanian
	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian di UPTD Balai Benih Pertanian									50	1.150.000.000	50	1.150.000.000	50	2.300.000.000	Dinas Pertanian
	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian untuk UPTD Balai Proteksi Pertanian									1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian										490.000.000		490.000.000		980.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat									5		5		5		Dinas Pertanian

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung gjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase peredaran benih/bibit pertanian yang tidak bersertifikat									5		5		5		Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kasus Penyakit Hewan menular	Pertanian								15	449.025.000	15	449.025.000	30	898.050.000	Dinas Pertanian
		Pertanian														Dinas Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dokumen Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian								2	280.000.000	2	280.000.000	2	560.000.000	Dinas Pertanian
	Persentase penurunan intensitas serangan/gangguan Organisme pengganggu tanaman									5	350.000.000	5	350.000.000	5	700.000.000	Dinas Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											63.025.000		63.025.000		126.050.000	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya	Pertanian									1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000	Dinas Pertanian
Kehutanan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indikator 1 : Persentase pelayanan Dinas Kehutanan	Kehutanan	100	100	2.940.595.709	100	4.678.298.500	100		100		100		100		DINAS KEHUTANA N
	Indikator 1 : Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=(>90-100); A=(>80-90); BB=(>70-90); B=(>60-70); CC=(>50-60); C=(>30-50); D=0-30)	Kehutanan	45,6	75		80,2		82,5		85		85		85		DINAS KEHUTANA N
Program Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang terkelola	Kehutanan			1.530.886.554		2.179.693.650		3.531.271.813		4.055.500.000		4.255.500.000		15.552.852.017	DINAS KEHUTANA N
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	Persentase luas kawasan hutan yang dimanfaatkan	Kehutanan		33,33	1.866.722.000	62,5	1.866.722.000	75	2.670.000.000	87,5	3.070.000.000	100	3.070.000.000	100	12.543.444.000	DINAS KEHUTANA N

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekosistem	Pesrentase penurunan luas kerusakan hutan	Kehutanan			1.462.545.640		1.220.127.000		2.742.400.000		3.575.000.000		4.300.000.000		13.300.072.640	DINAS KEHUTANAN
Program Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase luas DAS yang terkelola	Kehutanan			1.388.597.287		2.975.989.000		6.670.000.000		7.450.000.000		7.750.000.000		26.234.586.287	DINAS KEHUTANAN
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kehutanan								80	29.079.786.192	80	29.298.328.735	80	58.378.114.927	DINAS KEHUTANAN
	Nilai SAKIP PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=(>90-100); A=(>80-90); BB=(>70-90); B=(>60-70); CC=(>50-60); C=(>30-50); D=0-30)	Kehutanan								80		80		80		DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan yang terkelola	Kehutanan									6.051.000.000		7.105.000.000		13.156.000.000	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase kawasan hutan yang terkelola	Kehutanan									320.000.000		375.000.000		695.000.000	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luas kawasan hutan yang termanfaatkan	Kehutanan								99.541	800.000.000	119.438	900.000.000	218.979	1.700.000.000	DINAS KEHUTANAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pesrentase penurunan luas kerusakan hutan	Kehutanan								28	525.000.000	22	500.000.000	50	1.025.000.000	DINAS KEHUTANAN
Energi dan Sumber Daya Mineral																
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Urusan Energi dan Sumber			4.479.920.662		8.394.009.000									ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Daya Mineral														
																ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang menerapkan 'Good Mining Praticce'	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	45%	50%	223.820.000	65%	450.000.000	70%	450.000.000	75%	500.000.000	80%	550.000.000	80%	2.173.820.000	ESDM
	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang dibina dan diawasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral														ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral	Persentase perusahaan pertambangan mineral logam dan batuan yang menerapkan 'Good Mining Praticce'	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	45%	50%	350.000.000	60%	550.000.000	65%	650.000.000	70%	700.000.000	80%	750.000.000	80%	3.000.000.000	ESDM
	Jumlah IUP mineral logam dan batuan yang dibina dan diawasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral														ESDM
Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Indikator 1 : Persentase cadangan mineral yang potensial	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	16,28%	150.000.000	32,55%	500.000.000	48,83%	500.000.000	65,10%	550.000.000	81,38%	600.000.000	81,38%	600.000.000	ESDM
	Indikator 2 : Persentase cadangan mineral yang diselidiki	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	16,28%	317.270.000		-		-		-		-		-	ESDM
Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Indikator 1 : Persentase Penggunaan EBT	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	6,81%	6,82%	12.118.110.000	6,83%	15.000.000.000	6,84%	15.000.000.000	6,85%	15.000.000.000	6,86%	15.000.000.000	6,86%	15.000.000.000	ESDM
	Indikator 2 : Persentase perusahaan	Urusan Energi dan	40%	50%	150.000.000	60%	250.000.000	65%	250.000.000	70%	250.000.000	80%	250.000.000	80%	1.150.000.000	ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pemdistribusian minyak dan gas yang taat aturan	Sumber Daya Mineral														
	Indikator 3. Persentase perusahaan yang bergerak di bidang ketenagalistrikan yang sesuai dengan aturan	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	40%	50%	150.000.000	60%	200.000.000	65%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	300.000.000	80%	1.200.000.000	ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	Indikator 1: Pertambangan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam)	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	77,7 Miliar	70 Miliar	103.700.000	80 Miliar	250.000.000	80 Miliar	250.000.000	80 Miliar	275.000.000	80 Miliar	300.000.000	390 Miliar	1.178.000.000	ESDM
Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Indikator 1 : Jumlah Dana Bagi Hasil dan Lifting Migas Babel	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	480 Ribuan	460 Ribuan	125.850.000	440 ribu barel	300.000.000	420 ribu barel	350.000.000	400 ribu barel	350.000.000	400 ribu barel	350.000.000	2,12 Juta Barel	1.475.850.000	ESDM
Program Peningkatan Geologi dan Air Tanah	Indikator: Pertumbuhan jumlah pendapatan daerah dari retribusi penggantian biaya cetak peta	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	4 miliar	1,5 miliar	-	1,7 miliar	200.000.000	1,9 miliar	200.000.000	2 miliar	200.000.000	2 miliar	200.000.000	9,1 miliar	800.000.000	ESDM
Program Pengembangan Pertambangan Mineral	Indikator 1: Persentase lahan kritis diareal IUP yang direklamasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	NA	15%	900.396.000	13%	2.250.000.000	12%	2.250.000.000	10%	2.500.000.000	9%	3.000.000.000	9%	10.900.396.000	ESDM
	Indikator 2: Nilai Jaminan Reklamasi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	200 miliar	10 miliar	103.945.000	10 miliar	350.000.000	10 miliar	350.000.000	10 miliar	350.000.000	10 miliar	350.000.000	50 miliar	1.503.945.000	ESDM
	Indikator 3: Persentase luas lahan terganggu diareal IUP	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	5,6%	24,50%	900.396.000	43,40%	2.250.000.000	81,20%	2.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	10.900.396.000	ESDM
Program Pengelolaan Geologi dan Air Tanah	Indikator 1: Persentase cadangan air tanah yang	Urusan Energi dan	NA	18,20%	0	40,90%	200.000.000	63,60%	200.000.000	81,80%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000	ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	potensial	Sumber Daya Mineral														
	Indikator 2: Persentase pemenuhan air tanah di lokasi yang rawan air	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	NA	1%	1.700.000.000	0	0	1,70%	1.300.000.000	0	0	2,30%	1.400.000.000	2,30%	4.400.000.000	ESDM
	Indikator 3: Jumlah Obyek Geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	10 Obyek	10 obyek	0	10 Obyek	150.000.000	10 Obyek	175.000.000	10 Obyek	200.000.000	10 Obyek	225.000.000	50 Obyek	750.000.000	ESDM
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Sakip PD	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								4	3.818.961.806	4	4.100.865.897	4	18.950.855.378	ESDM
	survey kepuasan pelayanan internal	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								100		100		100		ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									4.800.000.000		5.600.000.000		10.400.000.000	ESDM
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per										800.000.000		800.000.000		1.600.000.000	ESDM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tahun.															
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.										2.900.000.000		2.900.000.000		5.800.000.000	ESDM
Perdagangan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (Ket: AA=6 A=5 BB=4 B=3 CC=2 C=1)			3	3.779.265.000	3	3.550.931.400	3	3.700.831.275	4	3.818.961.806	4	4.100.865.897	4	18.950.855.378	
	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan			100		100		100		100		100		100		100
	Nilai SAKIP									82	3.818.961.806	83	4.100.865.897	83		
Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Volume Ekspor	Perdagangan		860	18.293.331.000	862	34.774.061.000	862	27.746.093.000	862	26.361.128.000	863	29.938.266.000	863	137.112.879.000	DISPERINDAG
	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor perdagangan	Perdagangan		10		10		10		10		10		10		
	Persentase pemantauan dan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok)	Perdagangan		73		83		89		95		100		100		
	Persentase peningkatan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun	Perdagangan		0		63		12		0		25		25		
	Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	Perdagangan		0		20		40		20		20		20		
	Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar	Perdagangan		0		1		1		1		1		1		

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Lelang															
	Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	Perdagangan		10				10				10				
PROGRAM 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Perdagangan								82	475.000.000	84	555.000.000	84	1.030.000.000	DISPERINDA G
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Perdagangan									3.648.500.000	0	3.251.000.000	0	3.495.500.000	DISPERINDA G
PROGRAM 2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam tertib Niaga									2	150.000.000	3	200.000.000	5	350.000.000	DISPERINDA G
PROGRAM 4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tersedianya Bapokting	Perdagangan								18	600.000.000	18	800.000.000	18	1.400.000.000	DISPERINDA G
	Terkendalnya harga Bapokting									<11	700.000.000	<11	900.000.000	<11	1.600.000.000	DISPERINDA G
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Bersubsidi															DISPERINDA G
PROGRAM 5. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Produk Non Migas (USD juta)	Perdagangan								1.800	800.000.000	1.811	3.300.000.000	3.611	5.800.000.000	DISPERINDA G
		Perdagangan														DISPERINDA G
PROGRAM 7. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	Perdagangan								100	750.000.000	100	850.000.000	100	1.600.000.000	DISPERINDA G
PROGRAM 6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	Perdagangan								40 (Mampu)	800.000.000	43 (Mampu)	900.000.000	43 (Mampu)	1.700.000.000	DISPERINDA G
	Persentase Layanan Terstandarisasi									21,43		28,57		28,57		DISPERINDA G
Perindustrian																
Program Pengembangan	Jumlah kawasan	Perindustria		0	852.398.000	1	3.250.000.	1	5.075.000.	1	5.550.000.	1	5.975.000.	4	20.702.398.0	DISPERINDA G

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Wilayah dan Pegawasan Industri	strategis/kawasan industri/kawasan sentra	n					000		000		000		000		00	G
	Jumlah industri yang memenuhi standar industri	Perindustrian		15		15		15		15		15		75		DISPERINDAG
Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	Persentase tenaga kerja Industri terhadap total tenaga kerja	Perindustrian		5,1		5,17		5,24		5,31		5,38		5,38		DISPERINDAG
	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	Perindustrian		0,68		0,7		0,71		0,72		0,74		0,74		DISPERINDAG
	Persentase Tenaga Kerja yang tererap di Industri Pariwisata	Perindustrian		0,308		0,319		0,333		0,353		0,381		0,381		DISPERINDAG
	Persentase industri yang memiliki informasi kandungan nutrisi olahan pangan	Perindustrian		2,96		4,68		6,71		9,02		11,61		11,61		DISPERINDAG
	Pertumbuhan industri pada sektor pertanian	Perindustrian		1,474		1,499		1,524		1,549		1,574		1,574		DISPERINDAG
	Persentase tenaga kerja industri pada sektor pertanian	Perindustrian		10,13		10,28		10,44		10,58		10,73		10,73		DISPERINDAG
	Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	Perindustrian		4		4		5		5		5		5		DISPERINDAG
	Persentase tenaga kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan`	Perindustrian		1.035		1.035		1.036		1.037		1.037		1.037		DISPERINDAG
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian	Indeks Keberdayaan Konsumen (Ket: Sadar = 0-20 Paham = 21-40 Mampu = 41-60 Kritis = 61-80 Berdaya = 81-100)	Perindustrian		20		22		25		29		34		34		DISPERINDAG
	Persentase pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku	Perindustrian		10		14		18		27		31		100		DISPERINDAG

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab		
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	usaha Tertib Niaga)																	
	Persentase pengembangan standarisasi dan lab kemetrolagian	Perindustria n		10			20			50				80				100
Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase komoditi unggulan daerah yang di uji (7 komoditi) dan kalibrasi peralatan (4 besaran)	Perindustria n		27	1.237.299.000	18	3.526.429.000	18	3.489.907.000	10	3.514.907.000	9	3.764.907.000	82	1553344900	DISPERINDA G		
		Perindustria n		0				0				0				0		0
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah industri	Perindustria n								5,24	3.445.000.000	5,24	3.465.000.000	10,48	6.910.000.00	DISPERINDA G		
		Perindustria n														DISPERINDA G		
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Rekomendasi IUI yang dikeluarkan	Perindustria n								50	330.000.000	50	330.000.000	50	660.000.000	DISPERINDA G		
		Perindustria n														DISPERINDA G		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap di SIINAS	Perindustria n								2	120.000.000	2	120.000.000	4	240.000.000	DISPERINDA G		
		Perindustria n																
Transmigrasi																		
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	Transmigras i		0	198.842.050		150.020.000		127.190.000							DISNAKER		
	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	Transmigras i		0														DISNAKER
	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang	Transmigras i		0														DISNAKER

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	diberdayakan															
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja di kawasan transmigrasi	Transmigrasi														DISNAKER
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah dokumen perencanaan kawasan kransmigrasi	Transmigrasi								1 kawasan	750.000.000	1 kawasan	750.000.000	2 kawasan	1.500.000.000	DISNAKER
		Transmigrasi														DISNAKER
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang terkelola	Transmigrasi								0,14	700.000.000	0,15	900.000.000		1.600.000.000	DISNAKER
		Transmigrasi														
FUNGSI PENUNJANG URUSAN																
Perencanaan																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)		100	6.440.435.100	100	8.131.546.000	100	7.512.876.000	100	7.710.434.000	100	8.074.243.000	100	8.074.243.000	BAKUDA
	Predikat SAKIP Bappeda	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)		76		82		85		88		92		92		BAKUDA
program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	100	100	1.778.538.953	100	2.135.903.000,00	100	3.309.455.000	100	3.527.900.500	100	4.910.690.550		15.662.488.003	BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
program Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persentase PD Mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang dalam Penilaian LAKIP PD pada Aspek Perencanaan Kienrja mendapatkan skor/nilai > 25	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	100	85	341.052.387	90	324.747.000	90	1.353.250.000	90	1.454.912.500	90	1.600.158.000		5.074.119.887	BAPPEDA
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase PD Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dalam Penilaian LAKIP PD pada Aspek Perencanaan Kienrja mendapatkan skor/nilai > 25	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	100	85	266.559.095	90	435.602.000	90	1.311.500.000	90	1.344.575.000	90	1.379.304.000		4.737.540.095	BAPPEDA
program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Persentase PD Mitra Bidang Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang dalam Penilaian LAKIP PD pada Aspek Perencanaan Kienrja mendapatkan skor/nilai > 25	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	100	85	69.019.018	90	216.365.700	90	1.325.000.000	90	1.370.000.000	90	1.410.000.000		4.390.384.718	BAPPEDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	survey kepuasan pelayanan internal	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								90	4.990.800.000	95	4.414.300.000	95	8.715.100.000	BAPPEDA
	Nilai Sakip PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								88	450.000.000	92	535.000.000	92	985.000.000	BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		an (Perencanaan)														
program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPJMD dan Renstra dengan RPJMD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								95	4.135.000.000	100	4.100.000.000	100	9.905.261.160	BAPPEDA
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								100	770.000.000	100	870.000.000	100	1.640.000.000	BAPPEDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)														BAPPEDA
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								100	670.000.000	100	1.470.000.000	100	2.140.000.000	BAPPEDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)														BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								100	1.400.000.000	100	1.420.000.000	100	2.933.675.000	BAPPEDA
Keuangan																
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	-	100	14.242.602.958	100	19.803.282.257	100	14.542.421.133	100	20.475.404.350	100	22.899.839.000	100	91.963.549.698,00	BAKUDA
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	55	69,5	59.227.984	74	5.825.000	78	111.775.000	82	6.644.700	86	7.640.000	86	191.112.684,00	BAKUDA
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	19,26%	6,10%	1.192.187.500	4,78%	1.667.882.250	4,99%	1.910.540.000	9,09%	3.926.594.000	9,09%	4.319.253.400	6,81%	13.016.457.150,00	BAKUDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														BAKUDA
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	17,87%	5,03%	539.812.100	5,03%	124.399.250	5,03%	919.072.000	223,00%	983.380.200	223,00%	1.110.571.720	223,00%	3.677.235.270,00	BAKUDA
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00%	100,00%	307.701.000	100,00%	298.132.000	100,00 %	543.431.100	100,00%	597.774.210	100,00%	657.551.631	100,00%	2404589941	BAKUDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Persentase Pemda yang telah melaksanakan transaksi non tunai sesuai regulas	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								85,00%	85.750.000	100,00%	94.325.000	100,00%		BAKUDA
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	81,58%	100,00%	1.105.197.642	100,00%	411.443.000	100,00%	789.138.000	100,00%	593.051.800	100,00%	652.356.980	100,00%	3551187422	BAKUDA
Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	n/a	100,00%	1.285.176.800	100,00%	865.234.200	100,00%	1.708.081.000	100,00%	1.987.429.100	100,00%	2.186.172.010	100,00%	8032093110	BAKUDA
	persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	n/a	0,27%	156.150.000	0,27%	285.000.000	0,28%	238.214.000	0,29%	262.035.400	0,30%	288.238.940	0,30%	1229638340	BAKUDA
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	n/a	100,00%	2.784.419.400	100,00%	1.162.813.800	100,00%	1.930.981.000		2.317.121.600		2.541.583.760	0,00%	10736919560	BAKUDA
	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	n/a	100,00%	627.311.400	100,00%	71.450.000	100,00%	591.939.000		651.132.900		716.246.190	0,00%	2658079490	BAKUDA
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N/A	78	3.501.414.014	79,5	5.086.988.750	81	6.064.870.000	-	-		-	81	14653272764	BAKUDA
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Jasa Lainnya Badan Keuangan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	N/A	80	462.071.000	81	228.110.000	82	69.626.000					-	759807000	BAKUDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								82	17.579.169.684	86	19.602.041.750	86	37.181.211.434	BAKUDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														BAKUDA
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	persentase Transparansi dan akuntabiitas pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								100	3.839.095.000	100	4.345.129.000	100	8.184.224.000	BAKUDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														BAKUDA
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap nilai aset daerah yang dianggap belum diyakini kewajarannya/tidak memadai	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								92	1.574.638.000	95	1.768.984.000	95	3.343.622.000	BAKUDA
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														BAKUDA
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peersentase Peningkatan pertumbuhan PAD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								9,05	3.512.964.000	9,65	4.061.190.227	9,65	7.574.154.227	BAKUDA
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat BKPSDMD		90	92	9.676.024.880	95	8.689.426.924	97	13.505.000.000	0	0	0	0			BKPSDMD	
	Nilai LAKIP BKPSDMD	0	63	76		80		0		0					BKPSDMD		
	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	53	59	65		70		0		0					BKPSDMD		
	Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi	85	87	91		92		0		0					BKPSDMD		
																BKPSDMD	
Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan	Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	55	64	2.105.411.100	74	1.902.015.000	83	3.500.400.000	0	0	0	0			BKPSDMD	
	Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	79	83		87		92		0		0		0			BKPSDMD
	Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	90	91		92		93		0		0				BKPSDMD	
Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	46	56	1.949.545.050	65	5.205.277.000	76	8.703.250.000	0	0	0	0			BKPSDMD	
	Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	72	78		84		90		0		0				BKPSDMD	
	Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0,19	0,17		0,15		0,13		0		0				BKPSDMD	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		an														BKPSDMD
	Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1,85	2,17		2,19		2,21		0		0				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	88	92	6.346.790.160	96	7.486.508.400	97	15.884.500.000	0	0	0	0			BKPSDMD
	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4,45	23		42		60		0		0				BKPSDMD
	Nilai Akreditasi Diklat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	71	71		81		81		0		0				BKPSDMD
	Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	31,6	36,9		39,9		41		0		0				BKPSDMD
Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mempunyai profil kompetensi sesuai dengan standar penilaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	11,12	20,89	856.571.320	0	0	0	0	0	0	0	0			BKPSDMD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								82	4.752.500.000	82	4.975.850.000	82	5.152.532.500	BKPSDMD
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal									80%		80%		80%		BKPSDMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan formasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								73%	5.170.000.000	73%	3.191.419.906	73%	11.254.074.366	BKPSDMD
	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi Pegawai	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								5%	4.951.000.000	6%	5.375.000.000	6%	14.780.218.000	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memiliki kinerja dan disiplin minimal baik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								99,79%	2.331.100.000	99,81%	2.564.210.000	99,81%	6.893.710.000	BKPSDMD
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														BKPSDMD
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang tersertifikasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								100%	590.000.000	100%	915.000.000	100%	1.770.000.000	BKPSDMD
	Nilai Akreditasi Diklat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								81	1.120.000.000	83	1.340.000.000	83	3.480.000.000	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat Kompetensi Teknis	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								18,97%	2.512.400.000	21,12%	4.801.100.000	21,12%	9.467.516.545	BKPSDMD
	Persentase Pejabat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi yang memiliki sertifikat pengembangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								100,00%	835.000.000	100,00%	850.000.000	100,00%	2.425.000.000	BKPSDMD

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kompetensi															
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi manajerial	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								30,40%	3.115.000.000	39,09%	4.015.000.000	39,09%	9.875.000.000	BKPSDMD
	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi fungsional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								92,31%	1.315.000.000	100,00%	1.615.000.000	100,00%	4.055.000.000	BKPSDMD
Penelitian dan Pengembangan																
Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan inovasi daerah yang dijadikan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	100	85	853.645.209	90	896.575.500	90	1.180.000.000	90	1.270.000.000	90	1.390.000.000		5.590.220.709	BAPPEDA
Program Penelitian dan Pengembagan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								80	1.750.000.000	85	2.100.000.000	85	3.850.000.000	BAPPEDA
	Persentase jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)								80	1.400.000.000	85	1.650.000.000	85		BAPPEDA

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		90%	10.176.790.497	90%	12.051.552.139									SETWAN
	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		76 Predikat		76 Predikat										
	Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						90%	8.715.032.000							SETWAN
	Nilai LAKIP Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						77 Nilai								
Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		80%	78.085.172.513	80%	78.666.051.520									SETWAN
	Persentase meningkatnya Produk Hukum yang ditetapkan oleh Lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						80%	62.741.236.923							SETWAN
Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokol Dewan	Persentase Kesesuaian antar Informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		95%	7.043.213.400	95%	8.130.940.000	95%	9.504.587.500							SETWAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	daerah															
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lembaga DPRD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		75%		76%		77%								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								90%	13.364.329.083	90%	13.364.329.083	90%	49.759.127.272	SETWAN
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								77 Nilai		78 Nilai		78 Nilai		SETWAN
Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Jumlah Perda, Peraturan DPRD dan Produk Hukum Daerah Lainnya yang ditetapkan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									3.031.129.583		3.031.129.583		6.062.259.166	SETWAN
	Jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada eksekutif	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														SETWAN
	Persentase jumlah anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap APBD Provinsi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								meningkat		meningkat		meningkat		SETWAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									64.477.628.340		66.323.336.581		130.800.964.921	SETWAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab	
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Inspektorat																	
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	70%	75%	2.902.348.030	75%	10.391.720.000	80%	10.911.256.000							Inspektorat	
	Skor (Nilai) SAKIP Perangkat daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	70	75		75		82									Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2	3	400.000.000	3	1.067.500.000	3	1.420.625.000							Inspektorat	
	Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1	2		2		3									Inspektorat
Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	88,83	90	4.255.463.000	90	6.058.961.000	90	6.165.669.000							Inspektorat	
	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	91,63	93		94		95									Inspektorat
	Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100		100		100									Inspektorat
Program Pengawasan dan	Prosentase tingkat capaian	Fungsi	65,94%	75%	283.650.000	75%	1.199.000.	75%	1.632.244.							Inspektorat	

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	OPD dengan Laporan Kinerja BAIK	Penunjang Urusan Pemerintahan					000		700							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								82	1.758.525.000	85	1.865.250.000	85	1.865.250.000	Inspektorat
	Survey Kepuasan Pelayanan Internal									80		80		80		Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								85%	4.500.000.000	85%	4.800.000.000	85%	4.800.000.000	Inspektorat
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang tingkat maturitas SPIP-nya level 3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								5	2.750.000.000	8	3.250.000.000	8	3.250.000.000	Inspektorat
		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan														
Sekretaris Daerah																
BIRO UMUM																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indikator : Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	80	100	48.394.471.715	100	50.942.622.648	100	53.489.753.780	100	56.152.741.468	100	58.957.878.540	100	267.937.468.151,00	BIRO UMUM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		an Keseekretari atan Daerah dan Keseekretari atan DPRD														
BIRO PEREKONOMIAN																
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Indikator :Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an Keseekretari atan Daerah dan Keseekretari atan DPRD	0	100	818.556.850	100	1.306.000.000	100	1.916.000.000	100	2.886.715.000	100	4.104.965.750	100	11.032.237.600,00	BIRO PEREKONC MIAN
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Indikator :Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an Keseekretari atan Daerah dan Keseekretari atan DPRD	0	100	644.924.775	100	882.500.000	100	1.171.500.000	100	1.277.456.250	100	1.340.079.063	100	5.316.460.088,00	BIRO PEREKONC MIAN
Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Indikator : Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an Keseekretari atan Daerah dan Keseekretari atan DPRD	0	100	2.350.877.200	100	3.260.000.000	100	2.207.661.933	100	2.825.000.000	100	3.190.000.000	100	13.833.539.133,00	BIRO PEREKONC MIAN
BIRO PEMBANGUNAN																

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN	Indikator : Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan an Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	75	475.514.731	80	1.407.072.623	85	1.208.633.140	90	1.705.575.913	95	1.817.671.421	85	6.614.467.828,00	BIRO PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Setda	Indikator : Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan an Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	75	301.467.968	80	428.313.000	85	492.559.950	90	566.443.943	95	651.410.534	95	2.440.195.395,00	BIRO PEMBANGUNAN
Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Indikator : Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan an Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	92	779.993.020	95	1.549.651.606	97	1.780.849.347	98	2.042.976.749	100	2.340.673.261	96,4	8.494.143.983,00	BIRO PEMBANGUNAN
Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Indikator : Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan an Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	80	501.326.670	85	1.982.884.194	90	2.209.852.094	95	1.566.143.954	100	1.728.216.318	90	7.988.423.230,00	BIRO PEMBANGUNAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BIRO LAYANAN PENGADAAN																
Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Indikator 1 : Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT;	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	90	90	554.899.000	92	1.446.989.500	94	1.591.688.450	96	1.750.857.295	98	1.925.943.025	98	7.270.377.270,00	BIRO LAYANAN PENGADAA N
	Indikator 2 : Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	80		80		80		80		80		80		BIRO LAYANAN PENGADAA N
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Indikator 1 : Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	100	90	2.337.898.000	92	5.034.568.000	94	5.538.024.800	96	6.091.827.280	98	6.701.010.008	98	25.703.328.088,00	BIRO LAYANAN PENGADAA N
	Indikator 2 : Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	80		80		80		80		80		80		BIRO LAYANAN PENGADAA N
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Indikator 1 : Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan secara elektronik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	60	90	2.539.128.000	92	5.020.020.500	94	5.522.022.550	96	6.074.224.805	98	6.681.647.286	98	25.837.043.141,00	BIRO LAYANAN PENGADAA N
	Indikator 2 : Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	80		80		80		80		80		80		BIRO LAYANAN PENGADAA N
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL																
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT	Indikator : Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	80	2.193.142.400	85	3.503.023.340	90	4.020.448.841	95	4.615.086.767	100	5.298.498.912	90	19.630.200.260,00	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD														
Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Indikator : Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	80	162.698.250	85	535.354.305	90	678.246.464	95	823.983.435	100	958.980.950	90	3.159.263.404,00	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Indikator : Persentase Pelayanan dan Penyampaian informasi kepada aparatur dan publik	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	80	1.224.371.325	85	1.975.838.255	90	2.278.149.960	95	2.627.589.203	100	3.031.759.375	100	11.137.708.118,00	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
BIRO PEMERINTAHAN																
Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Indikator 1 : Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	77.460.000	5.385.583.757	81.000.000	700.574.000	85.000.000	480.578.842	89.500.000	649.970.000	94.500.000	760.878.000	85.492.000	7.977.584.599,00	BIRO PEMERINTAHAN
	Indikator 2 : Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat		0	30		30		40		0		0		0		BIRO PEMERINTAHAN
	Indikator 3 : persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan		0	20		40		60		80		100		60		BIRO PEMERINTAHAN
Program Pengembangan Otonomi Daerah	Indikator 1 : Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan	Fungsi Penunjang Urusan	0	15	1.448.652.830	13	2.638.074.000	11	2.272.931.408	10	2.685.000.000	9	3.075.000.000	9	12.119.658.238,00	BIRO PEMERINTAHAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	pemerintahan provinsi	Pemerintah an Kesekretari atan Daerah dan Kesekretari atan DPRD														
	Indikator 2 : Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan		0	10		15		20		25		30		30		BIRO PEMERINTA HAN
	Indikator 3 : Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi		0	20		20		20		20		20		20		BIRO PEMERINTA HAN
	Indikator 4 : Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik		0	90		90		90		100		100		94		BIRO PEMERINTA HAN
Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Indikator 1 : Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov Kep Bangka Belitung	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah an	0	90	1.639.284.704	90	1.665.551.000	90	1.549.338.000	90	1.649.308.000	100	1.751.757.000	92	8.255.238.704,00	BIRO PEMERINTA HAN
	Indikator 2 : Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	Kesekretari atan Daerah dan Kesekretari atan DPRD	0	90		90		90		90		100		92		BIRO PEMERINTA HAN
BIRO HUKUM																
Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Indikator 1 : Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	Fungsi Penunjang Urusan	100	80	1.912.323.600	85	3.420.000.000	90	4.078.050.000	95	5.570.000.000	100	5.865.000.000	100	20.845.373.600,00	BIRO HUKUM
Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah	Indikator 2 : Persentase Pelayanan Hukum	Pemerintah an Kesekretari atan Daerah dan Kesekretari atan DPRD	100	80	955.806.626	85	1.816.000.000	90	1.970.046.250	95	2.121.045.000	100	2.295.300.438	100	9.158.198.314,00	BIRO HUKUM
Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Indikator 3 : Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum		100	80	750.391.500	85	1.510.000.000	90	1.670.000.000	95	1.830.000.000	100	2.000.000.000	100	7.760.391.500,00	BIRO HUKUM

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																
Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Indikator : Prosentase pembinaan keagamaan	Fungsi Penunjang Urusan	0	100	8.394.550.000	100	12.728.933.000	100	11.595.068.000	100	11.995.068.000	100	12.395.068.000	100	57.108.687.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata	Indikator : Prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	Pemerintah an Kesekretariatan Daerah dan	0	100	1.323.400.000	100	2.010.920.000	100	2.160.920.000	100	2.310.920.000	100	2.460.920.000	100	10.267.080.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Indikator : Prosentase koordinasi kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi	Kesekretariatan DPRD	0	100	535.189.000	100	1.067.422.000	100	1.217.422.000	100	1.317.422.000	100	1.567.422.000	100	5.704.877.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
BIRO ORGANISASI																
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Indikator 1 : Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	70	2.047.186.525	75	952.670.000	80	1.563.440.000	85	1.757.670.000	90	1.942.670.000	80	8.263.636.525,00	BIRO ORGANISASI
	Indikator 2 : Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi teknis		0	75		80		85		90		95		85		BIRO ORGANISASI
	Indikator 3 : Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi		0	75		80		85		90		95		85		BIRO ORGANISASI
	Indikator 4 : Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien		0	70		75		80		85		90		80		BIRO ORGANISASI

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggungjawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Indikator 1 :Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	70	2.868.168.893	75	4.115.000.000	80	4.744.777.000	85	5.565.000.000	90	6.160.000.000	80	23.452.945.893,00	BIRO ORGANISASI
	Indikator 2 : Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung		0	65		75		80		85		90		79		BIRO ORGANISASI
	Indikator 3 :Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		61,89	63		65		67		70		75		68		BIRO ORGANISASI
	Indikator 4 : Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN		95,08	96		97		99		99,5		100		98,3		BIRO ORGANISASI
Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Indikator 1 : Peningkatan kepuasan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kesekretariatan Daerah dan Kesekretariatan DPRD	0	0	852.840.935	0	1.900.000.000	0	2.035.000.000	0	2.220.000.000	0	2.355.000.000	0	9.362.840.935,00	BIRO ORGANISASI
	Indikator 2 : Peningkatan kinerja sumber daya aparatur		0	50		55		60		65		70		60		BIRO ORGANISASI
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum									100	36.152.741.468	100	38.957.878.540	100	75.110.620.008,00	BIRO UMUM
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dibutuhkan									100	4.989.171.250	100	8.635.044.813	100	30.182.236.821,00	BIRO PEREKONOMIAN
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daeerah									98	3.881.140.559	100	6.537.971.534	96,4	25.537.230.436,00	BIRO PEMBANGUNAN

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ									Strategis	3.916.909.380	Unggul	7.308.600.319	Unggul	58.810.748.499,00	BIRO LAYANAN PENGADAA N
Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Pimpinan									95	4.066.659.405	100	9.289.239.237	95	33.927.171.782,00	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Program Penataan Administrasi Umum	Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi meningkat									9	4.984.278.000	8	5.587.635.000	8	28.352.481.541,00	BIRO PEMERINTA HAN
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi penyusunan, pendokumentasian dan informasi, evaluasi produk hukum dan layanan hukum yang dibutuhkan									95	3.521.045.000	100	4.160.300.438	100	37.763.963.414,00	BIRO HUKUM
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan dibidang Pelayanan dasar dan Non Pelayanan Dasar yang dibutuhkan									100	4.623.410.000	100	5.423.410.000	100	73.080.644.000,00	BIRO KESEJAHTER AAN RAKYAT
Program Penataan Administrasi Umum	Persentase OPD dengan type kelembagaan yang tepat dan nilai kinerja baik									85	3.542.670.000	90	3.457.670.000	85	41.079.423.353,00	BIRO ORGANISAS I
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA																
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Indikator 1 : Nilai Kepuasan Pelayanan Sekretariat Badan Penghubung	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	0	70	11.513.512.800	71	10.656.944.500	72	91.140.000.000	73	10.430.000.000	74	12.170.000.000	74	135.910.457.300,00	Badan Penghubun g Provinsi

Urusan/Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Urusan	Kondisi Kinerja pada Awal 2017/2018	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(12)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		an														
	Indikator 2 : Nilai Lakip Badan Penghubung	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	60	65		70		75		80		85		85		
Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi	Indikator 1 : Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	0	100	9.438.748.000	100	9.448.555.500	100	10.730.692.500	100	8.150.000.000	100	9.420.000.000	100	47.187.996.000,00	Badan Penghubung Provinsi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap kesekretariatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								100	4.934.049.742	100	5.160.156.720	100	10.094.206.462,00	BADAN PENGHUBUNNG PROVINSI
	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								80		85		85		BADAN PENGHUBUNNG PROVINSI
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									4.752.565.250		4.975.852.000		9.728.417.250,00	BADAN PENGHUBUNNG PROVINSI

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2017-2022 selain mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Selain itu, kondisi awal juga menjadi pertimbangan dalam upaya untuk menentukan target kinerja serta memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ini, selain dipedomani dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menjadi alat ukur yang bisa dimiliki dan dievaluasi, sehingga pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat diukur dan dievaluasi, baik tahunan maupun lima tahunan. Oleh karena itu Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD 2017-2022 ini, dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Indikator Kinerja Utama dan (2) Indikator Kinerja Kunci.

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022, yang diturunkan dari visi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

8.2.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Target

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang dijabarkan target-target pencapaian setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada sebanyak 10 (sepuluh), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi
2. Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan, dengan indikator kinerja Indeks Gini.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur, dengan indikator : Indeks ketersediaan Infrastruktur
4. Tujuan 4 : Meningkatkan Pendidikan Masyarakat, dengan Indikator : (a) Rata-rata lama sekolah, (b) Rata-rata lama sekolah laki-laki dan (c) Rata-rata lama sekolah perempuan.
5. Tujuan 5 : Meningkatkan Pembangunan Sosial Masyarakat, dengan Indikator : Indeks Pembangunan Sosial.
6. Tujuan 6 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja : (a) Angka Usia Harapan Hidup, (1) Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki dan (2) Angka Usia Harapan Hidup Perempuan.
7. Tujuan 7 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas, dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi.
8. Tujuan 8 : Meningkatkan Demokrasi Indonesia, dengan indikator kinerja : Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
9. Tujuan 9 : Menurunkan Resiko Bencana, dengan indikator kinerja : Indeks Resiko Bencana.
10. Tujuan 10 : Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Jadi dari 10 (sepuluh) tujuan yang dijabarkan dari visi dan misi, diperoleh 10 (sepuluh) indikator kinerja tujuan, yang semuanya ditetapkan target-target capaiannya, sehingga bisa diukur secara valid.

Keterkaitan dan konstitusi antara tujuan, indikator kinerja tujuan dan target-target selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel VIII.1, berikut ini:

Tabel VIII.1
Target Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan PDRB			4,47	4,3	4,45	4,4	4,5			
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,45	4,45	4,46	3,32	3,5	4,00 -4,45	4,7	4,7
2	Meningkatnya Pengeluaran Pemerintah dan pendapatan masyarakat	Pengeluaran pemerintah perkapita,(dalam ribuan)			1.864	1.890	1.890	1.940	1.980	2.020	2.060	2.060
		Pendapatan perkapita masyarakat, (dalam ribuan)			46.457	50.732	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499	60.499
			Meningkatnya pemerataan pendapatan	Indeks Gini	0,282	0,282	0,281	0,280	0,279	0,255-0,250	0,277	0,277
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi			5,64	6,95	5,76	7,0	7,1			

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Indeks Ketersediaan Infrastruktur								
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)			7,68	7,76	7,84	7,83	7,89			
					L=8,90	L = 7,90		L= 7,94	L = 7,96			
					P=7,76	P=6,76		P = 6,98	P = 6,99			
			Meningkatnya pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)						7,92	8,00	8,00
										L = 7,98	L= 8,00	L= 8,00
										P = 7,00	P = 7,05	P = 8,10
			Meningkatnya pembangunan sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Sosial	44,04					64	64,80	64,80
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)			69,97	69,98	70,18	70,16	70,23			
					L=68,17	L = 68,24		L = 68,37	L = 68,40			
					P=71,96	P = 72,00		P = 72,12	P = 72,23			
			Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)						70,36	70,48	70,48
										L = 68,50	L = 68,60	L = 68,60
										P = 72,30	P = 72,45	P = 72,45

NO	TUJUAN LAMA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN LAMA	TUJUAN (PERUBAHAN)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (PERUBAHAN)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET DAN REALISASI						KONDISI AKHIR RPJMD
						2018		2019	2020	2021	2022	
						Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Mewujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi			63,15	64,08	67,17	65,39	67,41			
			Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi						68,43	69,50	69,50
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi			80,11	74,77	73,43	75,24	75,65			
			Meningkatnya demokrasi indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi						75,83	76,00	76,00
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	Indeks Resiko Bencana			162	159		156	153			
			Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	145					150	147	147
9	Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			58,59	58,76	63,07	59,32	59,81			
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85					75,74	75,99	75,99

8.2.2. Indikator Kinerja Sasaran dan Target

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah.

Oleh karena itu sasaran menjadi sangat penting untuk bisa diukur, dengan indikator yang tepat dan target-target yang tepat pula.

Kesepuluh tujuan dalam Perubahan RPJMD 2017-2022, telah dirumuskan dan ditetapkan lebih lanjut ke dalam Indikator kinerja dari ke 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang telah dirumuskan dan diperoleh 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Sasaran 2 : Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Sasaran 3 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, dengan indikator kinerja : Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
4. Sasaran 4 : Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi
5. Sasaran 5 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan
6. Sasaran 6 : Menurunkan Tingkat Pengangguran, dengan indikator kinerja : Tingkat Pengangguran Terbuka
7. Sasaran 7 : Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
8. Sasaran 8 : Menurunkan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator kinerja : Persentase Angka Kemiskinan
9. Sasaran 9 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, dengan indikator kinerja : Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa
10. Sasaran 10 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, dengan indikator kinerja : Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
11. Sasaran 11 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan indikator kinerja : Persentase ketersediaan infrastruktur dasar
12. Sasaran 12 : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan, dengan indikator kinerja : Indeks Ketersediaan Infrastruktur perhubungan
13. Sasaran 13 : Meningkatkan Kesempatan Pendidikan, dengan indikator kinerja : (a) Angka harapan lama sekolah, (b) Angka harapan lama sekolah laki-laki,, (c) Angka harapan lama sekolah perempuan
14. Sasaran 14 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, dengan indikator kinerja : Nilai Ujian Akhir
15. Sasaran 15 : Meningkatnya Kesejahteraan Anak, dengan indikator kinerja : Indeks Perlindungan Anak (IPA)
16. Sasaran 16 : Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Penduduk

17. Sasaran 17 : Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender, dengan indikator kinerja : Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
18. Sasaran 18 : Meningkatkan Kualitas Pemuda, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Pemuda
19. Sasaran 19 : Meningkatkan Pembangunan Olah Raga, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Olah Raga
20. Sasaran 20 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, dengan indikator kinerja Persentase PMKS Sejahtera
21. Sasaran 21: Meningkatkan Kesehatan Masyarakat, dengan indikator kinerja : Angka Kesehatan Masyarakat
22. Sasaran 22 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi
23. Sasaran 23 : Meningkatkan Kebebasan Sipil Masyarakat, dengan indikator kinerja: Nilai kebebasan sipil
24. Sasaran 24 : Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, dengan indikator kinerja : Nilai hak-hak politik
25. Sasaran 25 : Meningkatkan Peran Lembaga Demokrasi Masyarakat, dengan indikator kinerja : Nilai Kelembagaan demokrasi
26. Sasaran 26 : Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana, dengan indikator kinerja : Indeks Kapasitas Bencana Daerah
27. Sasaran 27 : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Ke 27 (dua puluh tujuh) sasaran dengan Ke 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerjanya, telah ditetapkan target-target selama lima tahun, sebagaimana yang tertera dalam tabel VIII.2 berikut ini:

Tabel VIII.2
Target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 2017-2022
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)		INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
								2018		2019		2020	2021	2022	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan				-0,36	4,8	5,49	4,9	N.A	5,0			
				1	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	4,76						5,97	5,98	5,98
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan				-3,24	3,8	8,11	3,85	N.A	3,9			
				2	Meningkatkan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	3,74						4,42	4,59	4,59
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3	Tingkat kunjungan wisatawan				330.322	389.009		389.009	N.A	419.594			
				3	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	4,00	4,00	4,02	4,10	4,20	4,40	4,50	4,55	4,50

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	5	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian			2,22	0,53	-1,08	0,57	N.A	0,63			
				4	Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan Dan Energi	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Energi	1,52					1,74	1,76	1,76
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	6	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan			6,22	2,63	4,04	2,65	N.A	2,67			
				5	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan	2,62					2,70	2,75	2,75
6	Terwujudnya kemandirian energi	7	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan			5,91	12,8	8,8	12,83	N.A	12,86			
7	Meningkatnya pendapatan pemerintah Daerah	8	Persentase Pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah						0,253	N.A	0,257			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
8	Menurunnya angka Pengangguran	9	Persentase Angka Pengangguran			3,7	5,7	3,65	5,6	3,62	5,5			
				6	Meningkatkan kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30					4,78	4,50	4,50
				7	Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	58,83		63,23		63,82	66,95	64,00	64,80
9	Menurunnya angka kemiskinan	10	Persentase Angka Kemiskinan			5,3	5,22	4,77	5,15	4,62	5,1			
				8	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	5,20					5,30	5,00	5,00
				9	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa	1.120.353		1.214.930	1.271.837	N.A	1.334.870	1.409.026	1.479.389
10	Menurunnya angka Inflasi	11	Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			6,75	06.42		06.31	N,A	06.24			
11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	12	Persentase laju pertumbuhan Penduduk			2,11	2,09	2,03	2,09	N,A	2,08			
12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	13	Terbangunnya Daerah irigasi (ha)			1.034	1.084	N.A	1.135	N,A	1.187			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
		14	Ketersediaan air baku (m3)			N.A	N.A	N.A	N,A	N,A	90.000			
				10	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan Umum	Persentase ketersediaan Infrastruktur pekerjaan umum	9					86	100	100
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	15	Persentase lingkungan yang tertata			N.A	14%		34%	N,A	54%	86%	100%	100%
		16	Persentase bangunan yang tertata			N.A	16%		38%	N,A	56%	89%	100%	100%
		17	Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi			N.A								
				11	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase ketersediaan infrastruktur dasar	25					54	80	80
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	18	Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut			0.17%	0.17%		0.18%	N,A	0.19%	0.20%	0.21%	0.21%
		19	Persentase armada pengangkutan			N.A	0.33%		0.34%	N,A	0.35%	0.36%	0.37%	0.37%
		20	Persentase jalan kondisi mantap			92,2	93.50.00		94.50.00	N,A	95.50.00	96	4,0347222	96.50.00

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur perhubungan	Indeks Ketersediaan Infrastruktur perhubungan .	50					69,45	71,84	71,84
15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	21	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)				11,71	0,516667	11,87	12,12		12,19		
							L=11,93	L=12,08		L=12,37		L=12,51		
							P=12,07	P=12,21		P=12,46		P=12,63		
				13	Meningkatkan kesempatan pendidikan	Angka harapan lama sekolah, (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,71					12,32	12,45	12,45
							L=11,35					L=11,81	L=11,83	L=11,83
							P=12,07					P=12,15	P=12,17	P=12,17
				14	Meningkatkan kualitas pendidikan	Nilai Ujian Akhir	5,3					5,5	5,8	5,8
				15	Meningkatnya kesejahteraan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60					68,1	68,5	68,5
				16	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,02	2,02	2,03	2,03	2,04	2,05	2,08	2,08

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				17	Meningkatkan Pembangunan Resposif Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50	50	50,20	50,25	50,80	51,00	52,58	52,70
				18	Meningkatkan kualitas pemuda	Indeks Pembangunan pemuda	40						54	54,5
				19	Meningkatkan pembangunan olah raga	Indeks Pembangunan Olah raga	0,10						0,30	0,35
				20	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Sejahtera	35						65,92	67,00
16	Meningkatnyakesehatan masyarakat	22	Angka Kesehatan Masyarakat				76,94	71,6		77,58	N.A	82,97	85,92	89,98
				21	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	79						85,92	89,98
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	23	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan			WDP	WTP		WTP		WTP			
		24	Tingkat kematangan Maturitas SPIP			3	3		3		3	4	4	4
		25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat			63	65		70		72	73	75	75
		26	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat			N.A	2,75		2,78		2,8	2,85	2,9	2,9

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	27	Nilai rata-rata delapan area perubahan			N.A	30		35		40			
		28	Indeks Profesionalitas ASN			60	63		67,5		73,5			
				22	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	30					45	50	50
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	29	Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)			N.A	1		5		5			
		30	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat			N.A	B		B		B			
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	31	Skor aspek kebebasan sipil			81,7	87,75		87,76		87,79			
		32	Skor aspek hak-hak politik			80,25	81,72		81,76		81,79			
		33	Skor aspek lembaga demokrasi			80,1	80,3		80,33		80,36			

NO	SASARAN LAMA	INDIKATOR KINERJA SASARAN (LAMA)		SASARAN (BARU)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (BARU)	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET							KONDISI AKHIR RPJMD
							2018		2019		2020	2021	2022	
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
				23	Meningkatnya Kebebasan sipil masyarakat	Nilai kebebasan sipil	81,70					87,79	87,82	87,82
				24	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Nilai hak-hak politik	80,25					81,79	81,85	81,85
				25	Meningkatnya Peran lembaga demokrasi masyarakat	Nilai Kelembagaan demokrasi	80,10					80,36	80,54	80,54
21	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	34	Indeks kapasitas bencana daerah			0,1	0,15		0,2		0,25			
				26	Meningkatkan Kapasitas Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana	Indeks kapasitas terhadap bencana daerah	0,10					0,30	0,35	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	35	Indeks kualitas air sungai			64,56	65,85		67,8		67,16			
		36	Indeks kualitas udara			82,81	85,3		87,86		90,49			
		37	Indeks tutupan lahan			37,51	37,88		38,26		38,64			
		38	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			N.A	7.745,58		7.280,85		6.843,99			
				27	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,85					75,74	75,99	75,99

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Setelah diuraikan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka berikutnya, ditetapkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang merupakan Indikator Kinerja Kunci.

Indikator penyelenggaraan pemerintah daerah ini, adalah merupakan indikator kinerja kunci, karena untuk mengukur pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh semua PD yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah ini (wajib dan pilihan) telah dirumuskan dan ditetapkan didalam Renstra semua PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian telah ditetapkan Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Perubahan 2017-2022 ini, yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama Tujuan berjumlah 10 (sepuluh), untuk mengukur pencapaian 10 tujuan.
2. Indikator Kinerja Utama Sasaran berjumlah 27 (dua puluh tujuh), untuk mengukur pencapaian 27 sasaran.

Tabel VIII.3
Indikator Kinerja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.	Pertumbuhan PDRB						
1.1.1	(ADHK)	4,11	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70
1.2	Laju inflasi						
1.2.1	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6,42	6,31	6,24	6,17	6,02
1.2.2	Kota Pangkalpinang	7,78	7,70	7,65	7,60	7,56	7,50
1.2.3	Tanjungpandan	4,92	4,75	4,63	4,51	4,39	4,27
1.3.	PDRB per kapita ADHB	46.457	50.732	53.015	55.401	57.894	60.499
	PDRB per kapita ADHK		35.000	35.800	36.100	36.500	37.000
	Pengeluaran perkapita		12.500	12.680			
1.4.	Indeks Gini	0,288	0,278	0,269	0,259	0,250	0,24
1.5.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,251	0,248	0,245	0,242	0,239	0,236
1.6.	Kemiskinan						
1.6.1	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,04	5,22	5,15	5,10	5,05	5,00
1.6.2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	71.070	72.561	72.452	72.352	72.214	72.000
1.6.3	Garis Kemiskinan (Rp)	564.391	590.229	634.336	680.456	720.222	770.543
1.6.4	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,75	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64
1.6.5	Indeks keparahan Kemiskinan (P2)	0,16	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14
1.6.7	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	2,67	2,87	2,86	2,85	2,85	2,84
1.6.8	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	7,57	7,73	7,72	7,72	7,71	7,71

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.7	Angka Kriminalitas yang tertangani	40,25	42,50	44,35	47,15	50,23	54,65
B.	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf	97,69	97,72	97,75	97,78	97,81	97,84
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	7,68	7,76	7,83	7,89	7,92	8,00
1.3.	Angka partisipasi kasar	93,05	94,36	95,67	96,98	98,29	99,60
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	33,13	35,29	38,88	40,63	43,43	43,94
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK/MA	31,44	34,98	38,38	40,63	44,32	48,62
1.4.	Harapan Lama Sekolah	11,84	11,84	11,89	11,93	11,97	12
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni	77,78	79,98	82,18	84,38	86,58	88,79
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	57,02	57,20	57,45	57,70	57,90	58,00
2.	Kesehatan						
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	7,56	7,73	7,9	8,07	8,24	8,41
2.1.1	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	7,22	7,200	7,180	7,160	7,140	7,120
2.1.2	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	7	7	7	7	7	7
2.2.	Angka usia harapan hidup	69,92	69,98	70,16	70,23	70,36	70,48
2.3	Prevalensi Kurang Gizi anak balita	14	14	14	14	14	14
2.4	Kematian ibu (per 100.000 orang)	23	23	22	21	20	19
3.	Pertanahan						
3.1.	Jumlah Database Pertanahan yang <i>up to date</i>						
4.	Ketenagakerjaan						
4.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99
C.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
1.	Kebudayaan						
1.1.	Jumlah grup kesenian	2,50	2,69	2,89	3,08	3,27	3,47
1.2.	Jumlah gedung	0,0073	0,0075	0,0077	0,0079	0,0081	0,0083
2.	Pemuda dan Olahraga						
2.1.	Jumlah klub olahraga	1.578	1.771	1.965	2.158	2.352	2.545
2.2.	Jumlah gedung olahraga	10	11	12	14	14	14

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf	97,63	98,42	98,42	98,97	99,31	99,60
1.1.1.	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 +	97,66	98,79	98,79	99,00	99,47	99,92
	SMA/MA/SMK						
1.1.2.	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	48.655	58.288,56	58.288,56	62.483,15	66.026,74	70.908,16
1.1.3.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	73,531	76,60	76,60	78,14	79,67	81,21
1.1.4.	APS SMA/MA/SMK (%)	66,17	77,34	77,34	81,93	85,68	91,31
1.2.	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah						
	SMA/MA/SMK						
1.2.1.	Jumlah gedung sekolah	139	141,00	141,00	142,00	143,00	144,00
1.2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	73.531	76.597,18	76.597,18	78.137,94	79.674,37	81.210,04
1.2.3.	Rasio	18,9	19,03	19,03	17,95	18,18	17,81
1.3.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar						
	SMA/MA/SMK						
1.3.1.	Jumlah guru	3.059	3.400,00	3.400,00	3.550,00	3.600,00	3.786,34
1.3.2.	Jumlah murid	51.014	56.457	63.536	66.754	72.021	76.179
1.3.3.	Rasio	16,68	16,61	18,69	18,80	20,01	20,12
2.	Kesehatan						
2.1.	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	8	8	8	8	9	10
2.2.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	8	8	8	8	9	10
2.3.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	1	1	1	2	2	3
2.4.	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	77,6	79,00	79,00	80,00	81,86	82,45
2.5.	Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun	0,18	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14
2.6.	Perkembangan Prevelensi HIV	0	12,00	12,00	11,00	10,00	9,00

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.7.	Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	55,53	45,00	45,00	40,00	35,00	30,00
2.8.	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun	62	63	63	64	64	65
3.	Pekerjaan Umum						
3.1.	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	12,57	14,57	14,57	15,57	16,57	17,57
3.2.	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	20	20	20	20	25	30
3.4.	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	3	4	4	4	4	4
3.5.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20
3.6.	Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	92,00	93,00	93,00	93,50	94,00	94,50
4.	Perumahan						
4.1.	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)	80	83	83	84	84	85
4.2.	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak	68,14%	68,15%	68,52%	69,21%	69,90%	70,42%
4.3.	Persentase Rumah layak huni	22,48%	22,49%	22,51%	22,54%	22,56%	22,58%
4.4.	Persentase lingkungan yang tertata	-	0%	5%	10%	20%	28%
4.5.	Persentase bangunan yang tertata	-	15%	20%	30%	45%	60%
5.	Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
5.1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	1.229	1.414,78	1.414,78	1.501,15	1.604,90	1.697,07
6.	Jumlah penduduk	1.372.813	1.430.063,44	1.430.063,44	1.458.809,45	1.487.498,94	1.516.164,69
6.1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	8,95	9,96	9,96	10,42	11,00	11,50
6.2.	Jumlah Siskamling	988	1.384,22	1.384,22	1.570,85	1.788,10	1.984,93
6.3.	Jumlah Desa	309	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00
6.4.	Rasio Jumlah siskamling	3,2	4,49	4,49	5,09	5,80	6,44

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.5.	persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	N.A	3	2	1	0	0
6.6.	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	17	12	9	7	5	4
6.7.	persentase menurunnya kasus konflik sosial	100%	86,9%	73,9%	60,8%	47,8%	34,7%
6.8.	persentase partisipasi pemilih	61,37%	68%	71%	71%	74%	76%
7.	Sosial						
7.1.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	4.369	4.800	4.800	4.900	5.000	5.500
7.2.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	49.579	47.000	47.000	45.000	43.000	40.000
8.	Ketenagakerjaan						
8.1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,90	70,12	70,12	70,35	70,50	70,65
8.2.	Tingkat Pengangguran	3,7	5,70	5,60	5,50	5,40	5,30
8.3.	persentase kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan	5%	5%	5%	5%	5%	5%
8.4.	persentase lansia, disabilitas, korban eks napza dan tuna sosial yang mendapat pelatihan	0	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%
9.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
9.1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57,00	58,50	58,50	59,00	59,50	60,00
9.2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,47	90,15	90,15	91,15	91,99	92,37
9.3.	Jumlah KDRT	70,00	50,00	50,00	54,00	49,00	40,00
9.4.	Jumlah Rumah Tangga	353.846,00	333.860,00	333.860,00	331.490,50	321.497,50	316.648,25
9.5.	Persentase Capaian Provinsi Layak Anak	N.A	28,57	42,85	57,14	85,71	100
9.6.	Rasio KDRT	0,00020	0,00017	0,00017	0,00016	0,00015	0,00013
9.7.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi	(129 Kasus)	20	30	40	50	60
9.8.	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap anak di tingkat provinsi	(68 Kasus)	30	40	50	60	70
9.9.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	46 %	46 %	46 %	46 %	46 %	46 %
9.10.	Angka Fertilitas Total (TFR)	2,6%	2,56%	2,55%	2,54%	2,53%	2,52%
10.	Ketahanan Pangan						
10.1.	Regulasi ketahanan pangan	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.2.	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 87	77,1	79	81	83	85	87
10.3.	persentase pangan yang aman dikonsumsi	78	80	83	86	89	92
10.4.	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	78,78	79,8	81,9	84	86	88
10.5.	Persentase Cadangan Pangan	0,9 %	3%	2,7%	2,8%	2,9%	3%
11.	Pertanahan						
11.1.	Luas Lahan (m2) Berdasarkan Sertifikat	75.759.684,00	82.414.325,76	82.414.325,76	81.359.224,46	86.865.983,99	88.350.464,00
11.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	38,40	37,65	37,65	42,78	53,22	53,03
12.	Lingkungan Hidup						
12.1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,59	59,76	60,96	62,18	63,42	64,69
12.2.	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap air bersih	77,60	80,00	80,00	81,00	83,00	85,00
13.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
13.1.	Persentase Kepemilikan KTP	100	100	100	100	100	100
13.2.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	531,22	657,32	657,32	719,12	784,25	847,16
13.3.	Persentase penyajian database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	100	100
13.4.	Jumlah pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el oleh OPD Provinsi	5 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD
14.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
14.1.	Kelompok LPM	3.787,00	5.151,00	5.151,00	5.885,25	6.567,25	7.244,63
14.2.	Kelompok PKK	9.330,00	12.879,50	12.879,50	14.774,25	16.549,00	18.297,88
14.3.	Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang berkualitas	15 alat	3 alat	4 alat	5 alat	6 alat	7 alat
14.4.	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	126	40	50	50	50	50
14.5.	Jumlah kewirausahaan	58 lembaga	30 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga	100 lembaga
14.6.	Jumlah Pokjanel Posyandu dipedesaan	647	100	50	75	75	75
14.7.	Jumlah PKK aktif di pedesaan	60 Pokja	12 Pokja	12 Pokja	12 Pokja	12 Pokja	12 Pokja
14.8.	Jumlah kelembagaan ekonomi dan keuangan di pedesaan	139 BUMDesa	40 BUMDesa	40 BUMDesa	30 BUMDesa	30 BUMDesa	30 BUMDesa

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.9.	Jumlah Kawasan pedesaan yang dibangun	0	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	2 kawasan
15.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
15.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,11	2,11	2,11	1,90	1,90	1,50
15.2.	Jumlah akseptor KB	168.956,00	302.432,50	302.432,50	332.529,25	399.267,50	447.160,88
15.3.	Jumlah pasangan usia subur	278.062,50	294.389,25	294.389,25	295.248,50	303.411,88	310.236,88
15.4.	Rasio akseptor KB	60,22	106,92	106,92	117,51	140,86	157,48
15.5.	Persentase Grand design Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	N.A	20	40	60	80	100
15.6.	Jumlah keluarga pra sejahtera	20.491,00	31.053,00	31.053,00	34.069,75	39.350,75	43.244,88
15.7.	Jumlah keluarga sejahtera I	189.349,50	348.448,75	348.448,75	387.896,50	467.446,13	526.736,13
15.8.	Jumlah keluarga sejahtera I +	144.005,50	- 45.641,75	- 45.641,75	- 90.475,75	- 185.299,38	- 253.332,75
15.9.	Jumlah keluarga	353.846,00	333.860,00	333.860,00	331.490,50	321.497,50	316.648,25
16.	Perhubungan						
16.1.	Terminal Bus/Angkot/Angdes	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
16.2.	Pelabuhan Udara	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
16.3.	Pelabuhan Laut (Pelabuhan pengumpan, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Khusus)	74,00	85,56	85,56	90,96	97,36	103,09
16.4.	Jumlah ijin trayek	27,00	27,89	27,89	28,41	28,73	29,18
16.5.	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum	N.A	5 %	6 %	7 %	8 %	10 %
16.6.	Persentase peningkatan jumlah angkutan barang	N.A	10 %	15%	16%	18%	20%
16.7.	persentase penurunan jumlah angka kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi kepulauan bangka belitung	N.A	17%	18%	18%	19%	20%
16.8.	Persentase angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang laik jalan	N.A	100%	100%	100%	100%	100%
16.9.	persentase penurunan pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum penumpang dan angkutan barang	N.A	19%	20%	20%	21%	22%
17.	Komunikasi dan Informatika						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.1.	Web site milik pemerintah daerah	8	9	9	10	10	12
17.2.	Pameran/expo	1	1	1	1	1	1
18.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
18.1	Jumlah Koperasi Aktif	842,00	879,00	879,00	901,50	920,00	942,25
18.2.	Jumlah Koperasi	1.166,00	1.263,50	1.263,50	1.321,25	1.370,00	1.421,38
18.3	Persentase Koperasi Aktif	73,62	75,64	75,64	76,65	77,66	78,67
18.4.	Jumlah UKM	293.985,00	296.691,89	296.691,89	298.016,07	299.418,28	300.768,48
19.	Penanaman Modal						
19.1.	Jumlah Investor	74,00	97,56	97,56	115,63	116,91	129,39
19.2.	Nilai Investasi (Trillin Rp)	1.156,00	437,78	437,78	168,81	- 340,54	- 689,64
20.	Kepemudaan dan Olahraga						
20.1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
20.2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	12,00	8,89	8,89	7,41	5,73	4,18
20.3.	Klub/Organisasi Olahraga	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
21.	Statistik						
21.1.	Buku daerah dalam angka	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
21.2.	Buku PDRB prov/kabupaten/kota	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22.	Kebudayaan						
22.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
22.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
22.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	26	26	26	26	26	26
22.4.	Cakupan pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya	5	7	7	8	9	10
23.	Perpustakaan						
23.1.	Jumlah Pengunjung	3.660	3.700	3.750	3.800	3.850	3.900
23.2.	Perpustakaan Milik Pemda	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
23.3.	Perpustakaan Non Pemda	1.348	1.361	1.361	1.369	1.376	1.382
24.	Kearsipan						
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	55	58	58	59	60	61
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	16	18	18	19	20	21
	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
25.	Kelautan dan Perikanan						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25.1.	Potensi perikanan Tangkap	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00	1.059.000,00
25.2.	Potensi perikanan budidaya	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00	1.316.000,00
25.3.	Produksi perikanan tangkap	204.822,13	206.723,66	206.723,66	207.431,89	208.786,87	209.710,69
25.4.	Produksi perikanan budidaya	998,53	- 1.883,83	- 1.883,83	- 3.536,83	- 4.624,97	- 6.089,69
25.5.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107	108	109	110	111	112
25.6.	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	49	53	54	55	56	57
25.7.	Produksi olahan ikan (Ton)	24.000	20.610	21.110	21.610	22.110	22.610
25.8.	Jumlah Produksi Benih Ikan air payau (Juta Ekor)		8,75	9,63	10,59	11,65	12,81
25.9.	Jumlah Produksi Benih Ikan air Laut (Juta Ekor)		0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
25.10	Jumlah Produksi Benih Ikan air Tawar (Juta Ekor)		0,30	0,33	0,36	0,40	0,44
25.11	Luas kawasan konservasi yang dicadangkan (Ha)	550.000	815.077	820.077	825.077	830.077	835.077
26.	Pariwisata						
26.1.	Jumlah Wisatawan DalamNegeri	330.322,50	389.009,75	389.009,75	419.594,00	448.937,63	477.181,38
26.2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	3.723,00	5.159,00	5.159,00	5.637,25	6.355,25	6.946,63
26.3.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif		3,17%	3,80%	4,44%	5,07%	5,70%
26.4.	Pertumbuhan lembaga kepariwisataan yang difasilitasi		11	13	15	17	19
27.	Pertanian						
27.1.	Distribusi Persentase PDRB Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	13,09	14,08	14,08	14,55	15,07	15,56
27.2.	Distribusi Persentase PDRB Tanaman Pangan	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,46
27.3.	Distribusi Persentase PDRB Tanaman Hortikultura	2,05	2,09	2,09	2,11	2,13	2,15
27.4.	Distribusi Persentase PDRB Tanaman Perkebunan	9,36	10,30	10,30	10,75	11,24	11,70
27.5.	Distribusi Persentase PDRB Peternakan	0,96	0,99	0,99	1,00	1,01	1,02
27.6.	Distribusi Persentase PDRB Jasa Pertanian dan Perburuan	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26
28.	Kehutanan						
28.1.	Luas Hutan Produksi	432.883,28	432.883,51	432.883,51	432.883,57	432.883,68	432.883,65
28.2.	Luas Hutan Lindung	185.540,60	181.098,69	181.098,69	179.993,09	177.772,13	176.108,60

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28.3.	Luas Hutan Konservasi	35.444,34	35.430,41	35.430,41	35.421,06	35.414,09	35.407,03
28.4.	Luas Hutan Produksi Konversi	692,89	693,03	693,03	693,18	693,25	693,40
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
29.1.	Potensi bahan galian Pasir Kwarsa	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton	1.482.301 ton
29.2.	Potensi bahan galian Pasir Bangunan	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton	666.188,06 ton
29.3.	Potensi bahan galian Kaolin	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton	205.487,50 ton
29.4.	Potensi bahan galian Granit	55.508,29 m5	55.508,29 m7	55.508,29 m7	55.508,29 m8	55.508,29 m9	55.508,29 m10
29.5.	Potensi bahan galian Diabas	89.551,12 m5	89.551,12 m7	89.551,12 m7	89.551,12 m8	89.551,12 m9	89.551,12 m10
30.	Perdagangan						
30.1.	Ekspor (us Dollar)	1.290,70	990,70	990,70	799,10	718,43	563,81
30.2.	Timah	963,80	594,60	594,60	380,80	244,87	57,02
30.3.	Non Timah	326,80	395,89	395,89	418,04	473,24	506,41
30.4.	Impor (us Dollar)	132,00	215,22	215,22	250,09	302,94	343,80
B.	Migas	41,40	62,38	62,38	72,95	83,30	93,80
1.	Non Migas	90,61	153,67	153,67	178,43	221,23	252,01
1.1.	Perindustrian						
1.1.1	Jumlah Industri Kecil	14.197,50	17.388,25	17.388,25	19.224,50	20.819,88	22.548,88
1.1.2	Laju pertumbuhan	0,18	0,10	0,10	0,10	0,06	0,07
1.1.3	Industri Menengah	14.321,00	17.523,50	17.523,50	19.366,25	20.967,50	22.704,88
1.1.4	Laju pertumbuhan	0,18	0,10	0,10	0,10	0,06	0,07
1.2.	Transmigrasi						
1.2.1.	Jumlah Kawasan transmigrasi	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2.2.	jumlah KTM	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Total Pengeluaran RT	17.872.676,50	19.074.083,25	19.074.083,25	19.678.546,25	20.279.249,63	20.881.867,75
1.2.	Jumlah RT	356.828,50	371.801,25	371.801,25	379.194,50	386.680,88	394.117,88
1.3.	Rasio	50,16	51,55	51,55	52,28	52,97	53,69
1.4.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	117,41	116,55	116,55	112,65	112,21	111,46
1.5.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	110,54	104,53	104,53	98,65	95,64	92,61
1.6.	Rasio	1,05	1,09	1,09	1,11	1,12	1,14
1.7.	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	9.658.091,50	10.215.993,25	10.215.993,25	10.536.819,00	10.815.769,88	11.120.097,63
1.8.	Total pengeluaran	17.872.678,00	19.074.085,00	19.074.085,00	19.678.548,25	20.279.251,75	20.881.870,13
1.9.	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
1.10.	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	8.966,00	7.183,00	7.183,00	5.400,00	4.508,50	2.725,50
1.11.	Jumlah seluruh PMA/PMDN	40,50	40,75	40,75	41,00	41,13	41,38
1.12.	Rasio daya serap tenaga kerja	217,85	170,12	170,12	122,40	98,54	50,81
IV	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur						
1.	Panjang Jalan	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33
2.	Jumlah Kendaraan	405.491,00	410.955,50	410.955,50	415.015,75	417.748,00	422.163,13
3.	Rasio	0,002250	0,002225	0,002225	0,002200	0,002187	0,002162
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	4,09	2,70	2,70	2,88	2,18	1,84
5.	Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus	28,00	29,00	29,00	30,00	30,50	31,50
6.	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	125,00	125,00	131,25	143,75	153,13
7.	Persentase Penduduk berakses airminum	71,11	82,65	82,65	99,33	105,09	114,97
8.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	79,98	91,92	91,92	94,39	100,35	104,60
9.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	98,06	104,68	104,68	108,27	111,58	117,65
10.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,70	0,74	0,74	0,76	0,78	0,80
11.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,95	0,94	0,94	0,96	0,96	0,97
V	Fokus Iklim Berinvestasi						

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	Proyeksi Capaian Kinerja				
		Tahun 2016/2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tindak Pidana Pencurian/perampokan	642,00	480,00	480,00	470,00	430,00	420,00
2.	Tindak Pidana Penganiayaan	66	40,00	40,00	30,00	25,00	20,00
3.	Tindak Pidana Pembunuhan	15 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	15 hari kerja	15 hari kerja	14 hari kerja
4.	Tindak Pidana Kesusilaan	4	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
5.	Tindak Pidana Psikotropika						
6.	Tindak Pidana Perjudian	90	60,00	60,00	50,00	40,00	30,00
7.	Tindak Pidana Pemerkosaan	62,16	40,00	40,00	30,00	25,00	20,00
8.	Tindak Pidana Angka kriminalitas yang tertangani	1,60	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
9.	Jenis Demonstrasi Bidang politik	12,00	1	1	1	1	1
10.	Jenis Demonstrasi Bidang Ekonomi	16,00	7	7	7	7	7
11.	Jenis Demonstrasi Kasus pemogokan kerja	-	1	1	1	1	1
12.	Jenis Demonstrasi Jumlah unjuk rasa	17,00	9	9	9	9	9
13.	Indeks Demokrasi Indonesia	75,29	77,03	77,03	79,40	80,27	81,44
14.	Pajak Kendaraan Bermotor	253.258,12	310.129,25	310.129,25	356.268,42	384.703,98	430.579,03
15.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	179.826,73	177.829,74	177.829,74	201.462,22	200.463,72	222.442,82
16.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	247.169,31	302.071,88	302.071,88	349.470,82	376.922,11	421.543,92
17.	Pajak Air Permukaan	6.698,35	8.597,34	8.597,34	9.890,27	10.839,77	12.151,81
18.	Pajak Rokok	73.943,73	118.236,23	118.236,23	141.664,04	163.810,28	184.126,37
VI.	Fokus Sumber Daya manusia						
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	81.986,50	81.339,75	81.339,75	88.512,50	88.189,13	88.891,13
2.	Jumlah penduduk	1.395.669,50	1.450.408,75	1.450.408,75	1.476.259,50	1.503.629,13	1.529.501,63
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	588,82	562,60	562,60	605,66	592,54	587,30
4.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	392.254,50	407.494,75	407.494,75	414.610,75	422.230,88	429.353,75
5.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	53.144,00	55.499,00	55.499,00	56.769,00	57.946,50	59.217,00
6.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	445.398,50	462.993,75	462.993,75	471.379,75	480.177,38	488.570,75
7.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	956.079,50	996.127,75	996.127,75	1.016.496,75	1.036.520,88	1.056.904,25
8.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,57	46,44	46,44	46,31	46,24	46,11

Tabel VIII.4
Sasaran Pokok Provinsi Dan Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesejahteraan Rakyat	1. Kemiskinan (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	5,04	5,22	5,15	5,10	5,05	5,00
	Pangkalpinang	5,02/5,02	4,9	4,7	4,4	4,2	4,2
	Bangka	5,61/5,43	5,21	5,05	4,9	4,77	4,25
	Bangka Tengah	5,64/ 4,84	4,63	4,41	4,2	4	3,8
	Bangka Barat	2,74/3,05	3	2,95	2,9	2,85	2,85
	Bangka Selatan	3,24	2,99	2,74	2,49	2,5	2,24
	Belitung	7,85	7,35	7,1	6,85	6,6	6,35
	Belitung Timur	7,33	7,03	6,73	6,43	6,13	6,13
	2. Pengangguran (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	2,6	5,70	5,60	5,50	5,40	5,30
	Pangkalpinang	10,64/10,64	9,33	8,67	8,47	8,37	8,27
	Bangka	7,90/ 7,27	6,6	5,94	5,43	4,83	4,42
	Bangka Tengah	4,3	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3
	Bangka Barat						
	Bangka Selatan	2,4	2,3	2,25	2,2	2	1,96
	Belitung	4,57	4,42	4,31	4,17	4,05	3,93
	Belitung Timur	2,5	2,3	2	1,8	1,5	1,5
Meningkatnya ekonomi daerah	3. Pertumbuhan PDRB (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	4,11	4,30	4,40	4,50	4,60	4,70
	Pangkalpinang	5,17/5,17	5,2	5,23	5,26	5,29	5,32
	Bangka	4,62/ 4,70	4,78	4,86	4,94	5,12	5,36
	Bangka Tengah	2,97	2,9	4,4	4,58	4,78	4,98

SASARAN POKOK	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2017	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangka Barat	5,92/5,85	5,8	5,75	5,7	5,65	5,6
	Bangka Selatan	4,6	5	6	6,5	7,5	7,94
	Belitung	4,81	4,93	5,05	5,16	5,27	5,38
	Belitung Timur	5,1	5-5,25	5,25- 5,5	5,5- 5,75	5,75- 6,0	6,0- 6,14
	4. Inflasi (%)						
	Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6,42	6,31	6,24	6,17	6,02
	Pangkalpinang	7,78	7,7	7,65	7,6	7,56	7,5
	Tanjung Pandan	4,92	4,75	4,63	4,51	4,39	4,27
Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
	Kepulauan Bangka Belitung	69,55	70,09	70,33	70,57	70,81	71,05
	Pangkalpinang	76,61/76,959	77,059	77,159	77,259	77,359	77,459
	Bangka	70,43/70,77	71,13	71,48	71,83	72,18	72,53
	Bangka Tengah	68,76	68,98	69,22	69,46	69,73	70,00
	Bangka Barat	67,60/68,94	69,75	70,55	71,32	72,23	72,3
	Bangka Selatan	64,57	64,82	65,12	65,39	65,74	66,05
	Belitung	70,81	71,05	71,29	71,53	71,77	72,01
	Belitung Timur	69,85	70,09	70,33	70,57	70,81	71,05

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan sasaran dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun transisi pemerintahan Gubernur Erzaldi Roesman dan Abdul Fatah. Terkait dengan hal tersebut maka penyusunan dokumen RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 nantinya yang disusun tahun 2021 diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam melaksanakan pembangunan agar mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 ini dengan sebaik-baiknya.
4. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikasi anggaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang selanjutnya merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
6. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
7. Peraturan Daerah tentang RPJMD Perubahan Tahun 2017-2022 dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Perangkat Daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan dibuat sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh pelaku pembangunan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD Perubahan tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu Tahun 2017-2022.

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

**Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335
PANGKALPINANG 33149**